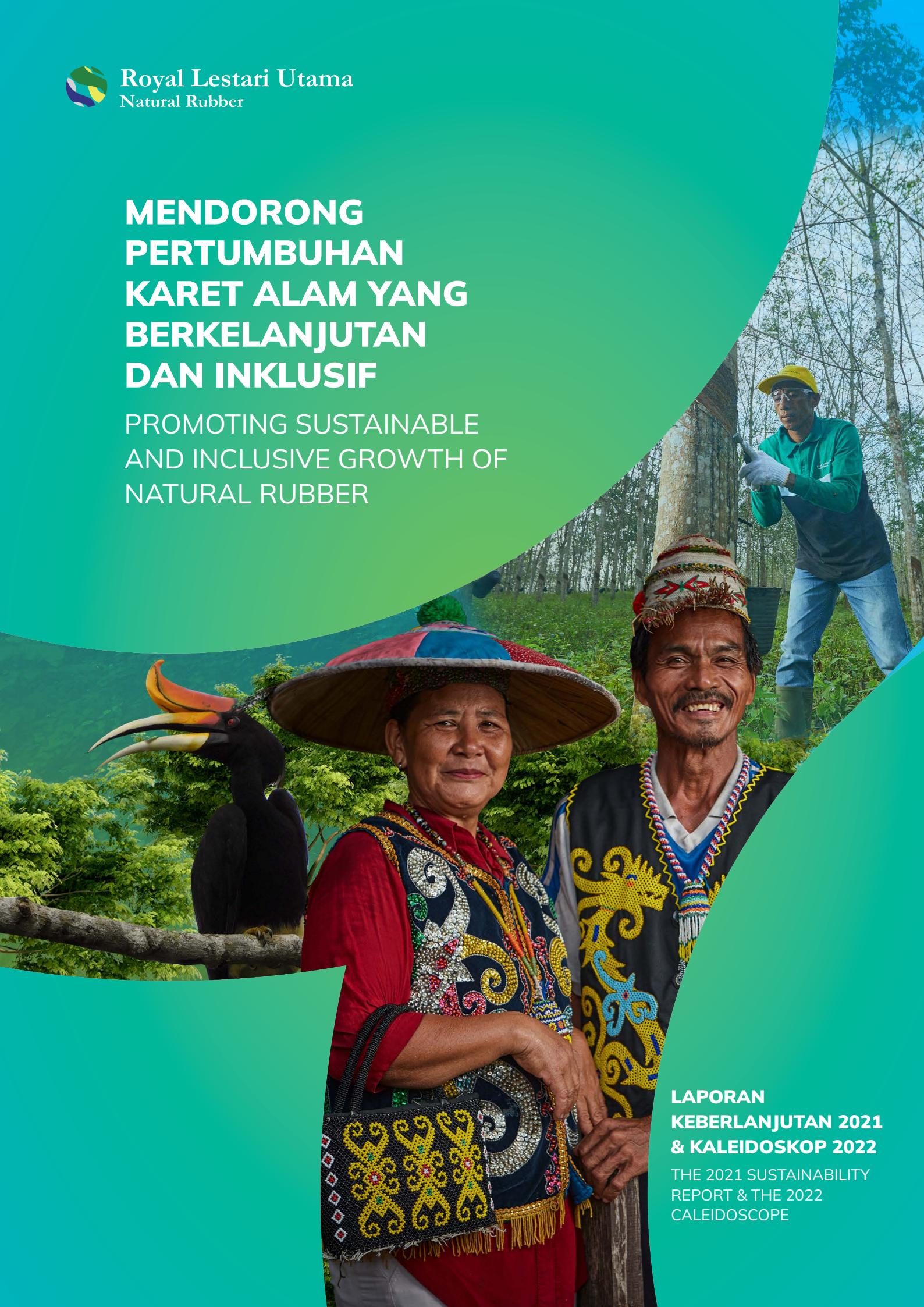




Royal Lestari Utama
Natural Rubber

MENDORONG PERTUMBUHAN KARET ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF

PROMOTING SUSTAINABLE
AND INCLUSIVE GROWTH OF
NATURAL RUBBER



**LAPORAN
KEBERLANJUTAN 2021
& KALEIDOSKOP 2022**
THE 2021 SUSTAINABILITY
REPORT & THE 2022
CALEIDOSCOPE



■ Area karet anak usaha RLU, PT Multi Kusuma
Cemerlang, Kalimantan Timur.

Informasi Kontak

Contact Information

Kami memandang laporan keberlanjutan kami sebagai bagian dari keterlibatan yang berkelanjutan dari para pemangku kepentingan dan menyambut masukan dari para pembaca. Silakan hubungi kontak di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan ditujukan kepada Head of Sustainability and Compliance PT Royal Lestari Utama melalui saluran komunikasi sebagai berikut:

At PT Royal Lestari Utama, sustainability report is viewed as part of our ongoing stakeholder engagement and hence we always welcome feedback from our readers. For further information, please contact the Head of Sustainability and Compliance of PT Royal Lestari Utama through the following channels:

-  **Head Office** : Wisma Barito Pacific, Jalan Letjen S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11410.
-  **Phone** : +62 (021) 534 7050
-  **Website** : www.rlu.co.id
-  **Email** : contact@rlu.co.id
-  **Youtube** : Royal Lestari Utama
-  **LinkedIn** : Royal Lestari Utama



Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Kerja

Prevention and Handling of COVID-19 in the Work Environment

Pandemi COVID-19 telah menguji perusahaan-perusahaan secara global termasuk Royal Lestari Utama (RLU) Group. Sebelumnya, ESG berupaya membawa RLU memenuhi kepatuhan terhadap IFC PS dan tercatat telah berperan penting dalam meningkatkan ketahanan dan menjaga risiko ESG yang tidak terduga seperti COVID-19, terutama erat kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat. Fokus Utamanya adalah melindungi karyawan kami dengan cara yang paling efektif, termasuk memberikan dukungan kepada keluarga karyawan yang terkena dampak COVID-19. Perhatian khusus selalu diberikan kepada pekerja garda depan kami, dengan memantau kesehatan mereka setiap hari, menyesuaikan kondisi kerja, dan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan mereka.

Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan, serta masyarakat di tempat RLU beroperasi, Perusahaan telah menerapkan beberapa langkah, termasuk di antaranya:

- Tidak ada pengurangan gaji atau kompensasi lainnya.
- Untuk mengambil keputusan dengan cepat dan efektif, perusahaan membentuk Tim Penanganan Krisis COVID-19 (tim COVID CMT), yang terdiri dari manajemen senior RLU Group (Direksi, General Manager, Kepala Departemen), dan juga Gugus Tugas COVID-19 di semua lokasi.
- Gugus Tugas terakhir ini terdiri dari anggota tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta perwakilan karyawan dari berbagai departemen. CMT dan Gugus Tugas didirikan pada Maret 2020.

The COVID-19 pandemic has put companies across the world to the test, the Royal Lestari Utama (RLU) Group being no exception. In the past, with regards to ESG, RLU has endeavoured to fulfil compliance with the IFC PS and has been instrumental in increasing resilience and guarding against unforeseen ESG risks, such as COVID-19, especially those closely related to the health and safety of workers and communities. RLU's primary focus is to protect our employees in the most effective way possible, including by providing support to the families of employees who have been affected by COVID-19. Special care is always given to our frontline workers, by daily monitoring their health, adapting working conditions, and providing the necessary equipment to ensure their health and safety.

As part of the Company's commitment towards protecting the health and safety of all employees, as well as the communities in which RLU operates, the Company has adopted several measures, including:

- No reduction in salary or other compensation.
- To enable quick and effective decision-making, the Company has established a COVID-19 Crisis Management Team (COVID CMT team), comprising senior management of the RLU Group (Board of Directors, General Managers, Department Heads), as well as COVID-19 Task Forces in all locations.
- The Task Force currently consists of members of the Occupational Health and Safety team, as well as employee representatives from various departments. The CMT and Task Forces were established in March 2020.



- Perusahaan juga membentuk Protokol COVID-19, dan meninjau rencana kerja berdasarkan situasi COVID-19 yang terus berkembang di masing-masing daerah. Hal ini termasuk dengan penerapan kerja dari rumah bagi para karyawan yang pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah, pembatasan pergerakan karyawan dan pengunjung di dalam perkebunan, tes Polymerase Chain Reaction (PCR) COVID-19 untuk semua pengunjung situs atau karyawan yang menunjukkan gejala atau pernah berkонтak erat dengan kasus yang terkonfirmasi positif berdasarkan penelusuran kontak.
- Mendukung program vaksinasi COVID-19 pemerintah dengan memfasilitasi vaksinasi dosis pertama dan kedua kepada seluruh karyawan, dan juga dosis ketiga bagi karyawan di kantor pusat. Kegiatan ini dilaksanakan baik melalui program Vaksinasi Gotong Royong yang direalisasikan perusahaan maupun program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah, dengan berkolaborasi bersama Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah.
- Secara aktif memberikan sosialisasi terkait protokol pencegahan COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 yang disampaikan melalui kegiatan Safety Talk oleh tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan edukasi oleh tenaga kesehatan Puskesmas setempat.
- The Company also established COVID-19 Protocols, and reviewed work plans based on the developing COVID-19 situation in each region. This includes the implementation of working from home for employees whose work can be done from home, restrictions on employee and visitor mobility within the estate, COVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) testing for all site visitors or employees who are symptomatic or have been in close contact with a confirmed positive case based on contact tracing.
- Supporting the government's COVID-19 vaccination program by facilitating the first and second doses of vaccination for all employees, as well as the third dose for employees at the head office. This activity is carried out both through the Gotong Royong Vaccination program implemented by the Company and the vaccination program run by the government, by collaborating with the Police, TNI, and Local Government.
- Actively providing socialisation regarding COVID-19 prevention protocols and COVID-19 vaccination delivered through Safety Talk activities by the Occupational Health and Safety team, and education by local Puskesmas health workers.



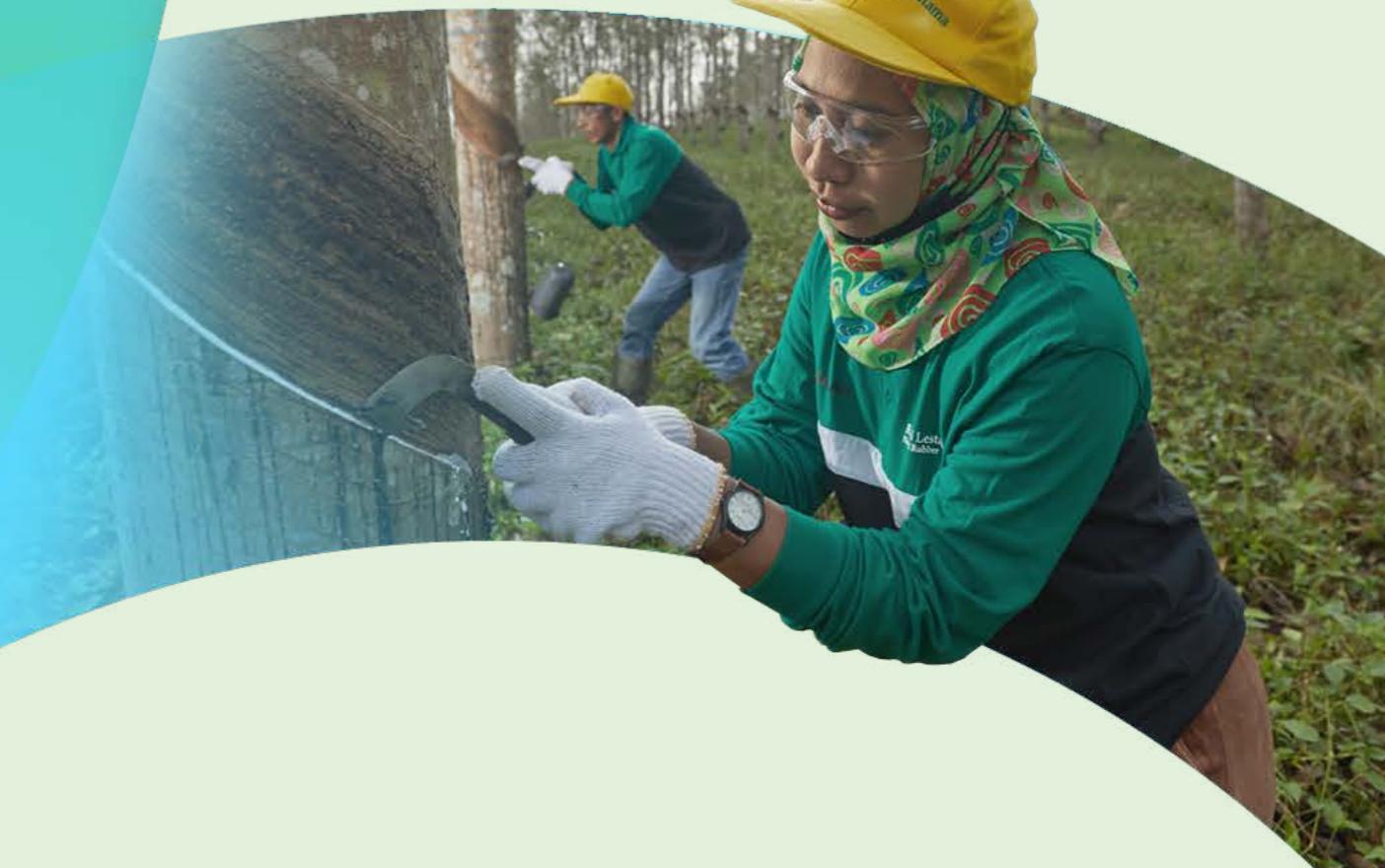
Daftar Isi

Table of Content

- | | |
|--|---|
| <p>10 — BAB CHAPTER 1
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama
<i>PT Royal Lestari Utama at a Glance</i></p> <p>28 — BAB CHAPTER 2
Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan
<i>Good Corporate Governance, Ethics and Compliance</i></p> <p>38 — BAB CHAPTER 3
Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
<i>Contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs)</i></p> <p>46 — BAB CHAPTER 4
Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan
<i>Partnerships and Stakeholder Engagement</i></p> <p>60 — BAB CHAPTER 5
Capaian Lingkungan
<i>Environmental Highlights</i></p> | <p>72 — BAB CHAPTER 6
Capaian Sosial
<i>Social Highlights</i></p> <p>92 — BAB CHAPTER 7
Capaian Produksi
<i>Production Highlights</i></p> <p>98 — BAB CHAPTER 8
Keterlibatan Karyawan
<i>Employee Engagement</i></p> <p>104 — BAB CHAPTER 9
Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
<i>Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)</i></p> <p>114 — BAB CHAPTER 10
Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD
<i>Summary of Environmental and Social Governance (ESG) Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD</i></p> |
|--|---|

Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama

PT Royal Lestari Utama
at a Glance



PT Royal Lestari Utama (RLU) merupakan perusahaan karet alam berkelanjutan yang termasuk dalam bagian *Michelin Group*, perusahaan ban Perancis terdepan di dunia. RLU didirikan pada tahun 2015 sebagai perusahaan joint venture dengan Barito Pasific Group yang bertujuan untuk memperkenalkan model bisnis baru produksi karet berkelanjutan yang meningkatkan taraf ekonomi, melibatkan aspek sosial, dan berwawasan ramah lingkungan. Pada bulan Juli 2022, Michelin Group sepenuhnya telah mengakuisisi RLU beserta seluruh anak perusahaannya, dan menjadikan Michelin secara resmi menjadi pemegang saham tunggal 100% atas RLU dan seluruh anak perusahaan RLU.

Berawal dari area yang telah terdegradasi akibat praktik illegal logging, deforestation, perambahan, dan kegiatan ilegal lainnya yang masif sebelum perusahaan mulai beroperasi, RLU memiliki ambisi untuk melakukan transformasi. Hingga saat ini, RLU telah menjadikan area-area tersebut menjadi area produktif karet alam yang berkelanjutan, serta restorasi untuk konservasi keanekaragaman hayati.

PT Royal Lestari Utama (RLU) is a sustainable natural rubber company that is part of the Michelin Group, the world's leading French tire company. RLU was established in 2015 as a joint venture company with Barito Pacific Group that aims to introduce a new business model of sustainable rubber production that is economically viable, socially engaged and environmentally friendly. In July 2022, the Michelin Group fully acquired RLU and all its subsidiaries, making Michelin officially the sole 100% shareholder of RLU and all RLU subsidiaries.

Beginning from areas that had been degraded by massive illegal logging, deforestation, encroachment, and other illegal activities before the company began operations, RLU is determined to transform these areas into productive areas of sustainable natural rubber, and restore them for biodiversity conservation.



RLU melalui anak usahanya memiliki izin untuk mengoperasikan tiga konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan jumlah area seluas 88.761 hektar (ha) di Jambi dan Kalimantan Timur. Ketiga konsesi HTI tersebut dioperasikan dengan mencerminkan visi RLU untuk menciptakan "Perkebunan Karet Berkelanjutan yang Terintegrasi di Sumatera dan Kalimantan," yang mendukung pengelolaan lanskap berkelanjutan jangka panjang dengan pembangunan perkebunan karet, Community Partnership Program (CPP), dan fasilitas pemrosesan karet sebagai penggerak utama roda perekonomian. RLU juga memiliki satu pabrik pemrosesan karet di Kalimantan Timur.

Dalam jangka panjang, area HTI seluas 88.761 ha akan dikelola secara produktif melalui penanaman karet berkelanjutan sebagai bisnis utama perusahaan, penyediaan area tanaman kehidupan dan kemitraan masyarakat, serta pengalokasian area konservasi. Michelin telah berkomitmen untuk membeli sedikitnya kurang lebih 75% dari jumlah produksi keseluruhan remah karet RLU, yang membuat RLU berkontribusi setidaknya 10% dari pasokan karet alam global Michelin.

Hingga akhir Desember 2021, RLU telah menanam 23.139 ha atau sebanyak 11,358,157 pohon karet komersial berkelanjutan di wilayah konsesi RLU yang terletak di Jambi dan Kalimantan Timur. Sedangkan dari sisi produksi remah karet, pabrik RLU di Kalimantan Timur telah menghasilkan 27.148 ton kering remah karet.

Through its subsidiaries, RLU has licenses to operate three Industrial Plantation Forest (HTI) concessions with a total area of 88,761 hectares (ha) in Jambi and East Kalimantan. The three HTI concessions are operated in line with RLU's vision to establish "Integrated Sustainable Rubber Plantations in Sumatra and Kalimantan," which supports long-term sustainable landscape management integrated with rubber plantation development, Community Partnership Program (CPP), and rubber processing facilities as the main drivers of the economy. RLU also has one rubber processing plant in East Kalimantan.

In the long term, the HTI area of 88,761 ha will be managed productively through sustainable rubber cultivation, as the Company's core business, as well as through allocating areas for livelihood, community partnership and conservation purposes. Michelin is committed to purchasing of at least 75% of RLU's total crumb rubber production, as such, RLU contributes at least 10% of the total global natural rubber supply for Michelin.

As of the end of December 2021, RLU has planted 23,139 ha, or 11,358,157 sustainable commercial rubber trees, in RLU's concession areas located in Jambi and East Kalimantan. In terms of crumb rubber production, RLU's factory in East Kalimantan has produced a total of 27,148 dry tonnes of crumb rubber.

Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Company Organisation Chart

Direksi menentukan tujuan strategis Perseroan, memastikan dan memantau pelaksanaannya, serta melakukan perbaikan berkelanjutan melalui praktik Tata Kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Representasi Dewan Direksi mencerminkan struktur kepemilikan saham RLU dan kepentingan semua pemegang sahamnya, hal ini juga mencerminkan keragaman, tanggung jawab bersama dan nilai-nilai inti perusahaan.

Terdapat perubahan susunan pada keanggotaan Dewan Direksi RLU pada tahun 2022 sebagai berikut:

In accordance with Good Corporate Governance (GCG) practices, the Board of Directors sets the Company's strategic objectives, ensures and monitors their implementation, and continuously improves the Company's performance. The representation of the Board of Directors reflects RLU's shareholding structure and the interests of all its shareholders. It also reflects the diversity, the shared responsibility and the Company's core values.

There have been changes to the membership of the RLU Board of Directors in 2022 as follows:



(*) Struktur BOD terbaru per bulan September 2022 Current BOD structure as of September 2022

Kegiatan Operasional RLU

RLU Operation

RLU mengembangkan produksi karet alam di Indonesia yang ramah lingkungan dan satwa liar serta inklusif dalam aspek sosial. RLU terus berupaya menjadi perusahaan terdepan di setiap pencapaian dalam merancang praktik-praktik penanaman dan panen karet yang turut melindungi, melestarikan dan melakukan regenerasi hutan.

RLU mengoperasikan Hutan Tanaman Industri (HTI) karet alam dan fasilitas pemrosesan karet di Indonesia melalui tiga anak perusahaan yakni PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dan PT Wanamukti Wisesa (WW) yang mengelola dua izin HTI dengan total 70,716 ha di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC) yang mengelola izin HTI seluas 18,045 ha di Kabupaten Kutai Timur dan satu fasilitas pemrosesan karet di Samarinda, Kalimantan Timur.

Jambi

Berdasarkan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) RLU terbaru, Sebesar total 18,690 ha area atau 25% dari total konsesi di Jambi, dialokasikan sebagai area konservasi keanekaragaman hayati, sebesar total 11.024 ha area atau 61% dari total konsesi di Kalimantan Timur dialokasikan sebagai area konservasi keanekaragaman hayati.

Kalimantan Timur

Konsesi HTI RLU merupakan area lanskap dataran rendah, yang terletak di antara pegunungan utama Kalimantan di bagian utara, dan dataran sungai tengah, yakni Sungai Mahakam di selatan. Area ini terdiri dari tiga tipe keanekaragaman hayati: hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa gambut dan hutan karst. HTI karet alam RLU juga menyediakan habitat yang dilindungi atau terancam punah seperti Orangutan. Sebesar total 9,874 ha area atau 55% dari total konsesi di Kalimantan Timur dialokasikan sebagai area konservasi keanekaragaman hayati.

RLU works towards the environmentally and wildlife friendly, as well as socially inclusive production of natural rubber in Indonesia. RLU continues to strive to be the leading company at every milestone in designing rubber planting and harvesting practices that help protect, conserve and regenerate forests.

A total of three subsidiaries of RLU manage natural rubber Industrial Plantation Forest (HTI) and rubber processing facilities in Indonesia, including PT Lestari Asri Jaya (LAJ) and PT Wanamukti Wisesa (WW), which manage two HTI licenses totaling 70,716 ha in Tebo Regency, Jambi Province, as well as PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC), which has an HTI license covering 18,045 ha in East Kutai Regency, and a rubber processing facility in Samarinda.

Jambi

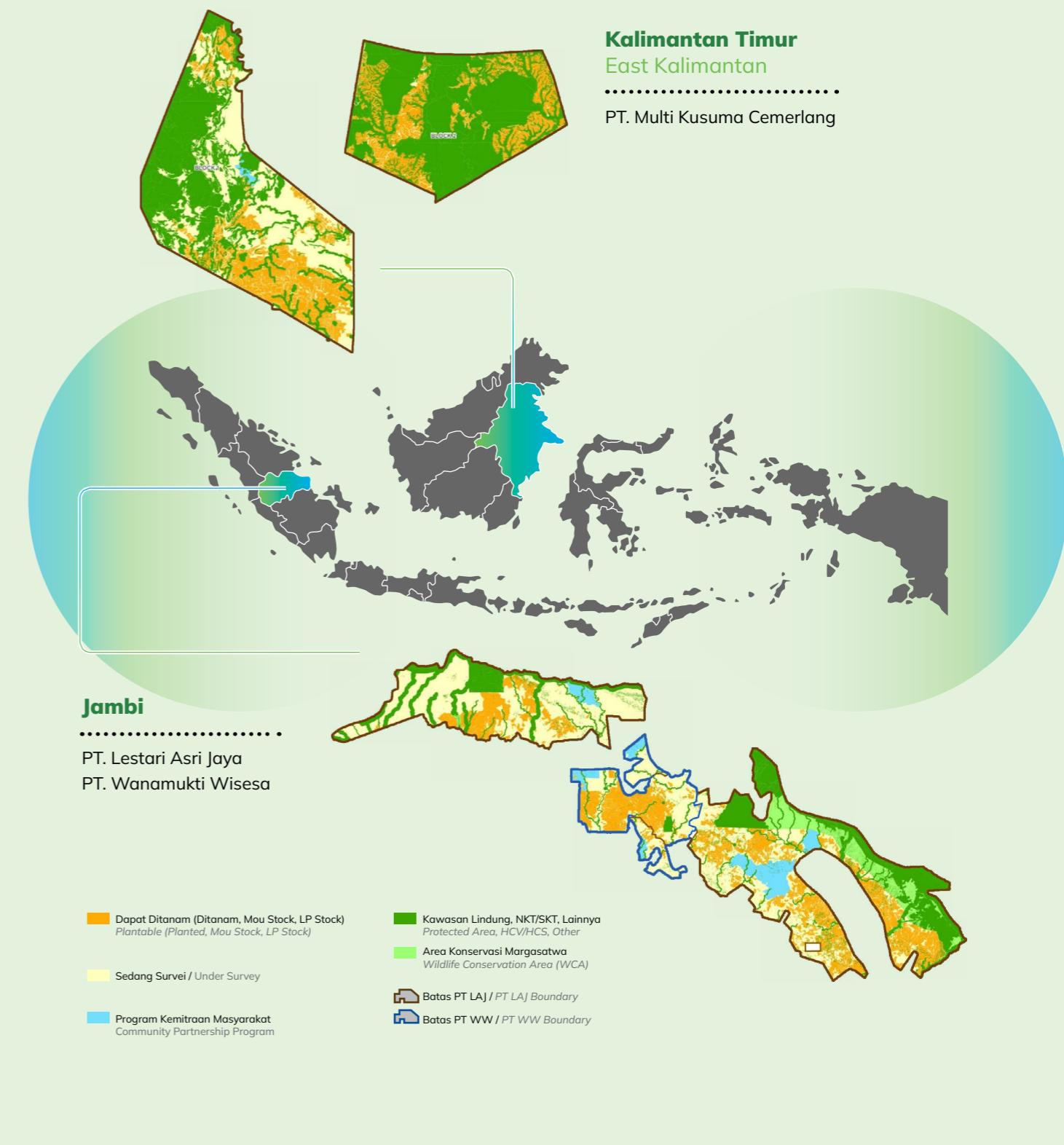
Based on the latest RLU High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) assessments, A total of 18,690 ha area or 25% of the total concession in Jambi, is allocated as biodiversity conservation area, a total of 11,024 ha area or 61% of the total concession in East Kalimantan is allocated as biodiversity conservation area.

East Kalimantan

The RLU HTI concession area is a lowland landscape, located between the main mountains of Kalimantan to the north, and the central river plain of the Mahakam River to the south. The area contains three types of biodiversity: lowland tropical rainforest, peat swamp forest and karst forest. RLU's natural rubber plantations also provide conservation areas for protected or endangered habitats such as Orangutans. A total of 9,874 ha area or 55% of the total concession in East Kalimantan is allocated as biodiversity conservation area.

Peta Wilayah Usaha

Business Area Map



BAB | CHAPTER 1

Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama
PT Royal Lestari Utama at a Glance

BAB | CHAPTER 2

Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan
Good Corporate Governance, Ethics and Compliance

BAB | CHAPTER 3

Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)

BAB | CHAPTER 4

Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan
Partnerships and Stakeholder Engagement

BAB | CHAPTER 5

Capaian Lingkungan
Environmental Highlights

BAB | CHAPTER 6

Capaian Sosial
Social Highlights

BAB | CHAPTER 7

Capaian Produksi
Production Highlights

BAB | CHAPTER 8

Keterlibatan Karyawan
Employee Engagement

BAB | CHAPTER 9

Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)

BAB | CHAPTER 10

Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD
Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

**Total area HTI**

Total area of HTI

88.761 ha (3 anak usaha/subsidiaries)**Jambi**

70,716 ha

Kalimantan Timur / East Kal :

18,045 ha

**Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK - HTI)**

Business Permit for Forest Timber Product Utilization-Industrial Plantation Forest (IUPHHK - HTI)

LAJ: Menteri Kehutanan No SK. 141/MENHUT-II/2010, dengan luas ± 61.495 Ha tanggal 31 Maret 2010

LAJ: Minister of Forestry Decree No. 141/MENHUT-II/2010, with an area of ± 61,495 Ha dated 31 March 2010

WMW: Keputusan Menteri Kehutanan No. 275/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 Junco No. 5952/Kpts-II tanggal 10 Juni 2002 dengan luas 9.263,77

WMW: Minister of Forestry Decree No. 275/Kpts-II/1998 dated 27 February 1998 Junco No. 5952/Kpts-II dated 10 June 2002 with an area of 9,263.77

MKC: SK.519/Menhet-II/2009 8 September 2009 seluas ± 18.045 Ha selanjutnya terjadi perubahan melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor SK.433/Menhet-II/2013 tanggal 12 Juni 2013

MKC: SK.519/Menhet-II/2009 8 September 2009 with an area of ± 18,045 Ha, subsequently amended by Minister of Forestry Letter No. SK.433/Menhet-II/2013 dated 12 June 2013.

**Koordinat lokasi**

Location coordinates

Jambi:

- PT Lestari Asri Jaya (LAJ)
0°18'6,23" – 0°53' 27,05" LS
101°51'3,46" – 102°31'46,11" BT
- PT Wanamukti Wisesa (WMW)
1°1'39,2 – 1°6' 42,1 LS
102°6'2,3 – 102°14'36,8 BT

Kalimantan Timur / East Kal :

PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC)
0 38' 10" – 1 06' 40" LS
117 07' 29" - 117 33' 48" B

Visi dan Misi
Vision and Mission**Visi Vision**

RLU dan anak perusahaannya beroperasi dengan mencerminkan visi RLU untuk menciptakan "Perkebunan Karet Berkelanjutan yang Terintegrasi di Sumatra dan Kalimantan," yang mendukung pengelolaan lanskap yang berkelanjutan yang meningkatkan taraf ekonomi, melibatkan aspek sosial, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Through its subsidiaries, RLU operate in accordance with RLU's vision to create "Integrated Sustainable Rubber Plantations in Sumatra and Kalimantan," which supports sustainable landscape management that is economically empowering, socially inclusive, and environmentally friendly.

Misi Mission

Misi kami menciptakan nilai unggul pada setiap aspek bisnis.

Our mission is to create distinctive values in every aspect of our business.

Misi kami dibangun di atas empat pilar:

Our mission is built on four pillars:

**People**

Orang/Masyarakat

Menciptakan penghidupan yang berkelanjutan dalam jangka panjang bagi para pekerja dan masyarakat.

Creating long-term sustainable livelihoods for workers and communities.

**Planet**

Bumi/Lingkungan

Penyanga untuk melindungi Taman Nasional Bukit Tigapuluh, perlindungan area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), serta spesies khas dalam konsesi.

Being a buffer zone to protect Bukit Tigapuluh National Park, protecting High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) areas, as well as specialised species within the concession.

**Product**

Produk

Mengembangkan produk yang berkualitas tinggi melalui proses manufaktur yang termutakhir.

Developing high quality products through state-of-the-art manufacturing processes.

**Profit**

Keuntungan

Menciptakan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan yang memberikan manfaat serta dampak yang positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Creating a long-term sustainable business that provides benefits and positive impact to society and the national economy.

Tanggung Jawab Utama Kami Our Core Responsibility



• Sustainability Keberlanjutan

Perlindungan terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan satwa liar, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan karyawan.

Protecting the environment, biodiversity and wildlife, while contributing to the improvement of community and employee welfare.



• Quality and Productivity Kualitas & Produktivitas

Melayani seluruh pelanggan dan pembeli dengan produk-produk yang berkualitas dan produktivitas yang tinggi.

Serving all customers and buyers with quality products and high productivity.



• Health and Safety Keselamatan dan Kesehatan

Memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan, pemasok, dan masyarakat di area operasi dengan menciptakan standar keamanan yang terintegrasi di seluruh kegiatan operasional.

Ensuring the safety and health of all employees, suppliers, and communities in the area of our operations by enforcing integrated safety standards throughout operations.

Nilai-Nilai Kami Our Values



Rantai Nilai Terintegrasi RLU

RLU Integrated Value Chain

Sebagai perusahaan karet alam yang terintegrasi, RLU berupaya untuk mengembangkan proses produksi terbaik melalui penerapan pemanfaatan lahan dan sumber pasokan yang berkelanjutan. Mulai dari penanaman, panen getah karet, pemrosesan, hingga pengiriman merupakan rantai nilai terintegrasi.

Untuk mencapai komitmen tersebut, kami menerapkan manajemen rantai pasok yang terintegrasi untuk memastikan bahwa bahan baku yang berasal dari pemasok telah memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Selain aspek kualitas, kami juga harus memastikan ketersediaan bahan baku, kontinuitas dan ketepatan waktu pengiriman pasokan untuk menjamin ketersediaan produk RLU.

Pengadaan bahan baku berupa karet alam dari perkebunan yang dikelola perusahaan sendiri dan sumber petani lokal sekitar adalah upaya kami untuk mempersingkat rantai pasok, memotong potensi adanya tahap inefisiensi.

As a fully integrated natural rubber company, RLU endeavours to develop the best production process through the implementation of sustainable land utilization and supply sources. Starting from planting, rubber sap harvesting, and processing, up to delivery, it is all part of an integrated value chain.

To fulfil this commitment, we implement an integrated supply chain management to ensure that raw materials from suppliers meet the required quality standards. In addition to the quality aspect, we must also ensure the availability of raw materials, continuity, and timeliness of supply delivery to guarantee the availability of RLU products.

Procurement of raw materials in the form of natural rubber from plantations under our own management and local farmers' sources nearby is part of our effort to shorten the supply chain, eliminating the possibility of inefficient stages.



Komitmen Keberlanjutan di Seluruh Rantai Pasok RLU

Commitment to Sustainability Across the RLU Supply Chain

Kami secara aktif mencari dan mendukung pemasok yang memiliki nilai dan komitmen etik yang sama dengan kami, termasuk mitra petani kecil kami. Kami berkomitmen untuk mendukung mereka dalam memenuhi standar tanggung jawab sosial kami dan berani menjatuhkan sanksi, termasuk mengakhiri hubungan, dengan mereka yang tidak memenuhi standar kami. Sekurang-kurangnya, kami mengharapkan pemasok kami untuk mematuhi undang-undang setempat mengenai standar tenaga kerja, termasuk jam kerja dan upah serta spesifikasi yang tercantum di bawah ini:

- Menghormati Hak Asasi Manusia
- Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur
- Tidak ada gratifikasi, korupsi, dan penyuapan dalam bentuk apapun
- Tidak ada kerja paksa dalam bentuk apapun
- Tidak ada deforestasi atau kegiatan ilegal (yaitu praktik tebasan dan pembakaran)
- Kondisi kerja yang aman harus diberikan kepada karyawan
- Kebebasan perkumpulan karyawan harus dihormati
- Menentang segala bentuk diskriminasi serta kekerasan fisik dan seksual.

Our company actively seeks out and supports suppliers that share our values and ethical commitments, including those of our smallholder partners. We are committed to supporting them in meeting our social responsibility standards and are prepared to impose sanctions, including terminating relationships, with those who fail to meet our standards. At the very least, we expect our suppliers to comply with local laws on labour standards, including working hours and wages and the specifications listed below:

- Respecting Human Rights
- Do not employ underage workers
- No gratuities, corruption, or bribery of any kind
- No forced labour in any form
- No deforestation or illegal activities (i.e. logging and burning practices)
- Safe working conditions shall be provided to employees
- Freedom of association of employees shall be respected
- Opposing all forms of discrimination as well as physical and sexual violence.



■ Area pabrik anak usaha RLU, PT Multi Kusuma Cemerlang, Kalimantan Timur.

Tonggak Pencapaian Keberlanjutan Sustainability Milestones

2015

- RLU didirikan sebagai perusahaan Joint Venture (JV) antara Michelin dan anak perusahaan Barito Pacific.
- Michelin - RLU berkolaborasi dengan WWF Perancis dan WWF Indonesia (berakhir pada tahun 2020).
- Penilaian HCV/HCS oleh Tropenbos International.
- Komitmen RLU terhadap NDPE (No Deforestation, No Peat and No Exploitation) sejalan dengan komitmen pemegang saham.

2016

- Berangkat dari hasil penilaian HCV/HCS; Michelin, Barito Pacific, RLU dan WWF telah menetapkan peta penggunaan lahan zona "go" dan "no-go" yang menggambarkan perbandingan kawasan lindung dan produksi. Jambi: 25% dan Kalimantan Timur: 50% adalah zona lindung yang disisihkan oleh perusahaan. Secara signifikan melampaui batasan 10% kawasan lindung yang dimandatkan oleh Pemerintah.
- Pembangunan PT Multi Kusuma Cemerlang, fasilitas pengolahan karet alam pertama di Kalimantan Timur dengan total kapasitas 27.000 ton per tahun.

2017

- Sebuah konsorsium yang dikelola oleh Daemeter menyelesaikan Penilaian Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (ESDD) secara ekstensif. ESDD mencakup Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) sebagai bagian dari Sistem Manajemen Sosial Lingkungan (ESMS) RLU yang dikembangkan bersama perusahaan, Rencana Pengelolaan Kehutanan Terpadu dan Proyek Kemitraan Masyarakat untuk RLU.
- Studi Konflik Sosial oleh kelompok peneliti, Wana Aksara Institute.
- Produksi pabrik remilling PT Multi Kusuma Cemerlang dimulai.

2018

- Audit Tahunan ESG yang Pertama.
- Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) menerbitkan obligasi keberlanjutan perusahaan pertama di Asia Tenggara atas nama RLU. TLFF adalah kemitraan antara BNP Paribas, ADM Capital, Program Lingkungan PBB dan ICRAF.
- Pembentukan Kawasan Konservasi Satwa Liar (WCA) di konsesi LAJ RLU yang berbatasan dengan BTPNP seluas ± 9.700 ha. Hal ini ditujukan untuk menyediakan habitat yang aman bagi gajah Sumatera yang terancam punah dan terintegrasi dengan program mata pencarian masyarakat, yang didukung oleh Partnerships for Forests (P4F).
- RLU memulai kemitraannya dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (BTPNP) untuk bersama-sama memantau dan memberikan dukungan di sepanjang daerah penyanga antara konsesi Taman Nasional.
- RLU meluncurkan Satuan Tugas Resolusi Konflik (TRK) di Provinsi Jambi sebagai bagian dari pendekatan multi-pemangku kepentingan yang dipimpin oleh Pemerintah Provinsi dengan LSM, perwakilan masyarakat, dan perusahaan yang juga berpartisipasi.

2019

- Menerbitkan Laporan Keberlanjutan Tahunan yang pertama.
- RLU memulai penilaian NKT/SKT terpadu, pemutakhiran dari penilaian pertama yang dilakukan pada tahun 2015.
- Penyusunan Perjanjian Masyarakat Adat, termasuk Kerangka Kerja dan Rencana Keterlibatan untuk Kawasan Konservasi Satwa Liar (WCA) dalam kemitraan dengan Rimba Bungaron Indonesia (RBI).
- Mitra baru, & Green Fund dan PG Impact Investments, sebagai bagian dari kemitraan Obligasi Keberlanjutan TLFF I untuk memperkuat kinerja dan komitmen ESG kami.

2020

- Dua Kelompok Tani Hutan yang menjalin kesepakatan dengan konsesi LAJ dan WMW RLU, menerima Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kemitraan Kehutanan. RLU merupakan perusahaan HTI pertama di Provinsi Jambi yang menerima SK tersebut.
- RLU menunjuk lembaga citra satelit internasional, Satelligence, untuk melakukan pemantauan dan verifikasi tutupan lahan termasuk HCV/HCS di konsesi HTI Jambi dan Kalimantan Timur.
- RLU meluncurkan halaman transparansi di situs webnya www.rlu.co.id/rlutransparency
- RLU Group menegaskan kembali dan memperbarui Kebijakan Keberlanjutannya dalam kemitraan dengan Ramboll, menegaskan kembali komitmennya terhadap IFC PS.
- Two Forest Farmers Groups that established agreement with RLU's LAJ and WMW concessions, received Decree from Minister of Environment and Forestry on Forestry Partnership. RLU is the first HTI Company in Jambi Province that received such a decree.
- RLU appoints an international satellite imagery agency, Satelligence, to do monitoring and verification of the land cover including the HCV / HCS on its Jambi and East Kalimantan HTI concessions.
- RLU launched transparency page on its website www.rlu.co.id/rlutransparency
- RLU Group reaffirms and updates its Sustainability Policy in partnership with Ramboll, reconfirming its commitments to the IFC PS.

2021

- RLU memulai kemitraannya dengan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) untuk memperkuat Program Kemitraan Masyarakat (CPP) di konsesi HTI Jambi.
- RLU, didukung oleh IDH dan &Green menunjuk MFC untuk memberikan bantuan teknis untuk penyesuaian Kebijakan dan Prosedur RLU dengan Standar Kinerja IFC 5 tentang Pembebasan Lahan dan pemukiman kembali secara sukarela dan IFC 7 tentang Masyarakat Adat.
- RLU didukung oleh IDH dan P4F menunjuk A+CSR Indonesia untuk melakukan Social Economic Baseline (SEB) di Konsesi RLU di Jambi.
- RLU membentuk Program Perlindungan Perempuan dan meluncurkan KANITA (Kawan Wanita), sebuah Kelompok Pendukung Perempuan untuk menyediakan ruang yang aman untuk berbagi pemikiran, ide, pengalaman, untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas dan juga berfungsi sebagai saluran pengaduan.
- Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) [PT Multi Kusuma Cemerlang](#), anak perusahaan RLU, memperoleh hasil yang memuaskan dari HCV Network. Ringkasan Publik dipublikasikan di situs web HCV Network.
- Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) dari PT Multi Kusuma Cemerlang, anak perusahaan RLU, memperoleh hasil yang memuaskan dari HCV Network.
- RLU began its partnership with Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) to strengthen Community Partnership Program (CPP) in Jambi HTI concession.
- RLU, supported by IDH and &Green appointed MFC to provide technical assistance for the alignment of RLU's Policy and Procedures with IFC Performance Standard 5 on Land Acquisition and voluntary resettlement and IFC 7 on Indigenous People.
- RLU supported by IDH and P4F appointed A+CSR Indonesia to conduct Social Economic Baseline (SEB) on RLU's Jambi Concessions.
- RLU established a Women Protection Program and launched KANITA (Kawan Wanita or Friends of Women), a Women's Support Group to provide safe space for sharing thoughts, ideas, and experiences, to facilitate capacity building and also serve as a grievance channel.
- The High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) Assessment Report of [PT Multi Kusuma Cemerlang](#), a subsidiary of RLU, obtained satisfactory results from the HCV Network. The Public Summary is published on the HCV Network website.
- The High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) Assessment Report of PT Multi Kusuma Cemerlang, a subsidiary of RLU, obtained satisfactory results from the HCV Network.

YTD 2022*

- Pada bulan Juli 2022, Michelin secara resmi menjadi pemegang saham tunggal RLU sekaligus menjadikan RLU sebagai bagian dari Michelin Group Company.
- Pada bulan Agustus 2022, Obligasi Keberlanjutan TLFF I USD 95 juta yang diterbitkan pada tahun 2018 telah dilunasi sepenuhnya oleh RLU. Indikator ESAP, LPP dan KPI akan terus diadopsi sebagai bagian dari kerangka kerja dan baseline ESG RLU.
- RLU dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh menandatangani kemitraan selama lima (5) tahun untuk periode 2022-2026 yang merupakan bagian dari kelanjutan kemitraan Tahap I pada tahun 2018.
- [PT Lestari Asri Jaya \(LAJ\)](#) dan [PT Wanamukti Wisesa \(WW\)](#) mendapatkan penilaian HCV HCS Terpadu dengan hasil memuaskan. Ringkasan Publik telah dimuat di situs web HCV Network.

(*) Publikasi Laporan Keberlanjutan RLU 2021 disusun pada triwulan ke-3 dengan beberapa pemberitahuan penting dari Perseroan di tahun 2022 agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pemangku kepentingan perusahaan.

The publication of the RLU Sustainability Report 2021 was prepared in the 3rd quarter with several important notices of the Company in 2022 to provide clear information to the company stakeholders.



BAB | CHAPTER 1
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama
PT Royal Lestari Utama at a Glance

BAB | CHAPTER 2
Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan
Good Corporate Governance, Ethics and Compliance

BAB | CHAPTER 3
Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)

BAB | CHAPTER 4
Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan
Partnerships and Stakeholder Engagement

BAB | CHAPTER 5
Capaian Lingkungan Environmental Highlights

BAB | CHAPTER 6
Capaian Sosial Social Highlights

BAB | CHAPTER 7
Capaian Produksi Production Highlights

BAB | CHAPTER 8
Keterlibatan Karyawan Employee Engagement

BAB | CHAPTER 9
Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)

BAB | CHAPTER 10
Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD
Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

Ikhtisar Kinerja Perusahaan Summary of Company Performance



People / Sumber Daya Manusia

Highlight 2021
Highlight 2021

Progress 2022
Progres 2022

Karyawan / Employees

Karyawan / Employees 3,882 orang / persons 4,213 orang / persons

Karyawan Perempuan / Female Employees 1,240 Orang (32%) / 1,240 persons (32%) 1,444 Orang (34%) / 1,444 persons (34%)

Rumah yang dibangun untuk tempat tinggal karyawan / Houses built for Employees to live in 1,135 rumah untuk karyawan / houses for employees 1,135 rumah untuk karyawan / houses for employees

Masyarakat / Community

Komunitas Perempuan yang terlibat dalam Program Pemberdayaan / Women's Community Involved in the Empowerment Programme 189 orang / persons 222 orang / persons

Jumlah Petani kecil karet tergabung dalam Community Partnership Program (CPP) dan dilibatkan dalam rantai pasok RLU / Total Rubber Smallholders Joined in the Community Partnership Programme (CPP) and Involved in the RLU Supply Chain 730 kepala keluarga / households 856 kepala keluarga / household

Jumlah individu masyarakat yang mendapatkan dampak positif dari program Community Partnership Programme (CPP) / Total community benefited from the Community Partnership Program. 3,650 orang / persons 4,280 orang / persons

Kenaikan pendapatan (%) dari petani karet melalui Kemitraan Kehutanan / Income increased (%) received by the smallholders from the CPP rubber smallholders program Hingga 30% Up to 30% Hingga 30% Up to 30%



Bumi / Land

Area teridentifikasi sebagai area konservasi dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi SKT) / Area identified as conservation area with High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS).

HCV/HCS yang telah dikelola secara aktif dalam konsesi / HCV/HCS that has been actively managed within concession.

Bitit dari hutan untuk kegiatan restorasi / Seedlings taken from the forest for the restoration activities

Total (ha) kegiatan restorasi / Total (ha) for restoration activity

Pohon asli tertanam / Native trees planted

Emisi gas rumah kaca yang diserap (TCO2e) / Greenhouse gas emissions absorbed (TCO2e)

39,319 ha dari total luas konsesi 88,761 ha
39,319 ha out of a total concession area of 88,761 ha

39,319 ha dari total luas konsesi 88,761 ha
39,319 ha out of a total concession area of 88,761 ha

11,874 ha / 11,874 ha / 11,874 ha

11,874 ha / 11,874 ha

10,336 btit / seedlings 9,350 btit / 9,350 seedlings

74,84 ha / 74,84 ha 86 ha / 86 ha

11,694 pohon tertanam / trees planted

13,460 pohon tertanam / trees planted

1,370,628 tCO2e 1,370,628 tCO2e

1,333,139 tCO2e 1,333,139 tCO2e



Produksi / Production

Pohon karet tertanam (kumulatif) / rubber trees planted (cumulative)

· 11,358,157 pohon karet tertanam / rubber trees planted
· 23,139 ha

· 11,334,720 pohon karet tertanam / rubber trees planted
· 23,151 ha

Total produksi karet mentah dari perkebunan RLU / tonnes of raw rubber production from RLU Plantation

· 997.2 ton (perkebunan Kalimantan Timur) / (East Kal plantations)
· 8,504 ton (perkebunan Jambi) / (Jambi plantations)

· 480 ton (perkebunan Kalimantan Timur) / (East Kal plantations)
· 6,826 ton (perkebunan Jambi) / (Jambi plantations)

Total produksi karet olahan / Total processed rubber production

27,148 ton / 27,148 ton

17,270 ton / 17,270 ton

Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan

Corporate Governance,
Ethics and Compliance



Kami percaya bahwa tata kelola yang kuat adalah pondasi untuk mencapai rencana keberlanjutan kami. Sejak pendirian, keberlanjutan telah diintegrasikan ke dalam pilar-pilar utama RLU yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis kami. Tim manajemen senior kami bertemu secara rutin dalam rapat strategis untuk membahas aspek-aspek keberlanjutan. Selain itu, kami juga telah membentuk Komite Lingkungan dan Sosial yang terdiri atas jajaran pimpinan departemen terkait yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Setiap tahun, kami menerbitkan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG).

Pedoman dan Indikator Kinerja Utama Guidelines and Key Performance Indicator

RLU berkomitmen untuk bekerja mematuhi standar-standar yang relevan dalam hal ini:

- Peraturan Perundangan di Indonesia;
- IFC Performance Standards dan Kerangka Kerja Sosial dan Lingkungan;
- World Bank Group Environmental Health and Safety (EHS) Guidelines;
- TLFF Core Objectives and specific KPIs derived for RLU's operations; and
- Landscape Protection Plan (LPP).

IFC PS menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk Sistem Monitoring Lingkungan dan Sosial di RLU. Dengan demikian Laporan ESG Review disusun secara konsisten dengan IFC PS dan dilaporkan dalam tabel ikhtisar kinerja sosial dan lingkungan RLU. Lebih lanjut mengenai ini ada di halaman [114](#).

We believe that having a robust governance is fundamental to achieving our sustainability plans. Since our establishment, sustainability has been embedded into the key pillars of RLU that are inseparable from our business strategy. Our senior management team meets regularly in strategic meetings to discuss sustainability aspects. In addition, we have also established an Environmental and Social Committee consisting of the heads of relevant departments who report directly to the Board of Directors. Every year, we publish an Environmental and Social Governance (ESG) Report.

RLU committed to operates in compliance to the relevant standards in this regards:

- National law and regulations
- IFC Performance Standards and Social Environmental Framework
- World Bank Group Environmental Health and Safety (EHS) Guidelines;
- TLFF Core Objectives (now E&S KPI) and specific KPIs derived for RLU Operations
- Landscape Protection Plan (LPP)

IFC PS provides the overarching framework of the Environment Social Monitoring System (ESMS) in RLU. The RLU ESG Report is prepared consistently in alignment to IFC PS and reported in the table of E&S KPI summary of RLU. More details in page [114](#).

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) Environment Social Action Plan (ESAP)

RLU telah menyusun ESAP sebagai kelanjutan komitmen Lingkungan dan Sosial Perusahaan. ESAP disusun berdasarkan pada Standar Kinerja (PS) 2012 dari International Finance Corporation (IFC) tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial serta pedoman khusus sektor Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (EHS) terkait. Bersama dengan Tropical Landscape Finance Facility (TLFF), RLU berkomitmen melacak dan mengungkapkan KPI lingkungan dan sosial (E&S) yang jelas, menggunakan auditor eksternal untuk melihat pelaksanaannya, serta meninjau kepatuhan dan kemajuan aspek E&S pada proyek. Hasilnya dilaporkan dalam laporan ESG tahunan dan Laporan Keberlanjutan. Saat ini, KPI disebut sebagai E&S KPI. Lebih lanjut tentang ESAP dan indikator KPI TLFF dapat dilihat pada halaman [166](#).

RLU has established an ESAP to further address the Company's Environment and Social commitments. The ESAP is based on the International Finance Corporation (IFC) 2012 Performance Standards (PS) on Environmental and Social Sustainability and associated Environmental Health and Safety (EHS) sector specific guidelines. Together with Tropical Landscape Finance Facility (TLFF) RLU has committed to track and disclose clear environmental and social (E&S) KPIs with external auditors reviewing the ongoing implementation, compliance and progress of the E&S aspects of the project. The result is being reported in the annual ESG report and Sustainability Report. The KPI's is now called E&S KPI more about the ESAP and TLFF KPI indicator is on page [166](#).

Rencana Perlindungan Lanskap (LPP) Landscape Protection Plan (LPP)

Rencana perlindungan lanskap adalah dokumen penting dari RLU dan Mitra Obligasi Keberlanjutannya, khususnya &Green. LPP dirancang untuk memandu visi jangka panjang RLU untuk pembangunan berkelanjutan di seluruh lanskap yang lebih luas dari konsesinya. Prioritas area kerja LPP adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan tutupan lahan dan hutan di konsesi RLU dan dampaknya terhadap lanskap;
2. Pemantauan dampak RLU terhadap masyarakat dan mata pencaharian;
3. RLU Tindakan proaktif dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk keberlanjutan

Uraian lebih lanjut tentang LPP dapat ditemukan di halaman [174](#).

Landscape protection plan is a fundamental document of RLU and its Sustainability Bond Partners in particular &Green. The LPP was designed to guide RLU's long term vision for sustainable development across the wider landscape of its concession. The priorities work area of LPP as follows:

1. Land and forest cover monitoring in RLU concessions and its impact to the landscape;
2. Impact monitoring of RLU to the community and livelihood;
3. RLU Proactive and collaborative actions with various stakeholders for sustainability

More about LPP is on page [174](#).

Dewan Penasihat Lingkungan dan Sosial Environmental and Social Advisory Board

RLU telah membentuk Dewan Penasihat Lingkungan dan Sosial (ESAB) untuk memberikan nasihat dan arahan kepada manajemen dalam menerapkan visi keberlanjutan RLU serta mengembangkan dan mendukung aspek-aspek penting strategi keberlanjutan Perusahaan. ESAB juga berfungsi untuk memberikan nasihat dalam isu-isu strategis yang dihadapi oleh perusahaan termasuk diantaranya apabila ada eskalasi penanganan keluhan yang tidak menemui titik temu.

ESAB terdiri dari perwakilan manajemen senior, pemegang saham, mitra berkelanjutan nasional dan internasional, dan ahli independen di sosial dan lingkungan. Rapat ESAB diadakan setiap triwulan untuk memberikan laporan kepada Direksi RLU guna menyelaraskan visi dan strategi Perusahaan dengan nilai-nilai dan komitmen yang berlaku. Tugas utama ESAB adalah memantau penerapan Sistem Pemantauan Lingkungan dan Sosial (ESMS) dan Rencana Kerja Lingkungan dan Sosial (ESAP) RLU. Dalam hal ini, ESAB bekerja sesuai dengan mekanisme protokol yang telah disepakati oleh para pihak dan tidak ada benturan kepentingan para pihak.

Struktur Dewan Penasihat Lingkungan dan Sosial (ESAB):

1. Independent Chairperson:
Dr. Efransjah (Senior Advisor to the Ministry of Environment and Forestry)
2. RLU Board of Directors:
Jan Blaauw (CEO), Yasmine Sagita (Chief Sustainability and Corporate Affairs), Gregory Lesturgez (Chief Agronomist)
3. Shareholder representative:
Herve Deguine (Michelin), Edouard De-Rostolan (Michelin)
4. Sustainability Bond Partners representative:
Lisa Genasci (TLFF/ADMC), Sanjiv Louis (Sail Ventures), Marthe Tollenaar (Sail Ventures)
5. Social Expert:
Godwin Limberg (Daemeter Consulting)
6. Biodiversity Expert:
Johannes Kieft (UNEP)
7. Secretary of the ESAB:
Karmila Parakkasi (Sustainability and Compliance General Manager RLU)

RLU has established an Environmental and Social Advisory Board (ESAB) to provide advice and guidance to the Management on the implementation of RLU's sustainability vision and to develop and support key aspects of the Company's sustainability strategy. The ESAB also serves to provide advice on strategic issues faced by the Company including the escalation of unresolved grievances.

The ESAB comprises representatives from senior management, shareholders, national and international sustainability partners, and independent social and environmental experts. ESAB meetings are held quarterly to provide reports to the RLU Board of Directors to align the Company's vision and strategy with applicable values and commitments. The ESAB's main task is to monitor the implementation of RLU's Environmental and Social Monitoring System (ESMS) and Environmental and Social Work Plan (ESAP). In this case, the ESAB works in accordance with the protocol mechanism agreed upon by the parties and there is no conflict of interest between the parties.

Structure of the Environmental and Social Advisory Board (ESAB):

1. Independent Chairperson:
Dr. Efransjah (Senior Advisor to the Ministry of Environment and Forestry)
2. RLU Board of Directors:
Jan Blaauw (CEO), Yasmine Sagita (Chief Sustainability and Corporate Affairs), Gregory Lesturgez (Chief Agronomist)
3. Shareholder representative:
Herve Deguine (Michelin), Edouard De-Rostolan (Michelin)
4. Sustainability Bond Partners representative:
Lisa Genasci (TLFF/ADMC), Sanjiv Louis (Sail Ventures), Marthe Tollenaar (Sail Ventures)
5. Social Expert:
Godwin Limberg (Daemeter Consulting)
6. Biodiversity Expert:
Johannes Kieft (UNEP)
7. Secretary of the ESAB:
Karmila Parakkasi (Sustainability and Compliance General Manager RLU)

Prioritas kerja ESAB:

1. Mendukung pembentukan dan monitoring kinerja Environment Social Monitoring System atau Sistem Monitoring Sosial dan Lingkungan untuk memastikan kepatuhan
2. Identifikasi faktor risiko dan kesenjangan serta dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan terhadap Kerangka Kerja Sosial dan Lingkungan (ESAP)
3. Bekerja dengan tim Sosial dan Lingkungan di RLU untuk memperkuat ESAP (apabila dibutuhkan)
4. Sarana untuk berdiskusi secara terbuka dan transparan dengan para pemangku kepentingan RLU.

Sub Komite Sosial dan Lingkungan:

Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan sejak tahun 2018 perusahaan telah membentuk Komite Sosial dan Lingkungan sebagai bagian dari komponen ESAB. Setiap per tiga bulan Komite Sosial dan Lingkungan memberikan laporan ke ESAB dan Direksi RLU. Sub komite Lingkungan dan Sosial yang terdiri dari:

1. Komite Lingkungan

Anggota komite lingkungan terdiri dari: Ahli Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati (bagian dari anggota ESAB); Head of Sustainability and Compliance; Head of Conservation; Wildlife Conservation Manager; Head of Safety Health and Environment; Conservation Assistant, Agronomist. Tugas dari komite lingkungan adalah untuk membahas mengenai:

- Perlindungan terhadap Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT)
- Perlindungan terhadap satwa liar dan keanekaragaman hayati
- Rehabilitasi dan area pengayaan
- Management dan mitigasi karhutla
- Wildlife Conservation Area management

ESAB work priorities:

1. Support the establishment and monitoring of the performance of the Environment Social Monitoring System to ensure compliance.
2. Identify risk factors and gaps and support needed to ensure compliance with the Environmental and Social Framework (ESAP)
3. Work with the Social and Environmental team at RLU to strengthen the ESAP (if needed)
4. A platform for open and transparent discussions with RLU stakeholders.

Social and Environmental Sub-Committee:

In the implementation of corporate governance, since 2018 the Company has established a Social and Environmental Committee as part of the ESAB component. Every three months the Social and Environmental Committee provides reports to the ESAB and the Board of Directors of RLU. The Environmental and Social sub-committee consists of:

1. Environmental Committee

The Environmental Committee members consist of the following: Environmental and Biodiversity Expert (part of ESAB members); Division Head of Sustainability and Compliance; Division Head of Conservation and Wildlife Conservation Area; Division Head of Safety Health and Environment and Security; Conservation Assistant, Agronomist. The task of the environment committee is to address:

- Protection of High Conservation Values (HCVs) and High Carbon Stocks (HCS)
- Protection of wildlife and biodiversity
- Rehabilitation and enrichment areas
- Forest fire management and mitigation
- Wildlife Conservation Area management

2. Komite Sosial dan Hak Asasi Manusia

Anggota komite sosial terdiri dari: Ahli Sosial; Head of Public Affairs; Head of Sustainability and Compliance; Head of Land Return, Head of Legal and Head of HR. Tugas dari komite sosial dan HAM adalah untuk membahas mengenai:

- Proses Permintaan Persetujuan yang dilakukan Tanpa Paksaan yang didasari pada penyampaian informasi di awal (resolusi konflik yang bertanggung jawab, management penanganan keluhan)
- Pelibatan dan management pemberdayaan masyarakat
- Program pelibatan masyarakat adat
- Praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab

2. Social and Human Rights Committee

Members of the social committee consist the following: Social Expert; Head of Public Affairs; Head of Sustainability and Compliance; Head of Land Return, Head of Legal Affairs, and Head of HR. The task of the social and human rights committee is to address:

- A free, prior and informed consent process (responsible conflict resolution, grievance management).
- Community engagement and empowerment management
- Indigenous community engagement programmes
- Responsible labour practices



BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan dan Sosial (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	--	---

Kebijakan Keberlanjutan

Sustainability Policy

RLU berkomitmen untuk meningkatkan performa lingkungan dan sosial di seluruh rantai nilai selaras dengan nilai-nilai dari pemegang saham kami, serta melalui kolaborasi aktif dengan para pemangku kepentingan. Bekerja sama dengan penilai independen, RLU secara rutin melaporkan perkembangan tersebut dalam Laporan Lingkungan dan Sosial.

1. Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab

- a. Tidak melakukan deforestasi, termasuk:
 - Tidak membakar hutan dan lahan;
 - tidak membangun di Area Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT); dan
 - melakukan upaya terbaik untuk melindungi area NKT dan SKT, termasuk mencegah kegiatan ilegal.
- b. Melindungi dan melestarikan spesies langka dan keanekaragaman hayati; dan
- c. Mengembangkan pengelolaan operasional secara terus menerus.

2. Menghormati Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia, Perundangan dan Peraturan Nasional, serta Standar Internasional Terkait:

- a. Mengidentifikasi hak-hak adat;
- b. Mengakui dan menghormati hak-hak Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (*Padiatapa*) bagi masyarakat adat yang mencakup hak-hak hukum, komunal, atau adat;
- c. Mendorong keterlibatan aktif pemangku kepentingan lokal, nasional, dan internasional yang terbuka dan membangun;
- d. Mengelola keluhan dan konflik secara bertanggung jawab, terbuka, dan transparan melalui proses yang konsultatif; dan
- e. Menghormati dan mengedepankan keterlibatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, termasuk petani kecil, melalui Community Partnership Program (CPP).

RLU is committed to improving environmental and social performance across the value chain, aligned with the values of our shareholders, and through active collaboration with stakeholders. In collaboration with independent assessors, RLU regularly reports on progress in its Environmental and Social Report.

1. Responsible Environmental Management

- a. No deforestation, including:
 - No burning of forests and land;
 - No building of any kind in High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) areas; and
 - Doing the best to protect HCV and HCS areas, including preventing illegal activities.
- b. Protect and conserve rare species and biodiversity; and
- c. Continuously improve operational management.

2. Comply with Human Rights Principles, National Laws and Regulations, and Relevant International Standards:

- a. Identify customary rights;
- b. Recognize and respect indigenous peoples' Free, Prior and Informed Consent (FPIC) rights which include legal, communal or customary rights;
- c. Encourage open and constructive active engagement of local, national, and international stakeholders;
- d. Manage grievances and conflicts responsibly, openly, and transparently through consultative processes; and
- e. Respect and promote social and economic engagement for communities, including smallholders, through the Community Partnership Programme (CPP).

3. Mempraktikkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

- a. Membentuk Dewan Penasihat Lingkungan dan Sosial (ESAB) yang terdiri atas jajaran manajemen senior Perusahaan, rekan bisnis eksternal, dan pengawas independen;
- b. Menyusun kode etik; dan
- c. Menciptakan rantai suplai yang terlacak dan transparan.

4. Menciptakan Tempat Kerja yang Aman dan Nyaman bagi Karyawan

- a. Melarang pekerja di bawah umur dalam bentuk apapun;
- b. Melarang kerja paksa dalam bentuk apapun;
- c. Mengakui dan menghormati hak-hak karyawan;
- d. Mengupayakan taraf hidup dan pekerjaan yang cukup;
- e. Mempromosikan keberagaman dan melarang diskriminasi dan pelecehan dalam bentuk apapun; dan
- f. Menyusun mekanisme keluhan internal yang berlaku bagi seluruh karyawan.

5. Meningkatkan Hasil Panen, Kualitas, dan Produktivitas. Menerapkan praktik-praktik agrikultur karet yang baik guna meningkatkan hasil panen, kualitas, dan produktivitas, baik di perkebunan milik RLU maupun petani kecil.

3. Practising Good Corporate Governance

- a. Establish an Environmental and Social Advisory Board (ESAB) consisting of the Company's senior management, external business partners, and independent supervisors;
- b. Develop a code of ethics; and
- c. Creating a traceable and transparent supply chain.

4. Creating a Safe and Comfortable Workplace for Employees

- a. Prohibit underage labour in any form;
- b. Prohibit forced labour in any form;
- c. Recognize and respect the rights of employees;
- d. Strive for an adequate standard of living and employment;
- e. Promote diversity and prohibit discrimination and harassment in any form; and
- f. Establish an internal grievance mechanism that applies to all employees.

5. Improving Yield, Quality, and Productivity. Implement good rubber agricultural practices to improve yield, quality as well as productivity, both in RLU and smallholder plantations.

Kode Etik dan Nilai-Nilai Utama Perusahaan

Code of Conduct and Core Values

Kami percaya bahwa penerapan Kode Etik yang menyeluruh merupakan kunci keberhasilan RLU. Oleh sebab itu, kami berkomitmen untuk menerapkan Kode Etik dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Kode Etik tersebut wajib diterapkan oleh seluruh karyawan tanpa terkecuali. RLU mendorong budaya keterbukaan di mana karyawan dapat menyampaikan keluhan dan melaporkan pelanggaran Kode Etik. Kode Etik RLU terdiri atas poin-poin berikut:

We fully believe that the comprehensive implementation of the Code of Ethics is the key to RLU's success. Therefore, we are committed to implementing the Code of Ethics in our daily business activities. The Code must be applied by all employees without exception. RLU encourages a culture of openness where employees can raise complaints and report violations of the Code. The RLU Code of Ethics consists of the following points:



Bekerja Sama

Working Together

Menghormati perbedaan antar karyawan tanpa memandang latar belakang, ras, agama, jenis kelamin, dan umur. RLU juga melarang segala bentuk kekerasan fisik dan seksual.

Respecting the differences between employees regardless of background, race, religion, gender and age. RLU also prohibits all forms of physical and sexual violence.



Menjaga Kelestarian Lingkungan

Preserving the Environment

Menjunjung tinggi pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, yang terdiri atas tidak membakar hutan dan lahan, tidak membangun di Area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) serta mencegah kegiatan ilegal, melindungi dan melestarikan spesies langka dan keanekaragaman hayati.

Uphold responsible environmental management, which consists of refraining from burning forests and land, refraining from constructing in High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) areas and preventing illegal activities, protecting and conserving endangered species and biodiversity.



Menghormati Perundangan dan Peraturan Nasional serta Hak Asasi Manusia

Respecting National Laws and Regulations and Human Rights

Menghormati dan mendukung Hak Asasi Manusia, mengakui dan menghormati hak-hak Masyarakat Adat, mendukung keberagaman, menghormati hak-hak perempuan dan anak. RLU berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun.

Respect and support Human Rights, recognize and respect the rights of Indigenous Peoples, support diversity, and respect the rights of women and children. RLU is also committed to not employing children under the age of 18.



Suap dan Gratifikasi

Bribery and Gratuities

Melarang segala bentuk korupsi, suap, pencucian uang, penipuan, dan konflik kepentingan bagi seluruh karyawan di seluruh area operasional.



Menjaga Keselamatan

Maintaining Safety

Memastikan bahwa seluruh karyawan, kontraktor, dan pengunjung area operasional RLU berada dalam lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman.



Prinsip, Etika, dan Perlakuan yang Adil bagi Pemasok

Principles, Ethics and Fair Treatment of Suppliers

Memastikan seluruh pemasok dan rekan bisnis memahami dan menerapkan Kode Etik kami.



Menjaga Reputasi Perusahaan

Maintain Company Reputation

Reputasi RLU bergantung pada perilaku setiap karyawan. Reputasi yang baik akan mendukung terciptanya kinerja yang baik.

Prohibit all forms of corruption, bribery, money laundering, fraud and conflict of interest for all employees in all operational areas.

Ensure that all employees, contractors and visitors to RLU's operational areas are in a healthy, safe and comfortable working environment.

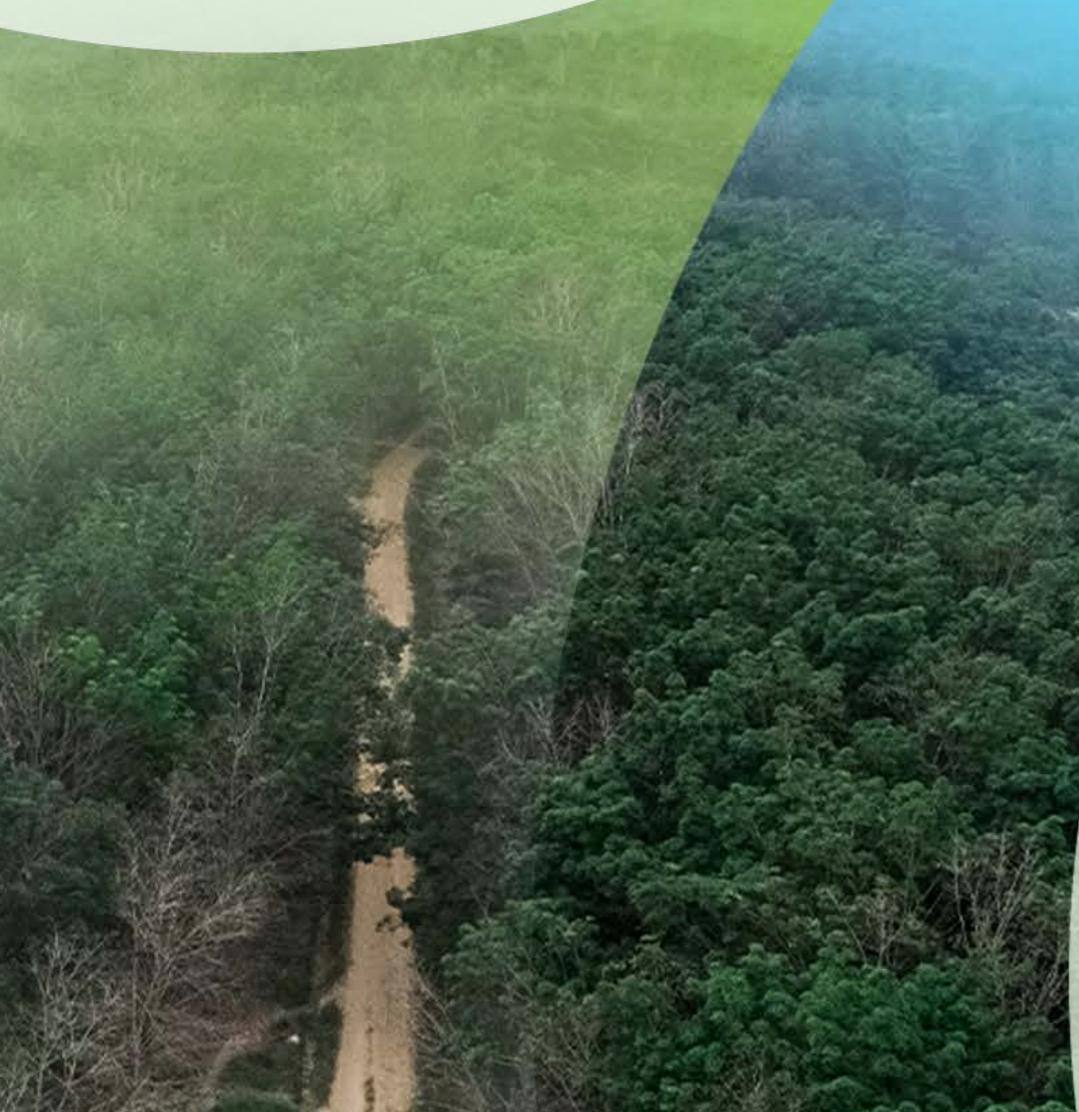
Ensure all suppliers and business partners understand and apply our Code of Conduct.

RLU's reputation depends on the behaviour of each employee. A good reputation will support the creation of good performance.

3

Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Contribution
to Sustainable
Development Goals
(SDGs)



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau Tujuan Global adalah kumpulan 17 tujuan yang saling terkait yang dirancang untuk menjadi cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua. Bagian ini mewakili inisiatif utama RLU yang mendukung tujuan ini:



1 Menghapus Kemiskinan Eradicating Poverty

- Proyek ini dirancang untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk setempat dengan pekerjaan yang adil dan dukungan kepada petani kecil.
- RLU memperkerjakan 3,882 orang dan Program Kemitraan Kehutanan telah melibatkan 730 petani kecil.



2 Mengakhiri Kelaparan Zero Hunger

- Kami berkomitmen untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui Program Pertanian Terpadu. Program ini dirancang untuk menciptakan ketahanan pangan bagi masyarakat dengan menyediakan nutrisi yang cukup dan mata pencaharian alternatif.
- Hingga saat ini, Program Pertanian Terpadu telah dilaksanakan di 10 area dan perusahaan menyerap hasil pertanian terpadu masyarakat sebesar 137,650 kg beras, 6.843 kg sayuran, 771 kg cabai merah, dan 38 kg ikan.

- We are committed to supporting community food security through the Integrated Farming Program. The programme is designed to create food security for communities by providing adequate nutrition and alternative livelihoods.
- To date, the Integrated Farming Programme has been implemented in 10 areas and the company has purchased 137,650 kg of rice, 6,843 kg of vegetables, 771 kg of red chilies, and 38 kg of fish from the integrated farming communities.



3 Kesehatan yang baik dan kesejahteraan Good Health and Well-Being

- Kami berkomitmen untuk terus menerus memastikan penyediaan fasilitas kesehatan untuk karyawan perusahaan dan masyarakat terutama kategori rentan di sekitar area perusahaan.
- Perusahaan telah menyediakan klinik berikut dokter dan tenaga medis pendukung serta bekerja sama dengan fasilitas kesehatan pemerintah di setiap unit usaha di Jambi dan Kalimantan Timur.
- Sejak tahun 2019 Perusahaan juga menyediakan layanan kesehatan rutin untuk Masyarakat Orang Rimba yang bermukim di area HTI Jambi.
- Mengimplementasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di setiap area operasional dan melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi seluruh karyawan.
- We are committed to continuously ensuring the provision of health facilities for the Company's employees and the community, in particular, the more vulnerable categories living around the Company's area.
- The Company has built clinics along with doctors and supporting medical personnel and cooperates with government health facilities in each business unit in Jambi and East Kalimantan.
- Since 2019, the Company has also provided routine health services for Orang Rimba communities living in the HTI area in Jambi.
- Implementing Covid-19 preventive health protocols in each operational area and conducting Covid-19 vaccinations for all employees.



4 Pendidikan Bermutu Quality Education

- Kami menyadari pentingnya pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, kami telah mendukung sejumlah sekolah dan memberikan pelatihan teknis bagi petani untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas mereka.
- Bagi RLU, pendidikan berkualitas dimaknai dengan menyediakan fasilitas pendidikan (seperti Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini) bagi anak-anak karyawan.
- Kami mendukung penyetaraan pengetahuan dengan mengadakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan.
- Memberikan kesempatan magang bagi Mahasiswa tingkat akhir melalui program Magang Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan RI sebagai upaya turut serta dalam mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul.
- We recognize the importance of education for the next generation. Therefore, we have supported a number of schools and provided technical training for farmers to improve their skills and productivity.
- For RLU, quality education means providing educational facilities (such as Early Childhood Education Facilities) for employees' children.
- We support knowledge equalization by organizing training activities to improve employee skills.
- Providing internship opportunities for final year students through the Ministry of Education's Merdeka Campus Internship programme as an effort to participate in producing excellent human resources.



5 Kesetaraan Gender Gender Equality

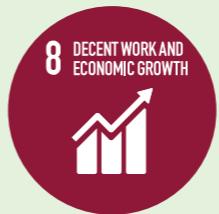
- Kami menyadari pentingnya keterlibatan perempuan di seluruh aspek bisnis, yang dimaknai dengan memberikan kesempatan kerja, meningkatkan partisipasi perempuan, dan memberdayakan perempuan di tengah masyarakat.
- Kami bekerja sama dengan UN Women dan Tropical Landscape Finance Facility (TLFF) untuk melakukan penelitian tentang perempuan di area HTI RLU di Jambi.
- Seorang tenaga ahli kesetaraan gender dari TLFF mengampu pembentukan kelompok pendukung perempuan sebagai bagian dari inisiatif ini.
- Meluncurkan Kelompok Pendukung Perempuan, yaitu Kawan Wanita (Kanita) RLU sebagai ruang aman bagi karyawan perempuan, untuk menyampaikan keluhan, berbagi pengalaman dan saling memberdayakan.
- Hingga saat ini, 32% dari jumlah keseluruhan karyawan RLU adalah perempuan, dengan ±30% target bagi partisipasi perempuan.



6 Akses Air Bersih dan Sanitasi Clean Water and Sanitation

- Pemantauan konsumsi air adalah bagian penting dari Rencana Kerja Lingkungan dan Sosial kami. Oleh sebab itu, kami bekerja sama dengan Towards Sustainability Business untuk memperluas akses terhadap air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan (WASH) di area HTI Jambi.

- Water use and pollution monitoring are main environmental objectives in our environmental and social action plans. We partnered with Towards Sustainability Business to close the gaps in access to water, sanitation, and hygiene (WASH) in our Jambi concession.



8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Decent Work and Economic Growth

- We recognize the importance of women's involvement in all aspects of business, which is interpreted by providing employment opportunities, increasing women's participation, and empowering women in the community.
- We collaborated with UN Women and the Tropical Landscape Finance Facility (TLFF) to conduct research on women in RLU's HTI area in Jambi.
- A gender equality expert from TLFF led the formation of women's support group as part of this initiative.
- Launched Women's Support Group, Kawan Wanita (Kanita) RLU as a safe space for female employees, to air grievances, share experiences and empower each other.
- To date, 32% of the total number of RLU employees are female, with ±30% target for female participation.
- Kami memiliki kebijakan "zero" toleransi untuk merekrut pekerja anak dan sistem kerja paksa.
- Komitmen terhadap Kode Etik adalah bagian dari proses rantai pasokan kami.
- Kami fokus pada penyediaan upah yang layak dan adil bagi karyawan kami, serta lingkungan kerja yang aman. Hingga saat ini, kami telah menyediakan sekitar 3.882 lapangan pekerjaan.
- Remunerasi karyawan kami senantiasa dilaporkan dalam Laporan ESG tahunan.



10 Mengurangi Ketimpangan Reduced Inequality

- Kami mendukung masyarakat dan mata pencarian mereka melalui upah yang adil dan Program Kemitraan Masyarakat (CPP).
- Kami mempromosikan kesempatan yang sama dan menghormati keragaman sebagaimana tercermin dalam kebijakan kami. Namun tidak terbatas pada Kebijakan Keberlanjutan, Kebijakan Rekrutmen, dan Kode Etik kami.
- Kami bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di seluruh tingkat bisnis.
- 189 perempuan terlibat dalam kegiatan CPP. Kami menargetkan partisipasi perempuan 20% dalam semua kegiatan pengembangan masyarakat jangka panjang.
- Hingga saat ini, 80% perempuan dari komunitas Orang Rimba (kelompok Suku Anak Dalam), telah bergabung dalam berbagai program inisiatif pengembangan masyarakat.
- We continuously support community livelihood by providing job opportunities with fair wage as well as running the Community Partnership Program.
- We promote equal opportunities and respect diversity as reflected in our policies, including but not limited to our Sustainability Policy, Recruitment Policy, and Code of Ethics.
- We regularly carry out projects for Indigenous People and aim to increase women participation on all levels.
- 189 women are involved in CPP activities. We target 20% female participation in all long-term community development activities.
- To date, 80% of women from the Orang Rimba community (Suku Anak Dalam group), have joined various community development initiative programmes.



13

Penanganan Perubahan Iklim Climate Action

- Aksi iklim adalah bagian penting dari bisnis kami. Oleh sebab itu, kami berupaya untuk membangun industri Karet Alam yang Berkelanjutan.
- Kami melakukan pemantauan GRK dan penilaian karbon di area HTI kami dalam kemitraan dengan USAID Green Invest Asia.
- Sebanyak 1.370.628 tCO₂e telah diserap oleh hutan dan pohon karet di area HTI kami.

- Climate action is an important part of our business. Hence, we endeavour to build a Sustainable Natural Rubber industry.
- We conduct GHG monitoring and carbon assessment in our plantation areas in partnership with USAID Green Invest Asia.
- A total of 1,370,628 tCO₂e has been sequestered by forests and rubber trees in our plantation areas.



15

Menjaga Ekosistem Darat Life on Land

- Kami berupaya untuk memperkenalkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
- Sejak pendirian, kami telah melaksanakan penilaian NKT dan SKT untuk menentukan rencana pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
- 25% dan 50% dari area HTI Jambi dan Kalimantan Timur masing-masing disisihkan sebagai kawasan lindung untuk program konservasi dan keanekaragaman hayati kami.
- Kami telah membentuk total ±9.700 ha Kawasan Konservasi Satwa Liar (WCA) dengan peran penting sebagai zona penyangga ke Taman Nasional Bukit Tigapuluh (BTPNP) yang terancam yang juga selaras dengan inisiatif Kawasan Esensial Ekosistem pemerintah.
- Diperkirakan sebanyak ±150 Gajah Sumatera yang berstatus terancam punah (10% dari populasi) menjelajahi area Lanskap Bukit Tigapuluh.
- Bekerja sama dengan ahli Orangutan Ecositrop, kami telah melaksanakan upaya konservasi dan pengelolaan populasi Orangutan di area HTI Kalimantan Timur.

- We endeavour to introduce sustainable land management.
- Since our establishment, we have conducted HCV and HCS assessments to determine sustainable land management plans.
- 25% and 50% of our plantation areas in Jambi and East Kalimantan respectively are set aside as protected areas for our conservation and biodiversity programmes.
- We have established a total of ±9,700 ha of Wildlife Conservation Areas (WCAs) to function as the important buffer zones to the endangered Bukit Tigapuluh National Park (BTPNP) in line with the government's Ecosystem Essential Areas initiative.
- An estimated ±150 endangered Sumatran Elephants (10% of the population) roam the Bukit Tigapuluh Landscape area.
- In collaboration with Ecositrop's Orangutan experts, we have implemented Orangutan conservation and population management efforts in East Kalimantan HTI areas.



17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



17

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Partnerships for the Goals

- RLU berkomitmen untuk terlibat aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional untuk memastikan bahwa seluruh aspirasi pemangku kepentingan dapat dikelola dengan baik.
- Kerja sama obligasi berkelanjutan dengan TLFF, UNEP, BNP Paribas, ADM Capital/ADM Foundation, dan World Agroforestry Centre (ICRAD). This cooperation includes social and environmental safeguards.
- In collaboration with Partnerships for Forests (P4F), we established a ±9,700 ha WCA in PT LAJ's HTI plantation in Jambi.
- In partnership with Bukit Tigapuluh National Park since 2018.
- Actively involved in regional partner's activities such as Bukit Tigapuluh Collaboration Platform (PKBT).
- Together with IDH to develop social inclusion through the Community Partnership Program (CPP) that enhances the empowerment of rubber farmers in the Jambi operational area through agroforestry schemes in community managed areas.

4

Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Stakeholder Engagement and Co-operation



Kerangka Kerja dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan and Framework*) telah disusun oleh RLU dalam memenuhi standar kerja IFC Performance Standard 1 (IFC PS 1) tentang Pengkajian dan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Risiko Sosial.

RLU berusaha untuk membangun bisnis jangka panjang yang berkelanjutan dengan lingkungan dan perlindungan sosial yang dipantau dan dievaluasi sepanjang masa hidup perusahaan. Perusahaan juga secara aktif terlibat dengan pemangku kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional untuk memastikan proses yang kuat dan transparan dan yang dikelola dengan baik. Termasuk di antaranya keterlibatan dengan masyarakat lokal, kelompok adat, pemerintah lokal dan nasional, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif, konsultasi dan pengungkapan informasi, yang didasarkan pada Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan - SEP*) yang komprehensif merupakan pedoman dalam mendukung RLU mengembangkan kinerjanya.

RLU has developed a Stakeholder Engagement Plan and Framework to fulfill the IFC Performance Standard 1 (IFC PS 1) on the Assessment and Management of Environmental and Social Risk Impacts.

RLU endeavors to build a long-term sustainable business with environmental and social safeguards monitored and evaluated throughout the Company's lifetime. The Company also actively engages with local, regional, national, and international stakeholders to ensure robust, transparent, and well-managed processes. This includes engagement with local communities, indigenous groups, local and national governments, communities, community leaders, religious leaders, and non-governmental organizations.

Effective stakeholder engagement, consultation, and information disclosure, which is based on a comprehensive Stakeholder Engagement Plan (SEP) is a guideline to support RLU in improving its performance.

Kerja Sama Royal Lestari Utama Royal Lestari Utama Cooperation

Kerja sama dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT)

Cooperation with Bukit Tigapuluh National Park (TNBT)

Kawasan TNBT dan penyangganya yaitu area Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Lestari Asri Jaya (LAJ) adalah bagian dari area jelajah kawanan Gajah dan Harimau Sumatera yang dilindungi dan merupakan satwa prioritas nasional. RLU melalui anak usahanya, PT LAJ menjalin kerja sama dengan Balai TNBT sejak 2018 dengan Rencana Kerja Tahunan meliputi:

1. Penguatan kelembagaan
2. Perlindungan kawasan penyangga antara TNBT dan HTI LAJ
3. Konservasi keanekaragaman hayati
4. Pemulihan ekosistem
5. Pemberdayaan masyarakat

Pada Maret 2021, salah satu *camera trap* di kawasan TNBT berhasil menangkap gambar tiga ekor Harimau Sumatera yang diduga induk beserta 2 ekor anaknya. Gambar ini merupakan hasil pengambilan data pemantauan satwa secara berkala yang dilakukan oleh Tim TNBT dan PT LAJ. Terekamnya tiga ekor Harimau Sumatera ini menunjukkan habitat satwa dilindungi tersebut masih terjaga, serta ketersediaan pakan yang cukup, sehingga satwa bisa berkembang biak dengan baik.

TNBT bersama dengan PT LAJ, Frankfurt Zoological Society (FZS) dan Yayasan Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera (PKHS) pada periode Augustus hingga Desember 2021 bersama-sama melaksanakan Survei Pendugaan Populasi Harimau Sumatera dengan metode Capture Mark Recapture menggunakan kamera jebak di 38 titik dengan area sampel seluas ±32.628 ha. Dari survei ini 5 ekor Harimau Sumatera berhasil diidentifikasi berdasarkan 16 foto Harimau Sumatera yang terekam. Keseluruhan kamera jebak merekam sekitar 73.000 foto terdiri dari 38 satwa. Dengan menggunakan pendekatan Bayesian Spatially Explicit Capture Recapture diketahui di dalam kawasan TNBT kepadatan populasi harimau Sumatera mencapai 1.5 individu/100 Km² dan mampu mendukung populasi sebanyak 53 Harimau Sumatera dewasa.



The Bukit Tigapuluh National Park (TNBT) and its buffer zone, the PT Lestari Asri Jaya (LAJ) Industrial Plantation Forest (HTI) area, are part of the range of the protected Sumatran Elephant and Tiger herds and are national priority animals. RLU through its subsidiary, PT LAJ has collaborated with TNBT Hall since 2018 with an Annual Work Plan including:

1. Institutional strengthening
2. Protection of buffer zone between TNBT and HTI LAJ
3. Biodiversity conservation
4. Ecosystem restoration
5. Community empowerment.

In March 2021, one of the camera traps in the TNBT area managed to capture images of three Sumatran Tigers, presumably a mother and 2 cubs. This image is the result of regular animal monitoring data collection conducted by the TNBT Team and PT LAJ. The recording of these three Sumatran Tigers shows that the habitat of these protected animals is still maintained, as well as the availability of sufficient food, so that animals can breed well.

TNBT together with PT LAJ, Frankfurt Zoological Society (FZS) and the Sumatran Tiger Rescue and Conservation Foundation (PKHS) from August to December 2021 jointly conducted a Sumatran Tiger Population Estimation Survey using the Capture Mark Recapture method with camera traps at 38 points covering a sample area of ±32,628 ha. The survey resulted in the identification of 5 Sumatran Tigers based on 16 captured Sumatran Tiger photos. In total, the camera traps recorded approximately 73,000 photos of 38 animals. Using the Bayesian Spatially Explicit Capture-Recapture approach, it is known that within the TNBT area, the population density of Sumatran tigers reaches 1.5 individuals/100 Km² and is able to support a population of 53 adult Sumatran tigers.

Capaian utama dari kerja sama RLU-TNBT di tahun 2021 antara lain:

- Patroli bersama dengan total 500 hari dan 23.164 km.
- Terdapat setidaknya 63 jenis satwa liar teridentifikasi melalui pemasangan 30 unit kamera jebak
- Survei Pendugaan Populasi Harimau Sumatera di TNBT

Kerja sama dengan Tropical Landscape Finance Facility (TLFF)

Cooperation with Tropical Landscape Finance Facility (TLFF)



TLFF merupakan program kolaborasi antara United Nations Environment Programme (UNEP), ADM Capital/ ADM Capital Foundation, dan World Centre for Agroforestry (ICRAF) dalam rangka menyediakan pendanaan jangka panjang untuk proyek dan perusahaan yang mendorong pertumbuhan. Pada bulan Februari 2018, TLFF menyediakan pendanaan untuk perkebunan karet berkelanjutan RLU melalui obligasi berkelanjutan senilai US\$95 juta yang mencakup 19.000 hektar pertama. Sebagian dari pinjaman pertama ini difasilitasi oleh USAID. Hasilnya, pendanaan Kelas "A" ini mendapat peringkat AAA dari Moody's. Konsultan ESG Vigeo Eiris mengonfirmasi bahwa pembiayaan berkelanjutan ini selaras dengan pedoman pembangunan berkelanjutan. TLFF I yang diterbitkan atas nama RLU adalah obligasi korporasi berkelanjutan pertama di Asia dan obligasi berkelanjutan pertama di Asia Tenggara. Pada bulan Agustus 2022, Obligasi Berkelanjutan telah dilunasi dan ditutup. Lihat siaran pers di situs [web TLFF](#).

The main achievements of the RLU-TNBT cooperation in 2021 include:

- Joint patrols totalling 500 days and 23,164 km.
- At least 63 species of wildlife were identified through the installation of 30 camera traps
- Sumatran Tiger Population Estimation Survey in TNBT

TLFF is a collaborative program between the United Nations Environment Programme (UNEP), ADM Capital/ ADM Capital Foundation, and the World Centre for Agroforestry (ICRAF) to provide long-term funding to projects and companies that promote growth. In February 2018, TLFF provided funding for RLU's sustainable rubber plantation through a US\$95 million sustainable bond covering the first 19,000 hectares. A portion of this first loan was facilitated by USAID. As a result, the Class "A" funding was rated AAA by Moody's. ESG consultancy Vigeo Eiris confirmed that this sustainable financing is aligned with sustainable development guidelines. TLFF I issued on behalf of RLU is the first sustainable corporate bond in Asia and the first sustainable bond in Southeast Asia. In August 2022, the Sustainability Bond had been repaid and closed. See the press release in [TLFF website](#).

Kemitraan dengan &Green Fund

Partnership with &Green Fund

Lembaga &Green Fund adalah lembaga pendanaan investasi yang terstruktur atas skema keuangan campuran yang berfokus pada perlindungan hutan dan komoditas hutan tropis. Pada Februari 2019, &Green melakukan investasi di RLU melalui pembelian obligasi yang diterbitkan oleh Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF). Bersama TLFF dan RLU, &Green menyusun kebijakan Rencana Kerja Lingkungan dan Sosial (ESAP) serta Rencana Perlindungan Lanskap (LPP). Kedua rencana ini menjadi pedoman proyek dalam upayanya mengembangkan HTI karet alam yang menguntungkan dan berkelanjutan, yang secara langsung berkontribusi terhadap pengembangan lanskap terintegrasi, melindungi hutan alam penting yang kritis, meningkatkan penghidupan, dan melindungi hak-hak masyarakat. Di samping pelaporan RLU, ESAP dan LPP ditinjau secara tahunan oleh pihak ketiga dan diungkapkan di laman web &Green.

Kemitraan dengan PG Impact Investments (Blue Earth Capital)

Partnership with PG Impact Investments (Blue Earth Capital)

Pada September 2019, PG Impact Investment (Blue Earth Capital), sebuah lembaga pendanaan multiasset global yang berinvestasi dalam transaksi awal Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) yang menerbitkan obligasi senilai US\$95 juta sebagai dana pinjaman untuk mendanai RLU. TLFF terdiri atas skema keuangan campuran yang diharapkan dapat berdampak positif pada berbagai aspek sosial dan lingkungan.



In September 2019, PG Impact Investments (Blue Earth Capital), a global multi-asset class impact investment firm, invested in the inaugural transaction of the Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF), which has issued notes to finance a US\$95 million loan to RLU. TLFF was structured using blended finance with the expectation to create differentiated social and environmental impact.



Kerja sama dengan Universitas Jambi

Collaboration with Jambi University

RLU dan Universitas Jambi menandatangani bersama Nota Kesepahaman pada 12 November 2020 dalam kegiatan Webinar. Mereka mengadakan kerja sama di beberapa bidang termasuk: pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan keilmuan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan pengabdian masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan berkelanjutan.

On 12 November 2020, RLU and Jambi University entered into a Memorandum of Understanding in a Webinar activity. They collaborate in several areas including education, training, research, scientific development, human resource capacity building, and community service in sustainable forest and land resource management.



Kerja sama dengan Partnerships for Forests (P4F)

Partnership with Partnership for Forest (P4F)

Dukungan kepada upaya membangun Wilayah Cinta Alam (WCA) seluas ±9.700 ha yang berada di area HTI RLU di Jambi, terus diberikan oleh lembaga Partnerships for Forests (P4F). Pada Juni 2020, RLU dan P4F menandatangani addendum kontrak yang menandai dukungan penuh dari P4F untuk pembangunan WCA. Lokasi WCA yang strategis berperan sebagai kawasan penyangga yang penting untuk melindungi TNBT dari perburuan liar, pembalakan hutan, dan kegiatan melanggar hukum lainnya. WCA juga menjadi bagian penting dari inisiatif kawasan yang dipimpin oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi yang tujuannya untuk memberikan ruang jelajah yang aman bagi satwa liar terancam punah dan dilindungi, termasuk Gajah Sumatera, juga membangun ekonomi produktif dan upaya mitigasi konflik dengan gajah untuk masyarakat yang penghidupannya tergantung pada lahan di WCA. Pada tahun 2021, RLU juga menerima dana hibah dari P4F untuk Community Partnership Program (CPP), dengan target 150 petani dengan luas 400 ha, dan proyek Social Economic Baseline (SEB).

Tonggak pencapaian dari kemitraan ini adalah:

- Telah melakukan pendekatan kepada 90% dari 100% pengklaim tanah yang diidentifikasi dalam area WCA.
- Target 50% dari pengklaim lahan kategori kecil dan menengah yang didekati setuju untuk bekerja sama, telah tercapai 90%.
- Jumlah konflik manusia-gajah menurun 54%.
- Menetapkan kerangka kerja dan rencana pelibatan Masyarakat Adat.
- Lebih dari 90% Orang Rimba di dalam WCA dalam Program Mata Pencaharian Orang Rimba yang terintegrasi, yaitu agroforestri, pemeriksaan kesehatan rutin, pembelajaran literasi dan numerasi, dan kolaborasi dalam perlindungan WCA.
- Dari SEB, 116 dari 800 petani (14,5%) yang diwawancara bersedia bergabung dengan program CPP.



The Partnerships for Forests (P4F) organisation continues to support the development of a ±9,700 ha Nature Conservation Area (WCA) in RLU's HTI area in Jambi. In June 2020, RLU and P4F signed a contract addendum that signalled P4F's full support for the development of the WCA. The strategic location of the WCA serves as an important buffer zone to protect the TNBT from poaching, illegal logging, and other unlawful activities. The WCA is also an important part of the area initiative led by the Jambi Provincial Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), which aims to provide safe home ranges for endangered and protected wildlife, including Sumatran elephants, as well as build productive economies and elephant conflict mitigation efforts for communities whose livelihoods depend on the land in the WCA. In 2021 RLU also received grants from P4F for Community Partnership Program (CPP), targeting 150 farmers with an area of 400 ha, and Social Economic Baseline (SEB) project.

The key milestones that has been achieved by this partnership are:

- 90% of 100% land claimants identified within the WCA have been approached.
- The target of 50% of small and medium categories of land claimant approached agree to cooperate, has been achieved by 90%.
- Number of human-elephant conflicts decreased 54%.
- Established Indigenous People framework and engagement plan.
- Over 90% of Orang Rimba within the WCA in integrated Orang Rimba Livelihood Program, i.e agroforestry, routine health check, literacy and numeracy learning, and collaboration in WCA protection.
- From the SEB, 116 out of 800 farmers (14.5%) interviewed were willing to join the CPP program.

Platform Kolaborasi Perlindungan Bukit Tigapuluh

Bukit Tigapuluh Protection Collaboration Platform

RLU merupakan bagian dari Platform Kolaborasi Perlindungan Bukit Tigapuluh (Forum Perlindungan). Forum perlindungan yang disponsori oleh P4F adalah platform kolaborasi tingkat lanskap di Jambi di mana lima pemegang izin konsesi saling berbagi informasi, pengetahuan, dan sumber daya untuk pendekatan yang lebih praktis guna melindungi konsesi mereka dan kawasan hutan di sekitarnya, termasuk taman nasional. Platform ini juga terlibat dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keselarasan dan memaksimalkan dukungan. Melalui keterlibatan yang erat selama setahun terakhir, Forum telah memupuk kepercayaan yang besar di antara para anggota, dan para anggota mengusulkan beberapa inisiatif kolaborasi seperti patroli bersama dan sistem pemantauan lanskap bersama.



The Sustainable Trade Initiative (IDH)

The Sustainable Trade Initiative (IDH)

Pada tahun 2021, RLU melakukan kerja sama dengan IDH dalam rangka kegiatan peningkatan kualitas penghidupan petani kecil melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas di tiga desa di area HTI RLU di Jambi. Kerja sama RLU-IDH ini juga sejalan dengan komitmen Production, Protection, and Inclusion (PPI Compact) di Kabupaten Tebo. Di tingkat provinsi, program ini juga mendukung Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Jambi. Dampak yang telah dicapai oleh kemitraan sebagai berikut:

- 181 dari 250 pengklaim lahan telah didekati;
- 129 dari 181 yang didekati telah setuju untuk bergabung dengan Program Kemitraan Masyarakat dengan total area yang dicakup 310,35 ha;
- Membentuk dua Kelompok Wanita Tani di Desa Napal Putih;
- Mendukung Social Economic Baseline (SEB) yang mencakup 800 rumah tangga.

RLU is part of the Bukit Tigapuluh Protection Collaboration Platform (Protection Forum). The P4F-sponsored protection forum is a landscape-level collaboration platform in Jambi where five concession license holders share information, knowledge and resources for a more practical approach to protecting their concessions and surrounding forest areas, including national parks. The platform also engages with the Government and other stakeholders to ensure alignment and maximise support. Through close engagement over the past year, the Forum has fostered great trust among members, and members proposed several collaborative initiatives such as joint patrols and joint landscape monitoring systems.

Penghargaan Royal Lestari Utama

Award for Royal Lestari Utama

Bisnis Indonesia CSR Award (BISRA)

RLU berkolaborasi dengan masyarakat dan para mitra untuk melindungi lingkungan dan menciptakan penghidupan yang berkelanjutan melalui program kemitraan kehutanan, lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas. Atas upaya tersebut, PT RLU mendapatkan rekognisi dari Bisnis Indonesia CSR Award (BISRA) sebagai The Best Award for Community Development/ Empowerment dan Platinum Champion untuk Perusahaan Swasta. Kegiatan yang diprakarsai oleh Bisnis Indonesia dan Habitat for Humanity Indonesia ini, mengapresiasi perusahaan yang berkomitmen dan berkontribusi terhadap lingkungan, komunitas rentan, dan komunitas berpenghasilan rendah.

Bisnis Indonesia CSR Award (BISRA)

Through partnerships in forestry, employment, community empowerment, and capacity-building programs, RLU collaborates with communities and partners to protect the environment and create sustainable livelihoods. For these efforts, PT RLU received a commendation from Bisnis Indonesia CSR Award (BISRA) as The Best Award for Community Development/ Empowerment and Platinum Champion for Private Companies. This activity, initiated by Bisnis Indonesia and Habitat for Humanity Indonesia, appreciates companies that are committed and contribute to the environment, vulnerable communities, and low-income communities.

**BISNIS INDONESIA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD 2021
CSR untuk Pemulihan Ekonomi Negeri**
KAMIS, 22 APRIL 2021 | GRAND SAHID JAYA HOTEL JAKARTA



BAB | CHAPTER 1
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama
PT Royal Lestari Utama at a Glance

BAB | CHAPTER 2
Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan
Good Corporate Governance, Ethics and Compliance

BAB | CHAPTER 3
Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)

BAB | CHAPTER 4
Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan
Partnerships and Stakeholder Engagement

BAB | CHAPTER 5
Capaian Lingkungan
Environmental Highlights

BAB | CHAPTER 6
Capaian Sosial
Social Highlights

BAB | CHAPTER 7
Capaian Produksi
Production Highlights

BAB | CHAPTER 8
Keterlibatan Karyawan
Employee Engagement

BAB | CHAPTER 9
Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)

BAB | CHAPTER 10
Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD
Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2021 Dari Provinsi Kalimantan Timur

PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC) memperoleh Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. PT MKC telah empat kali berturut-turut mendapatkan Penghargaan Kecelakaan Nihil sejak mulai beroperasi tahun 2017. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah provinsi terhadap konsistensi dan kedisiplinan perusahaan dalam menjalankan operasi sesuai dengan kaidah-kaidah aspek keselamatan kerja.



Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2021 PT MKC Remilling
Zero Accident Award 2021 for PT MKC Remilling

Zero Accident Award 2021 From East Kalimantan Province

PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC) received the Zero Accident Award from the East Kalimantan Provincial Government. PT MKC has received the Zero Accident Award four times in a row since starting operations in 2017. This award is a form of appreciation from the provincial government for the company's consistency and discipline in carrying out operations by the rules of work safety aspects.

Sertifikasi Royal Lestari Utama Royal Lestari Utama Certification

Sertifikasi Pengelolaan Hutan BerkelaJutan

Ketiga anak perusahaan RLU memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan mencapai peringkat yang baik yang merupakan hasil tertinggi dari sertifikasi ini. PHPL adalah standar yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan kemajuan berkelanjutan dalam tata kelola kawasan hutan. Ini memastikan produksi yang efisien serta kelancaran fungsi ekologi dan sosial dari kawasan hutan.

Sertifikasi PHPL bersifat mandatory (wajib) bagi seluruh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri (HTI). Predikat baik diberikan kepada pemegang izin yang dapat mencapai total nilai kinerja >80%.

Sustainable Forest Management Certification

All three RLU subsidiaries have Sustainable Production Forest Management (PHPL) certificates and achieved a good rating which is the highest outcome of this certification. PHPL is a standard created by the Indonesian government to ensure continuous progress in the governance of forest areas. It ensures efficient production as well as smooth ecological and social functioning of the forest area.

PHPL certification is mandatory for all Industrial Plantation Forest (HTI) Timber Forest Product Utilisation Business Permit (IUPHHK) holders. A good predicate is given to permit holders who can achieve a total performance score of >80%.

Penyerahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan oleh Presiden RI

Pada 7 Januari 2021 Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Penyerahan dilakukan secara virtual dari Istana Negara, Jakarta. Acara ini juga dihadiri secara virtual melalui konferensi video oleh penerima SK di berbagai provinsi di Indonesia.

Gubernur Jambi dan masyarakat penerima SK di Provinsi Jambi hadir untuk menerima SK dari Presiden secara virtual, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Dua Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dan PT Wanamukti Wisesa (WW) yaitu KTH Karang Jaya, Desa Sungai Karang dan KTH Wana Mitra Lestari, Desa Napal Putih turut hadir dalam penyerahan secara virtual tersebut. Kedua KTH mendapatkan SK Pengakuan dan Perlindungan (Kulin) Kemitraan Kehutanan (KK) yang diserahkan oleh Gubernur Jambi pada 24 Juli 2020.

Handover of the Minister of Forestry and Environment Decree on Recognition and Protection of Forestry Partnerships by the President of the Republic of Indonesia

On 7 January 2021, President of the Republic of Indonesia Joko Widodo (Jokowi) handed over the Decrees on Customary Forest, Social Forest, and Land for Agrarian Reform (TORA). The handover was conducted virtually from the State Palace, Jakarta. The event was also attended virtually via video conference by decree recipients in various provinces in Indonesia.

The Governor of Jambi and the recipients of the decree in Jambi Province were present to receive the decree from the President virtually, at the Auditorium of the Jambi Governor's Office House. Two Forest Farmer Groups (KTH) assisted by PT Lestari Asri Jaya (LAJ) and PT Wanamukti Wisesa (WW), namely KTH Karang Jaya, Sungai Karang Village and KTH Wana Mitra Lestari, Napal Putih Village were also present at the virtual handover. Both KTH received the Recognition and Protection Decree (Kulin) of Forestry Partnership (KK) which was submitted by the Jambi Governor on 24 July 2020.

BAB | CHAPTER 1
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama
PT Royal Lestari Utama at a Glance

BAB | CHAPTER 2
Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan
Good Corporate Governance, Ethics and Compliance

BAB | CHAPTER 3
Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)

BAB | CHAPTER 4
Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan
Partnerships and Stakeholder Engagement

BAB | CHAPTER 5
Capaian Lingkungan
Environmental Highlights

BAB | CHAPTER 6
Capaian Sosial
Social Highlights

BAB | CHAPTER 7
Capaian Produksi
Production Highlights

BAB | CHAPTER 8
Keterlibatan Karyawan
Employee Engagement

BAB | CHAPTER 9
Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)

BAB | CHAPTER 10
Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD
Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Seluruh perusahaan HTI dan fasilitas pemrosesan RLU di Jambi dan di Kalimantan Timur yang masing-masing dikelola oleh PT. Lestari Asri Jaya (LAJ), PT Wanamukti Wisesa (WMW) dan PT. Multi Kusuma Cemerlang (MKC) menerima Bendera Emas atau Kategori Memuaskan dalam penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Bendera Emas SMK3 diberikan kepada perusahaan dengan tingkat penerapan SMK3 lebih dari 85%. Penghargaan SMK3 adalah program tahunan yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan di berbagai perusahaan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Penilaian SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen, dan didasarkan pada penerapan prosedur dan kesesuaianya dengan perundangan dan peraturan yang berlaku. Sertifikasi SMK3 diperbarui setiap tiga tahun.

Occupational Safety and Health Management System (SMK3)

All of RLU's HTI plantation companies and processing facilities in Jambi and in East Kalimantan managed by PT Lestari Asri Jaya (LAJ), PT Wanamukti Wisesa (WMW) and PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC) respectively received the Gold Flag or Satisfactory Category in the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) assessment given by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.

The SMK3 Gold Flag is awarded to companies with a SMK3 implementation rate of more than 85%. The SMK3 Award is an annual program held by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia that aims to improve the implementation of safety and health policies in various companies in order to create a safe, efficient and productive workplace. The SMK3 assessment is conducted by an independent audit institution, and is based on the implementation of procedures and their compliance with applicable laws and regulations. SMK3 certification is renewed every three years.



Sertifikat SMK3 PT LAJ, PT WMW, PT MKC Plantation dan PT MKC Remilling
SMK3 Certificates of PT LAJ, PT WMW, PT MKC Plantation and PT MKC Remilling

Program Rubberway

RLU mengikuti Program Rubberway melalui anak perusahaannya di Kalimantan Timur, PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC). Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan serta memberikan pelatihan pertanian di seluruh rantai suplai. Hingga Desember 2021, sejumlah 284 wawancara telah dilakukan melalui aplikasi ponsel Rubberway. Responden terdiri dari 238 smallholder dan 46 intermediary. Hasil ini mencapai 80.5% dari target, salah satu kendala utama adalah pandemi COVID-19.

Panelis dalam Dialog Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF)

Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF) mengadakan dialog keempat secara virtual pada 25 November 2021 dengan tema "Action for Global Impact". Sesi dialog ini menyorot bagaimana para pemimpin bisnis dapat memainkan peran penting dalam mengatasi deforestasi melalui rantai pasokan berkelanjutan yang juga mendukung agenda iklim, serta bagaimana komitmen pemimpin bisnis pasca UNFCCC COP 25, dan UNCBD COP15.

Mewakili RLU, Yasmine Sagita membagikan pengalaman dalam mengembangkan Wildlife Conservation Area (WCA) yang bertujuan merestorasi dan melindungi habitat Gajah Sumatera yang terancam punah dengan memastikan pengolahan yang berkelanjutan, menyediakan area jelajah dan bergungsi sebagai penyanga Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

JCAF merupakan sebuah platform kolaborasi yang terdiri dari sebelas lembaga, yaitu Cocoa Sustainability Partnership (CSP), Daemeter Consulting, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCS); Inisiatif Dagang Hijau (IDH); IPMI International Business School - Case Centre; Landscape Indonesia; Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL); Filantropi Indonesia; Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PIS Agro); and Tropical Forest Alliance (TFA).

Rubberway Program

RLU participated in the Rubberway Program through its subsidiary in East Kalimantan, PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC). The program aims to identify social and environmental risks and provide agricultural training throughout the supply chain. As of December 2021, a total of 284 interviews have been conducted through the Rubberway mobile app. Respondents consisted of 238 smallholders and 46 intermediaries. This result achieved 80.5% of the target, one of the main obstacles being the COVID-19 pandemic.

Panelists in the Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF) Dialogue

The Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF) held its fourth virtual dialogue on 25 November 2021 under the theme "Action for Global Impact". The dialogue session highlighted how business leaders can play a critical role in addressing deforestation through sustainable supply chains that also support the climate agenda, as well as how business leaders are committed post the UNFCCC COP 25, as well as the UNCBD COP15.

Representing RLU, Yasmine Sagita shared her experience in developing a Wildlife Conservation Area (WCA) that aims to restore and protect the habitat of endangered Sumatran Elephants by ensuring sustainable management, providing a home range and serving as a buffer for Bukit Tigapuluh National Park.

JCAF is a collaboration platform consisting of eleven institutions, namely Cocoa Sustainability Partnership (CSP), Daemeter Consulting, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCS); Inisiatif Dagang Hijau (IDH); IPMI International Business School - Case Centre; Landscape Indonesia; Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL); Filantropi Indonesia; Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PIS Agro); and Tropical Forest Alliance (TFA).

BAB | CHAPTER 1
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama
PT Royal Lestari Utama at a Glance

BAB | CHAPTER 2
Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan
Good Corporate Governance, Ethics and Compliance

BAB | CHAPTER 3
Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)

BAB | CHAPTER 4
Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan
Partnerships and Stakeholder Engagement

BAB | CHAPTER 5
Capaian Lingkungan
Environmental Highlights

BAB | CHAPTER 6
Capaian Sosial
Social Highlights

BAB | CHAPTER 7
Capaian Produksi
Production Highlights

BAB | CHAPTER 8
Keterlibatan Karyawan
Employee Engagement

BAB | CHAPTER 9
Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)

BAB | CHAPTER 10
Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD
Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

Pembicara dalam Dutch-Indonesia Private Sector's Engagement in the Race to Zero

Pada 28 September 2021 Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Kedutaan Belanda di Indonesia mengadakan webinar Dutch-Indonesia Private Sector's Engagement in the Race to Zero yang menyorot peran perusahaan di Belanda dan Indonesia dalam mengatasi tantangan iklim dan keberlanjutan. Perusahaan yang diundang dalam webinar ini membagikan pandangan mereka tentang program, pengembangan dan praktik terbaik serta kolaborasi dengan pemerintah serta akademisi.

Yasmine Sagita dari RLU berkesempatan berbicara di sesi kedua diskusi, yang fokus membahas tentang kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi tantangan iklim. Dimoderatori oleh mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat Dinno Patti Djalal, Yasmine bercerita tentang kolaborasi RLU dengan berbagai pemangku kepentingan baik lembaga internasional maupun pemerintah Indonesia dalam mengembangkan karet alam berkelanjutan yang ramah lingkungan dan inklusif secara sosial. Diskusi dihadiri oleh 1.100 peserta secara virtual yang terdiri dari civitas akademika, sektor swasta dan lain sebagainya.

Panelis dalam Blue Earth Capital Annual Global Meeting

Pada 16 September 2021 Blue Earth Capital melaksanakan Annual Global Meeting (AGM) yang berlangsung di Swiss. Blue Earth Capital merupakan salah satu lembaga pendanaan asal Swiss yang berinvestasi melalui obligasi berkelanjutan yang diterbitkan oleh TLFF. Setiap tahun Blue Earth Capital melaksanakan AGM bagi para investor untuk membahas kinerja, portofolio dan tren pasar. Kegiatan AGM 2021 berlangsung secara hybrid karena adanya pembatasan akibat Covid-19. Dalam kesempatan ini, CEO RLU Jan Blaauw dan CSO Yasmine Sagita hadir secara virtual dan mempresentasikan kinerja dan pencapaian RLU dari sisi produksi, aspek lingkungan dan sosial.

Speaker on Dutch-Indonesian Private Sector's Engagement in the Race to Zero

On 28 September 2021 the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) in collaboration with the Embassy of the Netherlands in Indonesia held a webinar Dutch-Indonesia Private Sector's Engagement in the Race to Zero which highlighted the role of companies in the Netherlands and Indonesia in addressing climate and sustainability challenges. Companies invited to the webinar shared their views on program, developments and best practices as well as collaboration with government and academia.

RLU's Yasmine Sagita spoke in the second session, which focused on cross-sector collaboration in addressing climate challenges. Moderated by former Indonesian ambassador to the United States Dinno Patti Djalal, Yasmine talked about RLU's collaboration with various stakeholders from international organisations and the Indonesian government in developing sustainable natural rubber that is environmentally friendly and socially inclusive. The discussion was attended by a virtual audience of 1,100 participants from the academic community, private sector and others.

Panelists at the Blue Earth Capital Annual Global Meeting

On 16 September 2021, Blue Earth Capital held its Annual Global Meeting (AGM) which took place in Switzerland. Blue Earth Capital is one of the Swiss funding institutions that invests through sustainable bonds issued by TLFF. Every year Blue Earth Capital holds an AGM for investors to discuss performance, portfolio and market trends. The 2021 AGM activity took place in a hybrid manner due to restrictions due to Covid-19. On this occasion, RLU CEO Jan Blaauw and CSO Yasmine Sagita attended virtually and presented RLU's performance and achievements in terms of production, environmental and social aspects.

Panelis dalam Katadata Indonesia Data and Economic (IDE) Conference 2022

Bertemakan 'Together for the New Future', Katadata menyelenggarakan konferensi Indonesia Data and Economic (IDE) pada tanggal 5-8 April 2022 lalu, yang dilakukan secara virtual. Konferensi ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Katadata sebagai perusahaan media dan riset berita terkini terkait dengan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Pembahasan dalam IDE 2022 tersebut menyangkut beberapa agenda penting dalam pertemuan G20, seperti transformasi digital, inklusi keuangan, dan transformasi kesehatan. Yasmine Sagita, Chief Sustainability and Corporate Affairs RLU, berkesempatan untuk ikut serta membagikan pemahaman tentang keberlanjutan melalui topik Praktik Terbaik dalam Komoditas Berkelanjutan.

Narasumber dalam Podcast United Nations Environment Program (UNEP) and Green Finance Institute Financing Nature Road to COP 27

Menjelang COP 27, United Nations Environment Program (UNEP) berkolaborasi dengan Green Finance Institute (GFI) memproduksi podcast yang membahas pentingnya pembiayaan swasta dalam memberikan hasil positif bagi alam yang sangat dibutuhkan dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Dalam kesempatan ini, Yasmine Sagita berdiskusi mengenai pendanaan Tropical Landscape Finance Facility (TLFF), yakni obligasi keberlanjutan pertama di Asia-Pasifik, dan juga berbagi cerita tentang perjalanan keberlanjutan RLU, yang banyak berkiprah dalam program konservasi dan kemasyarakatan.

Kerja sama dengan Partnership for Forest (P4F)

Pada 10 Juni 2022, Partnership for Forest (P4F) melaksanakan pertemuan yang mengundang para delegasi dari seluruh dunia yang terdiri dari kolega, investor, pemerintah, pakar keberlanjutan, dan lembaga pembiayaan pembangunan untuk saling terhubung, berbagi wawasan dan solusi, serta mengeksplorasi karya besar bisnis dan proyek ramah hutan yang inovatif. Forum ini diselenggarakan setiap tahun, dan pada tahun ini P4F mengadakan secara langsung di Kota London.

RLU hadir dalam kegiatan tersebut bersama dengan para delegasi lainnya untuk mempresentasikan capaian dan tantangan mengenai ruang hutan dan tata guna lahan, melalui serangkaian sesi yang interaktif.

Panelists at Katadata Indonesia Data and Economic (IDE) Conference 2022

With the theme of 'Together for the New Future', Katadata held the Indonesia Data and Economic (IDE) conference on 5-8 April 2022, which was conducted virtually. This conference is an annual agenda organised by Katadata as a media and research company for the latest news related to the economy and business in Indonesia. The discussion in IDE 2022 concerned several important agendas in the G20 meeting, such as digital transformation, financial inclusion, and health transformation. Yasmine Sagita, Chief Sustainability and Corporate Affairs of RLU, had the opportunity to participate in sharing her understanding of sustainability through the topic of Best Practices in Sustainable Commodities.

Speaker in the Podcast of the United Nations Environment Programme (UNEP) and Green Finance Institute Financing Nature Road to COP 27

Ahead of COP 27, the United Nations Environment Programme (UNEP) in collaboration with the Green Finance Institute (GFI) produced a podcast discussing the importance of private finance in delivering positive outcomes for nature that are urgently needed in climate mitigation and adaptation. Yasmine Sagita discusses the funding of the Tropical Landscape Finance Facility (TLFF), the first sustainability bond in the Asia-Pacific, and also shares the sustainability journey of RLU, which works on conservation and community programmes.

Collaboration with Partnership for Forest (P4F)

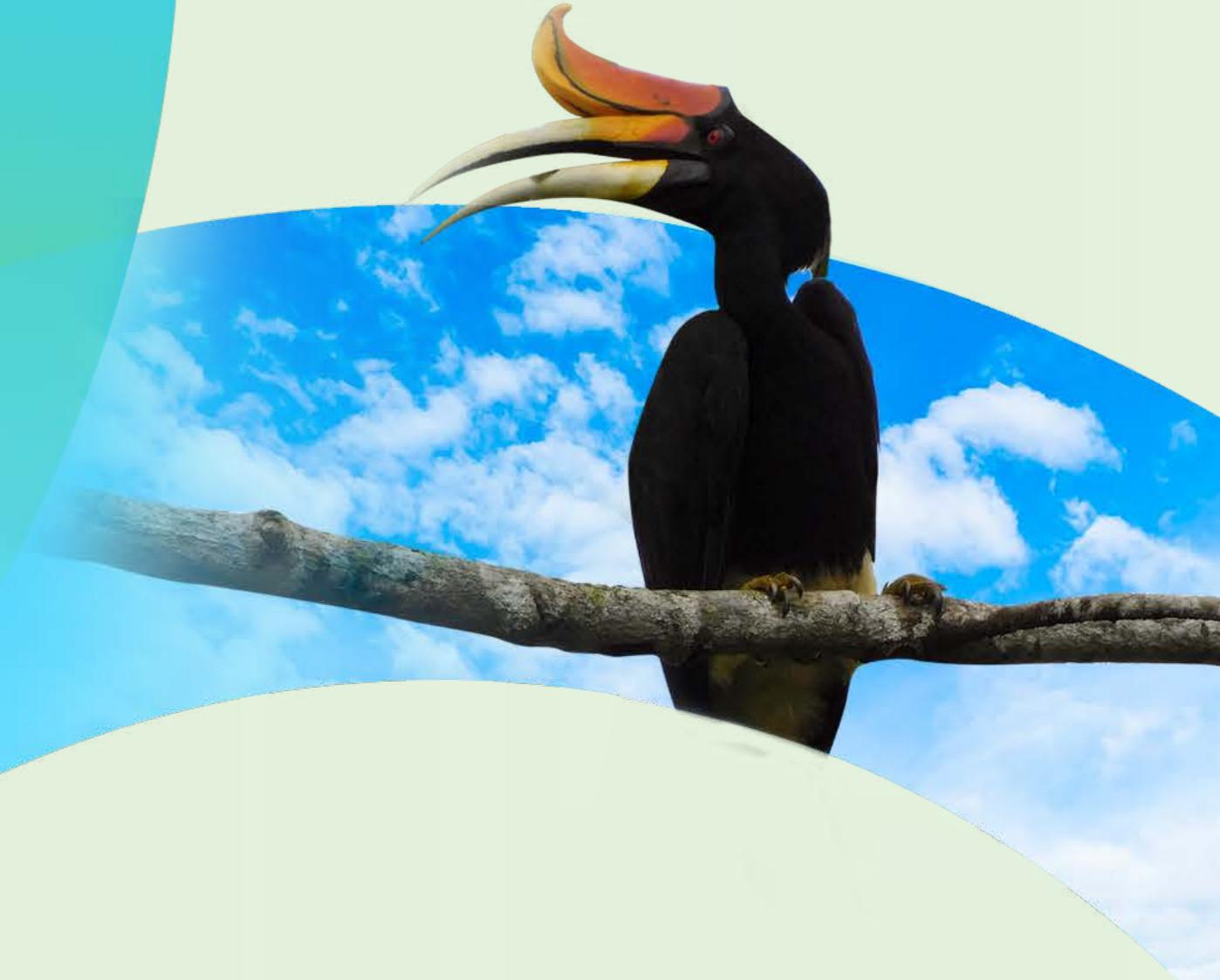
On 10 June 2022, the Partnership for Forest (P4F) convened a gathering of delegates from around the world consisting of colleagues, investors, governments, sustainability experts, and development finance institutions to connect, share insights and solutions, and explore the great work of innovative forest-friendly businesses and projects. The forum is organised annually, and this year P4F held it live in the City of London.

RLU attended the event along with other delegates to present achievements and challenges on forest space and land use, through a series of interactive sessions.

5

Program Lingkungan

Environmental Program



Capaian Program Lingkungan Environmental Program Outcomes

Total luas area Hutan Tanaman Industri (HTI) RLU di Jambi dan Kalimantan Timur 88,761 ha, dan total area yang dialokasikan untuk konservasi adalah 44%, hal ini lebih tinggi dari yang disyaratkan dalam Undang-undang yakni sebesar 10%. Di Jambi, 28.295 ha atau 40% area HTI disisihkan sebagai kawasan lindung dan berfungsi sebagai zona penyangga penting di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Di Kalimantan Timur, 11.024 ha atau 61% dari area HTI disediakan sebagai area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau High Conservation Value (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) atau High Carbon Stock (HCS). Pada tahun 2019, RLU mulai memperbarui penilaian HCV/HCS 2015 untuk menghasilkan Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu. Ini berfungsi sebagai panduan bagi perusahaan untuk memperbarui delineasi area HCV dan HCS serta rekomendasi untuk manajemen dan pemantauan mereka.

The total area of RLU's Industrial Plantation Forest (HTI) in Jambi and East Kalimantan is 88,761 ha, and the area allocated for conservation is 32%, higher than the 10% required by the law. In Jambi, 18,690 ha or 25% of the HTI area is set aside as a protected area and serves as an important buffer zone around Bukit Tigapuluh National Park. In East Kalimantan, 9,874 ha or 55% of the HTI area is reserved as High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) areas. In 2019, RLU began updating its 2015 HCV/HCS assessment to produce an Integrated Conservation and Land Use Plan. This serves as a guide for the Company to update the delineation of HCV and HCS areas and recommendations for their management and monitoring.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

Penilaian terpadu HCV/HCS 2019 di RLU dilakukan oleh penilai berlisensi dari HCV Network dan HCSA Steering Committee, dan laporannya ditinjau oleh HCV/HCS Quality Panel. Pada tanggal 22 Juli 2021, laporan penilaian HCV/HCS anak perusahaan RLU, [PT Multi Kusuma Cemerlang](#), dinilai memuaskan dan ringkasan publik dari laporan penilaian tersebut juga dipublikasikan di situs web HCV Network. Juga di awal tahun 2022, [PT Lestari Asri Jaya \(LAJ\)](#) dan [PT Wanamukti Wisesa \(WW\)](#) mendapatkan hasil penilaian HCV/HCS Integrated Assessment yang memuaskan dari HCVRN dan HCSA. Lebih lanjut tentang laporan HCV HCS RLU Group dapat ditemukan di situs web HCV Network.

Selama 2021, RLU telah berpatroli selama total 6.203 hari yang menempuh jarak 157.115 kilometer, yang merupakan keseluruhan dari total patroli rutin dan juga patroli gabungan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kondisi pandemi masih mempengaruhi mobilitas program konservasi khususnya aktivitas-aktivitas yang melibatkan kelompok ataupun tatap muka. Hal ini menyebabkan capaian beberapa kegiatan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

The 2019 HCV/HCS integrated assessment at RLU was conducted by licensed assessors from the HCV Network and HCSA Steering Committee, and the report was reviewed by the HCV/HCS Quality Panel. On 22 July 2021, the HCV/HCS assessment report of RLU's subsidiary [PT Multi Kusuma Cemerlang](#) was declared satisfactory and a public summary of the assessment report was also published on the HCV Network website. Also in early 2022, [PT Lestari Asri Jaya \(LAJ\)](#) and [PT Wanamukti Wisesa \(WW\)](#) received satisfactory results of HCV/HCS Integrated Assessment by HCVRN and HCSA. More about the RLU Group HCV HCS report can be found on the HCV Network website.

During 2021, RLU has patrolled for a total of 6,203 days covering 157,115 kilometres, which is the sum total of routine patrols as well as joint patrols with Bukit Tigapuluh National Park. The pandemic is still affecting the mobility of conservation program, especially activities that involve groups or face-to-face meetings. This led to lower achievements in some activities than the previous year.

Ikhtisar Pelestarian / Conservation Highlights

KPI	2019	2020	2021	2022*
Ranger Personnels / Personil Penjaga Hutan	Jambi: 12 Kaltim: 12	Jambi: 12 Kaltim: 7	Jambi: 12 Kaltim: 7	Jambi: 12 Kaltim: 7
Jumlah Hari Kerja Patroli / Patrol Working Days	Jambi: 2,936 Kaltim: 2,109	Jambi: 3,014 Kaltim: 1,917	Jambi: 2,843 Kaltim: 1,465	Jambi: 1,882 Kaltim: 1,214
Cakupan Patroli / Patrol Coverage (Km)	Jambi: 66,943 Kaltim: 24,729	Jambi: 83,015 Kaltim: 42,796	Jambi: 75,211 Kaltim: 50,083	Jambi: 48,895 Kaltim: 18,867
Sosialisasi / Socialization	Jambi: 148 Kaltim: 43	Jambi: 241 Kaltim: 53	Jambi: 174 Kaltim: 26	Jambi: 174 Kaltim: 9
Satwa Liar Terdeteksi / Wildlife Presence Detected	Jambi: 378 Kaltim: -	Jambi: 329 Kaltim: 161	Jambi: 242 Kaltim: 821	Jambi: 182 Kaltim: 84
Pelatihan / Training	Jambi: 4 Kaltim: 2	Jambi: 3 Kaltim: 2	Jambi: 1 Kaltim: -	Jambi: 8 Kaltim: 5

Ikhtisar Pelestarian / Conservation Highlights

KPI	2019	2020	2021	2022*
Restorasi / Restoration	a. Pohon Asli Tertanam / Native Trees Planted Jambi: 2,234 Kaltim: -	a. Pohon Asli Tertanam / Native Trees Planted Jambi: 1,827 Kaltim: 1,947	a. Pohon Asli Tertanam / Native Trees Planted Jambi: 4,389 Kaltim: 222	a. Pohon Asli Tertanam / Native Trees Planted Jambi: 1,766 Kaltim: -
b. Luas Area / Areas Equivalent	b. Luas Area / Areas Equivalent Jambi: 13.3 Ha Kaltim: -	b. Luas Area / Areas Equivalent Jambi: 11.69 Ha Kaltim: 12.46 Ha	b. Luas Area / Areas Equivalent Jambi: 28.16 Ha Kaltim: 1.4 Ha	b. Luas Area / Areas Equivalent Jambi: 11.30 Ha Kaltim: 0 Ha
c. Regenerasi Alami / Natural Regeneration	c. Regenerasi Alami / Natural Regeneration Jambi: - Kaltim: -	c. Regenerasi Alami / Natural Regeneration Jambi: 663 Ha Kaltim: 21 Ha	c. Regenerasi Alami / Natural Regeneration Jambi: 878 Ha Kaltim: 44 Ha	c. Regenerasi Alami / Natural Regeneration Jambi: 878 Ha Kaltim: 44 Ha

Kerja sama LAJ & TNBT / LAJ & TNBT Cooperation

KPI	2019	2020	2021	2022*
Jumlah Hari Kerja Patroli / Patrol Working Days	760	434	500	80
Cakupan Patroli / Patrol Coverage (Km)	TNBT: 11,888 TNBT+Ranger: 35,417	TNBT: 8,796 TNBT+Ranger: 22,914	TNBT: 7,973 TNBT+Ranger: 23,164	TNBT: 2,369 TNBT+Ranger: 5,272
Sosialisasi / Socialization	5	5	3	3
Pelatihan / Training	3	1	1	-
Satwa Liar Terdeteksi / Wildlife Presence Detected	a. Pemasangan Kamera Trap / Camera Trap Installation: -	a. Pemasangan Kamera Trap / Camera Trap Installation: 10 titik / point	a. Pemasangan Kamera Trap / Camera Trap Installation: 30 titik / point	a. Pemasangan Kamera Trap / Camera Trap Installation: 30 titik / point
	b. Identifikasi Satwa Liar / Wildlife identification: 42 Jenis / Species	b. Identifikasi Satwa Liar / Wildlife identification: 63 Jenis / Species	b. Identifikasi Satwa Liar / Wildlife identification: 63 Jenis / Species	b. Identifikasi Satwa Liar / Wildlife identification: 63 Jenis / Species

* Progess RLU per September 2022 / RLU progess as of September 2022

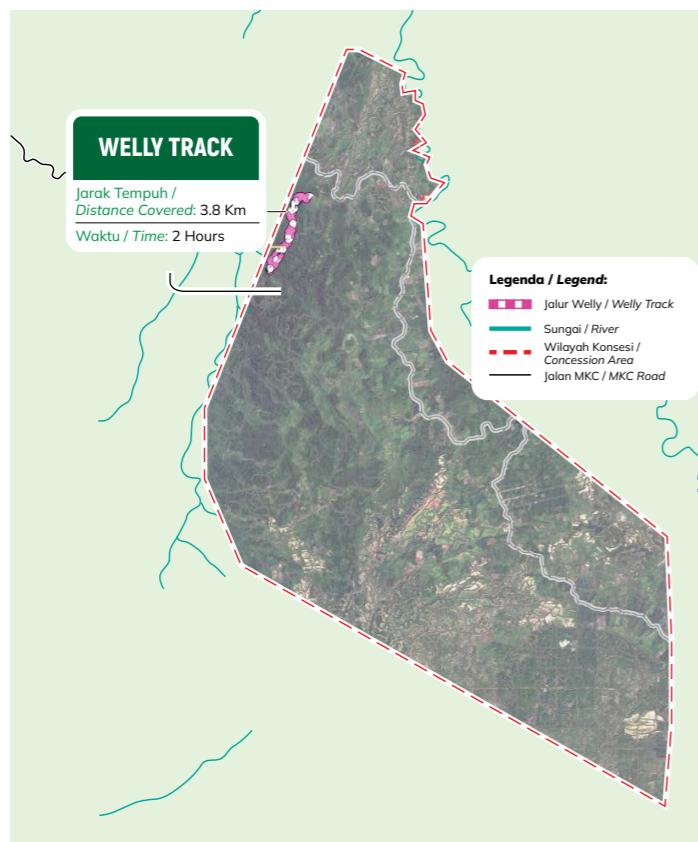
Pengelolaan Habitat Habitat Management

Perlindungan Kawasan Hutan & pemantauan area konservasi secara umum mencakup patroli kawasan hutan sebagai satu upaya dalam pengelolaan dan pemantauan area HCV dan HCS. Monitoring dilakukan oleh penjaga hutan yang terlatih dan berpengalaman. Di kawasan hutan HTI RLU di Jambi dan Kalimantan Timur, kami membangun jalur hutan untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati bersama ekosistem, pengembangan penelitian, serta pendidikan dan wisata alam terbatas.

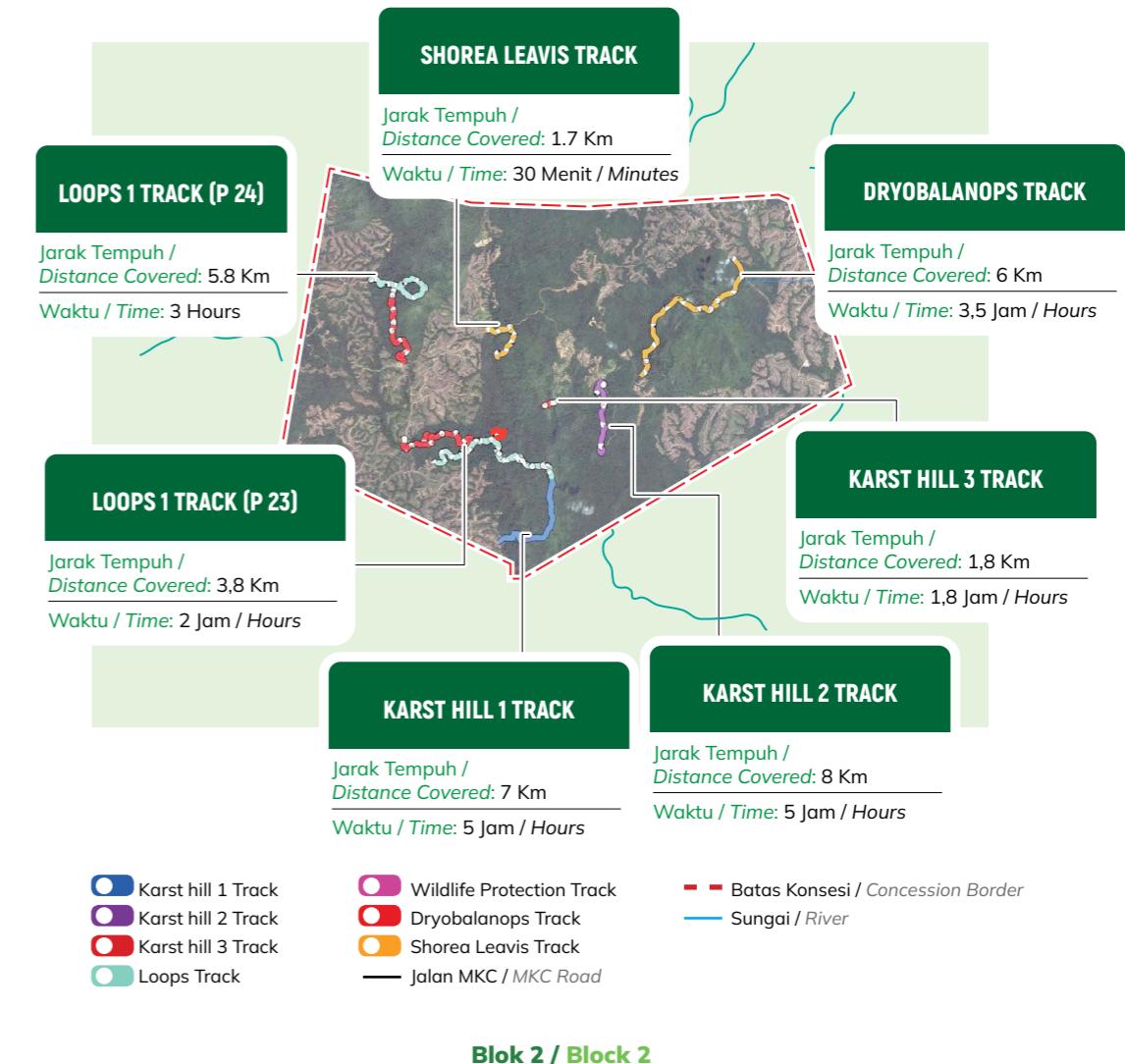
Dalam kawasan HCV blok 1 dan blok 2 HTI Kalimantan Timur, terdapat 7 jalur hutan dengan variasi panjang dan perkiraan waktu tempuh. Pemeliharaan jalur hutan rutin dilakukan oleh penjaga hutan kami, termasuk memeriksa kondisi jalur hutan seperti jembatan, jalan setapak, atau tangga yang mungkin perlu diperbaiki, pohon atau cabang besar yang perlu dibersihkan dengan peralatan khusus seperti gergaji mesin, dan juga area yang mungkin perlu diperbaiki karena erosi tanah atau genangan air.

Forest Area Protection & conservation area monitoring generally includes patrolling forest areas in an effort in managing and monitoring HCV and HCS areas. Monitoring is conducted by trained and experienced rangers. In RLU's HTI forest areas in Jambi and East Kalimantan, we build forest trails for protection and security activities, inventory and monitoring of biological resources along with ecosystems, research development, and limited education and nature tourism.

There are 7 forest trails within the HCV area of block 1 and block 2 of East Kalimantan HTI with varying lengths and approximate travelling times. Routine forest path maintenance is carried out by our rangers, including checking forest path conditions such as bridges, paths, or stairs that may need repair, trees or large branches that need to be cleared with specialised equipment such as chainsaws, and also areas that may need repair due to soil erosion or standing water.



Blok 1 / Block 1



Pengelolaan habitat RLU juga mencakup aktivitas restorasi dan rehabilitasi di kawasan konservasi. Selain kegiatan penanaman pohon, restorasi juga mencakup pengumpulan benih dan pembibitan. Ada 10.336 koleksi bibit tanaman asli di area konservasi Jambi dan Kalimantan Timur. Sementara itu, kegiatan penanaman diprioritaskan pada hutan tidak produktif yang Bernilai Konservasi Tinggi. Untuk tahun 2021 RLU telah melakukan penanaman pohon tanaman asli sebanyak 11.694 pohon atau setara 74,84 ha. Penanaman difokuskan pada area Riparian, kawasan bekas kebakaran dan di area bekas tanaman pokok.

The management of RLU habitats also includes restoration and rehabilitation activities in conservation areas. In addition to tree planting activities, restoration also includes seed collection and nurseries. There are 10,336 native plant seedling collections in Jambi and East Kalimantan conservation areas. Meanwhile, planting activities are being prioritized in unproductive forests of High Conservation Value. For 2021, RLU has planted 11,694 native plant trees or equivalent to 74.84 ha. Planting is focused on Riparian areas, ex-fire areas, and areas of former staple crops.

Pengelolaan Spesies Satwa Liar (Perlindungan Fauna)

Wildlife Species Management (Fauna Protection)

Penilaian NKT dan SKT mengkonfirmasi terdapat Gajah Sumatera di area HTI Lestari Asri Jaya (LAJ) dan Orangutan Kalimantan di HTI Multi Kusuma Cemerlang (MKC), yang keduanya merupakan spesies yang terancam punah. Taman Nasional Bukit Tigapuluh, yang berbatasan langsung dengan HTI RLU di Jambi, adalah rumah bagi sekitar ±150 ekor Gajah Sumatera individu (hampir 10% dari populasi liar saat ini), menjadikan daerah ini salah satu area prioritas tertinggi untuk konservasi gajah. RLU juga mendirikan Wildlife Conservation Area atau Wilayah Cinta Alam (WCA) sebagai penyangga Taman Nasional yang berfungsi sebagai habitat dan ruang jelajah Gajah Sumatera.

Kami memiliki penjaga hutan yang ditugaskan khusus untuk memantau pergerakan, posisi dan mengidentifikasi dan mencatat tanda-tanda Gajah Sumatera dan Orangutan. Ranger diberi pelatihan khusus untuk memahami jangkauan satwa dan bagaimana mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar.

RLU dan anak perusahaannya, MKC, di HTI Kalimantan Timur juga telah melakukan penelitian tentang Orangutan, bekerja sama dengan Pusat Ekologi dan Konservasi untuk Studi Tropis (Ecositrop). Penelitian ini dilakukan untuk menentukan penyebaran dan distribusi orangutan dan habitatnya. Pemantauan rutin orangutan berlanjut meskipun penelitian telah selesai dengan tujuan untuk mengurangi konflik antara Orangutan dan manusia.

Keberadaan satwa liar lainnya juga dipantau oleh para penjaga hutan melalui kegiatan patroli, dan pemasangan kamera jebak. Identifikasi keberadaan satwa diketahui dari perjumpaan langsung, penemuan jejak (kaki, cakaran dan kotoran) dan keberadaan sarang. Pada 2021, RLU memasang 30 kamera jebak di area konservasi Jambi dan Kalimantan Timur.

HCV and HCS assessments confirmed the presence of Sumatran Elephants in the Lestari Asri Jaya (LAJ) HTI area and Bornean Orangutans in the Multi Kusuma Cemerlang (MKC) HTI area, both of which are endangered species. Bukit Tigapuluh National Park, which borders RLU's HTI plantation in Jambi, is home to approximately ±150 individual Sumatran Elephants (nearly 10% of the current wild population), making this area one of the highest priority areas for elephant conservation. RLU also established a Wildlife Conservation Area (WCA) as a buffer to the National Park that serves as a habitat and home range for Sumatran Elephants.

We have specially assigned rangers to monitor the movements, positions and identify and record signs of Sumatran Elephants and Orangutans. Rangers are given specialized training to understand the range of the animals and how to reduce human-wildlife conflict.

RLU and its subsidiary, MKC, in the East Kalimantan HTI plantation have also conducted research on Orangutans, in collaboration with the Ecology and Conservation Centre for Tropical Studies (Ecositrop). This research was conducted to determine the distribution of orangutans and their habitat. Regular monitoring of orangutans continues despite the completion of the research with the aim of reducing conflicts between orangutans and humans.

The presence of other wildlife is also monitored by rangers through patrols, and camera traps. Identification of animal presence is based on direct encounters, tracks (feet, scratches and faeces) and nests. In 2021, RLU installed 30 camera traps in Jambi and East Kalimantan conservation areas.

Daftar Flora dan Fauna Prioritas yang Hidup di Dalam Area RLU

List of Priority Flora and Fauna Living within the RLU Area

Flora				
No	Nama Umum Common Name	Nama Ilmiah Scientific Name	Status (IUCN/Regulasi Indonesia) Status (IUCN/Indonesian Regulations)	Lokasi Location
1	Keruing	<i>Dipterocarpus humeratus</i>	CR / NP	Jambi
2	Meranti kuning	<i>Shorea peltata</i>	CR / NP	Jambi
3	Balau	<i>Parashorea lucida</i>	CR / NP	Jambi
4	Mersawa	<i>Anisoptera sp.</i>	EN / NP	Jambi
5	Gaharu	<i>Aquilaria beccariani</i>	CR / NP	Jambi; Ekal
6	Meranti	<i>Dipterocarpus tempehes Slooten (Endemic)</i>	CR / NP	Ekal
7	Kapur	<i>Dryobalanops oblongifolia subsp. <i>occidentalis</i> P.S.Ashton</i>	EN / NP	Ekal

Fauna				
No	Nama Umum Common Name	Nama Ilmiah Scientific Name	Status (IUCN/Regulasi Indonesia) Status (IUCN/Indonesian Regulations)	Lokasi Location
1	Sumatran Elephant	<i>Elephas maximus sumatranus</i>	CR / P	Jambi
2	Sumatran Tiger	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	CR / P	Jambi
3	Agile Gibbon	<i>Hylobates agilis</i>	EN / P	Jambi
4	Malay Tapir	<i>Tapirus indicus</i>	EN / P	Jambi
5	Clouded Leopard	<i>Neofelis diardi</i>	EN / P	Jambi; Ekal
6	Helmeted Hornbill	<i>Rhinoplax vigil</i>	CR / P	Jambi; Ekal
7	Sambar Deer	<i>Cervus unicolor</i>	VU / P	Jambi; Ekal
8	Borneo Orangutan	<i>Pongo pygmaeus morio</i>	CR / P	Ekal
9	Flat Headed Cat	<i>Prionailurus planiceps</i>	EN / P	Ekal
10	Bornean Gibbon	<i>Hylobates muelleri</i>	EN / P	Ekal

CR Critically Endangered (Terancam Punah)

EN Endangered (Terancam)

VU Vulnerable (Rentan)

P: Protected (Dilindungi)

NP: Not Protected (Tidak Dilindungi)

Mitigasi Konflik Satwa Liar dan Manusia (Konflik Gajah dan Konflik Orangutan)

Wildlife and Human Conflict Mitigation (Elephant Conflict and Orangutan Conflict)

Area HTI RLU Jambi dan Kalimantan Timur adalah kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) dengan habitat hewan, dan ini bersentuhan langsung dengan wilayah operasional, pemukiman, dan perkebunan kami. Hal ini dapat menyebabkan konflik manusia-satwa liar, terutama di area HTI Jambi di mana telah terjadi beberapa pertemuan antara masyarakat dengan Gajah Sumatera. Pertemuan ini berpotensi menimbulkan efek negatif pada manusia, masyarakat, budaya, konservasi gajah dan lingkungan karena melibatkan keselamatan masyarakat serta perlindungan spesies yang terancam punah.

Untuk memitigasi risiko konflik antara manusia dan gajah, RLU berkomitmen untuk meningkatkan upaya mengurangi kerugian yang terjadi pada manusia dan gajah. Upaya yang telah kami lakukan adalah memberikan pelatihan tentang mitigasi konflik gajah dan manusia, terutama kepada petani Kelompok Tani Hutan (KTH) PT LAJ dan Orang Rimba/Masyarakat Adat. RLU memfasilitasi pelatihan Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia dengan pelatih dari FZS kepada anggota Kelompok Tani Hutan dari Desa Pemayungan dan Semambu. Instansi dan lembaga lain yang berpartisipasi adalah Warsi, ABT, BKSDA dan TNBT.

Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah masyarakat khususnya KTH dapat mengimplementasikan secara aman materi pelatihan dalam penggiringan dan blokade Gajah Sumatera, agar tidak masuk ke ladang dan merusakan tanaman masyarakat.

Di area HTI Kalimantan Timur, kami telah mengembangkan model yang baik untuk konservasi Orangutan. Lebih dari 11,024 ha atau 61% dari area HTI yang didedikasikan untuk melestarikan keanekaragaman hayati termasuk Orangutan. Penyediaan area untuk habitat Orangutan adalah salah satu upaya RLU untuk mengurangi resiko terjadinya konflik antara manusia dan Orangutan. Upaya mitigasi lain yang telah kami lakukan adalah patroli identifikasi keberadaan Orangutan di dalam area perusahaan dengan peningkatan intensitas patroli dari tim konservasi. Pada bulan Juli sampai dengan Oktober patroli ditingkatkan ketika ketersediaan sumber pakan rendah.

The Jambi and East Kalimantan RLU HTI areas are High Conservation Value (HCV) areas with animal habitats, and these are in direct contact with our operational areas, settlements, and plantations. This could potentially lead to human-wildlife conflicts, especially in the Jambi HTI area where there have been several encounters between communities and Sumatran Elephants. These encounters have the potential to have negative effects on people, communities, culture, elephant conservation and the environment as they involve community safety as well as the protection of endangered species.

To mitigate the risk of human-elephant conflict, RLU is committed to increasing efforts to reduce harm to both humans and elephants. Our efforts have included providing training on the elephant and human conflict mitigation, especially to PT LAJ's Forest Farmers Group (KTH) farmers and Orang Rimba/Indigenous Peoples. RLU facilitated Elephant and Human Conflict Mitigation training with trainers from FZS to Forest Farmer Group members from Pemayungan and Semambu Villages. Other participating agencies and institutions were Warsi, ABT, BKSDA and TNBT.

The expected result of this training is that the community, especially the Forest Farmers Group, can implement the training material for driving and blocking Sumatran elephants, so that they do not enter the fields and damage the community's crops.

In our East Kalimantan HTI plantation area, we have been developing a successful model for Orangutan conservation. More than 11,024 ha or 61% of our HTI area is dedicated to conserving biodiversity including Orangutans. Providing areas for Orangutan habitat is one of RLU's efforts to reduce the risk of human-orangutan conflict. Other mitigation efforts that we have undertaken are patrols to identify the presence of Orangutans within the Company's area with increased patrol intensity from the conservation team. From July to October, patrols are increased when the availability of food sources is low.



Salah satu kelompok Gajah Sumatra yang tertangkap kamera di area anak usaha RLU, PT Lestari Asri Jaya, Jambi.

Pemantauan Hutan di Area Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT)

Forest Monitoring in High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) Areas

Sejak Juni 2020, RLU telah bermitra dengan Satelligence, penyedia layanan informasi dan data satelit dari Belanda, bekerja sama dengan &Green Fund dan P4F untuk memantau tutupan lahan di seluruh HTI, khususnya kawasan hutan lindung di Kalimantan Timur dan Jambi.

Kemitraan ini memberikan data dan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk manajemen dan pemantauan regional yang lebih baik untuk membantu dalam implementasi kebijakan keberlanjutan kami sebagai bagian terpadu dari Rencana Kerja Sosial Lingkungan (ESAP), Rencana Manajemen WCA dan Rencana Perlindungan Bentang Alam (LPP). Mereka menyediakan peta tutupan lahan dari semua HTI RLU serta melaporkan tutupan hutan di kawasan lindung dan konservasi perusahaan.

Setiap gangguan atau pengurangan kawasan hutan ditindaklanjuti oleh perusahaan dengan melakukan pengecekan lapangan. Setiap informasi dilaporkan ke RLU dan mitra program lainnya sehingga langkah-langkah kolaboratif dapat diambil bersama-sama. Hasil pemantauan satelit adalah bagian dari LPP pada pemantauan area HTI, dan dipublikasikan dalam laporan ini.

Since June 2020, RLU has been partnering with Satelligence, a Dutch satellite data and information service provider, in collaboration with &Green Fund and P4F to monitor land cover across our HTI plantations, particularly the protected forest areas in East Kalimantan and Jambi.

This partnership provides the Company with the data and information needed for better regional management and monitoring to assist in the implementation of our sustainability policies as an integrated part of our Environmental Social Work Plan (ESAP), WCA Management Plan and Landscape Protection Plan (LPP). They provide land cover maps of all RLU HTIs as well as report on forest cover in the Company's protected and conservation areas.

The Company follows up on any disturbance or reduction of forest area by conducting field checks. Any information is reported to RLU and other partners so that collaborative measures can be taken together. Satellite monitoring results are part of the LPP on HTI area monitoring and are published in this report.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

Wilayah Cinta Alam (WCA) Wildlife Conservation Area (WCA)

Wilayah Cinta Alam atau Wildlife Conservation Area (WCA) adalah areal lindung yang ditetapkan oleh RLU pada tahun 2018 di dalam salah satu anak perusahaan di Jambi, PT Lestari Asri Jaya (LAJ). WCA merupakan suatu inisiatif untuk berkontribusi pada pelestarian jangka panjang Gajah Sumatera yang terancam punah.

Lokasi WCA strategis berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan berada di antara dua blok konsesi restorasi ekosistem PT ABT. WCA memiliki total area ±9.700 ha yang terdiri dari Cagar Hutan Mandelang seluas ±2.000 ha; Zona penyangga DPSL ke TNBT dan sungai dengan luas ±5.900 ha; dan area perkebunan karet di timur. Perusahaan telah berkomitmen untuk tidak mengembangkan perkebunan karet lebih jauh di dalam WCA.

Sebagian WCA adalah habitat alami bagi satwa liar dan di dalamnya terdapat Cagar Hutan Mandelang yang merupakan hutan alami. WCA merupakan bagian dari rencana untuk mengembangkan yang merupakan inisiatif oleh BKSDA Provinsi Jambi untuk melindungi daerah-daerah di mana satwa liar berkeliaran, khususnya Gajah Sumatera.

Melalui WCA kami memberikan perlindungan terhadap ±150 ekor Gajah Sumatera di daerah Taman Nasional Bukit Tigapuluh pada habitat mereka di konsesi PT LAJ, dan menunjuk enam penjaga hutan untuk berpatroli di WCA dan melakukan mitigasi ancaman. Lima fasilitator sosial juga telah ditunjuk untuk berkomunikasi dan membangun hubungan dengan masyarakat lokal yang tinggal di WCA.

Wildlife Conservation Area (WCA) is a protected area designated by RLU in 2018 within one of its Jambi subsidiaries, PT Lestari Asri Jaya (LAJ). The WCA is an initiative to contribute to the long-term conservation of the endangered Sumatran Elephant.

The WCA is strategically located adjacent to Bukit Tigapuluh National Park (TNBT) and between two PT ABT ecosystem restoration concession blocks. The WCA has a total area of ±9,700 ha comprising the Mandelang Forest Reserve of ±2,000 ha; the DPSL buffer zone to TNBT and the river of ±5,900 ha; and the rubber plantation area to the east. The Company has committed not to develop further rubber plantations within the WCA.

Most of the WCA is a natural habitat for wildlife and it contains the Mandelang Forest Reserve which is a natural forest. The WCA is part of a plan to develop which is an initiative by the Jambi Provincial BKSDA to protect areas where wildlife roam, particularly Sumatran Elephants.

Through the WCA we are providing protection to ±150 Sumatran Elephants in the Bukit Tigapuluh National Park area by their habitat in PT LAJ's concession and appointing six rangers to patrol the WCA and conduct threat mitigation. Five social facilitators have also been appointed to communicate and build relationships with local communities living in the WCA.

Highlight WCA / Highlight WCA

Kegiatan / Activity	Tahun / Year			
	2019	2020	2021	*2022
Total Hari Kerja Patroli / Total Patrol Days	1.171 hari dengan total 6 Rangers 1,171 days for a total of 6 Rangers	1.614 hari dengan total 6 Rangers 1,614 days for a total of 6 Rangers	1.395 hari dengan total 6 Rangers 1,395 days for a total of 6 Rangers	969 hari dengan total 6 Rangers 969 days for a total of 6 Rangers
Cakupan Patroli / Patrol Coverage (Km)	58,729 Km	37,726 Km	23,848 Km	14,750 Km

Kegiatan / Activity	Tahun / Year			
	2019	2020	2021	*2022
Pelatihan / Training	3	5	8	6
Restorasi / Restoration	N/A	2.595 bibit Demonstration Plot agroforestry yang terdiri dari 20 tipe bibit. 2,595 seeds Demonstration Plot agroforestry consisting of 20 types of seeds.	2.915 bibit Demonstration Plot agroforestry yang terdiri dari 18 tipe bibit. 2,915 seeds Demonstration Plot agroforestry consisting of 18 types of seeds.	2,600 bibit Demonstration Plot agroforestry yang terdiri dari 18 tipe bibit. 2,600 seedlings Demonstration Plot agroforestry consisting of 18 types of seedlings.

* Progess RLU per September 2022 / RLU proges as of September 2022



Perlindungan habitat dan satwa liar, serta mitigasi konflik satwa liar dengan manusia, dilakukan dengan fokus utama pada daerah sempadan sungai, daerah yang terkena dampak kebakaran, dan daerah karet yang telah dihapuskan untuk penanaman. Penanaman di kawasan lindung ini difokuskan pada pengayaan keanekaragaman tanaman yang menyediakan pakan yang cukup bagi gajah.

Gambar pertama adalah daerah sempadan sungai WCA yang ditutupi oleh Mucuna. Seperti yang ditunjukkan pada gambar kedua, kami menghilangkan Mucuna sebagai salah satu strategi untuk memberikan batas alami bagi habitat Gajah Sumatera. YTD 2021, tim ranger telah membersihkan 17 ha Mucuna dan 3.277 bibit ditanam, setara dengan 14,04 Ha. Kita dapat melihat populasi Gajah Sumatera yang terus bertambah dengan banyaknya anak Gajah baru (bayi Gajah) dalam kelompok tersebut. Area tersebut kini telah menjadi batas alami gajah yang mengurangi mereka memasuki area produksi.

Habitat and wildlife protection, as well as human-wildlife conflict mitigation, is carried out with main focus on riparian areas, areas affected by fires and written off rubber areas for planting. Planting in these protected areas focuses on enriching plant diversity providing sufficient elephant foods.

The first picture is a WCA riparian area that is covered by Mucuna. As shown in picture two, we removed the Mucuna as one of the strategies to provide a natural boundary for the Sumatran Elephant habitat. YTD 2021, the ranger team has cleaned off 17 ha of Mucuna and 3,277 seedlings were planted, equivalent to 14.04 Ha. We can see a growing population of Sumatran Elephants by the number of new calves (Elephant babies) in the group. The area has now become a natural boundary of elephants that mitigates them entering the production area.

6

Program Sosial Social Program



Capaian Program Sosial Social Program Outcomes

RLU bermitra dengan masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan hutan menuju hutan yang lebih berkelanjutan. Melalui program Community Partnership Program (CPP) kami meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya petani kecil, yang dalam jangka panjang bertujuan untuk memberikan alternatif penghidupan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Program ini juga dimaksudkan untuk menyelesaikan klaim dan konflik tanah dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sebanyak 3.650 individu telah mendapatkan dampak yang positif dari CPP melalui berbagai kegiatan diantaranya pelatihan budidaya karet produktif, program pertanian terpadu, dan penyerapan hasil karet masyarakat. Selama tahun 2021, RLU juga melibatkan UMKM di sekitar wilayah kerja ke dalam rantai supply perusahaan. Daftar UMKM sebagai berikut:

1. BUMDes Teluk Kepayang Indah, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah
2. BUMDes Cahaya Intan, Desa Melako Intan
3. Koperasi Benteng Kurung, Desa Balai Rajo
4. CV. Kaisar Bersaudara 2, Bengalon Village

RLU is partnering with the community to jointly maintain and preserve the forest for a more sustainable forest. Through the Community Partnership Program (CPP), we increase the capacity of the community especially smallholders, which in the long term aims to provide alternative livelihoods and economic improvement for the community. The program is also intended to resolve land claims and conflicts and ensure compliance with applicable regulations.

Through various activities such as training on productive rubber cultivation, integrated farming program, and absorption of community rubber products, a total of 3,650 persons have been benefited from the CPP. During 2021, RLU also involved neighbouring MSMEs into the Company's supply chain. The list of MSMEs is as follows:

1. BUMDes Teluk Kepayang Indah, Teluk Kepayang Island Indah Village
2. BUMDes Cahaya Intan, Melako Intan Village
3. Benteng Kurung Cooperative, Balai Rajo Village
4. CV Kaisar Bersaudara 2, Bengalon Village

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

Salah satu praktik pengadaan yang disediakan oleh BUMDes dan koperasi adalah pengadaan beras yang diserap oleh Koperasi Karyawan di Jambi untuk memfasilitasi permintaan beras dari perusahaan. Nantinya beras tersebut akan diserahkan kepada tenaga penyadap (tapper) RLU.

Pada tahun 2021, RLU mendapatkan dukungan dan bekerja sama dengan Partnership for Forest (P4F) dan The Sustainable Trade Initiative (IDH) dalam mengembangkan program pemberdayaan petani kecil. Perusahaan juga mendapatkan rekognisi dari Bisnis Indonesia CSR Award (BISRA) sebagai The Best Award for Community Development/ Empowerment and Platinum Champion for Private Companies.

Terkait dengan isu sosial berikut ini adalah potensi dampak risiko dan rencana mitigasinya:

One of the procurement practices provided by BUMDes and cooperatives is the procurement of rice absorbed by Employee Cooperatives in Jambi to facilitate rice requests from the Company. Later, the rice will be distributed to RLU tappers.

In 2021, RLU received support and collaborated with Partnership for Forest (P4F) and The Sustainable Trade Initiative (IDH) in developing a smallholder empowerment program. The company was also recognised by the Bisnis Indonesia CSR Award (BISRA) as The Best Award for Community Development/ Empowerment and Platinum Champion for Private Companies.

Related to social issues, the following are the potential risk impacts and mitigation plans:

Isu/Fokus Utama Key Issue/Focus	Potensi Dampak Potential Impact	Rencana Mitigasi Mitigation Plan
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Pengembalian Lahan dan Relokasi Land Return and Relocation	<ul style="list-style-type: none"> Konflik sosial Penurunan tingkat penghidupan Social conflict Livelihood degradation 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan program Technical Assistance oleh pihak ketiga yang independen untuk memenuhi kepatuhan IFC PS 5, dengan membentuk: <ol style="list-style-type: none"> Kerangka kerja manajemen pengembalian lahan yang berkelanjutan yang berdasarkan prinsip Persetujuan atas Informasi Diawal Tanpa Paksaan (Padiatapa) Prosedur pengembalian lahan Kebijakan Hak Asasi Manusia Melaksanakan Social Economic Baseline dan Social Impact Assessment yang dilakukan pihak ketiga independen. Memberikan beberapa variasi opsi kepada pemilik klaim lahan Menyiapkan Alternative Dispute Resolution Melaksanakan program Community Partnership Program (CPP) yang berlandaskan pada Kemitraan Kehutanan Perhutanan Sosial. Dalam hal ini Kemitraan Kehutanan (CPP) dengan komoditas Karet dan atau agroforestry lainnya dengan memfasilitasi pemilik lahan dalam memperoleh SK Kemitraan Kehutanan dari Pemerintah untuk memperoleh Hak Kelola sesuai dengan peraturan perundangan dan melakukan kemitraan kehutanan karet dengan perusahaan. Bertujuan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat, perusahaan memberikan harga lebih tinggi dari harga di pasar kepada mitra petani kecil.
---	--	---

Isu/Fokus Utama Key Issue/Focus	Potensi Dampak Potential Impact	Rencana Mitigasi Mitigation Plan
Masyarakat Adat Indigenous Peoples	<ul style="list-style-type: none"> Konflik sosial Marginalisasi kelompok rentan Social conflict Marginalisation of vulnerable groups 	<ul style="list-style-type: none"> Sejak tahun 2018, RLU membangun Wildlife Conservation Area seluas 9.700 ha yang bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan jelajah bagi gajah juga memberikan area penghidupan bagi kelompok Orang Rimba, melalui program CPP kemitraan kehutanan. RLU menunjuk pihak ketiga independen untuk melakukan inventarisasi dan membentuk kerangka kerja masyarakat adat. RLU melakukan peningkatan dan pembaharuan kerangka kerja masyarakat adat untuk memenuhi kepatuhan IFC PS7 RLU membangun kesepakatan dengan Orang Rimba dan membangun program kemitraan NTFP/Agroforestry, untuk membangun alternatif penghidupan.

Masyarakat Adat Indigenous Peoples	<ul style="list-style-type: none"> Konflik sosial Marginalisasi kelompok rentan Social conflict Marginalisation of vulnerable groups 	<ul style="list-style-type: none"> Sejak tahun 2018, RLU membangun Wildlife Conservation Area seluas 9.700 ha yang bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan jelajah bagi gajah juga memberikan area penghidupan bagi kelompok Orang Rimba, melalui program CPP kemitraan kehutanan. RLU menunjuk pihak ketiga independen untuk melakukan inventarisasi dan membentuk kerangka kerja masyarakat adat. RLU melakukan peningkatan dan pembaharuan kerangka kerja masyarakat adat untuk memenuhi kepatuhan IFC PS7 RLU membangun kesepakatan dengan Orang Rimba dan membangun program kemitraan NTFP/Agroforestry, untuk membangun alternatif penghidupan.
		<ul style="list-style-type: none"> Since 2018, RLU has built a 9,700 ha Wildlife Conservation Area that aims to not only provide a roaming area for elephants but also provide a livelihood area for Orang Rimba groups, through the CPP forest partnership program. RLU appointed an independent third party to conduct an inventory and establish an indigenous peoples framework. RLU upgrades and updates the indigenous peoples framework to fulfill IFC PS7 compliance. RLU establishes an agreement with Orang Rimba and establishes NTFP/Agroforestry partnership program, to establish alternative livelihoods.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Kilasan Aspek Pengelolaan Sosial Masyarakat

Community Social Management Aspects Highlight

Deskripsi / Description	2019	2020	2021	2022*
Jumlah petani kecil karet tergabung dalam Community Partnership Program (CPP) dan dilibatkan dalam rantai pasok RLU. / Number of rubber smallholders who are members of the Community Partnership Programme (CPP) and are involved in the RLU supply chain.	333	611	730	856
Pekerjaan yang diberikan kepada supplier lokal / Jobs given to local suppliers	n/a	Jambi: 35 Kalimantan Timur: 163	Jambi: 16 Kalimantan Timur: 33	Jambi: 17 Kalimantan Timur: 13
Jumlah individu mendapatkan dampak positif dari program CPP / Number of individuals positively impacted by the CPP program	1.655	3.175	3.650	4.280
Jumlah individu mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas / Number of individuals receiving capacity building training	804	461	677	122 Jambi: 263 Kalimantan Timur: 198
Jumlah individu terlibat dalam kegiatan pertanian terpadu / Number of individuals involved in integrated farming activities	265	199	166	185
Kenaikan pendapatan (%) dari petani karet melalui Kemitraan Kehutanan / Increase of income of rubber farmers through Forestry Partnership (%)	Sampai dengan 20% / Up to 20%	Sampai dengan 20% / Up to 20%	Sampai dengan 30% / Up to 30%	Sampai dengan 30% / Up to 30%
Rata-rata produksi yang dihasilkan dari kegiatan CPP - Kemitraan Kehutanan Karet per bulan (kg) / Average production generated from CPP - Forestry Partnership Rubber activities per month (kg)	204 kg (KTH Karang Jaya)	1.172 kg (KTH Karang Jaya)	1.223 kg (KTH Karang Jaya)	4.177 kg (KTH Karang Jaya)
Total area (ha) CPP Pertanian Terpadu / Total area (ha) CPP Integrated Farming	8,38 ha	6,29 ha	6,66 ha	7,36 ha
Jumlah keluhan yang terdaftar / Number of grievances registered	n/a	9	12	1

* Progess RLU per September 2022 / RLU progres as of September 2022

Program CPP Petani Kecil Smallholder CPP Program

In-situ Smallholder Community Partnership Program (CPP) adalah program kerja sama dengan petani yang tinggal di dalam area HTI perusahaan. In-situ Smallholder Community Partnership Program (CPP) merupakan upaya jangka panjang yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat dan memberikan akses kepada masyarakat dengan menggunakan skema Perhutanan Sosial.

Hingga akhir 2021, sebanyak 242 keluarga di Jambi (LAJ dan WMW) dan 48 keluarga di Kalimantan Timur (MKC) terlibat dalam program ini. Dengan pelatihan peningkatan kapasitas yang diberikan kepada anggota komunitas CPP, termasuk teknik budidaya dan penyadapan karet yang tepat, rata-rata petani merasakan peningkatan pendapatan 30% dari kemitraan ini.

Total volume penyerapan karet di Jambi selama tahun 2021 adalah 93.846,5 kg dan total nilai transaksi Rp 1.126.249.613. RLU juga memberikan bantuan sarana produksi, pelatihan agroforestri, pelatihan kelembagaan, pelatihan peningkatan kapasitas karet, serta mempromosikan hasil agroforestri untuk ketahanan pangan petani.

Perusahaan juga mendorong perempuan untuk dapat berperan menunjang kehidupan keluarganya dalam mengelola pertanian dan kebun karet. Kini, empat Kelompok Wanita Tani (KWT) telah terbentuk dengan total anggota sebanyak 68 orang.

Anggota KWT dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembinaan mulai dari teknik menyadap/menderes pohon karet, memproduksi pupuk organik, mengembangkan pola agroforestry dengan tanaman usia pendek seperti sayur mayur dan jahe, serta perikanan. Kaum perempuan juga dibina agar lebih aktif dalam proses pemasaran dan mengembangkan produk pertanian.

The In-situ Smallholder Community Partnership Program (CPP) is a cooperation program with farmers living within the Company's HTI area. It is a long-term effort that aims to strengthen the social and economic stability of the community. The program aims to improve community livelihoods and provide access to communities using the Social Forestry scheme.

By the end of 2021, 242 families in Jambi (LAJ and WMW) and 48 families in East Kalimantan (MKC) were involved in the program. With capacity-building training provided to members of the CPP community, including proper rubber cultivation and tapping techniques, farmers on average experienced a 30% increase in income from this partnership.

The total volume of rubber absorption in Jambi during 2021 was 93,846.5 kg and the total transaction value was Rp 1,126,249,613. RLU also provides production facilities assistance, agroforestry training, institutional training, rubber capacity building training, and promotes agroforestry products for farmers' food security.

The Company also encourages women to play a role in supporting their families in managing farms and rubber plantations. Now, four Women Farmers Groups (KWT) have been formed with a total of 68 members.

KWT members are involved in various coaching activities ranging from rubber tapping techniques, producing organic fertiliser, developing agroforestry patterns with short-lived crops such as vegetables and ginger, and fisheries. Women are also trained to be more active in the marketing process and developing agricultural products.

Testimoni Testimonials



&Green Fund berinvestasi di RLU sejak tahun 2019 untuk mendukung pengembangan perkebunan karet yang inklusif dan berkelanjutan, yang membawa dampak positif pada mata pencarian masyarakat sekitar, serta pada keragaman hayati yang kaya di lanskap tersebut. Visi &Green adalah untuk mencapai perubahan transformasional dengan menciptakan cetak biru untuk rantai pasokan pertanian berkelanjutan di daerah Tropis. Dengan investasi dari &Green, RLU berupaya untuk menciptakan cetak biru yang dapat diadopsi oleh perusahaan karet lainnya dalam melindungi lanskap dan mengangkat populasi pedesaan yang bergantung pada sumber daya alam di lanskap yang sama atau serupa.

Inti dari ambisi ini adalah pembentukan Kawasan Konservasi Satwa Liar (WCA) di konsesi RLU di Jambi, sebagai penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (BTPNP), yang merupakan habitat bagi megafauna yang terancam punah seperti harimau, beruang, dan gajah, di antara satwa liar terestrial lainnya, burung, dan spesies pohon. Sejak didirikan pada tahun 2018, dan dengan dukungan dari &Green, Kemitraan untuk Hutan, Badan Taman Nasional Indonesia dan mitra lainnya, RLU telah berhasil melindungi hampir 10.000 ha WCA, dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak lain di lanskap untuk mengurangi tekanan perambahan di semua kawasan lindung di lanskap dan mengurangi risiko konflik manusia-satwa liar.

Di luar upaya konservasi dan restorasi lingkungan secara langsung, investasi &Green di RLU juga bertujuan untuk menghasilkan dampak positif bagi petani kecil dan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar area konsesi, dengan menawarkan lapangan kerja langsung, peluang mata pencarian yang diperluas, peningkatan kesejahteraan (perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan), serta akses ke pasar. &Green telah bekerja sama dengan RLU untuk memperluas Program Kemitraan Masyarakat (Community Partnership Program/CPP), dengan target untuk mengikutsertakan petani lokal skala kecil dalam rantai pasokan karet.

The &Green Fund invested in RLU in 2019 to support the development of an inclusive and sustainable rubber plantation, with a positive impact on the livelihoods of the surrounding communities, as well as the rich biodiversity in the landscape. &Green's vision is to achieve transformational change by creating blueprints for sustainable agricultural supply chains in the Tropics. With &Green's investment, RLU intended to create a blueprint that other rubber companies could adopt to protect the landscape and uplift the rural populations dependent on the natural resources in these same or similar landscapes.

At the heart of this ambition was the establishment of a Wildlife Conservation Area (WCA) on RLU's concessions in Jambi, as a buffer of the Bukit Tigapuluh National Park (BTPNP), which is a habitat for critically endangered megafauna such as tigers, bears and elephants, among other terrestrial wildlife, birds and tree species. Since its creation in 2018, and with the support of &Green, Partnership for Forests, Indonesia's National Parks agency and other partners, RLU demonstrated successfully in protecting almost 10,000 ha of WCA, and is committed to work together with others in the landscape to thus reducing encroachment pressure on all protected areas in the landscape and mitigate the risk of human-wildlife conflict.

Beyond the direct environmental conservation and restoration efforts, &Green's investment in RLU set out to generate a positive impact for smallholder farmers and communities living in and around the concession area, offering direct employment, expanded livelihood opportunities, improved welfare (housing, healthcare and education) and access to markets. &Green has worked together with RLU to expand the Community Partnership Program (CPP), targeting at the inclusion of local, small-scale farmers in the rubber supply chain.

&Green telah mengambil peran aktif dalam kemitraannya dengan RLU, memastikan peran mereka sebagai pemangku kepentingan utama di seluruh konsesi RLU dan di lanskap sekitarnya, di dalam dan di sekitar area konsesi RLU mereka. Bersama TLFF dan RLU, &Green mengembangkan Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) dan Rencana Perlindungan Lanskap (LPP) yang memandu ambisi keberlanjutan RLU dan menyediakan alat yang kredibel dan transparan untuk mengevaluasi kemajuan terhadap target keberlanjutan perusahaan yang ambisius.

Setelah Michelin mengakuisisi penuh RLU pada bulan Juli 2022, investasi &Green dilunasi pada bulan Agustus 2022. Michelin telah berkomitmen secara terbuka untuk terus mematuhi komitmen keberlanjutan seperti Standar Kinerja IFC dan melaporkan kemajuan menuju pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam LPP asli.

&Green has taken an active role in its partnership with RLU, securing their role as a key stakeholder across RLU's concessions and in the surrounding landscapes, within and surrounding their RLU's concession areas. Together with TLFF and RLU, &Green developed an Environmental and Social Action Plan (ESAP) and a Landscape Protection Plan (LPP) that guides RLUs sustainability ambitions and provides a credible, transparent tool to evaluate progress against the company's ambitious sustainability targets.

Following Michelin's full acquisition of RLU in July 2022, &Green's investment was repaid in August 2022. Michelin has publicly committed to continuing to adhere to the sustainability commitments such IFC Performance Standards and reporting on progress toward achieving the goals set out in the original LPP.

Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) / Member of Women Farmers Group (KWT)



Suriana - KWT Karang Indah Lestari

"Saya bersyukur sekali mengikuti program kemitraan kehutanan, karena saya mendapatkan ilmu tentang penyadapan karet yang lebih baik. Selain itu, saya juga sangat senang mendapatkan pelatihan tentang pemanfaatan lahan pekarangan rumah, sehingga lahan pekarangan rumah saya dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga kami sehari-hari."



Putri Utami - KWT Karang Jaya

"Manfaat yang saya dapatkan dari program pemberdayaan masyarakat RLU yakni saya jadi mengetahui cara menanam jahe. Selain itu juga saya diberikan benih sayuran seperti kangkung, sehingga bisa dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga dan mengurangi pembelian sayuran."



Irin Usat - KTH Lendung Mading Iestari

"Kami tertarik mengikuti program KTH yang sejalan dengan program kehutanan sosial dari pemerintah. Sejauh ini, ada beberapa program yang telah kami jalankan, antara lain pelatihan sambung pucuk durian, dan yang saat ini berjalan yaitu budidaya ikan patin yang saat ini sedang menunggu panen. Meskipun skalanya masih kecil dengan keramba sederhana yang kami buat secara gotong royong, namun saya senang sudah ada program yang kami jalankan."

"I am very grateful to have joined the forestry partnership program, because I gained knowledge about better rubber tapping. In addition, I am also very happy to receive training on how to utilize my yard, so that my yard can be useful to meet our family's daily food needs."

"The benefit I gained from the RLU community empowerment program is that I learned how to plant ginger. In addition, I was also given vegetable seeds such as kale, so that they can be used for household consumption and reduce the cost of purchasing vegetables."

"We are interested in joining the KTH program which is in line with the government's social forestry program. So far, there are several programs that we have run, including durian shoot grafting training, and currently running catfish farming which is currently waiting for harvest. Although the scale is still small with simple cages that we built together, I am happy that we have run the program."

CPP Pertanian Terpadu CPP Integrated Farming

RLU juga mengembangkan program pertanian terpadu yang telah merangkul 166 keluarga di Jambi, dengan fokus utamanya adalah pemenuhan pangan bagi keluarga. Dalam program pertanian terpadu ini, lahan tidur diolah sedemikian rupa sehingga menjadi lahan produktif. Program yang berjalan sejak 2018 ini menerapkan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan cara lahan yang ada di sekitar rumah dimanfaatkan fungsinya seoptimal mungkin sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pertanian ramah lingkungan yang berbasis kearifan lokal.

RLU berkomitmen menyerap produksi tanaman masyarakat melalui koperasi perusahaan. Hingga tahun 2021, sebanyak 9 koperasi yang tersebar di Jambi dan di Kalimantan Timur didirikan perusahaan untuk menyerap hasil panen dari masyarakat yang telah mencapai 137.650 Kg beras, 6.843 Kg sayur-sayuran, 771 Kg cabai merah dan 38 Kg ikan.

RLU has also developed an integrated farming program that has embraced 166 families in Jambi, with the main focus being the fulfilment of food for families. In this integrated farming program, idle land is processed in such a way that it becomes productive land. The program, which has been running since 2018, applies the concept of Sustainable Food Home Area (KRPL) by utilising the land around the house as optimally as possible so that it can provide economic benefits to the community through environmentally friendly agriculture based on local wisdom.

RLU is committed to absorbing community crop production through the Company's cooperatives. Until 2021, as many as 9 cooperatives spread across Jambi and in East Kalimantan were established by the Company to absorb crops from the community which has reached 137,650 Kg of rice, 6,843 Kg of vegetables, 771 Kg of red chillies and 38 Kg of fish.

Petani Pemasok Getah Karet ke Pabrik PT MKC Farmers Supplier of Rubber Sap to PT MKC Factory

Pabrik RLU di Kalimantan Timur juga bekerja sama dengan petani (outgrowers) dalam hal penyerapan karet dengan total volume 1.455.013 kg dan total nilai transaksi Rp 963.032.001. Kerja sama ini diantaranya termasuk kerja sama dengan para petani yang tergabung dalam Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan olah karet (UPPB) di Kalimantan Timur. Dalam peningkatan kualitas getah karet, RLU memberikan pelatihan bahan olahan karet (bokar) kepada petani. Kerja sama dengan sebanyak 398 petani kecil terlibat dalam rantai pasokan RLU, dimana 284 diantaranya juga terlibat dalam Program Rubberway yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko sosial, pekerjaan, keselamatan dan lingkungan melalui inisiatif yang didukung oleh Michelin. Program Rubberway dimulai pada tahun 2019 dan memainkan peran penting dalam rantai pasokan MKC. Petani kecil juga diberikan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas karet mereka.

The RLU factory in East Kalimantan also cooperates with farmers (outgrowers) in terms of rubber absorption with a total volume of 1,455,013 kg and a total transaction value of Rp 963,032,001. This cooperation includes cooperation with farmers who are members of the Rubber Processing and Marketing Unit (UPPB) in East Kalimantan. In improving the quality of rubber sap, RLU provides training on rubber processing materials to farmers. Cooperation with a total of 398 smallholders are involved in RLU's supply chain, of which 284 are also involved in the Rubberway Programme which aims to identify social, occupational, safety and environmental risks through initiatives supported by Michelin. The Rubberway Program started in 2019 and plays an important role in the MKC supply chain. Smallholders are also provided with technical training to improve the quality and productivity of their rubber.



Kami secara aktif mencari dan mendukung pemasok yang berbagi nilai-nilai kami dan komitmen etis kami, termasuk mitra petani kecil kami. Kami berkomitmen untuk mendukung mereka dalam memenuhi standar tanggung jawab sosial kami sambil memiliki keberanian untuk menjatuhkan sanksi termasuk mengakhiri hubungan dengan mereka yang tidak memenuhi. Sekurang-kurangnya, kami mengharapkan pemasok kami untuk mematuhi peraturan hukum setempat mengenai standar tenaga kerja, termasuk jam kerja dan upah.

Menghormati Hak-Hak Penduduk Asli dan Komunitas Lokal Respecting the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities

RLU menghormati hak-hak masyarakat adat dengan mewujudkan kerja sama yang setara bersama tiga kelompok Orang Rimba di Jambi dan satu komunitas Dayak Kenyah yg berada di Desa Tepian Langsat/ Desa Persiapan Tepian Budaya, Kalimantan Timur.

RLU berkomitmen untuk mengidentifikasi, menghormati, melindungi dan mendukung masyarakat adat, baik mereka yang ingin hidup secara tradisional maupun yang pindah ke cara hidup modern. Keterlibatan dengan masyarakat adat dilakukan di bawah prinsip-prinsip Free, Prior, Informed and Consent (FPIC) sesuai dengan Standar Kinerja IFC. RLU melibatkan dan membantu masyarakat adat dalam melestarikan warisan budaya mereka serta memberikan dukungan teknis dan akses pasar bagi petani karet kecil, di mana mereka dapat diintegrasikan dengan pengembangan kerja sama kehutanan yang lebih luas.

We actively seek out and support suppliers who share our values and ethical commitments, including our smallholder partners. We are committed to supporting them in meeting our social responsibility standards while having the courage to impose sanctions including terminating relationships with those who do not meet them. At a minimum, we expect our suppliers to comply with local laws and regulations on labour standards, including working hours and wages.

RLU respects the rights of indigenous peoples by establishing equal cooperation with three Orang Rimba groups in Jambi and one Dayak Kenyah community in Tepian Langsat Village/ Tepian Budaya Preparatory Village, East Kalimantan.

RLU is committed to identifying, respecting, protecting and supporting indigenous peoples, both those who wish to live traditionally and those who are moving to a modern way of life. Engagement with indigenous communities is conducted under the principles of Free, Prior, Informed and Consent (FPIC) in accordance with the IFC Performance Standards. The RLU engages and assists indigenous communities in preserving their cultural heritage as well as providing technical support and market access for small rubber farmers, where they can be integrated with broader cooperative forestry development.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Kelompok kerja multi-pemangku kepentingan untuk Orang Rimba/Masyarakat Adat juga telah dibentuk di dalam Tim Resolusi Konflik (TRK). Perjanjian tertulis mencakup poin-poin berikut:

1. Perusahaan akan memberikan dukungan dan bantuan untuk pendidikan, kesehatan, keadaan darurat dan mata pencaharian;
2. Perusahaan akan terlibat dalam upaya perlindungan WCA sebagai habitat Gajah Sumatera; dan
3. Perusahaan akan memetakan persebaran Orang Rimba dan mata pencahriannya.

Kerangka Kerja Keterlibatan Masyarakat Adat dan Rencana Kerangka Kerja Berbasis Masyarakat yang disiapkan perusahaan dengan Rimba Bungaron Indonesia (RBI) pada tahun 2019, ditegaskan kembali oleh Ramboll Consulting pada tahun 2020 bersama dengan sejumlah dokumen strategis utama lainnya yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan RLU dalam aspek Produksi, Sosial, dan Lingkungan.

RLU bersama Pemerintah Kabupaten Tebo dan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh meluncurkan program Orang Rimba pada 22 April 2021. Program yang diluncurkan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengembangan dan pelibatan Orang Rimba yang terintegrasi, yang lahir dari aspirasi warga orang rimba sendiri dan sekaligus diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi warga Orang Rimba. Program yang telah dirintis sejak 2019 tersebut menjangkau 3 kelompok Orang Rimba yang tinggal di kawasan Wildlife Conservation Area PT LAJ mencakup Desa Semambu dan Desa Pemayungan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi.

Program tersebut antara lain operasional Balai Pelayanan Orang Rimba (OR) yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan pelayanan lainnya. Selain itu, RLU membangun Pusat Pembibitan Tanaman Kehidupan Orang Rimba termasuk bantuan bibit, pupuk dan peralatan pertanian. Pembibitan ini merupakan salah satu bagian dari program penghidupan bagi Orang Rimba dimana bibit yang dikembangkan merupakan tanaman yang dimanfaatkan oleh Orang Rimba baik untuk kebutuhan konsumsi sendiri maupun untuk dijual.

A multi-stakeholder working group for Orang Rimba/ Indigenous Peoples has also been established within the Conflict Resolution Team (TRK). The written agreement includes the following points:

1. The Company will provide support and assistance for education, health, emergencies and livelihoods;
2. The Company will engage in efforts to protect the WCA as a habitat for Sumatran Elephants; and
3. The Company will map the distribution of Orang Rimba and their livelihoods.

The Indigenous Peoples Engagement Framework and Community Based Framework Plan that the company prepared with Rimba Bungaron Indonesia (RBI) in 2019, was reaffirmed by Ramboll Consulting in 2020 along with a number of other key strategic documents that serve as guidelines for the implementation of RLU's policies in Production, Social and Environmental aspects.

RLU together with the Tebo District Government and Bukit Tigapuluh National Park Agency launched the Orang Rimba program on 22 April 2021. The launched programme is a series of integrated Orang Rimba development and engagement activities, which was born from the aspirations of the Orang Rimba people themselves and at the same time is expected to have a positive impact on the Orang Rimba people. The program, which has been initiated since 2019, reaches 3 groups of Orang Rimba who live in the Wildlife Conservation Area of PT LAJ, covering Semambu Village and Pemayungan Village, Sumay District, Tebo Regency, Jambi.

The program includes the operation of the Orang Rimba (OR) Service Centre which is used for education, health, and other service activities. In addition, RLU built the Orang Rimba Livelihood Plant Nursery Centre including assistance with seeds, fertilisers and agricultural equipment. This nursery is one part of the livelihood programme for the Orang Rimba where the seedlings developed are plants that are used by the Orang Rimba both for their own consumption needs and for sale.

Capaian Orang Rimba / Orang Rimba Outcome

Program / Programmes	Dampak / Impacts	
	2021	2022*
Data Jiwa OR / Population of OR	38 Keluarga / HouseHolds (HH) 153 Jiwa / People	50 Keluarga / HouseHolds (HH) 192 Jiwa / People
Kegiatan Rutin / Regular Activities	Pemeriksaan Kesehatan / Health Check 148 penerima manfaat menerima 9 kali layanan kesehatan / 148 beneficiaries received 9 times of health services	 148 penerima manfaat menerima 9 kali layanan kesehatan / 148 beneficiaries received 9 times of health services
Pemberian Bahan Pangan Pokok / Provision of basic food items	 37 rumah tangga menerima 10 kali pemberian paket sembako / 37 households received 10 times the provision of basic food packages	 38 rumah tangga menerima 5 kali pemberian paket sembako / 38 households received 5 times the provision of basic food packages
Pengajaran baca, tulis, hitung / Teach reading, writing, and arithmetic	 12 anak-anak OR dari 7 rumah tangga mengikuti program sastra dan matematika yang diselenggarakan oleh WCA / 12 OR children from 7 household joined literature and maths program conducted by WCA	 12 anak-anak OR dari 7 rumah tangga mengikuti program sastra dan matematika yang diselenggarakan oleh WCA / 12 OR children from 7 household joined literature and maths program conducted by WCA
Pelatihan / Training	Budidaya Jernang / Dragon Blood Cultivation 6 OR di area seluas 4 ha dilatih tentang budidaya Jernang / 6 OR in 4 ha area trained about Dragon Blood cultivation	 6 OR di area seluas 4 ha dilatih tentang budidaya Jernang / 6 OR in 4 ha area trained about Dragon Blood cultivation
	Budidaya Lemon / Lemon Cultivation 5 OR di area seluas 1 ha dilatih tentang budidaya lemon / 5 OR in 1 ha area trained about lemon cultivation	 5 OR di area seluas 1 ha dilatih tentang budidaya lemon / 5 OR in 1 ha area trained about lemon cultivation
	Pembuatan Pupuk Cair Organic / Organic Liquid Fertiliser Production 5 OR di area seluas 1 ha dilatih tentang produksi cairan organik / 5 OR in 1 ha area trained about organic liquid production	 5 OR di area seluas 1 ha dilatih tentang produksi cairan organik / 5 OR in 1 ha area trained about organic liquid production
	Mitigasi Konflik Gajah / Elephant Conflict Mitigation 19 OR dilatih tentang Mitigasi Konflik Gajah Manusia (HECM) / 19 OR trained about Human Elephant Conflict Mitigation (HECM)	n/a
	Pelatihan Resolusi Konflik / Conflict Resolution Training 5 OR berpartisipasi dalam lokakarya dan pelatihan Resolusi Konflik yang Bertanggung Jawab / 5 OR participated in the Responsible Conflict Resolution workshop and training	n/a

Program / Programmes	Dampak / Impacts		
	2021	2022*	
2 Kegiatan Kelembagaan / Institutional Activities	Pembangunan pusat pertemuan / Construction of a meeting centre	3 pusat pertemuan yang dibangun di setiap 3 pemimpin Orang Rimba / 3 meeting center built in each 3 of Orang Rimba leader	3 pusat pertemuan yang dibangun di setiap 3 pemimpin Orang Rimba / 3 meeting center built in each 3 of Orang Rimba leader
3 Pembangunan Agroforestry / Agroforestry Development	Pembangunan area dan fasilitas pembibitan / Construction of nursery area and facilities	1 lokasi di Kelompok Hasan / 1 location at Hasan's Group	1 lokasi di Kelompok Hasan / 1 location at Hasan's Group
	Perawatan bibit tanaman Agroforestry / Agroforestry plant seedling care	2 lokasi: Masing-masing 1 di Hasan dan Buyung / 2 locations: 1 each at Hasan and Buyung	2 lokasi: Masing-masing 1 di Hasan dan Buyung / 2 locations: 1 each at Hasan and Buyung
	Program perikanan / Fisheries program	3 lokasi; masing-masing 1 di Hasan, Buyung, Bujang Kabut / 3 locations; 1 each at Hasan, Buyung, Bujang Kabut	3 lokasi; masing-masing 1 di Hasan, Buyung, Bujang Kabut / 3 locations; 1 each at Hasan, Buyung, Bujang Kabut
1 Administrasi Populasi / Population Administration	Pembuatan KTP / ID card Facilitation	Memfasilitasi pembuatan 35 kartu identitas / Facilitated the creation of 35 ID cards	Memfasilitasi pembuatan 35 kartu identitas / Facilitated the creation of 35 ID cards
	Pembuatan Kartu Keluarga / Family Card Facilitation	Memfasilitasi pembuatan 19 kartu keluarga baru, 6 perubahan kartu keluarga, dan 33 akta kelahiran / Facilitated the creation of 19 new family cards, 6 family cards changes, and 33 birth certificates	Memfasilitasi pembuatan 19 kartu keluarga baru, 6 perubahan kartu keluarga, dan 33 akta kelahiran / Facilitated the creation of 19 new family cards, 6 family cards changes, and 33 birth certificates

*Progres RLU per September 2022 / RLU progress as of September 2022

Testimoni Orang Rimba / Orang Rimba Testimonial



Ucha

"Kehadiran tim WCA melalui perusahaan memberikan manfaat kepada kami, seperti pemberian sembako secara rutin, dan pengobatan Orang Rimba yang dilakukan setiap bulannya. Jenis sembako yang kami terima seperti beras, minyak goreng, gula, teh dan kopi dapat membantu kebutuhan makan kami. Selain itu, setiap ada kebutuhan mendadak seperti ketika anak kami sakit, Tim WCA cepat membantu dan mengantarkan ke Puskesmas."

"The presence of the WCA team has brought benefits to us, including the regular provision of basic necessities, and the medical treatment of Orang Rimba which is carried out every month. The types of basic necessities we receive include rice, cooking oil, sugar, tea, and coffee, which help us with our daily needs. Furthermore, anytime there is an emergency like when our child falls ill, the WCA team quickly helps us and takes us to the health centre."

Penanganan Keluhan dan Resolusi Konflik yang Bertanggung Jawab

Grievance Handling and Responsible Conflict Resolution

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan eksternal sangat penting dalam meningkatkan operasional bisnis kami. Kami telah mengembangkan mekanisme pengaduan sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan transparansi dalam menangani keluhan dan menindaklanjuti dengan pemangku kepentingan eksternal.

Mekanisme keluhan sebagai wadah aktif yang dijadikan panduan utama bagi seluruh manajemen dan karyawan RLU dalam penanganan keluhan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan eksternal seperti individu, masyarakat, masyarakat adat, pemerintah, LSM dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan berdasarkan Standar Kinerja Internasional Finance Corporation (IFC PS). Selama tahun 2021 kami mencatat 12 keluhan dan telah ditindaklanjuti.

The engagement of various external stakeholders is critical in improving our business operations. Therefore, we have developed a grievance mechanism as part of the Company's commitment to sustainability and transparency in handling grievances and following up with external stakeholders.

The grievance mechanism serves as an active platform to guide all RLU management and employees in handling grievances from various external stakeholders including individuals, communities, indigenous peoples, governments, NGOs and other relevant stakeholders based on the International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS). During 2021 we recorded 12 grievances that have been followed up.

No	Entitas / Entity	Jumlah Pengaduan / Total Grievance
1	Grup Royal Lestari Utama	2
2	Lestari Asri Jaya	7
3	Wanamukti Wisesa	1
4	Multi Kusuma Cemerlang	2

No	Pihak yang Mengajukan Pengaduan / Grievance Raiser	Jumlah Pengaduan / Total Grievance
1	Masyarakat adat / Indigenous People	3
2	Masyarakat / Public	4
3	LSM / NGO	3
4	Pemerintah Daerah / Local Government	2

No	Isu Utama / Key Issue	Jumlah Pengaduan / Total Grievance
1	Polusi Bau / Odour Pollution	2
2	Pengembalian dan kompensasi lahan / Land return and compensation	3
3	Pengelolaan lahan oleh masyarakat / Land management by community	2
4	Upah / Wages	1

BAB | CHAPTER 1
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama
PT Royal Lestari Utama at a Glance

BAB | CHAPTER 2
Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan
Good Corporate Governance, Ethics and Compliance

BAB | CHAPTER 3
Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)

BAB | CHAPTER 4
Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan
Partnerships and Stakeholder Engagement

BAB | CHAPTER 5
Capaian Lingkungan Environmental Highlights

BAB | CHAPTER 6
Capaian Sosial Social Highlights

BAB | CHAPTER 7
Capaian Produksi Production Highlights

BAB | CHAPTER 8
Keterlibatan Karyawan Employee Engagement

BAB | CHAPTER 9
Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)

BAB | CHAPTER 10
Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD
Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

No	Isu Utama / Key Issue	Jumlah Pengaduan / Total Grievance
5	Kerja sama dengan stakeholders / Cooperation with stakeholders	1
6	Akses jalan di area perusahaan / Road access in company area	1
7	Tuduhan kriminalisasi / Allegations of criminalisation	1
8	Tuduhan deforestasi / Allegations of deforestation	1

Kami telah menyediakan berbagai media untuk pengaduan termasuk tatap muka, telepon, email dan melalui situs web kami [rlu.co.id/connect](https://www.rlu.co.id/connect). Kami juga telah membentuk Komite Penanganan Keluhan yang terdiri dari tim Pemimpin Senior RLU yang dilaporkan langsung kepada Dewan Direktur dan Fasilitator Penanganan Keluhan yang memimpin upaya tindak lanjut untuk merangkum, memverifikasi dan menyelesaikan keluhan.

Catatan dan kemajuan keluhan dilaporkan setiap bulan kepada manajemen sebagai bagian dari pelacakan kemajuan yang ditindaklanjuti dan juga setiap triwulan kepada Komisaris dan Dewan Penasihat Sosial Lingkungan (ESAB). Ketika terjadi kebuntuan dalam mediasi, proses Alternatif Penyelesaian Sengketa diterapkan (ADR) dengan melibatkan mediator independen. Detail tentang ADR ada di halaman [88](#).

Perusahaan juga telah membuat bagian 'halaman transparansi' khusus sebagai tindak lanjut, pengungkapkan dan upaya transparansi atas topik-topik tertentu yang menjadi perhatian atau keluhan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya [rlu.co.id/rlutransparency](https://www.rlu.co.id/rlutransparency).

We have provided various media for grievances including face-to-face, telephone, email and through our website [rlu.co.id/connect](https://www.rlu.co.id/connect). We have also established a Grievance Redressal Committee comprises of RLU Senior Leaders team reported directly to the Board of Director and a Grievance Redressal Facilitators who lead follow-up efforts to summarise, verify and resolve grievances.

The grievance log and progress is reported in monthly basis to the management as part of the track the progress followed up and also in quarterly basis to the Commissioners and Environment Social Advisory Board (ESAB). When there is a deadlock in mediation the Alternative Dispute Resolution process applied (ADR) by involving independent mediators. Detail about ADR is on page [88](#).

The Company has also set up a dedicated 'transparency page' section as a follow-up, disclosure and transparency effort on specific topics of concern or complaints from the public or other stakeholders [rlu.co.id/rlutransparency](https://www.rlu.co.id/rlutransparency).

Proses Pengajuan Keluhan Masyarakat

Public Grievance Submission Process



Kirimkan Keluhan

Keluhanmu dapat dikirim melalui <https://www.rlu.co.id/connect>, surat ke kantor pusat, dan secara langsung di Forum Masyarakat atau staf CSR perusahaan.

Input Keluhan

Uraikan keluhan dengan jelas dan lengkap. Jangan lupa sertakan data diri

Penerimaan

The grievance will be accepted by the grievance handling facilitator

Verifikasi

Keluhan akan diverifikasi untuk memastikan kesesuaianya. Solusi atas keluhan akan diberikan dalam 7 hari kerja.

Submit Your Grievance

Your grievance can be submitted via the link <https://www.rlu.co.id/connect> by letter to our Headquarters and directly at the Community Forum or through the company's CSR staff.

Input Your Grievance

Describe your grievance thoroughly and completely. Don't forget to include your personal information.

Acceptance

The grievance will be accepted by the grievance handling facilitator

Verification

Your grievance will be verified to ensure compliance. Solutions will be provided within 7 business days.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Forum Masyarakat Community Forum

Forum Masyarakat adalah program diskusi dua bulanan yang digelar oleh RLU dan masyarakat dari 23 desa di sekitar konsesi RLU. Kegiatan ini adalah bagian dari program keterlibatan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait kegiatan dan rencana Perusahaan serta menampung saran, aspirasi, dan keluhan masyarakat.

Forum Masyarakat dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan RLU, anggota masyarakat, serta perwakilan desa dan pemerintah untuk membahas hal-hal seperti sosialisasi pengembalian lahan, pencegahan kebakaran, CPP Petani Kecil In-situ, dan lain-lain. Hingga akhir 2021, RLU telah mengadakan 119 dialog forum masyarakat di Jambi dan Kalimantan Timur.

The Community Forum is a bi-monthly discussion program held by RLU and communities from 23 villages around the RLU concession. This activity is part of the community engagement program that aims to provide information related to the Company's activities and plans as well as accommodate community suggestions, aspirations, and complaints.

The Community Forum was conducted with reference to the principles of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). These activities are attended by RLU representatives, community members, as well as village and government representatives to discuss matters such as socialization of land return, fire prevention, In-situ Smallholder CPP, and others. By the end of 2021, RLU had held 119 community forum dialogues in Jambi and East Kalimantan.

Alternative Dispute Resolution (ADR) Alternative Dispute Resolution (ADR)

Mengacu pada laporan HCS HCV RLU dan Laporan Karbon, Konsesi RLU telah mengalami tantangan yang signifikan seperti pembalakan liar, perambahan sejak pertama kali didirikan dan sejak RLU mengambil alih kendali atas konsesi tersebut pada tahun 2015.

Menanggapi tantangan yang kompleks ini, RLU mengadopsi sejumlah kerangka kerja keberlanjutan sosial dan lingkungan yang dipandu oleh standar internasional. Ini termasuk:

- Kebijakan Pengelolaan Tata Guna Lahan dan Kerangka Kerja Pengelolaan Tata Guna Lahan yang menggambarkan komitmen kebijakan dan pendekatan RLU untuk menangani klaim lahan di Go Zone area konsesi. Pendekatan ini dirancang untuk memenuhi hukum dan peraturan di Indonesia, komitmen kebijakan Michelin, dan standar kinerja IFC, dan untuk melindungi orang-orang yang rentan dan mereka yang berisiko dimiskinkan dengan mengupayakan prosedur penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Pendekatan ini berfokus pada negosiasi dan mediasi dengan penuntut tanah untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan secara damai, dihormati, dan bertanggung jawab.

Refer to the RLU HCV HCS report and Carbon Report RLU concessions have undergone significant challenges such as illegal logging, encroachment since they were first established and since RLU took control of them in 2015.

In response to these complex challenges, RLU is adopting a number of social and environmental sustainability frameworks guided by international standards. These include:

- The Land Use Management Policy and Land Use Management Framework which describe RLU's policy commitments and approach to addressing land claims in the Go Zone of the concession areas. The approach is designed to meet Indonesian law and regulations, Michelin's policy commitments, and the IFC performance standards, and to protect vulnerable people and those at risk of impoverishment by pursuing an alternative dispute resolution (ADR) procedure. The approach focuses on negotiation and mediation with land claimants to meet win-win solutions in peaceful, respected and responsible manner.

- Kerangka Kerja Masyarakat Adat (MA) menggambarkan komitmen RLU dalam kaitannya dengan kelompok MA di daerah tersebut, termasuk tidak mencari pengembalian lahan dari MA.
- Kawasan Konservasi Satwa Liar di konsesi Jambi (Zona Larangan Masuk) sejalan dengan komitmen peraturan untuk melestarikan habitat kritis dan untuk mendukung pelestarian mata pencarian tradisional bagi Masyarakat Adat.

Rencana Penggunaan Lahan Konsesi Terpadu, yang menggantikan pendekatan asli RLU terhadap pengelolaan lahan yang diuraikan dalam Rencana Perlindungan Lanskap (LPP) dan Rencana Pengelolaan Kehutanan Terpadu. Sebagai bagian dari rencana baru, perusahaan telah membagi Go Zone menjadi Zona Konsentrasi dan Area Survei Bawah. Perusahaan telah membagi peta tersebut lebih lanjut ke dalam area target untuk program Perhutanan Sosial Program Kemitraan Masyarakat (CPP). Secara umum, RLU berupaya memberikan hasil yang saling menguntungkan bagi perusahaan, masyarakat, dan keanekaragaman hayati melalui pengembangan perkebunan dengan produktivitas tinggi dan pabrik yang efisien yang menghasilkan karet alam industri sekaligus mendukung keanekaragaman hayati dan modal alam setempat.

Pada tahun 2021, bersama dengan Mitra Keberlanjutan TLFF dan &Green, RLU menunjuk MFC Consulting untuk memperkuat proses Manajemen Pengembalian Lahan melalui pengembangan Kerangka Kerja Manajemen Pengembalian Lahan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) agar sejalan dan sesuai dengan Standar Kinerja IFC 5 tentang Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa dan Standar Kinerja 7 tentang Masyarakat Adat. Pekerjaan ini telah selesai pada pertengahan tahun 2022. Sehubungan dengan ADR, dua metode tersebut adalah:

Negosiasi: Hal ini adalah upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dengan berurusan langsung dengan pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan. Ini melibatkan diskusi transparan tentang masalah pada sumber perselisihan, dilakukan secara independen oleh para pihak (perusahaan dan penuntut), tanpa keterlibatan perantara pihak ketiga. RLU akan memaksimalkan penggunaan Negosiasi dalam penyelesaian sengketa

- The Indigenous People (IP) Framework describing RLU's commitments in relation to IPs groups in the area, including not seeking land return from IPs.
- A Wildlife Conservation Area in the Jambi concessions (No-Go Zone) in line with regulatory commitments to preserve critical habitat and to support the preservation of traditional livelihoods for IPs.

The Integrated Concession Land Use Plan, which replaces RLU's original approach to land management outlined in the Landscape Protection Plan (LPP) and Integrated Forestry Management Plan. As part of the new plan, the company has divided the Go Zone into a Concentration Zone and an Under Survey Area. The company has further subdivided the map into target areas for Community Partnership Program (CPP) Social Forestry programming. In general, RLU is seeking to deliver win-win outcomes for the company, communities, and biodiversity through the development of high-productivity plantations and efficient mills that produce industrial natural rubber while supporting local biodiversity and natural capital.

In 2021, together with Sustainability Partners TLFF and &Green, RLU appointed MFC Consulting to strengthen the Land Return Management process through the development of Land Return Management Framework and Alternative Dispute Resolution (ADR) to be inline and compliance with the IFC Performance Standards 5 about Land Acquisition and Involuntary Resettlement and Performance Standards 7 about Indigenous People. The work has been completed in mid 2022. In regards the ADR the two methods are:

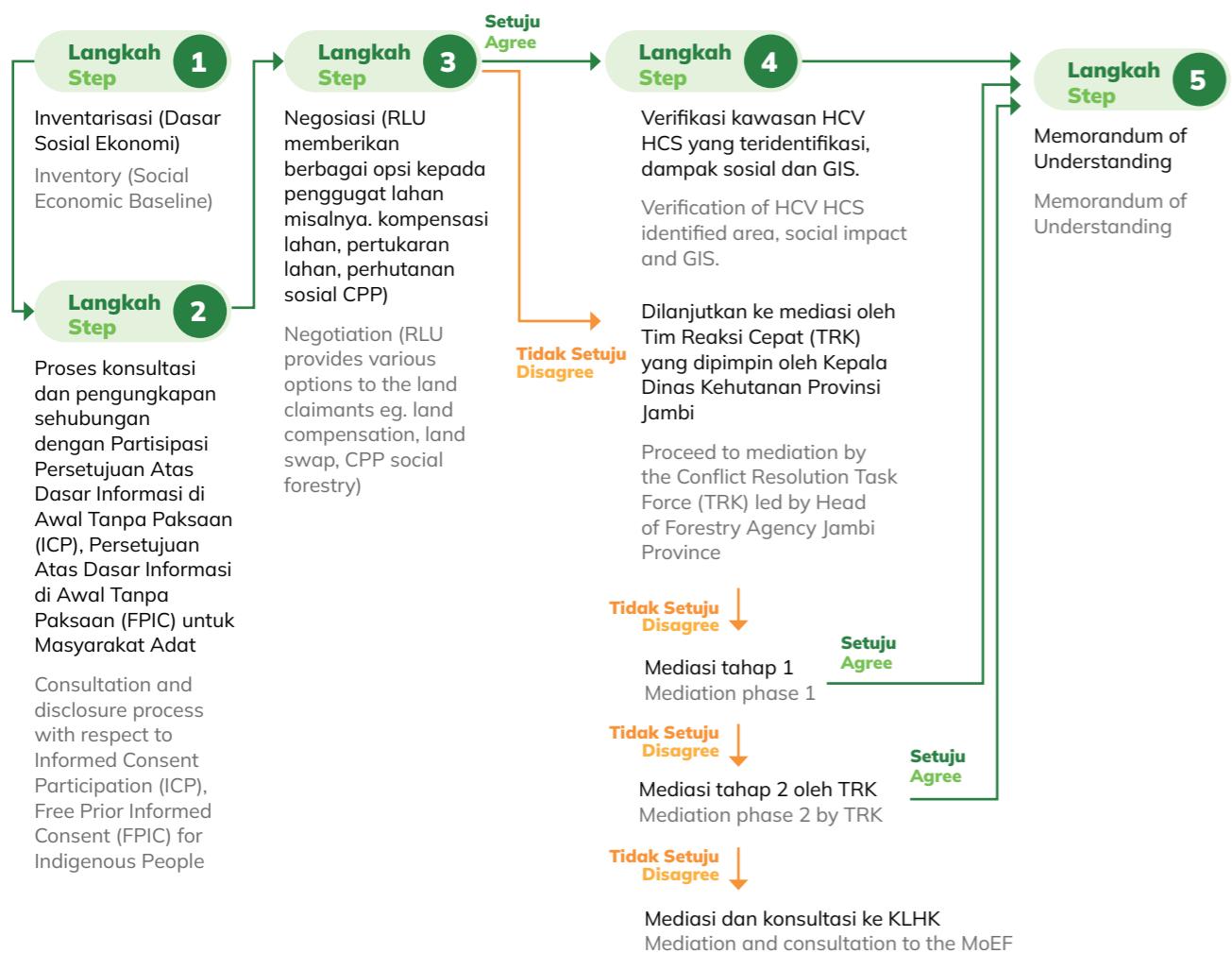
Negotiation: This is an effort to resolve the dispute between the parties by dealing directly with those parties to reach a mutually satisfactory agreement. It involves transparent discussion of the problem at the source of the dispute, carried out independently by the parties (company and claimants), without the involvement of a third-party intermediary. RLU will maximize the use of Negotiation in dispute resolution

Mediasi: Ini adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan bantuan pihak ketiga yang netral untuk bertindak sebagai mediator. Peran mediator adalah menjembatani kepentingan pihak-pihak yang berselisih dengan mendefinisikan isu-isu mereka dan menghilangkan hambatan komunikasi. Mediator memandu percakapan dan proses untuk meminimalkan konfrontasi atau ketidakpercayaan. Dalam proses mediasi, RLU akan fokus pada PADIATAPA para pihak dalam menyetujui proses mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik, termasuk dengan memilih dan menyetujui siapa Mediator Independen yang akan ditunjuk. Tidak semua kasus dapat dimediasi oleh TRK, harus ada kesempatan untuk mediator independen yang disepakati oleh para pihak.

Mediation: This is a dispute resolution process that involves assistance of a neutral third party to act as mediator. The mediator's role is to bridge the interests of the opposing parties by defining their issues and eliminating obstacles to communication. The mediator guides the conversation and the process to minimize confrontation or mistrust. In the mediation process, RLU will focus on the FPIC of the parties in agreeing to the mediation process as a means of resolving conflicts, including by selecting and agreeing on who the Independent Mediator will be appointed. Not all cases can be mediated by the TRK, there must be an opportunity for an independent mediator to be agreed upon by the parties.

Ringkasan Proses Bisnis

Summary of Business process



Tim Resolusi Konflik

Conflict Resolution Team

Berdiri pada 20 Agustus 2018, Tim Resolusi Konflik (TRK) saat ini dipimpin oleh Dinas Kehutanan Jambi dan terdiri dari perwakilan dari pemerintah, penegak hukum, RLU, LSM, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, pendekatan TRK didasarkan pada rekomendasi *ad hoc*, partisipatif, dan bertanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah untuk memfasilitasi, memediasi, dan mendukung upaya penyelesaian sengketa pemerintah yang terkait dengan LAJ dan WMW. TRK memiliki tiga kelompok kerja, yakni:

- A. Kelompok kerja mediasi.
- B. Kelompok kerja inventarisasi.
- C. Kelompok kerja Orang Rimba.

Selama tahun 2021, terdiri dari 56 kegiatan, fasilitasi, dan mediasi yang dilakukan oleh TRK, dan 3 kelompok kerjanya, Pokja Mediasi, Pokja Sosialisasi & Inventarisasi dan Pokja SAD (Orang Rimba).

Established on 20 August 2018, the Conflict Resolution Team (TRK) is currently led by the Jambi Forestry Service and consists of representatives from the government, law enforcement, RLU, NGOs, village heads, and community leaders. In carrying out its duties, TRK's approach is based on *ad hoc*, participatory, and accountable recommendations from the Directorate General of Sustainable Production Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. Its main task is to facilitate, mediate and support government dispute resolution efforts related to LAJ and WMW. TRK has three working groups, namely:

- A. Mediation working group.
- B. Inventory working group.
- C. Orang Rimba working group.

During 2021, there were 56 activities, facilitation and mediation conducted by TRK, and its 3 working groups, Mediation Working Group, Socialisation & Inventory Working Group and SAD (Orang Rimba) Working Group.

Capaian Operasional

Operational Outcomes



Kebun Karet Rubber Plantation

Hingga akhir 2021, Perseroan telah menanam 23.139 ha area tanaman karet berkelanjutan, dimana 34% diantaranya telah berproduksi dan menghasilkan getah karet sebanyak 9.500,7 ton. Jumlah pohon karet tertanam pada area tersebut adalah sebanyak 11.358.157 pohon.

RLU menargetkan dapat mencapai hingga 1,7 ton/ha/tahun getah karet, lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas nasional saat ini yaitu sekitar 1 ton/ha/tahun. Benih, pemeliharaan pohon, dan penyadapan adalah tiga komponen penting dalam mencapai hasil target.

RLU memiliki pembibitan pohon karet di setiap unit usaha di Jambi dan Kalimantan Timur. Untuk memastikan bibit berkualitas. Tanaman terbaik kami berasal dari klon dan DNA mereka diperiksa melalui tes laboratorium di Prancis.

As of the end of 2021, the Company had planted 23,139 ha of sustainable rubber plantation area, of which 34% have been in production and produced 9,500.7 tonnes of rubber latex. The total number of rubber trees planted in the area is 11,358,157 trees.

RLU targets to achieve up to 1.7 tonnes/ha/year of rubber latex, higher than the current national average productivity of around 1 tonne/ha/year. Seeds, tree maintenance, and tapping are three critical components in achieving the target yield.

RLU has rubber tree nurseries in each business unit in Jambi and East Kalimantan. To ensure quality seedlings. Our best plants come from clones and their DNA is checked through laboratory tests in France.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Perawatan terhadap tanaman dilakukan secara disiplin mengikuti prosedur dan instruksi kerja yang telah disiapkan. Pemberian pupuk, pengendalian hama dan penyakit, penyirianan, dan pemangkasan dilakukan sesuai dengan metode dan jadwal yang ditetapkan dengan tetap memastikan efek minimal terhadap lingkungan. Perusahaan melakukan pengukuran rutin untuk memantau pertumbuhan tanaman karet.

Penyadapan pohon karet dilakukan dengan teknik dan periode tertentu untuk memastikan tanaman karet berkelanjutan dan bernilai hingga jangka panjang. Perusahaan juga memiliki sekolah teknik penyadapan yang menyediakan 2 jenis program, yaitu pelatihan bagi para karyawan sadap yang baru bergabung, dan program penyegaran yang diperuntukan bagi karyawan sadap yang mengalami penurunan mutu sadapan yang dipantau setiap bulan.

Care for the plants is carried out disciplined following the procedures and work instructions that have been prepared. Fertiliser application, pest and disease control, weeding, and pruning are done in accordance with established methods and schedules while ensuring minimal effects on the environment. The company conducts regular measurements to monitor the growth of rubber plants.

Tapping of rubber trees is carried out with specific techniques and periods to ensure that the rubber crop is sustainable and valuable in the long term. The Company also has a tapping school that provides 2 types of programmes, namely training for newly joined tappers, and a refresher programme for tappers who have experienced a decline in tapping quality which is monitored monthly.

Ton produksi karet mentah dari kebun karet RLU / Tons of raw rubber production from the RLU rubber plantation

Desember 2021 / December 2021:

- **997.2 ton** (Perkebunan Kalimantan Timur / East Kalimantan plantations)
- **8,503.5 ton** (Perkebunan Jambi / Jambi plantations)

Tahun 2022 / YTD 2022 :

- **480 ton** (Perkebunan Kalimantan Timur / East Kalimantan plantations)
- **6,826 ton** (Perkebunan Jambi / Jambi plantations)

Jumlah Pohon Permukaan & Karet yang Ditanam (Jambi + Kalimantan Timur) / Total Surface & Rubber Trees Planted (Jambi + East Kalimantan)

Desember 2021 / December 2021:

Total Permukaan / Total surface: **23,139 ha** or **11,358,157** pohon karet ditanam / rubber trees planted

Jambi: **18,351 ha** or **9,028,377** pohon ditanam / trees planted

Kalimantan Timur / East Kalimantan: **4,788 ha** or **2,329,780** pohon ditanam / trees planted

Tahun 2022 / YTD 2022 :

Total Permukaan / Total surface: **23,151 ha** or **11,334,720** pohon karet ditanam / rubber trees planted

Jambi: **18,363 ha** or **9,005,365** pohon ditanam / trees planted

Kalimantan Timur / East Kalimantan: **4,788 ha** or **2,329,355** pohon ditanam / trees planted

*Progres RLU per September 2022 / RLU progress as of September 2022

Pabrik Karet MKC MKC Rubber Factory

Pabrik pengolahan karet alam RLU dikelola oleh anak perusahaan PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC). Diresmikan tahun 2017 oleh Gubernur Kalimantan Timur, pabrik yang merupakan fasilitas pengolahan karet pertama di Kalimantan Timur ini telah mengantongi sertifikasi ISO 9001 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjamin kualitas dari produknya.

Tahun 2021 pabrik MKC menyerap 27.555 ton getah karet dan memproduksi total 27.148 ton kering remah karet dimana 71% dari produksi tersebut dieksport dan sisanya untuk kebutuhan dalam negeri. Berkat kedisiplinan menjalankan prosedur keselamatan kerja, pabrik MKC berhasil memperoleh Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Gubernur Kalimantan Timur selama 4 (tiga) tahun terakhir.

Sejalan dengan program lingkungan perusahaan, pabrik MKC juga berhasil memanfaatkan limbah endapan sisa produksi karet untuk media tanam. Pada 19 November 2021 pabrik MKC menyerahkan 34 ton limbah pengolahan karet kepada pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda untuk media tanam di Taman Bebaya Kota Samarinda. Sebelumnya DLH Samarinda dan MKC juga telah melakukan serangkaian pengujian dan diskusi dengan akademisi terkait limbah tersebut. Hasilnya, limbah dinyatakan aman untuk dimanfaatkan sebagai media tanam, khususnya tanaman hias.

RLU's natural rubber processing plant is managed by its subsidiary, PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC). Inaugurated in 2017 by the Governor of East Kalimantan, the factory, which is the first rubber processing facility in East Kalimantan, has obtained ISO 9001 and Indonesian National Standard (SNI) certifications that guarantee the quality of its products.

In 2021, the MKC factory absorbed 27,555 tonnes of rubber latex and produced a total of 27,148 tonnes of dry crumb rubber, of which 71% was exported and the rest for domestic needs. Thanks to the discipline in implementing work safety procedures, the MKC factory has successfully obtained the Zero Accident Award from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and the Governor of East Kalimantan for the last 4 (three) years.

In line with the company's environmental program, the MKC factory has also succeeded in utilizing sludge waste from rubber production for planting media. On 19 November 2021, MKC factory handed over 34 tonnes of rubber processing waste to the Samarinda City government through the Samarinda Environmental Agency (DLH) for planting media in Bebaya Park, Samarinda City. Previously, DLH Samarinda and MKC had also conducted a series of tests and discussions with academics regarding the waste. As a result, the waste was declared safe to be used as planting media, especially ornamental plants.

Deskripsi / Description	2021	2022*
Produksi VKOR / VKOR production : ton / tons	12,458.88	4,631.76
Produksi SIR 20 C / Production of SIR 20 C : ton / tons	14,689.19	12,637.8
Kapasitas Terpasang / Installed Capacity : ton/tahun / tons/year	40,000	40,000

*Progres RLU per September 2022 / RLU progress as of September 2022

BAB | CHAPTER 1
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama
PT Royal Lestari Utama at a Glance

BAB | CHAPTER 2
Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan
Good Corporate Governance, Ethics and Compliance

BAB | CHAPTER 3
Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)

BAB | CHAPTER 4
Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan
Partnerships and Stakeholder Engagement

BAB | CHAPTER 5
Capaian Lingkungan
Environmental Highlights

BAB | CHAPTER 6
Capaian Sosial
Social Highlights

BAB | CHAPTER 7
Capaian Produksi
Production Highlights

BAB | CHAPTER 8
Keterlibatan Karyawan
Employee Engagement

BAB | CHAPTER 9
Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)

BAB | CHAPTER 10
Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD
Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

Asupan Karet Pabrik PT MKC / PT MKC Factory Rubber Intake

Deskripsi Supplier / Supplier Description	Satuan	2019	2020	2021	2022*
Petani Kecil / Smallholder	Ton / Tons	1,614	1,721	1,455	1,441
	%	8.7	7.0	5.3	5.3
Pedagang / Trader	Ton / Tons	16,552	20,104	22,605	15,598
	%	89	82	82	82
Perkebunan Perusahaan Kecil / Small Company Plantations	Ton / Tons	0.364	2.245	2.497	1.321
	%	2.0	9.2	9.1	7
Perkebunan Internal / Internal Plantation	Ton / Tons	0.066	0.443	0.997	0.48
	%	0.4	1.8	3.6	2.55

* Progres RLU per September 2022 / RLU progress as of September 2022



Keterlibatan Karyawan

Employee Engagement



Keterlibatan Karyawan dan Membangun Lingkungan Kerja yang Aman, Nyaman dan Sehat

Employee Engagement and Building a Safe, Comfortable and Healthy Work Environment

Kami percaya bahwa setiap karyawan berhak mendapat perlakuan yang setara, adil, dan dengan rasa hormat. Dalam praktiknya, kami mematuhi seluruh perundangan dan peraturan yang berlaku serta standar internasional terkait, yang mencakup hal-hal seperti kebebasan berserikat, kelayakan upah dan jam kerja, kebijakan non-diskriminasi, dan penolakan segala bentuk kerja anak dan paksa.

Komitmen kami untuk menerapkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang adil juga diperkuat melalui Kebijakan Keberlanjutan, buku panduan karyawan, Kode Etik RLU, dan praktik ketenagakerjaan lainnya. Perusahaan memiliki kebijakan pemberian kesempatan yang setara tanpa memandang ras, kebangsaan, agama, disabilitas, jenis kelamin, orientasi seksual, keanggotaan serikat dan afiliasi politik.

Seperti yang tertuang dalam Kode Etik Perusahaan, kami menentang keras segala bentuk kerja anak dan kerja paksa. Usia kerja minimum di RLU adalah 18 tahun dan tidak dibenarkan praktik pemaksaan kerja kepada siapapun. Petugas rekrutmen kami diwajibkan untuk melakukan verifikasi kartu identitas dengan ijazah sekolah, sebagai langkah untuk memastikan bahwa kami tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

We firmly believe that all employees deserve to be treated equally, fairly, and with respect. In practice, we comply with all applicable laws and regulations as well as relevant international standards, covering matters such as freedom of association, fairness of wages and working hours, non-discrimination policies, and the rejection of all forms of child and forced labor.

Our commitment to fair labor practices is also reinforced through our Sustainability Policy, employee handbook, RLU Code of Conduct, and other employment practices. The Company has a policy of equal opportunity regardless of race, nationality, religion, disability, gender, sexual orientation, union membership, and political affiliation.

As enshrined in the Company's Code of Conduct, we strongly oppose all forms of child labor and forced labor. The minimum working age at RLU is 18 years old and forced labor is not permitted. Our recruitment officers are required to verify identity cards with school certificates, as a measure to ensure that we do not employ minors.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Secara rutin kami melakukan sosialisasi, serta menerapkan prinsip serta Kode Etik ini di perkebunan dan fasilitas pemrosesan kami. Kami juga memiliki mekanisme yang mendukung karyawan RLU untuk melaporkan pelanggaran Kode Etik dalam bentuk apapun.

We regularly socialize and implement these principles and the Code of Conduct in our plantations and processing facilities. We also have a mechanism that supports RLU employees to report any breach of the Code of Conduct.

Indikator Karyawan / Employee Indicator

Area	Jumlah Karyawan / Number of Employee			
	2019	2020	2021	2022*
Jambi	3,256	3,302	3,005	3,236
Kalimantan Timur	1,013	912	828	931
Jakarta	51	45	49	46
Total	4,320	4,259	3,882	4,213

*Progres RLU per September 2022 / RLU progress as of September 2022

Rincian Karyawan 2021 / Employee Details 2021

Deskripsi / Description	2019	2020	2021	2022*
Aspek Pengelolaan Sosial / Social Management Aspect				
Total Karyawan / Total Employees	4,320	4,259	3,882	4,213
Total Karyawan tetap / Total permanent employees	663	734	959	1,007
Total Karyawan kontrak / Total non-permanent employees	3,657	3,525	2,923	3,206
Total karyawan perempuan / Total female employees	1,308 (30%)	1,280 (30%)	1,240 (32%)	1,444 (34%)
Total karyawan perempuan di posisi managerial (%) / Total female employees in managerial positions (%)	0.28%	0.23%	0.26%	0.35%
Remunerasi Karyawan / Employee Remuneration	Sesuai atau Di Atas UMP / On or Above UMP	Sesuai atau Di Atas UMP / On or Above UMP	Sesuai atau Di Atas UMP / On or Above UMP	Sesuai atau Di Atas UMP / On or Above UMP

*Progres RLU per September 2022 / RLU progress as of September 2022

Pelatihan dan Pengembangan Training and Development

Pelatihan dan Pengembangan adalah program strategis utama bagi perusahaan. RLU berkomitmen untuk membantu semua karyawan kami untuk mengembangkan keterampilan dan kinerja profesional mereka melalui pelatihan dan pengembangan terpadu. Perusahaan telah mengembangkan peta jalan di semua fungsi untuk memungkinkan perusahaan meningkatkan jenjang karir mereka.

Jumlah jam belajar di tahun 2021 adalah 17.135,5 jammencakup eksternal dan internal training seperti Yayasan Pulih Training, Wadhwani Foundation Training, Headman development program dan lain-lain.

For the Company, Training and Development are key strategic programs. RLU is committed to helping all our employees to improve their skills and professional performance through integrated training and development. The Company has developed roadmaps across all functions to enable them to advance their career path.

The total learning hours in 2021 amounted to 17,135.5 hours covering external and internal training such as Yayasan Pulih Training, Wadhwani Foundation Training, Headman development program and others.

Kelompok Dukungan Perempuan Women's Support Group

Pada September 2021 RLU meluncurkan program Women's Support Group (WSG) dengan nama Kanita (Kawan Wanita). Langkah penting merupakan bagian dari Rencana Kerja Perlindungan Perempuan (Women Protection Plan) yang sejalan dengan komitmen Sustainability Policy RLU untuk menciptakan lingkungan kerja yang setara, aman, nyaman dan kolaboratif bagi seluruh karyawan.

WSG Kanita bertujuan memberikan perlindungan dan support system kepada karyawan perempuan dalam menyampaikan masukan, keluhan dan ide-ide mereka. Di samping itu, program ini juga memberi mereka akses dalam berbagi pengetahuan dan pengembangan perempuan. Kepengurusan WSG dipimpin oleh Sustainability General Manager yang membawahi perwakilan perempuan dari masing-masing area operasional, serta bermitra dengan pakar gender dari TLFF sebagai Penasihat.

In September 2021 RLU launched a Women's Support Group (WSG) program under the name Kanita (Kawan Wanita). This momentous step is part of the Women Protection Plan, in line with RLU's Sustainability Policy commitment to establish an equal, safe, comfortable, and collaborative working environment for all employees.

WSG Kanita aims to provide protection and a support system for female employees to express their feedback, complaints, and ideas. In addition, the program also gives them access to knowledge sharing and women's development. The WSG is led by the General Manager of Sustainability who oversees female representatives from each operational area, and partners with a gender expert from TLFF as the Advisor.

Penanganan Keluhan Internal Internal Grievance Redress

Pada tahun 2021 RLU telah membentuk mekanisme penanganan keluhan internal dengan dukungan dari pihak ke-3 yang independen. Sosialisasi dan pelatihan penanganan keluhan internal dilaksanakan pada akhir tahun 2021 oleh Dewan Direksi dan Departemen Sustainability and Compliance. Protokol tersebut bertujuan untuk memberikan akses kepada karyawan untuk menyampaikan keluhan serta tindakan pelanggaran kode etik melalui berbagai saluran baik secara langsung ke Departemen HR atau secara tidak langsung yakni melalui email ke Departemen Sustainability and Compliance yang bertindak dalam menangani pelanggaran kode etik.

In 2021 RLU established an internal grievance mechanism supported by independent 3rd parties. Socialization and training on internal grievance handling were conducted in late 2021 by the Board of Directors and the Sustainability and Compliance Department. The protocol aims to provide access to employees to submit complaints and acts of violation of the code of ethics through various channels either directly to the HR Department or indirectly by email to the Sustainability and Compliance Department which acts in handling violations of the code of ethics.

Pendidikan Anak Usia Dini Early Childhood Education

Perusahaan telah membangun 3 (tiga) unit terintegrasi Taman Penitipan Anak (TPA) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di area operasionalnya di Jambi. Di area operasional di Kalimantan Timur, perusahaan menyediakan fasilitas Sekolah Dasar Kelas Jauh. Fasilitas Pendidikan ini merupakan komitmen dari RLU untuk dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak untuk meningkatkan daya saing generasi penerus bangsa. Selain itu fasilitas pendidikan ini diharapkan dapat membantu anak-anak dari pekerja untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih dekat dan memudahkan para orang tua dalam menjaga anak-anak mereka.

The Company has built 3 (three) integrated units of Daycare Centre (TPA) and Early Childhood Education (PAUD) in its operational area in Jambi. In its operational area in East Kalimantan, the Company provides a Remote Classroom Primary School facility. This educational facility is a commitment from RLU to be able to provide quality education for children to enhance the competitiveness of the nation's next generation. In addition, this educational facility is expected to help children of workers to get closer access to education and help parents to look after their children.

Perbaikan Infrastruktur Infrastructure Improvement

Sebagai bagian dari komitmen RLU terhadap penyediaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan, RLU telah menyusun rencana pengembangan infrastruktur sebagai salah satu program utama. Rencana pengembangan tersebut meliputi area pemukiman karyawan dan fasilitas pendukungnya, seperti jalan, air, sanitasi, fasilitas kebersihan (WASH), pengelolaan limbah, klinik dan fasilitas karyawan lainnya.

Hingga akhir Desember 2021, RLU telah membangun 1135 Rumah untuk menampung >4.500 Orang dan 6 Bangunan untuk tamu; 2 klinik dan 5 sekolah dibangun di area RLU di Jambi dan di Kalimantan.

As part of RLU's commitment to providing a safe and comfortable working environment for all employees, RLU has developed an infrastructure development plan as one of its main programs. The development plan includes employee housing areas and supporting facilities, such as roads, water, sanitation, hygiene facilities (WASH), waste management, clinics, and other employee facilities.

By the end of December 2021, RLU has built 1135 Houses to accommodate >4,500 People and 6 Buildings for guests; 2 clinics and 5 schools were built in RLU area in Jambi and in Kalimantan.



Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan

Occupational Health
Safety and Environment



RLU menjunjung tinggi Penerapan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada setiap proses bisnis. Oleh sebab itu, RLU secara rutin mengevaluasi dan menganalisis kebijakan K3L secara menyeluruh guna melindungi karyawan, rekan bisnis, dan masyarakat.

Sejak pendirian, kami menyadari dampak yang mungkin timbul dari kegiatan operasional kami terhadap karyawan. Oleh sebab itu, kami melaksanakan Identifikasi Bahaya serta Penilaian dan Pengendalian Risiko (HIRARC) di setiap aspek kegiatan operasional. Kami terus meningkatkan komitmen kami terhadap keselamatan dengan mengembangkan budaya dan proses kerja yang selaras dengan visi kami untuk mencapai nol kecelakaan.

RLU upholds the implementation of Health, Safety and Environment (HSE) in every business process. As such, RLU regularly evaluates and analyses its overall HSE policy to protect its employees, business partners and the community.

Since our establishment, we have recognised the impact that our operations may have on our employees. Therefore, we implement Hazard Identification and Risk Assessment and Control (HIRARC) in every aspect of our operations. We continue to enhance our commitment to safety by developing a culture and work processes that are aligned with our vision to achieve zero accidents.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Lima aktivitas paling berisiko tinggi berdasarkan HIRARC di area operasional RLU di Jambi dan Kalimantan adalah sebagai berikut:

No.	Resiko / Risk	Kegiatan / Activity	Area	Pengendalian / Control
1	Jatuh atau tertabrak / Falling or crashing	Mengoperasikan kendaraan / alat berat Operating vehicles / heavy equipment	Seluruh area All areas	Pengemudi / operator memiliki izin dan lisensi keahlian Membuat area khusus operasional alat berat Driver/operator should have permit and expertise license Create designated area for heavy equipment operation
2	Tersambar Petir / Struck by Lightning	Pembukaan lahan dan Penanaman / Land Clearing and Planting	Kebun / Plantation	Menghentikan pekerjaan jika sudah ada tanda turun hujan Memasang penyalur petir di area bangunan Cease work at the first sign of rain Install lightning rods in the building area
3	Tersengat, tergigit atau terserang binatang, / Stung, bitten or attacked by animals,	Perawatan, Penyadapan / Maintenance, Tapping	Kebun / Plantation	Membersihkan area semak belukar, Clearing the shrubbery area
4	Terjatuh dari ketinggian / Fall from height	Perawatan dan perbaikan tower / Tower maintenance and repair	Seluruh Area All Areas	Memasang alat perlindungan dan pencegahan jatuh dari ketinggian Install fall protection and prevention equipment
5	Tertimpa beban / Struck by the loads	Pembersihan trolley, pemindahan dari mesin dryer / Cleaning of trolley, removal from dryer machine	Pabrik / Factory	Posisi tidak berada pada area penurunan beban / Do not stand in the loading area
6	Terkena mesin berputar / Hit by rotating machine	All machine activity	Pabrik / Factory	Memasang guarding machine Memasang emergency shutdown di sekitar mesin berputar Install guarding machine Install emergency shutdown around rotating machinery
7	Tenggelam / Drowning	Pengelolaan kolam limbah / Sewage pond treatment	WWTP All area	Membuat pagar pengaman di sekitar kolam Memakai alat pelindung diri dari tenggelam Build a safety fence around the pond Wear personal protective equipment from drowning

The five most high-risk activities based on HIRARC in RLU's operational areas in Jambi and Kalimantan are as follows:

Seluruh anak usaha RLU telah memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan hasil Bendera Emas atau Kategori Memuaskan dalam penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. PT Multi Kusuma Cemerlang (Factory) received the Zero Accident Award for 2021 from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and the Governor of East Kalimantan.

Kami berupaya untuk terus mengembangkan dan memperkuat budaya keselamatan dengan menggalakkan perilaku dan kondisi kerja yang aman melalui penerapan kepemimpinan yang baik, komunikasi yang aktif dan jelas, program pelatihan, dan praktik-praktik industri terbaik.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dikomunikasikan kepada karyawan melalui briefing awal shift, melalui media seperti papan informasi, banner, poster, bulletin dan melalui pertemuan P2K3 yang dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh ketua P2K3 (settingkat General Manager). Materi yang disampaikan dapat berupa update regulasi pemerintah/peraturan perusahaan terbaru, kejadian kecelakaan kerja, safety performance (lagging and leading indicator), promosi/pelayanan kesehatan atau safety moment yang disampaikan oleh tim SHE atau karyawan lain.

All RLU subsidiaries have been certified with the Gold Flag or Satisfactory Category in the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) assessment conducted by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. PT Multi Kusuma Cemerlang (Factory) received the Zero Accident Award for 2021 from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and the Governor of East Kalimantan.

We strive to continuously develop and strengthen our safety culture by promoting safe working behaviors and conditions through the application of good leadership, active and clear communication, training programs, and industry best practices.

Occupational Safety and Health (OHS) is communicated to employees through briefings at the beginning of shifts, through media such as information boards, banners, posters, bulletins, and through P2K3 meetings held every month led directly by the P2K3 chairman (at General Manager level). The material presented can be in the form of updates on the latest government regulations/company regulations, work accident events, safety performance (lagging and leading indicators), health promotion/services or safety moments delivered by the SHE team or other employees.

Total Case Incident Rate

Total Case Incident Rate

Total Case Incident Rate (TCIR) adalah total angka cedera maupun penyakit akibat kerja yang membutuhkan penanganan medis, dalam setiap 200.000 jam kerja (yang diakumulasi sampai periode tertentu atau sampai akhir tahun). Perhitungan TCIR mulai diterapkan oleh RLU sejak 2019 sejalan dengan kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Michelin grup.

Tahun / Years	Jumlah Insiden / Total incident	TCIR
2019	36	0.68
2020	68	1.68
2021	69	1.88

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Pada tahun 2021, terdapat 69 insiden di RLU dengan TCIR sebesar 1.88. Insiden didominasi oleh insiden yang memerlukan penanganan medis namun tidak menyebabkan kehilangan hari kerja. Jumlah insiden meningkat dari tahun 2020 yaitu 68 insiden dengan rasio 1.68. Data ini merevisi data TCIR yang dipublish pada Laporan Keberlanjutan tahun sebelumnya.

Perlindungan Terhadap Kesehatan Keselamatan Pekerja Protection of Workers' Health and Safety

Di area HTI di Jambi dan di Kalimantan Timur masing-masing dilengkapi 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatan yang memadai untuk pertolongan pertama yang dijalankan oleh Dokter dan Paramedik yang sudah memiliki sertifikat Hiperkes.

Fokus kesehatan kerja pada tahun 2021 yaitu penanganan pandemi COVID-19 dan pencegahan penyakit akibat kerja (PAK). RLU konsisten menerapkan protokol kesehatan termasuk RLU Testing, Tracing dan Treatment (3T) untuk karyawan. RLU juga telah melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk karyawan.

Pelaksanaan vaksinasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, yang mengatur program vaksin gotong royong (VGR), atau vaksin mandiri yang dilakukan perusahaan swasta pada karyawannya. Selain program VGR, perusahaan juga memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi dari pemerintah bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

In 2021, there were 69 incidents in the RLU with a TCIR of 1.88. Incidents are dominated by incidents that require medical treatment but do not cause loss of working days. The number of incidents increased from 2020, which was 68 incidents with a ratio of 1.68. This data revises the TCIR data published in the previous year's Sustainability Report.

Each HTI area in Jambi and East Kalimantan is equipped with 1 (one) health care facility equipped with adequate equipment and medicines for first aid, run by doctors and paramedics who already have Hyper Health certificates.

The focus of occupational health in 2021 is handling the COVID-19 pandemic and preventing occupational diseases (PAK). RLU consistently implements health protocols including RLU Testing, Tracing and Treatment (3T) for employees. RLU has also implemented vaccination activities for employees. The implementation of vaccination is in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the COVID-19 Pandemic, which regulates the vaccine gotong royong (VGR) program, or independent vaccines carried out by private companies for their employees. In addition to the VGR program, the company also facilitates the implementation of vaccinations from the government in collaboration with the TNI, Polri, and local governments.

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Forest and Land Fire Prevention

Sebagai perusahaan karet alam berkelanjutan, RLU memiliki komitmen dan secara konsisten membantu mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran lahan. Upaya yang dilakukan dengan membentuk Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) yang merupakan satgas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di area HTI Jambi dan Kalimantan Timur, serta melengkapi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kami berupaya meningkatkan peringatan dan deteksi dini dengan secara rutin melakukan pemantauan dan pengecekan kondisi lapangan dengan patroli darat maupun pemantauan dari menara pantau api oleh TPKD. Selain itu pemantauan juga dilakukan melalui citra satelit. Tim Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja perusahaan juga melaksanakan audit kesiapan Dalkarhutla termasuk evaluasi penanganan Karhutla tahun 2020 dan kesiapan dalam menghadapi musim kemarau tahun 2021.

Aktivitas penting lainnya adalah kegiatan patroli bersama dengan Manggala Agni, yang merupakan tim khusus Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di bawah naungan Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan. Kerja sama antara perusahaan dan Manggala Agni telah berlangsung sejak tahun 2017, meliputi kegiatan sosialisasi, operasi, patroli dan latihan bersama terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pada tahun 2021 kebakaran di area HTI RLU di Jambi dan Kalimantan Timur mengalami penurunan. Angka karhutla di area HTI Jambi mengalami penurunan 64%, sedangkan di Kalimantan Timur turun 20%.

As a sustainable natural rubber company, RLU is committed and consistently helps reduce air pollution caused by land fires. Efforts are made by forming an Emergency Response Team (TPKD) which is a forest and land fire control task force in the HTI areas of Jambi and East Kalimantan, and equipping facilities and infrastructure for forest and land fire control in accordance with applicable regulations.

We strive to improve early warning and detection by routinely monitoring and checking field conditions with ground patrols and monitoring from fire monitoring towers by TPKD. In addition, monitoring is also carried out through satellite imagery. The company's Occupational Safety, Health and Security team also conducts Fire and Rescue readiness audits including an evaluation of the handling of forest and land fires in 2020 and readiness for the dry season in 2021.

Another important activity is joint patrol activities with Manggala Agni, which is a specialised team for forest and land fire control under the Ministry of Environment and Forestry. Cooperation between the company and Manggala Agni has been ongoing since 2017, covering socialisation activities, operations, patrols and joint exercises related to forest and land fire prevention.

In 2021, fires in RLU's HTI areas in Jambi and East Kalimantan have decreased. The number of forest and land fires in the Jambi HTI area has decreased by 64%, while in East Kalimantan it has decreased by 20%.

Data Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jambi dan Kalimantan Timur

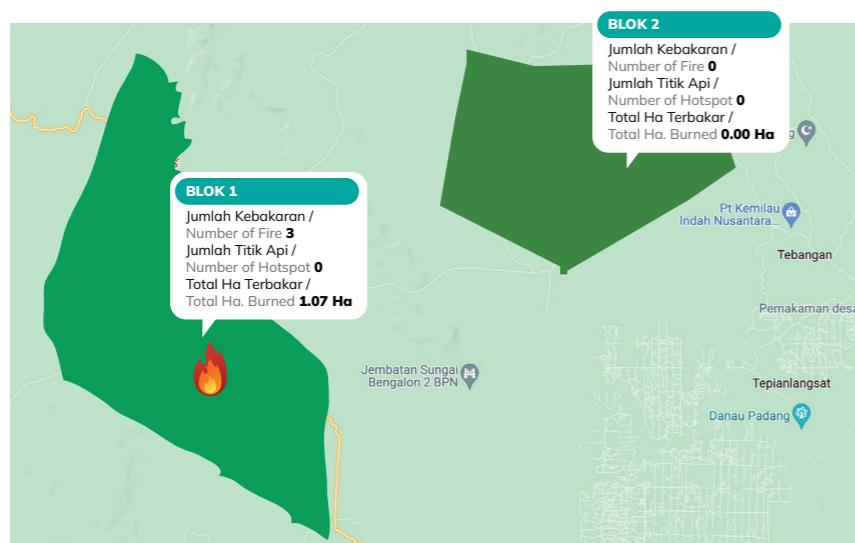
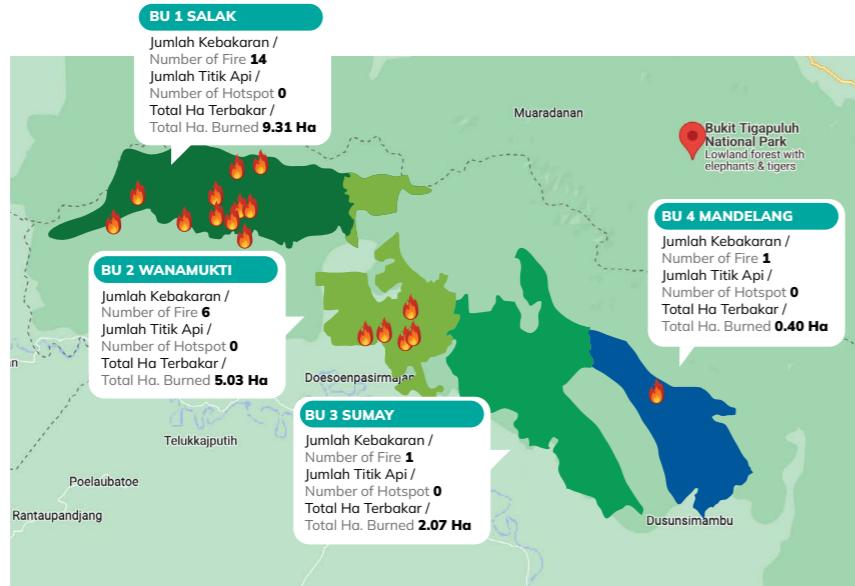
Forest and Land Fire Data for Jambi and East Kalimantan Region

Indikator / Indicator	Area	Tahun / Year			
		2019	2020	2021	2022*
Jumlah Kebakaran / Number of Fire	Jambi	92	101	22	7
	Kalimantan Timur / East Kalimantan	16	4	3	0
Jumlah Ha Terbakar / Total Ha Burned (Ha)	Jambi	101.1	37.65	16.81	7.67
	Kalimantan Timur / East Kalimantan	42	3.6	1.07	0

*Progres RLU per September 2022 / RLU progress as of September 2022

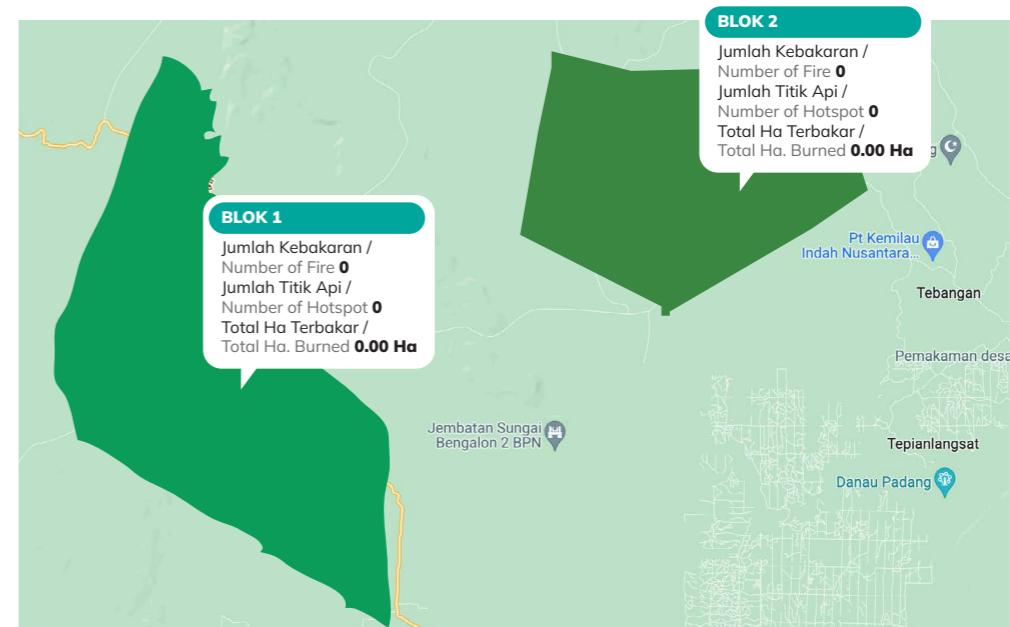
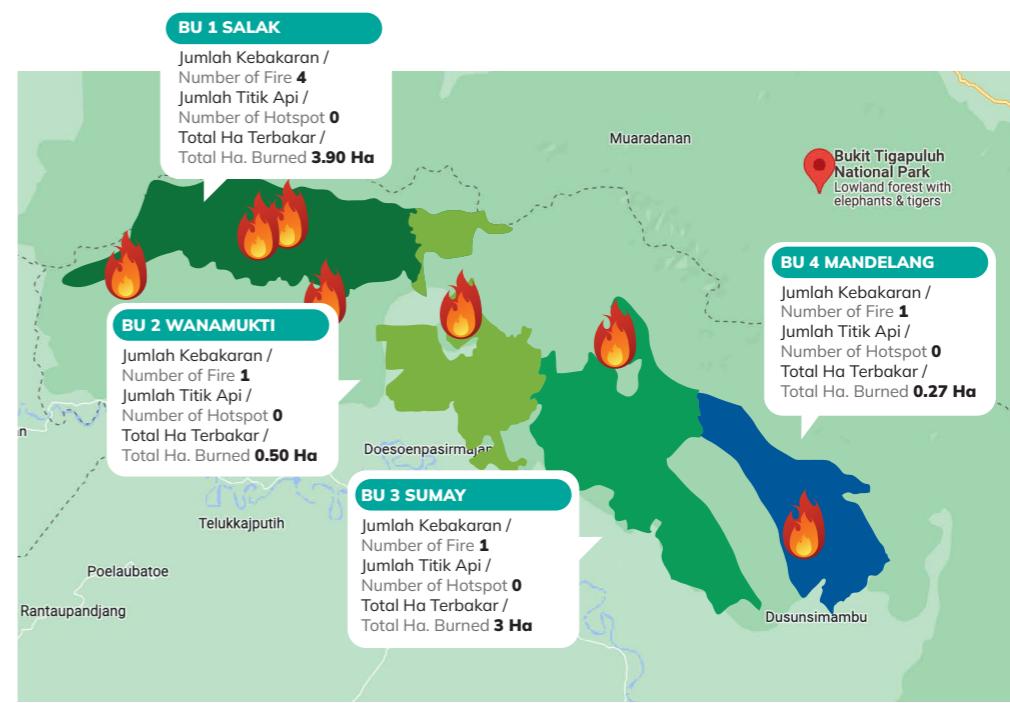
Peta Kebakaran Hutan pada 2021 di wilayah RLU

Map of Forest Fires in 2021 within the RLU area



Peta Kebakaran Hutan pada 2022 di wilayah RLU

Map of Forest Fires in 2022 within the RLU area



Tahapan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Stages in the Prevention and Suppression of Forest Fires



Pengelolaan Sampah di RLU

Waste Management at RLU

Royal Lestari Utama terus berupaya menjaga keseimbangan alam dan berkontribusi mengurangi sampah dengan melakukan kegiatan pemilahan sampah di kawasan pemukiman di dalam area RLU sejak 2018. Perusahaan telah membentuk Pengelolaan Sampah berdasarkan temuan dan rekomendasi dari Towards Sustainable Business (TSB) dengan:

1. Pemisahan limbah dan pemantauan di lokasi
2. Penyediaan infrastruktur berdasarkan jenis limbah
3. Sosialisasi dan edukasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar.

Perusahaan juga telah membuat rencana untuk mengoptimalkan pengurangan limbah, khususnya pengurangan limbah habis pakai. Kebun dan pabrik kami juga dilengkapi dengan fasilitas pengolahan air limbah atau WWTP sebagai cara untuk mengelola limbah padat di mana kinerjanya secara teratur dipantau dan ditinjau.

Royal Lestari Utama continues to strive to maintain the balance of nature and contribute to reducing waste by conducting waste sorting activities in residential areas within the RLU area since 2018. The Company has established Waste Management based on the findings and recommendations of Towards Sustainable Business (TSB) with:

1. Waste segregation and on-site monitoring
2. Provision of infrastructure based on waste type
3. Socialisation and education to employees and surrounding communities.

The Company has also made plans to optimise waste reduction, particularly the reduction of consumable waste. Our estates and mills are also equipped with wastewater treatment facilities or WWTP as a way to manage solid waste where performance is regularly monitored and reviewed.



Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD

Summary of 2021
Environmental and Social
Governance (ESG) Report by
Ramboll Environ Singapore
PTE LTD)



Pernyataan Ramboll Environ Statement from Ramboll Environ

Laporan Keberlanjutan RLU menggambarkan tentang implementasi kepatuhan, pelaporan prosedur, praktik dan program menggunakan baseline IFC Performance Standard tentang Keberlanjutan Sosial, Lingkungan dan Tata Kelola, *Tropical Landscape Finance Facility (TLFF) Key Indicators* dari kinerja operasional RLU dan *andGreen Fund Landscape Protection Plan (LPP)*. Pada Laporan Keberlanjutan RLU tahun 2021, RLU merujuk pada standar pelaporan *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*.

Laporan Keberlanjutan 2021 merupakan Laporan Keberlanjutan RLU yang ke-4 dari periode Januari s/d Desember 2021. Laporan ini disusun oleh perusahaan pada setiap tahunnya. Laporan Keberlanjutan ini juga mempresentasikan rangkuman dari Laporan Audit Environment Social Governance (ESG) tahunan perusahaan yang ke-4 dari periode Januari - Desember 2021 oleh auditor independen, Ramboll Consulting.

The RLU Sustainability Report describes the implementation of compliance, reporting procedures, practices, and programs using the baseline IFC Performance Standard on Social, Environmental, and Governance Sustainability, Tropical Landscape Finance Facility (TLFF) Key Indicators of RLU's operational performance and the Green Fund Landscape Protection Plan (LPP). In the 2021 RLU Sustainability Report, RLU refers to the Global Reporting Initiative (GRI) Standards reporting standards.

The 2021 Sustainability Report is the 4th RLU Sustainability Report for the period January to December 2021. The report is prepared by the Company on an annual basis. This Sustainability Report also presents a summary of the Company's 4th annual Environment Social Governance (ESG) Audit Report from the period January - December 2021 by an independent auditor, Ramboll Consulting.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Sebagai informasi, Audit ESG yang ke-1 dan ke-2 dilaksanakan oleh PT Daemeter Consulting (Daemeter) di tahun 2018 dan 2019. Sementara Audit ESG yang ke-3 dan ke-4 dilaksanakan oleh Ramboll Consulting di tahun 2020 dan 2021.

Laporan Keberlanjutan 2021 juga terdiri dari penilaian pelaksanaan yang tengah berjalan, kepatuhan dan program yang telah didefinisikan pada Rencana Kerja Sosial dan Lingkungan “Environmental Social Action Plan- ESAP” perusahaan dan Rencana Kerja Perlindungan Lanskap (Landscape Protection Plan - LPP). Tujuan dari review tersebut juga untuk menilai progres terhadap ESAP sesuai dengan *International Finance Corporation Performance Standards* (IFC PS). Demikian pula data yang dilaporkan terkait dengan upaya konservasi terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, peningkatan penghidupan masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan dalam TLFF KPI dan LPP.

RLU berupaya menjadi pemimpin dalam membangun produksi karet alam yang berkelanjutan dan memperkenalkan model baru atas produksi karet alam yang berkelanjutan yang secara inklusif secara sosial, pemberdayaan ekonomi dan ramah lingkungan di seluruh rantai nilai. Kemajuan yang signifikan telah dicapai menuju kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial sejak pendirian RLU. Namun, perlu dicatat bahwa dalam upaya untuk sepenuhnya menjalankan komitmen perusahaan dan menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan karet alam yang berkelanjutan terdapat beberapa tantangan yang akan membutuhkan inovasi, dukungan dan waktu.

Perubahan data Laporan Keberlanjutan 2021 terkait dengan pengumuman perubahan kepemilikan saham di RLU dan anak perusahaannya PT LAJ, PT WW, PT MKC dalam hal ini pada bulan Juli 2022 Michelin telah melaksanakan akuisisi saham 100% saham kepada RLU dan seluruh anak perusahaannya menjadikan Michelin sebagai pemilik dan pemegang saham tunggal di RLU. Detail mengenai struktur kepemilikan perusahaan akan dijelaskan di bagian Struktur Perusahaan pada laporan ini.

For the record, the 1st and 2nd ESG Audits were conducted by PT Daemeter Consulting (Daemeter) in 2018 and 2019. While the 3rd and 4th ESG Audits were conducted by Ramboll Consulting in 2020 and 2021.

The 2021 Sustainability Report also comprises an assessment of the ongoing implementation, compliance, and programs as defined in the Company's Environmental Social Action Plan (ESAP) and Landscape Protection Plan (LPP). The purpose of the review is also to assess progress against the ESAP in accordance with the International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS). Similarly, data is reported on conservation efforts toward biodiversity protection, and community livelihood improvement as indicated in the TLFF KPIs and LPP.

RLU endeavours to be a leader in establishing sustainable natural rubber production and introducing a new model of sustainable natural rubber production that is socially inclusive, economically empowering, and environmentally sustainable across the value chain. Significant progress has been made toward compliance with environmental and social standards since the establishment of the RLU. However, it should be noted that in the endeavour to fully deliver on the company's commitments and be at the forefront of sustainable natural rubber implementation there are several challenges that will require innovation, support and time.

Changes to the 2021 Sustainability Report data are related to the announcement of changes in share ownership in RLU and its subsidiaries PT LAJ, PT WW, PT MKC in this case in July 2022 Michelin has carried out a 100% share acquisition of shares to RLU and all its subsidiaries making Michelin the sole owner and shareholder in RLU. Details of the company's ownership structure will be explained in the Corporate Structure section of this report.

Latar Belakang dan Gambaran Umum

Background and Overview

Ramboll Environ Singapore Pte Ltd (Ramboll) ditunjuk PT. Royal Lestari Utama (RLU) untuk melakukan kajian Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) secara independen terhadap operasi RLU pada tahun 2021 di tiga konsesi RLU yang berlokasi di Jambi dan Kalimantan Timur, Indonesia.

Proyek RLU dirancang untuk melindungi lingkungan hidup dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Inti dari upaya ini adalah pembentukan kawasan konservasi satwa liar di area konsesi RLU sebagai penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Jambi, yang merupakan habitat bagi fauna yang terancam punah seperti harimau, orangutan, dan gajah. Hal ini akan membantu melindungi perbatasan selatan Taman Nasional dari perambahan di area yang mempunyai tekanan populasi yang tinggi dan degradasi parah dibandingkan kawasan konservasi hutan lainnya. Selain itu, RLU juga telah menyisihkan semua kawasan Nilai Konservasi Tinggi (ABKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), serta kawasan riparian, untuk perlindungan di konsesi Jambi dan Kalimantan Timur. Dipercirikan ada sekitar 50.000 orang yang saat ini tinggal di dalam atau berdekatan dengan area konsesi RLU. RLU telah menjalin kemitraan dengan spesialis internasional untuk mendukung aspek masyarakat lokal dan masyarakat adat, antara lain dengan menyediakan pemeriksaan kesehatan secara teratur serta dukungan pendidikan yang berkelanjutan, dan memfasilitasi penerbitan KTP nasional untuk kelompok Orang Rimba yang tinggal di Kawasan Konservasi Satwa Liar RLU (WCA), dalam kemitraan dengan pemerintah sebagai bagian dari program WCA.

Ramboll Environ Singapore Pte Ltd (Ramboll) was commissioned by PT. Royal Lestari Utama (RLU) to undertake an independent Environmental, Social and Governance (ESG) review of RLU's operations in 2021 within RLU's three concessions located in Jambi and East Kalimantan, Indonesia.

The RLU's project is designed to protect the environment and improve the people's livelihood. At the heart of these efforts is the establishment of a wildlife conservation area on RLU's concessions as a buffer to the Bukit Tigapuluh National Park in Jambi, which is a habitat for critically endangered fauna such as tigers, orangutans and elephants. This will help protect the southern border of the National Park from encroachment in a landscape with high population pressure and severe degradation of other existing forest conservation areas. In addition, RLU has set aside all High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) areas, as well as riparian areas, for protection on both the Jambi and East Kalimantan concessions. There is an estimated 50,000 people currently live in and adjacent to the RLU concessions. RLU has partnered with international specialists to support the local community and indigenous people aspects, for example RLU provides regular health checks as well as ongoing education support, and facilitates national ID Card issuance to indigenous Orang Rimba group living in the RLU Wildlife Conservation Area (WCA), in partnerships with the government as part of the WCA program.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

RLU didirikan pada tahun 2015 sebagai perusahaan patungan antara Michelin Group Perancis (49%), salah satu produsen ban terbesar di dunia, dan Barito Pacific Group (51%). RLU berusaha untuk menjadi produsen karet alam berkelanjutan terdepan di dunia, dengan menerapkan model produksi karet berkelanjutan di lahan yang dapat memberdayakan ekonomi, sosial inklusif, dan ramah lingkungan di seluruh rantai nilai. RLU menjalankan dan mengelola perkebunan karet yang berkelanjutan di Indonesia melalui tiga anak perusahaan pemegang Izin Hutan Tanaman Industri (HTI), yakni PT. Lestari Asri Jaya (LAJ), PT. Wanamukti Wisesa (WMW), dan PT. Multi Kusuma Cemerlang (MKC). Secara kolektif RLU dan anak perusahaannya dikenal sebagai RLU Group. Pada tahun 2016, MKC membangun fasilitas pengolahan karet alam pertama di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kapasitas total 27.000 ton per tahun di Palaran, Kota Samarinda. Fasilitas ini mulai beroperasi pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, TLFF I Pte Ltd (TLFF) menerbitkan sustainability bond senilai USD 95 juta untuk membiayai pinjaman bagi RLU yang digunakan untuk pengembangan perkebunan karet berkelanjutan di Jambi (Sumatra) dan Kalimantan Timur. Pinjaman tersebut sebagian dijamin oleh USAID dan merupakan sustainability bond korporasi pertama di Asia. Pada tahun 2019, &Green Fund, lembaga pendanaan investasi yang terstruktur atas skema keuangan campuran yang berfokus pada perlindungan hutan dan komoditas hutan tropis melakukan pembelian obligasi TLFF sebesar USD 23.75 juta oleh untuk membantu mempercepat penerbitan obligasi tersebut.

Pada tahun 2020, +22.000 ha karet komersial berkelanjutan telah ditanam di seluruh konsesi RLU di Jambi dan Kalimantan Timur. RLU telah mengalokasikan sekitar setengah luas lahan untuk konservasi, restorasi, mata pencarian, perlindungan stok karbon, dan produksi karet petani kecil. Area tersebut telah disisihkan sebagai zona penyangga untuk melindungi hutan dataran rendah tropis, mega-fauna, dan hotspot keanekaragaman hayati di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh (BTPNP) di Jambi.

RLU was established in 2015 as a joint venture between France's Michelin Group (49%), one of the world's largest tire producers and Barito Pacific Group (51%). RLU strives to become a world leader in sustainable natural rubber by promoting a new model of sustainable rubber production that is economically empowering, socially inclusive, and environmentally friendly throughout the value chain. RLU runs and manages sustainable rubber plantations in Indonesia through three subsidiaries of Industrial Forestry License (HTI), PT. Lestari Asri Jaya (LAJ), PT. Wanamukti Wisesa (WMW), and PT. Multi Kusuma Cemerlang (MKC). RLU and its subsidiaries are collectively known as RLU Group. In 2016, MKC constructed a rubber processing facility with a total capacity of 27,000 tons per year in Palaran, Samarinda City, the first natural rubber processing facility in East Kalimantan Province. The facility commenced operations in 2017.

In 2018, TLFF I Pte Ltd (TLFF) issued a USD 95 million sustainability bond to finance a loan to RLU for the development of sustainable rubber plantations in Jambi (Sumatra) and East Kalimantan. The loan was partially guaranteed by USAID and represented Asia's first corporate sustainability bond. In 2019, the &Green Fund, a blended finance impact investment fund focused on forest protection and tropical forest commodities, purchased USD 23.75 million of the longer-dated notes issued by TLFF helping to catalyse the notes issuance.

In 2020, a total of +22,000 ha of commercial sustainable natural rubber had been planted across the RLU concessions in Jambi and East Kalimantan. RLU sets aside roughly half the land for conservation, restoration, livelihoods, carbon stock protection and smallholder rubber production. The set-aside areas are intended to provide a contiguous buffer zone to protect tropical lowland forest, mega-fauna, and biodiversity hotspots around the Bukit Tigapuluh National Park (BTPNP) in Jambi.

Tujuan Objectives

Sebagaimana dituangkan dalam Kebijakan Keberlanjutan, RLU berkomitmen untuk mendorong kemajuan yang berkesinambungan di seluruh operasinya, menyampaikan transparansi operasinya, dan menunjuk pihak ketiga yang independen untuk memverifikasi komitmen kebijakan di bidang sosial dan lingkungan setiap tahunnya.

Kajian ESG tahunan ini merupakan penilaian independen terhadap pelaksanaan, kepatuhan, pemantauan dan pelaporan atas prosedur, praktik dan program yang tengah berlangsung yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) dan sesuai standar lain yang relevan seperti Standar ESG TLFF dan Rencana Perlindungan Lansekap (LPP) &Green. Tujuan dari dilakukannya kajian ini adalah untuk menilai seberapa jauh kemajuan dalam pelaksanaan ESAP berdasarkan *International Finance Corporation Performance Standards* (IFC PS), KPI yang dikembangkan oleh TLFF, yang mencakup tujuan inti untuk Retensi Hutan, Peningkatan Mata Pencarian Pedesaan, Pengurangan Emisi, dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati, dan KPI yang disajikan dalam LPP &Green.

As outlined under its Sustainability Policy, RLU is committed to driving continuous progress across its operations, providing transparency of its operation and appointing an independent third party to annually verify that the policy commitments in social and environment.

This annual ESG review is an independent assessment of the ongoing implementation, compliance, monitoring and reporting of the procedures, practices and programmes set out in the Environmental and Social Action Plan (ESAP) and by other relevant standards such as TLFF ESG Standards and &Green Landscape Protection Plan (LPP). The objective of the review is to assess the progress against the ESAP based on International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS), KPIs developed by the TLFF which include core objectives for Forest Retention, Improved Rural livelihoods, Reduced Emissions, and Biodiversity Protection, and KPIs presented in the &Green LPP.

Standar Pemberi Pinjaman yang Berlaku Applicable Lender Standards

Persyaratan pemberi pinjaman yang berlaku terdiri dari:

- IFC PS tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial;
- Tujuan inti TLFF dan Indikator Kinerja Utama spesifik yang berasal dari operasi RLU; dan
- Persyaratan Rencana Perlindungan Lansekap (LPP) &Green.

The applicable lender requirements comprise:

- IFC PS on Environmental and Social Sustainability;
- TLFF core objectives and specific Key Performance Indicators derived for RLU operations; and
- Requirements of the &Green Landscape Protection Plan (LPP).

Pendekatan Audit ESG ESG Audit Approach

Audit ESG ini dilakukan melalui desk-based assessment terhadap dokumen-dokumen, serta melalui wawancara virtual, dan kunjungan lapangan ke Jambi dan Kalimantan Timur.

The ESG audit comprised a desk-based assessment of documents, virtual interviews, and a physical site visit to Jambi and East Kalimantan

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Prioritas Utama

Overarching Priorities

Penerapan strategi ESG yang komprehensif dan kepatuhan PS IFC merupakan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan upaya terus menerus untuk memenuhi dan mempertahankan pemenuhan persyaratan, serta mengelola risiko E&S yang terus berkembang. RLU menyadari bahwa penerapan komitmen tersebut secara penuh akan menghadirkan sejumlah tantangan dan akan membutuhkan inovasi, dukungan, dan waktu.

Tantangan utama yang terkait dengan implementasi strategi LST dan pemenuhan persyaratan PS IFC untuk RLU dapat dirangkum sebagai berikut:

- Pendekatan yang terkotak-kotak dan kurangnya kepemilikan ESG di seluruh perusahaan;
- Kompleksitas dokumentasi dan kurangnya kapasitas organisasi untuk implementasi penuh PS IFC dan persyaratan ESG;
- Kurangnya keterlibatan internal dan strategi yang terfokus (roadmap) untuk mencapai kepatuhan penuh.

Tantangan-tantangan ini menyebabkan rendahnya semangat keberlanjutan di antara karyawan, terutama karyawan tingkat non-eksekutif. Itu sebabnya, sangatlah penting untuk mengenali tantangan-tantangan utama tersebut dan mengkomunikasikannya kepada mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Beberapa rekomendasi untuk membantu mengatasi tantangan-tantangan ini dapat ditemukan dalam tabel di bawah ini.

Comprehensive ESG strategy implementation and IFC PS compliance is an ongoing journey that requires continuous efforts to meet and sustain the requirements, and manage evolving E&S risks. It is recognised that full implementation of the commitments presents a number of challenges and will require innovation, support and time.

The key challenges related to implementation of ESG strategies and meeting IFC PS requirements for RLU can be summarised as follows:

- Siloed approaches and lack of ownership of ESG across the company;
- Complexity of documentation and lack of organisational capacity for full implementation of IFC PS and ESG requirements;
- Lack of internal engagement and focused strategy (roadmap) on achieving full compliance.

These challenges lead to low sustainability spirit among employees, particularly the non-executive level employees. Acknowledging these key challenges to strategy implementation and communicating them to those who are responsible for the execution is critical. Some recommendations to help address these challenges are provided in the table below.

Memperkuat rasa kepemilikan dan penanaman ESG di dalam Perusahaan Strengthen ownership and embedding of ESG within the Company	Mengurangi kompleksitas dan fokus pada pengembangan kapasitas di seluruh Perusahaan Reduce complexity and focus on capacity building across the Company	Meningkatkan keterlibatan internal di seluruh Perusahaan Improve internal engagement on ESG across the Company
Departemen ESG (Dept) membentuk inti yang kuat untuk implementasi dan pengawasan ESG, namun ada pendekatan 'terkotak-kotak' terhadap ESG yang mengakibatkan ESG tidak tertanam ke dalam organisasi.	Meningkatkan kapasitas organisasi (orang-orang dengan keahlian yang tepat) untuk memastikan kesinambungan, kepemilikan, dan konsistensi dalam keterlibatan pemangku kepentingan perusahaan.	Menggabungkan pendekatan manajemen perubahan untuk menerapkan persyaratan pemberi pinjaman, praktik internasional yang baik, dan PS IFC - dimulai dengan kampanye komunikasi internal dari tim eksekutif / kepemimpinan tentang komitmen dan harapan pada kinerja lingkungan & sosial.
The ESG Department (Dept) forms a strong core for ESG implementation and oversight, however there is a 'siloe' approach to ESG which results in ESG not being embedded into the organisation.	Increase organisational capacity (people with the right skillsets) to ensure continuity, ownership and consistency in the company's stakeholder engagement.	Incorporate a change management approach to implementing lender requirements, good international practice and IFC PS - starting with an internal communications campaign from executive / leadership team on commitment and expectations on E&S performance.
Beberapa saran untuk meningkatkan kepemilikan ESG di seluruh perusahaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan peta jalan yang realistik menuju kepatuhan penuh terhadap PS IFC, sebagaimana disepakati dengan Pemberi Pinjaman; • Meningkatkan kepemilikan ESG oleh Kepala Departemen (HOD) yang ada seperti SHE, HRGA, Land, Operations, dan Plantations, dengan mendelegasikan tanggung jawab tertentu untuk topik/tugas ESG yang terkait dengan pemenuhan PS IFC; • Menetapkan KPI terkait ESG untuk peran manajerial, sebagai bagian dari rencana kinerja pribadi mereka; • Menyelaraskan strategi ESG dan strategi bisnis inti, melalui lokakarya dan kesepakatan di tingkat HOD tentang prioritas dan risiko utama (baik keuangan, non-keuangan) 	Beberapa saran untuk pengembangan kapasitas ESG di seluruh perusahaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Menargetkan perekruit orang-orang dengan keahlian yang tepat untuk implementasi PS IFC; • Mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas internal untuk memenuhi standar yang diperlukan, termasuk pelatihan tentang persyaratan ESG/PS IFC dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk tingkat manajemen, memanfaatkan sumber daya gratis seperti pelatihan IFC1; • Membuat perangkat dokumentasi ESG utama untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kolaborasi - menginventarisasi semua studi E&S, rencana, dll untuk menunjukkan status setiap dokumen (saat ini/aktif/ pensiun) dan interkoneksi serta ketergantungan di antara dokumen-dokumen tersebut. 	Beberapa saran untuk keterlibatan internal karyawan dalam ESG meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi lintas departemen dan operasi perkebunan di lapangan untuk penyelarasan yang lebih baik tentang ESG (apa yang harus dilakukan dan mengapa). • Mengkomunikasikan manfaat praktik keberlanjutan kepada semua karyawan, untuk operasi bisnis, untuk diri mereka sendiri sebagai individu, dan untuk masyarakat di mana mereka berinteraksi. • Terlibat dengan berbagai cara dan berbagai tingkat di dalam Perusahaan seperti dengan champion internal (di bawah HOD), pembaruan manajemen, dll, untuk menjelaskan bahwa keberlanjutan dan praktik E&S yang baik adalah persyaratan internasional / pemberi pinjaman, dan merupakan bagian integral dari memungkinkan RLU untuk makmur.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Memperkuat rasa kepemilikan dan penanaman ESG di dalam Perusahaan Strengthen ownership and embedding of ESG within the Company	Mengurangi kompleksitas dan fokus pada pengembangan kapasitas di seluruh Perusahaan Reduce complexity and focus on capacity building across the Company	Meningkatkan keterlibatan internal di seluruh Perusahaan Improve internal engagement on ESG across the Company
<p>Some suggestions to improve ownership of ESG across the company include:</p> <ul style="list-style-type: none"> Establish a realistic roadmap to full IFC PS compliance, as agreed with the Lenders; Improve ownership for ESG by existing Heads of Department (HOD) such as SHE, HRGA, Land, Operations and Plantations, by allocating certain responsibilities for ESG topics / tasks related to meeting the IFC PS; Establish ESG-related KPIs for management roles as part of their personal performance plans; Align ESG and core-business strategy, through workshops and agreement at HOD level of key priorities and risks (both financial, non-financial). 	<p>Some suggestions for capacity building of ESG across the company include:</p> <ul style="list-style-type: none"> Targeted hiring of people with the right skillsets for IFC PS implementation; Develop a training programme to improve internal capacity to meet the necessary standards, including training on ESG / IFC PS requirements and stakeholder engagement for management level, making use of free resources such as IFC training;¹ Establish a toolkit of key ESG documentation to reduce complexity and improve collaboration - inventorise all E&S studies, plans etc to show status of each document (current / active / retired) and the interconnections and dependencies between them. 	<p>Some suggestions for internal engagement of employees on ESG include:</p> <ul style="list-style-type: none"> Improve the communication across departments and to the plantation operations on the ground for better alignment on ESG (what to do and why). Communicate the benefits of sustainability practices to all employees, for business operations, for themselves as individuals, and for the communities within which they interact. Engage by various means and at levels within the Company such as with internal champions (below HODs), management updates, etc, to explain that sustainability and good E&S practices are international / lender requirements, and an integral part of enabling RLU to prosper.

Temuan Penting dan Rekomendasi

Priority Findings and Recommendations

Rangkuman PS 1 hingga PS 8 di bawah ini menyajikan apa yang menurut Ramboll merupakan temuan dan rekomendasi penting dari Tinjauan ESG 2021.

PS 1: PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL / KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Sistem Penilaian dan Manajemen Lingkungan dan Sosial:

Selama beberapa tahun terakhir, upaya RLU telah difokuskan pada pengembangan sistem dan kebijakan, serta menyelesaikan beberapa proyek khusus E&S, seperti pembaruan Stakeholder Engagement Plan (SEP), dan upaya bersama oleh tim yang relevan untuk mengerjakan proyek MFC sebagai bagian dari pengembangan kapasitas mereka. Penerapan sistem dan kebijakan di seluruh perusahaan berlangsung secara bertahap dan membutuhkan waktu. Beberapa kesenjangan yang masih ada dalam Sistem Manajemen Lingkungan & Sosial (ESMS) RLU terkait dengan PS 1 IFC, dan akibatnya PS 2 hingga PS 8, tetap ada. Meskipun banyak dokumen 'mengatakan hal yang benar' dalam kaitannya dengan standar, namun implementasi di lapangan yang diamati selama wawancara dan kunjungan lapangan ditemukan masih kurang. Hal ini mencerminkan dan berdampak terutama pada kapasitas organisasi, pemahaman, dan yang paling penting adalah dukungan perusahaan terhadap standar sebagai ekspresi praktik industri internasional yang baik (GIIP).

Prioritas selama tahun 2021 adalah melakukan Studi Baseline Sosial Ekonomi (SEB) dan/atau Penilaian Dampak Sosial (SIA) terkait serta pengiriman dua paket Bantuan Teknis (TA). Fokus dan sumber daya substansial yang dicurahkan oleh RLU untuk mendukung SEB dan TA mendapatkan pujian dari Tim Audit. A+CSR dilibatkan untuk melakukan SEB, dan SEB diantisipasi untuk penyelesaian dan pengiriman Laporan pada akhir kuartal pertama tahun 2022. Untuk TA - tentang pengembalian lahan dan Masyarakat Adat (IP) - Monkey Forest Consulting (MFC) dilibatkan hingga tahun 2021 dan masih berlangsung.

The summary of PS 1 through PS 8 below provides what Ramboll considers the priority findings and recommendations from the 2021 ESG Review.

PS 1: ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT / STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Environmental and Social Assessment and Management System:

Over the past few years, RLU's efforts have focused on developing its systems and policies, as well as completing several key E&S special projects such as an update on the Stakeholder Engagement Plan (SEP), and joint efforts by relevant teams to work on the MFC project as part of their capacity building. It is recognised that the embedding of systems and policies across the company progresses gradually and takes time. Several ongoing gaps in RLU's Environmental & Social Management System (ESMS) in relation to IFC PS 1, and consequently PS 2 through PS 8, remain. While many documents 'say the right things' in relation to the standards, the implementation on the ground observed during both the interviews and the site visits was found to be lacking. This reflects and impacts primarily on organisational capacity, understanding, and most importantly company-wide buy-in of the standards as an expression of good international industry practice (GIIP).

A priority through 2021 was the conduct of a Socio-Economic Baseline study (SEB) and/or associated Social Impact Assessment (SIA) and delivery of two Technical Assistance (TA) packages. The substantial focus and resources devoted by RLU to support the SEB and TAs is commended by the Audit Team. A+CSR was engaged to conduct the SEB, and the SEB is anticipated for completion and delivery of a final Report in the first quarter of 2022. For the TAs - on land return and Indigenous People's (IPs) - Monkey Forest Consulting (MFC) was engaged through 2021 and they remain ongoing.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

Penelitian A+CSR dan MFC mendukung temuan-temuan terkait ESMS dan penilaian dampak. Misalnya, RLU memiliki beberapa rencana pengelolaan menyeluruh dan analisis penggunaan lahan (IFMP, LPP, ABKT/SKT, Survei Penggunaan Lahan [SLUS], peta Penggunaan Lahan/Tutupan Lahan [LULC]) yang menawarkan berbagai gambaran penggunaan lahan konsesi dan yang menggunakan terminologi yang berbeda. Evolusi dari satu rencana ke rencana lainnya dan status berbagai rencana dan set data tampak jelas bagi personel RLU yang terlibat langsung. Namun, tidak ada dokumentasi yang menjelaskan evolusi ini dan rencana mana (atau bagian mana dari rencana) yang masih berlaku. Sekali lagi, konsolidasi semua studi direkomendasikan.

Tindakan yang Direkomendasikan:

- Menginventarisasi semua studi lingkungan & sosial dan rencana pengelolaan untuk menunjukkan status setiap dokumen (saat ini/aktif/pensiun) serta keterkaitan dan ketergantungan di antara komponen-komponen, dengan mengkonsolidasikannya jika memungkinkan. Pemetaan dokumentasi dapat digambarkan secara grafis untuk kemudahan penggunaan.

Identifikasi Risiko dan Dampak:

Terlepas dari ESDD 2017 yang merupakan sumber daya yang berguna, RLU belum menerapkan penilaian E&S penuh dan baseline sosial-ekonomi seperti yang biasanya terjadi pada proyek skala ini. Akibatnya, RLU tidak memiliki data dan analisis spesifik yang diperlukan untuk mengembangkan pendekatan mereka terhadap pengembalian lahan, Masyarakat Adat, Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat (CHSS), Warisan Budaya, antara lain dan sejalan dengan PS 1 hingga 8 IFC. RLU saat ini sedang melakukan SEB dan penilaian risiko/dampak terkait (seperti yang direkomendasikan dalam Laporan Tinjauan ESG 2020). Ini adalah komponen penting yang akan mendukung RLU untuk meningkatkan koherensi ESMS-nya dan akan mendukung penanganan kesenjangan IFC PS 1.

A+CSR and MFC research is noted to support the findings regarding the ESMS and impact assessment, among others. For example, RLU has several overarching management plans and land use analyses (IFMP, LPP, ABKT/SKT, Survey of Landuse [SLUS], Land Use / Land Cover [LULC] map) that offer varying pictures of concession land use and that use different terminology. The evolution from one plan to another and the status of various plans and data sets appears clear to RLU personnel directly involved. However, there is no documentation that describes this evolution and which plans (or which parts of plans) are still current. Again, consolidation of all studies is recommended.

Recommended Action:

- Inventorise all E&S studies and management plans to show status of each document (current / active / retired) and the interconnections and dependencies between the components, with consolidation where possible. Mapping of documentation could be depicted graphically for ease of use.

Identification of Risks and Impacts:

Notwithstanding the 2017 ESDD which is a useful resource, RLU has not yet implemented a full E&S assessment and socio-economic baseline as would normally be the case for a project of this scale. As a result, RLU lacks the specific data and analysis needed to develop their approach to land return, IPs, Community Health, Safety and Security (CHSS), Cultural Heritage, among others and in line with IFC PS 1 through 8. RLU is currently in the midst of conducting the SEB and associated risk/impact assessment (as recommended in the 2020 ESG Review Report). This is a critical component that will support RLU to improve the coherency of its ESMS and will support addressing IFC PS 1 gaps.

Tinjauan dasbor dan hasil SEB awal menunjukkan adanya proses yang kuat untuk SEB, termasuk format, dan metodologi yang konsisten dengan GIIP. SEB telah menargetkan 500 responden pada awalnya, dan dengan tambahan 150 rumah tangga yang ditargetkan untuk disurvei di masing-masing Jambi dan Kalimantan Timur pada awal 2022. Jumlah responden terutama dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang tersedia untuk SEB; studi ini harus memastikan bahwa studi ini membenarkan dan mengomentari kekokohan ukuran sampel sebagai perwakilan dari populasi di wilayah pengaruh Proyek. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, RLU tetap proaktif dalam mengembangkan SEB.

Yang menjadi prioritas adalah bahwa RLU dapat menggunakan alat SEB (KOBOToolbox, dan PowerBI Dashboard) sendiri untuk melakukan kegiatan baselining tambahan secara progresif sehingga seiring waktu baseline yang representatif dapat terbentuk.

Rekomendasi:

- Berdasarkan hasil SEB yang akan datang, lakukan latihan pelingkupan ESIA desktop yang mencakup seluruh konsesi (Jambi dan Kalimantan Timur), untuk mengidentifikasi kesenjangan, jika ada. Hal ini akan memungkinkan RLU untuk menjangkau dampak-dampak utama dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang sesuai berdasarkan penerapan hierarki mitigasi.
- Setelah penyelesaian/revisi Rencana Pengelolaan (MP) (dan prosedur) seperti yang saat ini direncanakan sebagai bagian dari TA dan termasuk Pelingkupan ESIA yang direkomendasikan, lakukan pelatihan kesadaran dan sosialisasi internal sehubungan dengan dokumentasi yang telah direvisi untuk semua staf RLU yang terlibat dalam implementasi untuk membantu mendorong pemahaman tentang persyaratan/praktik, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan.
- Memprioritaskan pengembangan kapasitas (sesuai dengan Addendum kontrak A+CSR) tim RLU dengan A+CSR tentang metodologi dan platform untuk pengumpulan dan analisis data SEB, sehingga alat ini dapat digunakan secara efektif oleh RLU.
- Mengembangkan rencana SEB yang menargetkan kegiatan SEB lebih lanjut, dengan fokus khusus pada IP dan target pengembalian lahan.

Review of the dashboard and preliminary SEB results indicate a robust process in place for SEB, including format, and methodology that is consistent with GIIP. The SEB has targeted 500 respondents initially, and with an additional 150 households targeted for survey in each of Jambi and East Kalimantan in early 2022. The number of respondents is mainly influenced by the constrained budget available for the SEB; the study should ensure that it justifies and comments on robustness of the sample size as representative of the population in the Project area of influence. Despite these challenges RLU remains proactive in developing the SEB.

A priority is that RLU is able to utilise the SEB tools (KOBOToolbox, and PowerBI Dashboard) themselves in order to undertake additional baselining activities in a progressive manner such that over time a representative baseline is established.

Recommendations:

- Based on forthcoming SEB results, conduct a desktop ESIA scoping exercise that covers the entire concession (Jambi and East Kalimantan), to identify gaps, if any. It would allow RLU to scope key impacts and identify appropriate mitigation measures based on application of the mitigation hierarchy.
- Upon completion / revision of Management Plans (MPs) (and procedures) as currently planned as part of TA and including the recommended ESIA Scoping, conduct internal awareness and socialisation training in relation to the revised documentation for all RLU staff involved in implementation to assist in driving understanding of the requirements / practices, and who is responsible for implementing.
- Prioritise capacity building (as per A+CSR contract Addendum) of RLU teams with A+CSR on methodologies and platform for SEB data collection and analysis, such that these tools are able to be effectively utilised by RLU.
- Develop a SEB plan that targets further SEB activities, with particular focus on IPs and land return targets.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

Program Pengelolaan:

Penilaian alternatif belum dilakukan secara memadai sesuai dengan PS IFC sebagai bagian dari studi sebelumnya untuk Proyek. Hal ini diharapkan mencakup penilaian alternatif-alternatif untuk penentuan lokasi proyek dan untuk desain dan konfigurasi proyek yang diusulkan. Penilaian alternatif didasarkan pada hierarki mitigasi yang menetapkan bahwa preferensi harus diberikan pertama-tama untuk menghindari dampak, kemudian meminimalkan dampak, dan akhirnya, jika perlu, sebagai kompensasinya.

RLU menerapkan hierarki mitigasi yang bervariasi seperti ditunjukkan dalam rencana dan pendekatan pengelolaan yang ada saat ini dan dibuktikan dalam diskusi wawancara. Hal ini termasuk strategi referensi untuk menghindari area tertentu untuk penanaman. Namun sayangnya, dokumentasi yang mendukung pengambilan keputusan untuk menghindari atau meminimalkan dampak dan risiko, tidak cukup baik. Dalam pekerjaan sebelumnya bersama WWF, telah ditetapkan SLUS untuk penanaman dengan kerangka kerja pengambilan keputusan yang dapat digunakan sebagai sumber daya dan dikembangkan lebih lanjut. Ada beberapa alternatif proyek yang sudah fix, namun ada proyek-proyek lain yang masih terbuka untuk penyesuaian (bauran produksi: penanaman vs kemitraan, lokasi penanaman), dan dengan demikian nilai penilaian alternatif lebih lanjut sebagai bagian dari pelingkupan ESIA yang direkomendasikan tetap penting untuk pengambilan keputusan di masa depan.

Rekomendasi:

- Memasukkan penilaian alternatif ke dalam latihan Pelingkupan ESIA (lihat juga PS5) dengan fokus khusus pada alternatif pengembalian lahan.

Kapasitas dan Kompetensi Organisasi:

Kapasitas organisasi, termasuk peran dan tanggung jawab, pengetahuan tentang standar internasional, keterampilan perencanaan, struktur, dan budaya organisasi merupakan komponen penting dalam mendesain dan mengimplementasikan ESMS yang efektif dan patuh, termasuk dalam mengelola dampak dan risiko. Poin utama yang diangkat dalam banyak wawancara audit terkait dengan kapasitas dan kompetensi organisasi. Temuan-temuannya termasuk:

Management Programs:

Alternatives assessment has not been adequately conducted consistent with IFC PS as part of previous studies for the Project. This would be expected to include assessing alternatives to the project siting and to the proposed design and configuration of the project. The alternatives assessment is based on the mitigation hierarchy which stipulates that preference should be given first to avoiding impacts, then to minimize them, and finally, if necessary, to compensate them.

RLU has varyingly applied the mitigation hierarchy as demonstrated in existing management plans and approaches and corroborated in interview discussions. This includes referencing strategies for avoidance of certain areas for planting, among others. However, documentation supporting decision-making to avoid or minimise impacts and risks is somewhat poor. Previous work with WWF had established the SLUS for planting with a decision making framework which could be drawn on as a resource and developed further. While some project alternatives are fixed, others remain open for adjustment (production mix: planting vs partnering, planting locations), and as such the value of further alternatives assessment as part of ESIA scoping remains important for future decision-making.

- Pendekatan yang terkotak-kotak terhadap isu-isu lintas sektoral. Misalnya, pengembalian lahan ditangani oleh Departemen Operasi/Pertumbuhan dan Hukum, sementara Departemen Keberlanjutan mengelola kinerja dan kepatuhan lingkungan dan sosial, yang tampaknya menyebabkan putusnya hubungan antar departemen, baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat operasi

- Pembagian data dan informasi tidak memadai antar departemen.
- Tim RLU memiliki berbagai tingkat pengetahuan tentang standar internasional dan PS IFC, sering kali kurang memiliki kesadaran akan rincian proses dan persyaratan khusus dari standar. Juga terdapat berbagai tingkatan dukungan operasional untuk tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mendukung kepatuhan terhadap PS IFC.
- Peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik dan alat kolaborasi di seluruh divisi RLU umumnya tidak jelas.
- Dalam hal sumber daya, ada tantangan dalam memenuhi target/KPI yang ditetapkan. Tantangan-tantangan ini menjadi semakin berat karena tingginya pergantian staf di tingkat operasional.
- Adanya kendala anggaran telah mengganggu kinerja tahun 2021, dan mempengaruhi kemampuan sumber daya Proyek. Hal ini dianggap menghadirkan tantangan dalam pelaksanaan Proyek untuk memenuhi persyaratan PS IFC.

Rekomendasi:

- Memastikan bahwa semua kegiatan terintegrasi, mulai dari perencanaan strategis hingga implementasi di lapangan. Mengembangkan SOP untuk kolaborasi antar departemen termasuk matriks Responsible, Accountable, Consulted and Informed (RACI) untuk pengembalian lahan, pertemuan yang telah ditetapkan sebelumnya, pesan-pesan kunci yang sama, dan perangkat kolaborasi lainnya di seluruh divisi untuk memastikan bahwa divisi-divisi beroperasi berdasarkan konsensus yang digerakkan oleh kepatuhan di semua tingkat organisasi dan saat berada di lapangan.

- Siloed approaches to cross-cutting issues. For example, land return is handled by the Operations/Growth and Legal Departments while the Sustainability Department manages environmental and social performance and compliance, which appears to lead to a disconnect between departments both at a corporate level and at an operations level.
- Data and information sharing is inadequate between departments.
- RLU teams possess various levels of knowledge of international standards and the IFC PS, often lacking awareness of details of the processes and specific requirements of the standards. There are also varying levels of support for actions that are needed in support of compliance with IFC PS.
- Well defined roles and responsibilities and collaboration tools across RLU divisions are generally unclear.
- In terms of resourcing, there are challenges in meeting the targets / KPIs set. These challenges are compounded by high staff turnover at an operational level.
- Budget constraints are indicated to have plagued 2021, including affecting the ability to resource the Project and which is considered to present ongoing challenges for the ability to implement the Project to meet the requirements of IFC PS.

Recommendations:

- Ensure that all activities are integrated, from strategic planning through to implementation in the field. Develop a SOP for inter-departmental collaboration including a Responsible, Accountable, Consulted and Informed (RACI) matrix for land return, pre-set meetings, common key messages, and other collaboration tools across divisions to ensure that divisions operate by compliance-driven consensus at all levels of the organisation and while in the field.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan dan Sosial (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	--	---

8. Menerapkan *organisation-wide orientation* pada peraturan nasional, persyaratan pemberi pinjaman, praktik internasional yang baik, dan PS IFC yang berfokus pada pengungkapan dan penanganan sikap organisasi terhadap kinerja lingkungan dan sosial.
9. Membangun pendekatan untuk menerapkan persyaratan pemberi pinjaman, praktik internasional yang baik, dan PS IFC yang memberikan ketahanan bagi perusahaan dan kemampuan untuk menavigasi perubahan, dimulai dengan dukungan dan kampanye komunikasi internal yang berkelanjutan dari tim eksekutif/pimpinan mengenai komitmen dan harapan terhadap kinerja lingkungan dan sosial.
10. Melibatkan sumber daya internal yang memiliki pengetahuan dalam penerapan PS IFC dan penerapannya. Sumber daya ini harus diberdayakan untuk mengarahkan divisi-divisi RLU sesuai dengan PS dan secara khusus mengarahkan evolusi dan perubahan yang diperlukan pada ESMS untuk mendukung hal tersebut.
11. Merasionalisasi tim berbasis lapangan, yang saat ini beroperasi secara terpisah (misalnya Pertumbuhan/Operasi vs Keberlanjutan) dengan menciptakan tim lapangan gabungan untuk melakukan kegiatan di lapangan. Hal ini akan memungkinkan sumber daya diarahkan dengan lebih baik ke tempat yang dibutuhkan, dan mendukung pendekatan “satu Perusahaan”.
12. Berdasarkan rasionalisasi di atas, sumber daya personil tambahan dengan pemahaman tentang PS IFC dan persyaratan pemberi pinjaman lainnya akan diperlukan untuk menerapkan dan menanamkan Roadmap pengembalian lahan, Perencanaan Masyarakat Adat, CPP, dan lain-lain.
13. Implement an organisation-wide orientation on national regulations, on lender requirements, good international practice, and the IFC PS that focuses on revealing and addressing organisational attitudes towards E&S performance.
14. Build an approach to implementing lender requirements, good international practice and IFC PS which provides resilience to the company and ability to navigate change - starting with support and ongoing internal communications campaign from executive / leadership team on commitment and expectations on E&S performance.
15. Engage an internal resource who is knowledgeable in the application of IFC PS and their application. This resource should be empowered to direct RLU divisions in conformance with the PS and specifically in leading the evolution and required changes to the ESMS in support of this.
16. Rationalise field-based teams, which currently operate separately (e.g. Growth/Operations vs Sustainability) by creating joint field teams to go about activities in the field. This will allow resources to be better directed where needed, and support a “one Company” approach.
17. Based on above rationalisation, additional personnel resources with understanding of IFC PS' and other lender requirements would be required to implement and embed the land return Roadmap, Indigenous People's Planning, CPP, among others.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan:

Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif, konsultasi, dan pengungkapan informasi, yang didasarkan pada Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) yang kuat, merupakan landasan yang menjadi dasar kemampuan RLU untuk memajukan Proyek. Ada kemajuan yang terbatas sehubungan dengan temuan utama dan rekomendasi yang dibuat dalam Laporan Audit 2020. Beberapa dari kurangnya kemajuan ini disebabkan oleh kegiatan SEB yang sedang berlangsung yang merupakan masukan untuk revisi yang diperlukan dari SEP, dan beberapa lainnya terkait dengan paket TA yang sedang berlangsung dan penilaian ABKT-SKT. Namun demikian, diakui bahwa COVID-19 telah secara signifikan membatasi kemampuan tim RLU dalam melakukan kegiatan pelibatan.

Di lapangan, kunjungan lapangan yang dilakukan sebagai bagian dari Audit 2021 pada bulan Januari 2022, mengidentifikasi bahwa kesenjangan yang dicatat dalam Laporan Audit 2020 tetap relevan. Temuan khusus dari kunjungan lapangan mencakup identifikasi kebutuhan RLU untuk secara lebih efektif menggambarkan antara Jambi dan Kalimantan Timur (melalui SEP yang terpisah dan spesifik lokasi). Forum komunikasi pemangku kepentingan disorot dan dipuji karena telah terbentuk dengan baik di Jambi, meskipun tidak untuk Kalimantan Timur. Terakhir, kunjungan lapangan menemukan bahwa sumber daya pelibatan pemangku kepentingan / penghubung masyarakat di Kalimantan Timur tampaknya tidak cukup untuk melakukan dan memenuhi tujuan pelibatan.

Stakeholder Engagement:

Effective stakeholder engagement, consultation and information disclosure, predicated on a robust Stakeholder Engagement Plan (SEP) is a cornerstone upon which RLU's ability to progress the Project relies. There has been limited progress in relation to the key findings and recommendations made in the 2020 Audit Report. Some of the lack of progress is due to ongoing SEB activities which are inputs to the revisions required of the SEP, and some are in relation to ongoing TA packages and HCV-HCS assessment. However in addition, it is recognised that COVID-19 has significantly restricted the ability of the RLU teams to conduct engagement activities.

On the ground, the site visits conducted as part of the 2021 Audit in January 2022, identified that the gaps noted in the 2020 Audit Report remain pertinent. Specific findings from the site visit include identifying the need for RLU to more effectively delineate between Jambi and East Kalimantan (through separate and site-specific SEPs). Stakeholder communications forums are highlighted and commended as being well established in Jambi, though not for East Kalimantan. Lastly, the site visit found stakeholder engagement / community liaison resources in East Kalimantan appear insufficient to undertake and meet the engagement objectives.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan dan Sosial (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	--	---

Rekomendasi:

13. Mekanisme pelibatan pemangku kepentingan yang efektif yang lebih dari sekadar pengungkapan informasi menuju pembagian informasi dua arah, pembangunan hubungan, dan pengembangan serta penyebaran pesan merupakan komponen penting dalam mencapai hasil Proyek yang diinginkan (termasuk isu-isu utama seputar kegiatan pengelolaan lahan). Hal ini membutuhkan penggabungan fungsi perencanaan, pembangunan hubungan, dan penyampaian pesan dengan praktik administrasi dan dokumentasi yang kuat. Rekomendasi dari Audit 2020 tetap relevan dan didokumentasikan (dan sedikit direvisi, selain mengakui rekomendasi MFC tentang topik yang sama) dalam Laporan Audit 2021.

Komunikasi Eksternal dan Mekanisme Pengaduan:

Audit 2020 menemukan bahwa mekanisme pengaduan RLU sebagian besar konsisten dengan GIIP, mengakui kerentanan, gender, Masyarakat Adat, ketakutan akan retribusi, dan anonimitas. Mekanisme ini mencakup peningkatan kesadaran yang berkelanjutan setiap dua bulan di forum masyarakat. Namun, prosedur mekanisme pengaduan kurang mendefinisikan tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan kepada Fasilitator Pengelolaan Pengaduan. Kurangnya kejelasan dalam mendefinisikan ekspektasi dan indikator kinerja untuk posisi Fasilitator Pengelolaan Keluhan akan mempengaruhi bagaimana pengaduan dinilai, diselidiki, dipantau, dan ditutup. Rekomendasi (Laporan Audit 2020) untuk meninjau fungsi mekanisme pengaduan tidak dilakukan pada tahun 2021 karena pembatasan pandemi COVID-19, anggaran dan sumber daya.

Recommendations:

13. An effective stakeholder engagement mechanism that goes beyond disclosure towards two-way information sharing, relationship-building, and message development and dissemination is a critical component in achieving desired Project outcomes (including the key issues around land management activities). It requires combining planning, relationship building, and messaging functions with strong administration and documentation practices. The recommendations from the 2020 Audit remain relevant and are documented (and slightly revised, in addition to recognising MFC's recommendations on the same topic) in the 2021 Audit Report.

External Communications and Grievance Mechanism:

The 2020 Audit found that the RLU grievance mechanism is largely consistent with GIIP, acknowledging vulnerability, gender, IPs, fear of retribution, and anonymity. The mechanism includes ongoing awareness raising every two months at community forums. However, the grievance mechanism procedure poorly defines duties and responsibilities assigned to the Grievance Management Facilitator. Lack of clarity in defining expectations and performance indicators for the position of Grievance Management Facilitator will affect how grievances are assessed, investigated, monitored and closed out. The recommendation (2020 Audit Report) to review the functioning of the grievance mechanism was not conducted in 2021 due to the restrictions of COVID-19 pandemic, budget and resources.

RLU telah melakukan upaya untuk mensosialisasikan mekanisme tersebut lebih lanjut selama tahun 2021, termasuk merevisi materi kesadaran, menempatkan poster di desa-desa dan sosialisasi selama pertemuan masyarakat, namun hal ini tampaknya tidak menghasilkan kesadaran yang luas dan/atau diterjemahkan ke dalam penggunaan mekanisme tersebut. Wawancara dengan RLU menunjukkan bahwa COVID-19 hingga 2021 telah membatasi mobilitas dan kurangnya sumber daya, berkontribusi pada kesulitan yang berkelanjutan dalam mensosialisasikan mekanisme dan melaporkan kembali kepada masyarakat. Upaya lebih lanjut dan berkelanjutan dalam hal peningkatan kesadaran dan sosialisasi, terutama di antara MA, dan lebih luas lagi di masyarakat dicatat sebagai keharusan hingga tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengakui keengganannya banyak MA untuk menghadiri pertemuan masyarakat karena takut akan COVID-19, di antara alasan potensial lainnya. Keterbatasan khusus tetap ada dalam keterlibatan dengan MA di luar WCA, dan keterlibatan serta sosialisasi Mekanisme Pengaduan dengan kelompok/individu-individu ini disorot sebagai tantangan yang sedang berlangsung.

Terkait dengan hal di atas, RLU memperluas ruang lingkup TA untuk MFC (karena situasi dinamis yang sedang berlangsung dengan dua keluhan). Ruang lingkup yang diperluas termasuk bantuan dalam menanggapi keluhan, yang berkaitan dengan pengembalian lahan dan IP (melibatkan kelompok komunikasi Mighty Earth, dan SPI-SHN). Ruang lingkupnya mencakup pembinaan RLU, termasuk dalam kaitannya dengan resolusi dan pencegahan konflik. Pekerjaan tercatat telah dimulai pada ruang lingkup yang diperluas, meskipun output / hasil daripadanya tidak tersedia untuk ditinjau selama proses audit. Ruang lingkup yang diperluas dianggap sebagai pengakuan penting oleh RLU tentang perlunya RLU untuk "memiliki" tindakan / solusi - dengan penekanan pada peningkatan pembinaan dan pendampingan untuk RLU dalam menangani keluhan.

Rekomendasi:

14. Fokus melalui tahun 2022 pada sosialisasi yang berkelanjutan dan sistematis/pembangunan kesadaran di sekitar mekanisme pengaduan, terutama di antara Masyarakat Adat. Fokus khusus harus ditempatkan pada sosialisasi mekanisme dengan MA di luar WCA (dan yang kemungkinan memiliki kesadaran paling sedikit).

RLU has made efforts to further socialise the mechanism through 2021, including revising awareness materials, placing posters in villages and socialisation thereof during community meeting, however this does not appear to have resulted in broad awareness and / or translated into use of the mechanism. Interviews with RLU indicated that COVID-19 through 2021 has restricted the mobility and lack of resources, contributed to ongoing difficulties in socialising the mechanism and reporting back to communities. Further and ongoing efforts in terms of awareness raising and socialisation, particularly among IPs, and more broadly in the community are noted to be imperative through 2022 and subsequent years. This recognises the reticence by many IPs to attend community meeting for fear of COVID-19, among other potential reasons. Particular limitations remain in engagement with IPs outside of the WCA, and engagement and socialisation of the Grievance Mechanism with these groups / individuals is highlighted as an ongoing challenge.

Related to the above, RLU expanded the scope of the TA for MFC (due to the ongoing dynamic situation with two grievances). The expanded scope included assistance in responding to grievances, which relate to land return and IPs (involving the communications group Mighty Earth, and SPI-SHN). The scope includes coaching of RLU, including in relation to conflict resolution and prevention. Work is noted to have commenced on the expanded scope, though outputs / outcomes thereof were not available for review during the audit process. The expanded scope is considered to be an important recognition by RLU of the need for RLU to "own" actions / solutions - with an emphasis on increased coaching and mentoring for RLU in handling grievances.

Recommendations:

14. Focus through 2022 on ongoing and systematic socialisation / awareness building around the grievance mechanism, particularly among IPs. Special focus should be placed on socialising the mechanism with those IPs outside of the WCA (and which are likely to have the least awareness thereof).

BAB CHAPTER 1	BAB CHAPTER 2	BAB CHAPTER 3	BAB CHAPTER 4	BAB CHAPTER 5	BAB CHAPTER 6	BAB CHAPTER 7	BAB CHAPTER 8	BAB CHAPTER 9	BAB CHAPTER 10
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	Capaian Lingkungan Sama dengan Pemangku Kepentingan Environmental Highlights	Capaian Sosial Social Highlights	Capaian Produksi Production Highlights	Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

15. Tinjau dan perbarui SEP untuk memasukkan kegiatan sosialisasi/peningkatan kesadaran terkait Mekanisme Pengaduan (selain Forum Komunitas), mencatat frekuensi, menetapkan tanggung jawab, mengidentifikasi pemangku kepentingan sasaran, dll.
16. Menyederhanakan prosedur pengaduan dan diagram alur (yaitu, mengubahnya menjadi prosedur langkah demi langkah) agar lebih mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan, pengadu, serta Fasilitator Manajemen Keluhan. Terkait dengan hal ini, format daftar keluhan juga harus direvisi untuk menyelaraskannya dengan diagram alur untuk memudahkan pelacakan status keluhan yang telah diajukan dan diselesaikan.
17. Sertakan pelaporan berkala (rekomendasikan dua tahunan yang konsisten dengan jadwal audit internal/analisis akar masalah) kepada masyarakat melalui Forum Masyarakat tentang bagaimana RLU telah menangani keluhan melalui perubahan langkah-langkah/tindakan manajemen dan perbaikan yang sedang berlangsung. Menyimpan catatan dalam daftar/log keterlibatan.
18. Melakukan tinjauan (2022) dan mengembangkan laporan tentang (2022) fungsi mekanisme pengaduan.
19. RLU dapat menjajaki jendela/titik pengajuan lain untuk membuat mekanisme dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat Adat, misalnya rumah kepala desa untuk Orang Rimba yang memiliki mobilitas terbatas untuk mencapai kantor proyek RLU. Para pemangku kepentingan dapat dikonsultasikan tentang bagaimana mereka akan merasa paling nyaman untuk menyampaikan keluhan.
20. Sertakan (sesuai rencana) tingkat transparansi yang lebih besar pada manajemen pengaduan yang sedang berlangsung dan upaya untuk menyelesaikan masalah dengan Mighty Earth dan SPI-SHN (dan lainnya seperti yang diajukan) dalam dokumen/laporan yang sesuai.
21. Melakukan pelibatan dan peningkatan kesadaran akan mekanisme pengaduan di desa-desa di luar area konsesi, untuk memperhitungkan orang-orang yang terkena dampak proyek yang tidak berdomisili di area konsesi.

15. Review and update the SEP to include socialisation / awareness raising activities related to the Grievance Mechanism (in addition to Community Forums), noting frequency, assigning responsibility, identifying target stakeholders, etc.
16. Simplify the grievance procedures and flowchart (i.e., converting it into a step-by-step procedure) to make it more understandable for stakeholders, grievant, as well as the Grievance Management Facilitator. Related to this, the format of the grievance register should also be revised to align it with the flowchart for easier tracking of the status of grievances that have been filed and resolved.
17. Include periodic (recommend bi-annual consistent with internal audit schedule / root cause analyses) reporting back to communities through the Community Forum on how RLU has taken onboard grievances through changes to management measures / actions and ongoing improvement. Maintain records in engagement register/log.
18. Conduct a review of (2022) and develop a report on (2022) the functioning of the grievance mechanism.
19. RLU could explore other submission windows/ points to make the mechanism accessible to various stakeholders, including the IPs for example the home of the kepala desa for the Orang Rimba who have limited mobility to reach the RLU project offices. Stakeholders can be consulted on how they would feel most comfortable raising grievances.
20. Include (as planned) a greater level of transparency on ongoing grievance management and efforts to resolve issues with Mighty Earth and SPI-SHN (and others as are lodged) in appropriate documents/reports.
21. Conduct engagement and awareness raising of the grievance mechanism in villages outside of the concession areas, to take into account project affected people that are not domiciled in the concession areas.

Masih ada upaya yang cukup besar atas nama RLU untuk lebih menanamkan protokol dokumentasi dan bukti (terutama proses PADIATAPA). Sebagaimana dicatat di tempat lain dalam Laporan (dan diidentifikasi dalam kunjungan lapangan oleh tim audit), tantangan yang cukup besar tetap ada dalam kesadaran akan persyaratan dan harapan di bawah PS IFC, termasuk dalam kaitannya dengan keterlibatan pemangku kepentingan, persyaratan dokumen dan bukti (untuk menunjukkan PADIATAPA). Hal di atas dikuatkan oleh penilaian yang dilakukan oleh MFC untuk mendukung paket TA. Hal ini termasuk bahwa RLU tidak memiliki pemahaman bersama tentang tujuan keterlibatan pemangku kepentingan dan bagaimana menerapkannya secara efektif untuk memastikan kredibilitas dan efektivitas.

Laporan Audit 2020 menemukan bahwa identifikasi kelompok-kelompok rentan dan spesifikasi mekanisme diferensial yang ada untuk keterlibatan mereka masih kurang dalam SEP (dan dalam praktiknya). Tonggak penting yang dicapai oleh RLU adalah pembentukan kerangka kerja dan rencana IP untuk WCA dan keterlibatan dengan IP, dalam kemitraan dengan para ahli. Meskipun Rencana Keterlibatan dan Mata Pencaharian MA yang terpisah telah dikembangkan yang secara khusus membahas keterlibatan dengan MA (yang dianggap sangat rentan), hal ini tidak meniadakan kebutuhan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan secara lebih luas dan memberikan ketentuan yang berbeda untuk keterlibatan mereka yang berarti. Selain itu, kelompok rentan diidentifikasi secara bervariasi dalam dokumen RLU lainnya untuk mencakup kelompok yang berbeda dalam dokumen yang berbeda. Perlu ada pemahaman yang jelas yang ditunjukkan dalam SEP tentang kelompok mana yang dianggap rentan dan atas dasar apa kerentanan telah diidentifikasi. Rekomendasi dari tahun 2020 telah diupayakan hingga tahun 2021, meskipun SEP belum diperbarui sesuai rekomendasi tentang kelompok rentan - karena SEB dan IP TA yang sedang berlangsung masih berlangsung.

Mengenai kerentanan, TA MFC telah menguatkan temuan Audit 2020, mencatat bahwa diskusi tentang kerentanan tidak cukup atau tidak ada dalam dokumen yang terkait dengan pengembalian lahan.

There remains considerable effort on behalf of RLU to further embed documentation and evidence protocols (particularly FPIC processes). As noted elsewhere in the Report (and identified in the field visit by the audit team), a considerable challenge remains in awareness of requirements and expectations under the IFC PS, including in relation to stakeholder engagement, document and evidence requirements (to demonstrate FPIC). The above is corroborated by assessments conducted by MFC in support of the TA packages. This included that RLU lacks a shared understanding of the purpose of stakeholder engagement and how to effectively implement it to ensure credibility and effectiveness.

The 2020 Audit Report found that the identification of vulnerable groups and specification of differential mechanisms in place for their engagement is lacking in the SEP (and in practice). A key milestone reached by RLU was the establishment of IP framework and plans for the WCA and engagement with IPs, in partnership with experts. While a separate IP Engagement and Livelihoods Plan has been developed which specifically addresses engagement with IPs (who are considered especially vulnerable), this does not negate the need to identify vulnerable groups more broadly and provide differentiated provisions for their meaningful engagement. Furthermore, vulnerable groups are variably identified in other RLU documents to encompass different groups in different documents. There needs to be clear understanding demonstrated in the SEP as to which groups are considered vulnerable and on what basis vulnerability has been identified. Recommendations from 2020 have been somewhat pursued through 2021, though the SEP has not been updated as per recommendations on vulnerable groups - due to ongoing SEB and IP TA which remain underway.

On vulnerability, the MFC TA has corroborated the 2020 Audit findings, noting that discussion of vulnerability is insufficient or absent from documents related to land return.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

PS 2: TENAGA KERJA DAN KONDISI KERJA

Perjanjian Kerja Bersama:

Perlu diperhatikan bahwa Omnibus Law Indonesia (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Ketenagakerjaan yang diamandemen pada tanggal 2 November 2020, telah menetapkan standar baru untuk syarat dan ketentuan ketenagakerjaan dengan memperkenalkan konsep dan aturan baru. Namun, Omnibus Law tidak menguraikan konsep-konsep yang baru diperkenalkan, seperti pemberitahuan prosedur pemutusan hubungan kerja. Hingga tanggal 2 Februari 2021, beberapa peraturan pelaksana diperkenalkan dengan ketentuan umum untuk memperjelas aturan dan prosedur baru. Peraturan pelaksanaan ini termasuk Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP35"); Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ("PP36"); dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ("PP37"). Dapat dipahami bahwa perjanjian kerja bersama yang ada saat ini belum memasukkan perubahan seperti yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah karena masih banyak ketidakpastian sehingga memerlukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut untuk mengklarifikasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada akhir tahun 2021 menyatakan bahwa Omnibus Law tidak konstitusional secara bersyarat dan harus diamandemen dalam waktu dua tahun, oleh karena itu keputusan ini membuat pengusaha bertanya-tanya apa yang diharapkan selanjutnya dan bagaimana mereka harus melanjutkannya. Namun, jika UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formal dan bertentangan dengan Konstitusi, maka UU Cipta Kerja dan semua peraturan pelaksanaannya akan menjadi batal demi hukum.

Penting juga untuk diperhatikan bahwa Omnibus Law dan peraturan pelaksanaannya yang ada masih berlaku hingga saat ini, oleh karena itu RLU harus memasukkan kerangka waktu dalam rencana aksinya untuk memutuskan kapan akan memasukkan perubahan yang signifikan (di mana ada kejelasan persyaratan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PS 2: LABOUR AND WORKING CONDITIONS

Collective Labour Agreements:

It is to be noted that Indonesia's Omnibus Law (Law No. 11 of 2020 on Job Creation, the amended Manpower Law which was issued on November 2, 2020, sets new standards for employment terms and conditions by introducing new concepts and rules. However, the Omnibus Law did not elaborate on the newly introduced concepts, such as the notice of termination procedure. Until February 2, 2021, several implementing regulations were introduced with general terms to clarify the new rules and procedures. These implementing regulations include Government Regulation No. 35 of 2021 regarding Fixed-Term Contract, Outsourcing, Work and Resting Hours, and Termination of Employment ("GR35"); Government Regulation No. 36 of 2021 regarding wages ("GR36"); and Government Regulation No.37 of 2021 regarding the Implementation of the Job Loss Security Program ("GR37"). It is understood that the current collective labour agreements have not incorporated the changes as required by the Government Regulations as there are still many uncertainties needing further legislation to clarify. Additionally, the Constitutional Court in its decision at the end of 2021 declared that the Omnibus Law is conditionally unconstitutional and must be amended within two years, hence this decision left employers wondering what to expect next and how they should proceed. However, if the Job Creation Law is declared formally flawed and against the Constitution, then the Job Creation Law and all its implementing regulations will become null and void.

It is important to note that the Omnibus Law and its existing implementing regulations are still prevailing to date, therefore RLU should include a timeframe in its action plan to decide when to incorporate the significant changes (where clarity of the requirements exist) as stipulated in the Government Regulations.

Standar untuk Pengoperasian Perumahan Pekerja dan Fasilitas Kesejahteraan Lainnya:

Pedoman teknis tentang air, sanitasi, kebersihan dan pengelolaan limbah disusun oleh PT. Towards Sustainable Business (TSB), sebuah perusahaan konsultan keberlanjutan yang dilibatkan oleh RLU. Selain itu, sebuah perusahaan master planner dan desain perkebunan, PT. Panca Agri Solusindo (PAS) juga dilibatkan oleh RLU untuk melakukan perencanaan induk dan pekerjaan desain (termasuk perumahan pekerja dan fasilitas umum) untuk wilayah Jambi dan Kalimantan Timur sejak tahun 2018. Namun, standar yang berkaitan dengan pengoperasian perumahan pekerja dan fasilitas kesejahteraan lainnya (yaitu rumah pertemuan, toilet, mushola, klinik, dll) belum secara resmi ditetapkan dengan manual tertulis atau catatan panduan untuk implementasi yang konsisten di seluruh perkebunan. Dengan tidak adanya rencana manajemen yang menetapkan standar minimum terkait kondisi kehidupan, dan pemeliharaan fasilitas umum dan infrastruktur utilitas, operasi dan manajemen akomodasi pekerja yang tidak memadai dicatat seperti kualitas air yang buruk dan kekurangan pasokan air, pengelolaan limbah di bawah standar, kondisi jalan yang buruk, dll.

Selama kunjungan lapangan dan wawancara dengan personil lapangan, ditemukan masalah-masalah berikut ini:

Jambi

- Masalah keamanan di kompleks pemukiman Beringin 3;
- Kualitas pasokan air yang buruk (air kekuningan dan berminyak) dilaporkan di sebagian besar fasilitas perumahan;
- Fasilitas pengumpulan sampah di Beringin 3 terlihat tidak memiliki atap sehingga menyebabkan masalah kebersihan;
- Kondisi jalan yang buruk;
- Berdasarkan diskusi dengan personel fasilitas yang bertanggung jawab atas fasilitas perumahan pekerja, fasilitas sanitasi menggunakan pengolahan biologis dan pengolahan limbah. fasilitas sanitasi menggunakan pengolahan biologis dan dilaporkan rentan terhadap masalah;
- Aspek positif: Berdasarkan wawancara dengan beberapa penghuni, umpan balik secara keseluruhan adalah bahwa layanan akomodasi pekerja yang baik / memuaskan disediakan.

Standards to the Operation of Worker Housing and Other Welfare Facilities:

Technical guidelines on water, sanitation, hygiene and waste management were established by Pt. Towards Sustainable Business (TSB), a sustainability consulting company engaged by RLU. A master planner and plantation design company, PT. Panca Agri Solusindo (PAS) has been engaged by RLU to conduct the master planning and design works (including workers' housing and public facilities) for Jambi and East Kalimantan region since 2018. However, standards with regards to the operation of worker housing and other welfare facilities (i.e. meeting houses, toilets, prayer rooms, clinics etc) have not yet been formally established with written manual or guidance note for consistent implementation throughout the plantations. In the absence of a management plan establishing minimum standards related to living conditions, and maintenance of public facilities and utility infrastructures, inadequate operation and management of workers' accommodation was noted such as poor water quality and shortage of water supply, substandard waste management, poor road condition, etc.

The following issues were noted during the site visit and interviews with site personnel:

Jambi

- Security issues at Beringin 3 settlement complex;
- Poor water supply quality (yellowish and oily water) was reported in most of the housing facilities;
- Waste collection facilities at Beringin 3 were observed without roofing causing hygiene related issues;
- Poor road conditions;
- Based on discussions with facility personnel responsible for workers housing facilities, the sanitary facilities employ biological treatment and reportedly were prone to problems;
- Positive aspect: Based on the interviews with several residents, overall feedback was that good / satisfactory workers accommodation services are provided.

Kalimantan Timur

- Pasokan air yang terbatas dan kualitas air yang buruk dilaporkan dari penduduk di Blok 1 dan Blok 2;
- Bentuk dan struktur perumahan yang kontras diamati dalam jarak dekat di kompleks perumahan Blok 1. Kondisi seperti itu dilaporkan telah menimbulkan rasa ketidakadilan atau ketidaksetaraan di antara penduduk;

Sejumlah besar penghuni adalah non-Muslim dan dilaporkan merasa bahwa kebutuhan keagamaan mereka belum difasilitasi secara memadai, misalnya, melalui penyediaan tempat ibadah di lokasi atau penyediaan transportasi untuk mengunjungi fasilitas keagamaan yang terletak di luar area konsesi. Ramboll telah melakukan kunjungan ke gedung yang saat ini digunakan untuk tempat ibadah bagi non-Muslim, dan menemukan bahwa tempat tersebut perlu diperbaiki untuk menyediakan kebutuhan ibadah.

Support System untuk Karyawan Wanita:

RLU secara resmi meluncurkan Women's Support Group (WSG), yang secara lokal disebut sebagai WSG Kanita (Kawan Wanita), pada 29 September 2021. WSG Kanita bertujuan untuk menyediakan support system bagi karyawan wanita sebagai saluran yang aman untuk setiap keluhan termasuk pelecehan, berbagi pengalaman, dan pemberdayaan. Pelatihan kesadaran dan implementasi WSG Kanita dilakukan oleh penasihat komite, seorang ahli gender dan sosial dari TLFF.

RLU memantau dan melacak jumlah karyawan perempuan yang bekerja di perkebunan, dan telah membuat komitmen yang kuat untuk melindungi pekerja perempuan di dalam perkebunan. Perusahaan telah menyediakan fasilitas yang bermanfaat bagi perempuan, seperti tempat penitipan anak untuk anak-anak mereka, klinik dan pusat komunitas yang menawarkan peningkatan keterampilan. Meskipun dukungan yang diberikan kepada perempuan patut dipuji, penting untuk dicatat bahwa diperlukan lebih banyak upaya untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masyarakat dan perusahaan, dan akses yang sama bagi perempuan ke peluang kerja di perkebunan. Berdasarkan tinjauan Database Karyawan untuk BU 3 dan BU 4, terbukti bahwa mayoritas karyawan perempuan bekerja sebagai pekerja pemeliharaan dan/ atau pekerja pembibitan, tanpa peran pengawasan atau manajemen.

East Kalimantan

- Limited water supply and poor water quality were reported from residents in Block 1 and Block 2;
- Contrasting housing forms and structures were observed within close distance in Block 1 housing complex. Such conditions reportedly have led to some sense of injustice or inequality among the residents;

A considerable number of residents are non-Muslim and reportedly are feeling that their religious need has not been adequately facilitated, for example, through provision of on-site place of worship or provision of transportation to visit religious facilities located outside the concession area. Ramboll had paid a visit to the building which is currently used for place of worship for non-Muslims, and found that the place warrants improvement to provide for religious observance needs.

Support System to Women Employees:

RLU officially launched the Women's Support Group (WSG), locally referred to as the WSG Kanita (Kawan Wanita - women's friend), on September 29, 2021. WSG Kanita aims to provide a support system for women employees as a safe channel for any grievance including harassment, sharing experiences, and empowerment. Awareness training and WSG Kanita implementation were conducted by the committee's advisor, a gender and social expert from TLFF.

RLU monitors and keeps track on the number of women employees working in the plantation, and has made strong commitments to protect women workers within the plantations. The company has provided facilities that benefit women, such as daycare centres for their children, clinics and community centres that offer skills upgrading. Whilst the support given to women is commendable, it is important to note that more effort are needed to ensure women's representation in community and company decision making, and equal access for women to workplace opportunities in the plantation. Based on the review of Employee Databases for BU 3 and BU 4, it is evident that a majority of women employees are working as upkeep workers and/or nursery workers, with no supervisory or management roles.

Oleh karena itu, upaya untuk menilai dan memperkuat kapasitas manajer, supervisor, dan pekerja untuk mencegah dan menanggapi kekerasan berbasis gender. Pelatihan dan sesi peningkatan kesadaran harus menjadi proses yang berkelanjutan, dan efektivitas program harus diukur dan dilaporkan secara teratur.

RLU telah menanggapi insiden yang menimpak Pekerja Perempuan PT Wanamukti Wisesa3 dengan sumber daya tambahan untuk menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: memperkuat dan menekankan kebijakan dan pendekatan untuk memastikan semua hak dan keselamatan perempuan; memperkuat saluran komunikasi untuk melaporkan pelecehan seksual dan keluhan lainnya; membentuk Kelompok Pendukung Perempuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak di masa mendatang; dan bekerja sama dengan organisasi terkait dan para ahli di bidangnya untuk meningkatkan sistem. Dua kebijakan sedang dipersiapkan (Kebijakan tentang Hak Asasi Manusia dan Kebijakan tentang Pelaporan Pelanggaran), yang ditargetkan akan diadopsi pada tahun 2022. RLU secara resmi meluncurkan Kelompok Pendukung Wanita (WSG Kanita) pada bulan September 2021. Dalam hal meningkatkan saluran komunikasi, selain personil SDM di setiap Unit Bisnis di lokasi dan Kantor Pusat sebagai saluran yang aman bagi karyawan untuk melaporkan keluhan, diskriminasi, pelecehan, dll., RLU telah membentuk komite Kanita yang disarankan oleh Direktur Urusan Korporat dan Spesialis Gender TLFF dan dipimpin oleh Sustainability GM. RLU juga menjajaki kerja sama dengan Yayasan Pulih, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Indonesia yang berfokus pada penguatan kelompok rentan psikososial dan korban kekerasan berbasis gender untuk mengembangkan Program Pendidikan tentang pencegahan dan mitigasi kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Upaya-upaya ini telah berlangsung pada tahun 2021 dan direkomendasikan untuk ditinjau kembali sebagai bagian dari audit tahun 2022.

Basis Data Karyawan dan Pekerja Kontrak

Database karyawan dan pekerja kontrak masih dalam pengembangan. Data karyawan dan pekerja kontrak didaftarkan secara manual dalam spreadsheet. Selama kunjungan lapangan, Ramboll meninjau spreadsheet dan mencatat bahwa formatnya sulit untuk melacak dan mengeksplorasi informasi. Ada risiko inkonsistensi dan redundansi data dengan tidak adanya alat yang tepat untuk menyortir atau menyaring data secara efisien.

Thus, efforts to assess and strengthen the capacities of managers, supervisors and workers to prevent and respond to gender-based violence. Training and awareness raising sessions should be a continuous process, and programme effectiveness should be measured and reported on a regular basis.

RLU has responded to the incident to PT Wanamukti Wisesa's Female Worker3 with additional resources to implement the measures as follows: strengthen and emphasize policies and approaches to ensure all women's rights and safety; strengthen communication channels to report sexual harassment and other grievances; establish Women Support Groups to prevent any rights violations going forward; and cooperate with relevant organizations and experts in the field to improve systems. Two policies are being prepared (a Policy on Human Rights and a Policy on Whistleblowing), targeted to be adopted in 2022. RLU officially launched the Women's Support Group (WSG Kanita) in September 2021. In terms of improving communication channels, in addition to HR personnel at each Business Unit on site and Head Office as a safe channel for employees to report any grievance, discrimination, harassment etc, RLU has established Kanita's committee advised by the Director of Corporate Affairs and TLFF's Gender Specialist and led by Sustainability GM. RLU is also exploring collaboration with Yayasan Pulih, an Indonesian based non-profit organization that focuses on strengthening psychosocial vulnerable groups and victims of gender based violence to develop an Education Program on prevention and mitigation of gender based violence in the workplace. These efforts have been ongoing in 2021 and are recommended to be reviewed again as part of the 2022 audit.

Employee and Contract Worker Database

The employee and contract worker database is still under development. Data of employees and contract workers is registered manually in spreadsheets. During the site visit, Ramboll reviewed the spreadsheets and noted that the format is difficult to track and explore the information. There is a risk of data inconsistencies and redundancies with the absence of appropriate tools to efficiently sort or filter the data.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Potensi Risiko Pekerja Anak di Perkebunan

Berkenaan dengan potensi risiko pekerja anak di perkebunan, RLU telah memperkuat kebijakan dan sistemnya melalui Peraturan Perusahaan, Etika RLU, dan Surat Komitmen Etika Pemasok serta pengingat terus-menerus kepada manajer perkebunan. Dokumen-dokumen tersebut (Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja) telah memasukkan persyaratan usia minimum.

Program Pelatihan

Departemen SDM belum secara resmi mengembangkan kerangka kerja di seluruh perusahaan yang terdokumentasi untuk program pelatihan, sedangkan tim SHE telah mengembangkan prosedur untuk Kompetensi, Pelatihan & Kesadaran K3L (Doc. No. PRO/HO-P/SHE/06, tertanggal 14 Desember 2017), yang menentukan proses identifikasi, perencanaan, dan implementasi program pelatihan K3L.

Tantangannya termasuk melibatkan pimpinan tim di lokasi dalam mengidentifikasi subjek/materi pelatihan yang diperlukan, dan mengembangkan jadwal pelatihan. Tanggung jawab pimpinan tim lapangan untuk mengumpulkan data penyelesaian pelatihan belum didefinisikan secara formal, dan akuntabilitas belum dilembagakan melalui pelaporan berkala terkait dengan pelaksanaan program pelatihan.

Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)

Rencana penyediaan APD untuk semua pekerja dilaporkan masih dalam proses. Pekerja saat ini yang diberikan APD diperkirakan sekitar 80%.

Potential Risk of Child Labour in the Plantation

With regard to the potential risk of child labour in the plantation, RLU has strengthened its policy and systems through Company Rules, RLU Ethics, and Supplier Ethical Commitment Letter as well as constant reminders to the estate manager. The documents (Company Rules and Work Agreement) have included the minimum age requirements.

Training Programme

The HR department has not formally developed a documented corporate-wide framework for training programs whereas the SHE team has developed a procedure for OHSE Competence, Training & Awareness (Doc. No. PRO/HO-P/SHE/06, dated 14 Dec 2017), which specifies the process of identifying, planning, and implementing the EHS training programme.

The challenges include engaging the site team leaders in identifying the required training subjects/materials, and developing the training schedule. Site team leaders' responsibility to collect training completion data has not been formally defined, and the accountability has not been instituted through periodic reporting related to the implementation of the training programme.

Provision of Personal Protective Equipment (PPE)

An action plan related to the provision of PPE to all workers is reportedly still in progress. The current workers that are provided with PPE are estimated at about 80%.

Keluhan Internal

Masalah-masalah berikut dicatat terkait dengan implementasi Mekanisme Pengaduan Internal:

- Kerangka Kerja Mekanisme Pengaduan Internal (Doc. No. PRO-HO-P-HR_001, tanggal 1 Nov 2020) belum secara jelas mendefinisikan persyaratan untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan mekanisme tersebut kepada semua pekerja. Ada pernyataan tanggung jawab bagi Manager Layanan SDM untuk melaksanakan program pelatihan dan mengkomunikasikan prosedur kepada semua pekerja. Namun, dokumen tersebut tidak menjelaskan metode yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan mekanisme pengaduan internal kepada semua pekerja termasuk pekerja baru. Dilaporkan bahwa mekanisme pengaduan internal belum secara konsisten dimasukkan ke dalam program induksi untuk karyawan baru.
- Tinjauan terhadap Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja menemukan bahwa isi yang terkait dengan mekanisme pengaduan dalam kedua dokumen tersebut tidak konsisten dengan mekanisme yang didefinisikan dalam Kerangka Kerja Mekanisme Pengaduan Internal (Doc. No. PRO-HO-P-HR_001).
- Wawancara dengan beberapa individu dari Jambi dan Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme pengaduan internal belum konsisten dengan persyaratan prosedural. Ketidakkonsistenan dilaporkan terkait dengan waktu respons terhadap pengaduan serta tindak lanjut untuk mengatasi keluhan yang disampaikan.

Kebijakan dan Prosedur Sumber Daya Manusia (SDM)

RLU belum secara resmi menetapkan kebijakan SDM yang menyeluruh untuk mendefinisikan prinsip-prinsip dalam manajemen sumber daya manusia sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Keberlanjutan. Prinsip-prinsip panduan manajemen sumber daya manusia di tingkat korporat belum ditetapkan untuk mendefinisikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi risiko dan peluang, menetapkan tujuan dan sasaran, serta menetapkan tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip panduan ini harus diterjemahkan ke dalam prosedur/program (yaitu prosedur perekutan, program pelatihan, mekanisme pengaduan internal, layanan akomodasi pekerja, dll.) yang mungkin berlaku berbeda untuk setiap lokasi.

Internal Grievance

The following issues were noted related to the implementation of Internal Grievance Mechanism:

- The Framework for Internal Grievance Mechanism (Doc. No. PRO-HO-P-HR_001, dated 1 Nov 2020) has not clearly defined the requirements for socialising and communicating the mechanism to all workers. There is a statement of responsibility for HR Service Manager to implement training program and to communicate the procedure to all workers. However, the document does not describe the methods to be employed for communicating and socialising the internal grievance mechanism to all workers including new recruits. It was reported that the internal grievance mechanism has not been consistently included in the induction program for new recruits.
- Review of the Company Rules and Work Agreement found that the contents related to the grievance mechanism in both documents are not consistent with the mechanism defined in the Framework for Internal Grievance Mechanism (Doc. No. PRO-HO-P-HR_001).
- Interviews with several individuals from Jambi and East Kalimantan indicate that the implementation of the internal grievance mechanism has not been consistent with the procedural requirements. Inconsistencies were reported related to the response time to the complaints as well as follow up actions to address the submitted grievances.

Human Resource (HR) Policies and Procedures

RLU has not formally established an overarching HR policy to define the principles in human resource management as stated in the Sustainability Policy. A guiding principles of human resource management at the corporate level has not been established to define the framework for identifying risks and opportunities, establishing goals and objectives, as well as assigning accountable responsibilities. These guiding principles are to be translated into procedures/programs (i.e. recruitment procedure, training programme, internal grievance mechanism, workers accommodation services, etc.) that may be applicable differently for each site.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

Kondisi Kerja dan Ketentuan Kerja

Tinjauan Perjanjian Kerja untuk LAJ (PKB 2020 - 2022) dan WMW (PKB 2020 - 2022) menunjukkan bahwa PKB tersebut disusun bekerja sama dengan serikat pekerja di Site Jambi. Sosialisasi dan komunikasi dengan pekerja masih menjadi tantangan yang ditunjukkan oleh demonstrasi pekerja pada tahun 2021, yang menuntut kejelasan terkait hak dan tanggung jawab mereka.

Tinjauan SOP untuk perekrutan pekerja (tertanggal 1 Dec 2021) menunjukkan bahwa prosedur tersebut tidak mencakup referensi ke prosedur untuk pemukiman kembali rekrutmen baru atau relokasi personel antar lokasi kerja. Proses pemukiman kembali atau relokasi personel belum ditetapkan secara formal untuk memastikan kesesuaian dengan standar kinerja yang terkait dengan layanan akomodasi pekerja (PS 2, paragraf 12).

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

• Kompetensi K3

- Baik Jambi dan Kalimantan Timur belum secara konsisten menangani persyaratan peraturan terkait penugasan personel K3 yang bersertifikat dan kompeten seperti Ahli K3 Umum (AK3 Umum, AK3U), Ahli K3 Kimia (AK3 Kimia). Selama kunjungan lapangan, masalah-masalah berikut dicatat terkait dengan penugasan Ahli K3:
 - Fasilitas penyimpanan bahan kimia di Site Jambi (BU1) - tercatat bahwa penanggung jawab pengelolaan bahan kimia di fasilitas tersebut belum dilengkapi dengan kompetensi K3 yang dipersyaratkan sebagai Ahli K3 Kimia atau Petugas K3 Kimia (Petugas K3 Kimia).
 - Tinjauan terhadap daftar sertifikasi personil dan peralatan RLU menunjukkan bahwa RLU belum menugaskan Ahli K3 Kimia (AK3 Kimia) untuk bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi manajemen bahan kimia di tingkat tapak di Jambi dan Kalimantan Timur.
 - Personil AK3U yang kompeten di Site Kalimantan Timur belum memperbarui sertifikasi mereka untuk mengembalikan otorisasi AK3U untuk MKC. (Catatan: Penugasan AK3U adalah spesifik untuk perusahaan tempat pemegang sertifikasi bekerja. Sertifikasi AK3U berakhir ketika pemegang sertifikasi meninggalkan posisinya di perusahaan yang ditunjuk).

Working Conditions and Terms of Employment

Review of the Work Agreement for LAJ (PKB 2020 – 2022) and WMW (PKB 2020 – 2022) indicates that the PKBs were prepared in collaboration with the unions of Jambi Site. Socialisation and communication with workers remain as challenges as indicated by a worker demonstration in 2021, demanding clarity relative to their rights and responsibilities.

Review of the SOP for workers recruitment (dated 1 Dec 2021) indicates that the procedure does not include reference to procedures for resettling new recruits or relocation of personnel between worksites. The process of personnel resettlement or relocation has not been formally established to ensure conformance with the performance standards related to workers accommodation services (PS 2, paragraph 12).

Occupational Health and Safety

• OHS competencies

- Both Jambi and East Kalimantan have not consistently addressed the regulatory requirements related to assignment of certified and competent OHS personnel such as General OHS Expert (AK3 Umum, AK3U), Chemical OHS Expert (AK3 Kimia). During site visit, the following issues were noted related to assignment of OHS Experts:
 - Chemical storage facility in Jambi Site (BU1) - it was noted that the person in charge for chemical management of the facility has not been equipped with the required OHS competency of Chemical OHS Expert or Chemical OHS Officer (Petugas K3 Kimia).
 - Review of RLU's personnel and equipment certification register indicates that RLU has not assigned a Chemical OHS Expert (AK3 Kimia) to be in charge of the chemical management development and implementation at site level in Jambi and East Kalimantan.
 - AK3U competent personnel in East Kalimantan Site have not updated their certifications to reinstate the AK3U authorisation for MKC. (Note: AK3U assignment is specific to the company where the certification holder works. AK3U certification expires when the certification holder leave his/her position in the appointing company.)

Higienitas Industri

- RLU belum secara resmi mengembangkan dan menerapkan program higiene industri yang komprehensif untuk mencakup pengukuran berkala lingkungan kerja dan/atau parameter higiene industri sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 tahun 2018 dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan No. 70 tahun 2016.
- Selama kunjungan ke fasilitas penyimpanan bahan kimia di Jambi Site dan Kalimantan Timur, tercatat bahwa respirator setengah masker dan/atau masker kain digunakan selama penanganan bahan kimia. Respirator disimpan dengan tidak benar dan tidak terlindungi dari paparan bahan kimia di fasilitas penyimpanan. Selain itu, kartrid tidak ditandai dengan penggunaan awal dan tanggal kedaluwarsa. Respirator setengah masker dilaporkan disediakan untuk penggunaan individu. Namun, wawancara dengan operator menunjukkan bahwa mereka tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang persyaratan yang terkait dengan penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pembuangan APD.

Pengawasan Kesehatan Pekerja

RLU belum secara konsisten melaksanakan program pengawasan kesehatan pekerja. Pengawasan kesehatan terakhir dilakukan pada tahun 2019. Selain itu, RLU belum secara komprehensif menilai dan mengevaluasi risiko kesehatan yang terkait dengan operasi di lokasi. Misalnya, penggunaan respirator setengah masker belum didasarkan pada langkah-langkah kesehatan yang memadai (misalnya, izin medis, uji kesesuaian).

Rekomendasi:

22. RLU untuk meninjau kebijakan SDM dan perjanjian kerja bersama yang ada untuk mengidentifikasi syarat dan ketentuan yang terkena dampak dari UU Ketenagakerjaan yang telah diamandemen dan Peraturan Pemerintah yang menerapkannya. Kesenjangan dan perubahan dalam perjanjian kerja yang dapat diatas saat ini harus dimasukkan sambil menunggu klarifikasi lebih lanjut dari Kementerian Ketenagakerjaan. Juga perlu ditetapkan kerangka waktu yang jelas untuk menjabarkan rencana perubahan dalam kontrak kerja yang akan diberlakukan.

Industrial Hygiene

- RLU has not formally developed and implemented a comprehensive industrial hygiene programme to include periodic measurement of working environment and/or industrial hygiene parameters as per the Regulation of the Minister of Manpower No. 5 of 2018 and/or the Regulation of the Minister of Health No. 70 of 2016.
- During visits to the chemical storage facilities in Jambi Site and East Kalimantan, it was noted that half mask respirators and/or cloth masks were used during chemical handling. The respirators were stored improperly and unprotected from exposure to the chemicals in the storage facility. In addition, the cartridges were not marked with initial use and expiry dates. The half mask respirators were reportedly provided for individual use. However, interviews with the operators indicate that they had not been equipped with sufficient knowledge on the requirements related to the PPE usage, storage, maintenance and disposal.

Workers Health Surveillance

RLU has not consistently implemented the program for workers health surveillance. Last health surveillance was conducted in 2019. In addition, RLU has not comprehensively assessed and evaluated the health risks associated with the site operations. For example, use of half mask respirator has not been based on adequate health measures (e.g., medical clearance, fit testing).

Recommendations:

22. RLU to review its existing HR policies and collective labour agreements to identify terms and conditions impacted by the amended Manpower Law and the implementing Government Regulations. Gaps and changes in the labour agreements that can be addressed presently should be incorporated pending further clarification from the Ministry of Manpower. It is also necessary to have a clear timeframe established to lay out plans for changes in the contracts to take effect.

BAB CHAPTER 1	BAB CHAPTER 2	BAB CHAPTER 3	BAB CHAPTER 4	BAB CHAPTER 5	BAB CHAPTER 6	BAB CHAPTER 7	BAB CHAPTER 8	BAB CHAPTER 9	BAB CHAPTER 10
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	Capaian Lingkungan Environmental Highlights	Capaian Sosial Social Highlights	Capaian Produksi Production Highlights	Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

23. Rancang rencana manajemen yang mencakup kesehatan dan keselamatan, lingkungan, keamanan, hak-hak pekerja dan masyarakat, rencana manajemen harus menentukan jenis staf yang akan ditunjuk untuk pengelolaan fasilitas. Meninjau kebijakan dan praktik manajemen secara rutin.
24. Proses pengaduan (formal dan informal) harus diperjelas untuk memastikan ada beberapa rute untuk pelaporan dengan perlindungan dari pembalasan. Kapasitas pekerja perempuan dan perencanaan kesetaraan kesempatan harus ditingkatkan, dengan implementasi rencana yang responsif gender, termasuk langkah-langkah yang dilaksanakan dengan pembiayaan yang menyertai dan mekanisme pengawasan.
25. Memperbarui kerangka kerja Mekanisme Pengaduan Internal untuk menentukan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa semua pekerja memahami proses dan persyaratan. Memasukkan komunikasi mekanisme pengaduan internal dalam program induksi untuk karyawan baru. Meninjau prosedur Mekanisme Pengaduan Internal, dan memastikannya dimasukkan ke dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja untuk konsistensi. Jadwal untuk menanggapi keluhan yang diajukan harus distandarisasi dan diikuti oleh semua divisi.
26. Melengkapidatabasekaryawandanpekerjakantrak. Format database harus mudah dipelihara, dan dapat diverifikasi serta dilacak. Mengembangkan kerangka kerja untuk pengembangan dan implementasi program pelatihan. Kerangka kerja harus mendefinisikan proses identifikasi kebutuhan pelatihan, tanggung jawab semua pihak yang relevan, persyaratan pencatatan dan pelaporan, dan termasuk pendaftaran penyedia pelatihan dan sertifikasi yang diwajibkan oleh peraturan, selain matriks dan jadwal pelatihan yang telah ditetapkan.
23. Design management plans covering health and safety, environmental, security, workers' and communities' rights, the management plans should specify the type of staff to be appointed for facility managements. Review policies and management practices on a regular basis.
24. The complaint process (formal and informal) should be made clear to ensure there are multiple routes for reporting with protection from retaliation. Capacity of women workers and equal opportunity planning should be enhanced, with implementation of gender-responsive plans, including measures implemented with accompanying financing and oversight mechanisms.
25. Update the Internal Grievance Mechanism framework to specify the methods used to ensure that all workers understand the process and requirements. To include the communication of internal grievance mechanism in the induction program for new recruits. Review the Internal Grievance Mechanism procedure, and ensure it is incorporated in the Company Rules and Work Agreement for consistency. The timeline to respond to the submitted grievance must be standardised and followed by all divisions.
26. Complete employee and contract worker database. The format of the database should be easy to maintain, and can be verifiable and trackable. Develop a framework for training programme development and implementation. The framework should define the process of identifying training needs, the responsibilities of all relevant parties, requirements of recordkeeping and reporting, and include registration of training providers and regulatory required certification in addition to the established training matrix and schedule.
27. Menetapkan kebijakan SDM yang menyeluruh untuk mendefinisikan prinsip-prinsip dalam manajemen SDM untuk memasukkan identifikasi dan penilaian risiko dan peluang, menetapkan tujuan dan sasaran, penugasan tanggung jawab, serta menentukan kriteria untuk standar kerja dan/ atau standar hidup, yang mungkin spesifik untuk lokasi tertentu (Jambi dan Kalimantan Timur) atau standar perusahaan yang berlaku untuk semua lokasi sesuai dengan Kebijakan Keberlanjutan RLU.
28. Menyelesaikan identifikasi dan registrasi kompetensi bersertifikat yang diwajibkan oleh peraturan (misalnya, Ahli K3 dan/atau Petugas K3 dan/atau Teknisi K3 untuk manajemen bahan kimia, keselamatan kebakaran, keselamatan listrik, dll.) dengan pertimbangan ruang lingkup tanggung jawab (korporat, lokasi, atau unit bisnis), tingkat tanggung jawab (pengembangan program, pengawasan, atau operasi), serta jumlah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rencanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bersertifikat yang diperlukan.
29. Kembangkan program higiene industri yang komprehensif untuk menangani semua aspek operasi di lokasi, termasuk penggunaan dan pengelolaan pestisida dan pupuk, kegiatan pencucian karet, pengoperasian peralatan penghasil kebisingan, penanganan dan penyimpanan bahan bakar, serta tanggap darurat (pemadam kebakaran, petugas P3K, penyedia layanan medis/klinik). Standar kebersihan yang baik juga harus diterapkan pada kegiatan non-operasional seperti pengelolaan sekolah dan penitipan anak.
30. Pertimbangkan untuk mengembangkan pamflet instruksional mengenai penggunaan APD, penyimpanan, pemeliharaan, dan persyaratan pembuangan untuk diberikan kepada pekerja sesuai dengan jenis APD yang akan digunakan oleh pekerja yang bersangkutan. Informasi yang diberikan harus mencakup, antara lain, masa pakai APD dan persyaratan pembuangan APD yang harus dilaporkan kepada tim SHE.
27. Establish an overarching HR policy to define the principles in HR management to include identification and assessment of risks and opportunities, establish goals and objectives, assignment of responsibilities, as well as define the criteria for working and/or living standards, which may be site-specific (Jambi and East Kalimantan) or corporate standards to be applicable for all sites in accordance with RLU's Sustainability Policy.
28. Complete the identification and registration of regulatory required certified competencies (e.g., OHS Experts and/or OHS Officers and/or OHS Technicians for chemical management, fire safety, electrical safety, etc.) with considerations for scope of responsibility (corporate, site, or business unit), level of responsibility (program development, supervisory, or operative), as well as the required number as per the applicable regulations. Plan for the training and certification of the required certified competencies.
29. Develop a comprehensive industrial hygiene program to address all aspects of the site operations including pesticide and fertilizer use and management, rubber washing activities, operation of noise generating equipment, fuel handling and storage, as well as emergency response (fire fighters, first aiders, medical service providers/ clinics). Good standards of hygiene should also be applied to non-operational activities such as school and day-care management.
30. Consider to develop instructional pamphlets regarding to PPE use, storage, maintenance, and disposal requirements to be provided to the workers according to the types of PPE to be used by the workers concerned. Provided information should include, among others, the lifetime of the PPE and the requirements of PPE disposal for which report to SHE team should be made.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

31.Tinjau dan evaluasi identifikasi dan penilaian APD selaras dengan identifikasi dan penilaian persyaratan pengawasan kesehatan pekerja untuk menangani aktivitas kerja yang memerlukan pengawasan medis khusus dan/atau APD khusus (misalnya, respirator, alat bantu pernapasan mandiri [SCBA]).

PS 3: EFISIENSI SUMBER DAYA DAN PENCEGAHAN POLUSI

Pengelolaan Limbah:

Program pengelolaan limbah tertanggal November 2020 mencantumkan tujuh (7) rencana kegiatan dan rencana-rencana ini telah dilaksanakan berdasarkan tinjauan lokasi yang dilakukan pada Januari 2022. Rencana masa depan yang diidentifikasi berdasarkan tinjauan dan evaluasi program implementasi saat ini mengidentifikasi kebutuhan untuk membeli dua (2) unit truk sampah dan untuk mencapai pengurangan sampah di sumber sebesar 50% hingga 60% dari volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir. Dilaporkan, di daerah-daerah di mana fasilitas persampahan terpadu dibangun, RLU melaporkan selama proses wawancara telah mencapai 100% pemilahan sampah, dan sampah anorganik yang dapat dijual kembali dijual ke pendaur ulang pihak ketiga.

Sebagai bagian dari program, RLU melakukan audit internal oleh tim SHE untuk menilai implementasi. Selain itu, RLU saat ini sedang melakukan penilaian ulang pada program pengelolaan sampah dalam kemitraan dengan program magang Kampus Merdeka. Temuan dari audit internal dan penilaian ulang akan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Isu-isu berikut dicatat terkait dengan pengembangan dan implementasi program pengelolaan limbah non-berbahaya:

- Rencana pengelolaan limbah padat belum dikembangkan.
- Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak memadai di Jambi dan Kalimantan Timur (yaitu tidak ada atap, tidak ada pemilahan limbah)

31. Review and evaluate the PPE identification and assessment in sync with the identification and assessment of worker health surveillance requirements to address work activities that require specific medical surveillance and/or specific PPEs (e.g., respirators, self-contained breathing apparatus [SCBA]).

PS 3: RESOURCE EFFICIENCY AND POLLUTION PREVENTION

Waste Management:

A waste management programme dated November 2020 listed out seven (7) activity plans and these plans have been implemented based on site review conducted in January 2022. Future plans identified based on the review and evaluation of current implementation programmes identified the need to purchase two (2) units of waste trucks and to achieve waste reduction at source by 50% to 60% of waste volume sent to landfills. Reportedly, in areas where an integrated waste facilities were constructed, RLU reported during the interview process to have achieved 100% waste segregation, and resaleable inorganic wastes are sold to third party recyclers.

As part of the programme, RLU conducted an internal audit by the SHE team to assess the implementations. In addition, RLU is currently conducting re-assessment on the waste management programme in partnership with the internship program of Kampus Merdeka. The findings from both internal audit and re-assessment will be used for continual improvement.

The following issues were noted related to the development and implementation of non-hazardous waste management programme:

- The solid waste management plan has not been developed.
- Inadequate provision of domestic waste management facilities in Jambi and East Kalimantan (i.e. no roof, no waste segregation)

Pengelolaan Limbah Berbahaya:

Tidak adanya Izin Limbah B3 Sementara untuk fasilitas penyimpanan limbah B3 yang baru dibangun yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah NO. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Merupakan persyaratan bahwa penghasil limbah B3 harus memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara sebelum penyimpanan dan pembuangan limbah B3. Permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara telah dibuat tetapi izin tersebut belum diberikan karena petugas dinas setempat tidak dapat melakukan kunjungan ke lokasi untuk memverifikasi fasilitas penyimpanan yang dibangun dengan benar.

RLU melaporkan bahwa pengumpul limbah B3 bersertifikat yang sebelumnya ditunjuk di Jambi hilang sejak September 2021. Oleh karena itu, limbah B3 yang disimpan di lokasi Jambi telah melebihi durasi penyimpanan sesuai peraturan yaitu 90 hari. Dilaporkan bahwa dinas setempat telah diberitahu tentang gangguan layanan pembuangan limbah B3, dan sejak itu tidak ada limbah B3 yang dibuang. Rencana pengelolaan limbah B3 juga perlu disiapkan.

Pengelolaan Air Limbah:

Baik Jambi maupun Kalimantan Timur belum secara resmi mengembangkan rencana komprehensif untuk mengelola air limbah yang dihasilkan dari operasi perkebunan (misalnya, pencucian karet, bengkel). Lokasi saat ini mengelola beberapa air limbah di kolam tanpa membuangnya ke air permukaan terdekat; namun, praktik saat ini dianggap tidak cukup untuk melindungi tanah dan air tanah karena penahanan air limbah yang tidak diolah di kolam sementara masih menimbulkan risiko infiltrasi air limbah ke dalam tanah dan air tanah.

Pengelolaan Sumber Daya Air:

Pemanfaatan sumber daya air melalui penggalian air tanah dan air permukaan yaitu sungai tanpa Surat Izin Penggunaan Air Tanah (SIPA). Selain itu, tercatat bahwa inventarisasi sumber daya air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga tidak mencakup penggunaan air sungai, persyaratan untuk pemantauan kualitas air secara berkala dan/atau proses pengolahan air yang diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan air memenuhi standar kualitas.

Hazardous Waste Management:

Absence of the Temporary Hazardous Waste Permit for the newly constructed storage facility for hazardous wastes which is non-compliant with Government Regulation NO. 101 of 2014 regarding Hazardous Waste Management. It is a requirement that hazardous waste generator must possess a temporary hazardous waste storage permit prior to the storage and disposal of hazardous waste. Application for the Temporary Hazardous Waste Permits has been made but the permits were not yet granted as the local agency officers were unable to pay a visit to the site to verify the storage facility is constructed appropriately.

RLU reported that the previously appointed certified hazardous waste collector in Jambi went missing since September 2021. Therefore, hazardous wastes stored at Jambi site has exceeded the regulatory storage duration of 90 days. Reportedly, the local agency had been informed about the disruption of hazardous waste disposal service, and no hazardous wastes have since been disposed of.

A hazardous waste management plan is also required to be prepared.

Wastewater Management:

Both Jambi and East Kalimantan have not formally developed a comprehensive plan to manage the wastewater generated from plantation operations (e.g., rubber washing, workshops). The site currently maintains several wastewater in ponds without discharging to nearby surface water; however, current practice is deemed insufficient to protect soil and groundwater as containment of untreated wastewater in temporary ponds still presents the risk of infiltration of wastewater into soil and groundwater.

Water Resource Management:

Utilisation of water resources through extracting groundwater and surface water i.e. river without a groundwater usage permit (SIPA). Additionally, it was noted that inventory of water resources utilised for domestic use did not include the use of river water, requirements for periodic water quality monitoring and/or the required water treatment processes to ensure that the water use meets the quality standards.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) dan Pengelolaan Vektor Terpadu (IVM):

RLU belum mengembangkan rencana apa pun untuk PHT dan IVM. Tingkat pengetahuan tentang penggunaan pestisida yang bertanggung jawab masih rendah, terutama di kalangan petani kecil di Jambi dan Kalimantan Timur. Ada kebutuhan besar untuk lebih banyak pelatihan bagi personel di lokasi tentang penerapan PHT dan IVM tentang penggunaan pestisida dan PHT yang aman. Untuk pengelolaan bahan kimia, RLU memiliki daftar daftar penggunaan bahan berbahaya dan beracun tertanggal 22 September 2021 yang terdiri dari jenis herbisida, insektisida, bahan bakar, bahan kimia, koagulan, dan pelumas yang disetujui, untuk digunakan di dalam perkebunan, berdasarkan penilaian pada Klasifikasi Pestisida yang Direkomendasikan WHO berdasarkan Bahaya dan Pedoman Klasifikasi 2009).

Baik Jambi maupun Kalimantan Timur melakukan pemantauan kualitas air pada aliran air utama yang mengalir melalui area konsesi setiap enam bulan sekali. Lokasi pengambilan sampel dipilih di dua titik di luar area konsesi: hulu dan hilir. Lokasi pengambilan sampel mungkin tidak cukup untuk mengatasi potensi kontaminasi pestisida pada aliran air di mana pestisida diaplikasikan. Aliran air tersebut digunakan untuk keperluan minum masyarakat setempat yang berada di dalam area konsesi.

Dokumen Lingkungan

Entitas konsesi RLU (LAJ, WMW, dan MKC) belum memperbarui dokumen lingkungan (UKL-UPL dan AMDAL) untuk memasukkan perubahan berdasarkan kegiatan operasional saat ini.

Rekomendasi:

32. RLU perlu segera mengajukan empat (4) Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara dan Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) yang tersisa untuk memastikan diperolehnya izin yang sah untuk penyimpanan limbah B3 dan pengambilan air tanah. Jika izin tidak dapat diberikan tepat waktu karena pembatasan COVID-19, RLU harus meminta tanggapan tertulis dari instansi setempat bahwa perpanjangan diberikan untuk sementara waktu sampai kunjungan lapangan dapat diatur.

33. Pastikan bahwa fasilitas penyimpanan limbah B3 yang baru dibangun telah memperoleh Persetujuan Teknis dan SLO (Surat Laik Operasi) dari instansi pemerintah.

Integrated Pest Management (IPM) and Integrated Vector Management (IVM):

RLU has not developed any plan for IPM and IVM. The level of knowledge about responsible pesticide use is low, especially among smallholders in both Jambi and East Kalimantan. There is a great need for more training of site personnel about the applicable of IPM and IVM on safe pesticide use and IPM. For chemical management, RLU maintains a list of hazardous and toxic used list dated September 22, 2021 comprising the types of approved herbicides, insecticides, fuel, chemicals, coagulant, and lubricants, for use within the plantations, based on the assessments on the WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 2009).

Both Jambi and East Kalimantan conduct water quality monitoring on the main water streams flowing through the concession areas on a six-monthly basis. The sampling locations are selected at two points outside of concession areas: upstream and downstream. The sampling locations may not be sufficient to address the potential contamination of pesticides to the water streams where pesticides are applied. The water streams are for potable use of the local communities located within the concession areas.

Environmental Documents

RLU's concession entities (LAJ, WMW, and MKC) have not updated the environmental documents (UKL-UPL and AMDAL) to include the changes based on the current operational activities.

Recommendations:

32. RLU needs to immediately apply for the remaining four (4) Temporary Hazardous Waste Storage Permit and Groundwater Extraction Permit (SIPA) to ensure legal permits are obtained for hazardous waste storage and groundwater extraction. If permits are unable to grant in time due to COVID-19 restrictions, RLU should request a written response from the local agencies that extensions are granted for the time being until a site visit can be arranged.

33. Ensure that the newly constructed hazardous waste storage facility has obtained the Technical Approval and SLO (Operational Eligibility Letter) from governmental agency.

34. Memperbaiki desain fasilitas limbah padat, seperti fasilitas harus cukup terlindung dari cuaca dan dilengkapi dengan pemilahan limbah.

35. Mengembangkan rencana pengelolaan limbah padat dan berbahaya.

36. Jika RLU tidak dapat menunjuk pengumpul limbah B3 bersertifikat, RLU harus memastikan bahwa surat tertulis dikirim oleh instansi setempat yang menyetujui perpanjangan penyimpanan limbah B3. Selain itu, tim manajemen fasilitas harus memastikan bahwa keselamatan kebakaran dan tindakan tata graha tersedia untuk mencegah potensi eskalasi kebakaran karena jumlah limbah berbahaya yang berlebihan yang tersisa di lokasi.

37. Rencana formal untuk memasang dan mengatur fasilitas pengolahan air limbah dan pengolahan air harus dilaksanakan sekarang mengingat populasi yang hidup terus bertambah dan memenuhi standar kualitas yang berlaku. Kurangnya instalasi fasilitas pengolahan air limbah dan air yang tepat akan meningkatkan risiko lingkungan dan kesehatan bagi penduduk yang tinggal.

38. PHT adalah proses pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan yang menggabungkan alat dan strategi untuk mengidentifikasi dan mengelola hama. Praktisi PHT menggunakan pengetahuan biologi hama dan inang yang dikombinasikan dengan pemantauan biologis dan lingkungan untuk menanggapi masalah hama dengan taktik manajemen yang dirancang untuk: 1) mencegah tingkat kerusakan hama yang tidak dapat diterima; 2) meminimalkan risiko terhadap manusia, properti, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan; dan 3) mengurangi evolusi resistensi hama terhadap pestisida dan praktik pengelolaan hama lainnya. Karena kurangnya pengetahuan tentang penerapan PHT dan IVM, studi pelingkupan termasuk tinjauan literatur, misi pelingkupan, dan lokakarya pemangku kepentingan direkomendasikan sebelum mengembangkan rencana pengelolaan hama terpadu. Penekanannya adalah pada penjelasan penggunaan pestisida saat ini dan di masa depan serta risiko terkait dan pada praktik saat ini sehubungan dengan penggunaan pestisida dan pengelolaan pestisida yang berkelanjutan.

34. Improve the design of solid waste facilities, such as the facility should be sufficiently protected from weather and equipped with waste segregation.

35. Develop solid and hazardous wastes management plan.

36. Should RLU be unable to appoint a certified hazardous waste collector, RLU must ensure that a written letter is sent by the local agency agreeing the extension of hazardous waste storage. Additionally, the facility management team shall ensure fire safety and housekeeping measures are in place to prevent any potential fire escalations due to excessive quantities of hazardous wastes remaining at the site.

37. A formal plan to install and set out wastewater treatment and water treatment facilities should be implemented by now considering the living population is growing and meet the applicable quality standards. Lacking the proper installation of wastewater and water treatment facilities will increase environmental and health risks to the living population.

38. IPM is a science-based decision making process that combines tools and strategies to identify and manage pests. IPM practitioners use knowledge of pest and host biology in combination with biological and environmental monitoring to respond to pest problems with management tactics designed to: 1) prevent unacceptable levels of pest damage; 2) minimise the risk to people, property, infrastructure, natural resources, and the environment; and 3) reduce the evolution of pest resistance to pesticides and other pest management practices. Due to the lack of knowledge on IPM and IVM implementation, a scoping study including a literature review, scoping mission and stakeholder workshop is recommended prior to developing an integrated pest management plan. The emphasis is on describing current and future pesticide use and associated risks and on the current practices with respect to sustainable use of pesticides and pesticide management.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

39. Mempertahankan pemetaan penggunaan pestisida secara real time dalam kaitannya dengan aliran air di dalam area konsesi, terutama area perkebunan aktif. Pemetaan tersebut harus mengidentifikasi titik-titik kritis potensi kontaminasi terhadap aliran air dari penggunaan pestisida secara aktif, terutama di daerah-daerah di mana terdapat pemukiman masyarakat. Identifikasi titik-titik pemantauan untuk pengambilan sampel dan analisis air secara berkala untuk memastikan potensi risiko kontaminasi akibat penggunaan pestisida di area tersebut dipantau dan dikendalikan.

40. Memperbarui dokumen lingkungan untuk mencerminkan operasi lokasi saat ini untuk LAJ, MKC dan WMW. Dokumen lingkungan juga harus memasukkan program-program ESG yang dilaksanakan/direncanakan.

PS 4: KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT

Sebagaimana yang tercatat dalam PS 1, tidak ada data dasar yang komprehensif dan ESIA yang dilakukan untuk Proyek. Akibatnya, pengelolaan risiko dan dampak CHSS masih kurang - khususnya langkah-langkah pencegahan dan pengendalian untuk risiko dan dampak kesehatan & keselamatan Masyarakat yang Terkena Dampak, sesuai dengan GIIP. Sejauh ini, RLU telah menangani CHSS melalui pengembangan berbagai prosedur dan inisiatif. Pendekatan yang diambil sehubungan dengan CHSS mencerminkan bagaimana fokus RLU adalah pada topik-topik yang menghadirkan risiko terbesar yang dirasakan, seperti pengembalian lahan. SEB saat ini sedang berlangsung dan yang dapat menginformasikan koherensi pendekatan terhadap CHSS, melalui data / informasi dasar CHSS terkait dan penilaian dampak yang ditargetkan.

Wawancara dengan pemangku kepentingan internal RLU mengindikasikan pengakuan akan perlunya perencanaan kegiatan dan pengelolaan CHSS yang lebih terinformasi, serta kebutuhan untuk berkolaborasi lebih efektif dengan divisi lain dalam pengelolaan CHSS. RLU telah melakukan pelatihan CHSS, meskipun ini telah ditargetkan secara reaktif pada masalah dan tantangan topikal. Pelatihan CHSS direncanakan untuk tahun 2021, namun pandemi COVID-19 mengganggu upaya CHSS pada tahun 2021, sampai-sampai tidak ada pelatihan di tingkat masyarakat yang ditawarkan.

39. Maintain real time mapping of pesticide use in relation with water streams within the concession areas, particularly the active plantation areas. The mapping should identify critical point of potential contamination to the water streams from active use of pesticides, particularly in areas where community settlements are present. Identity monitoring points for periodic water sampling and analysis to ensure potential risk of contamination due to the use of pesticide in the area is being monitored and controlled.

40. Update the environmental documents to reflect the current site operations for LAJ, MKC and WMW. The environmental documents should also incorporate the implemented / planned ESG programs.

PS 4: COMMUNITY HEALTH, SAFETY AND SECURITY

As noted under PS 1, there is not yet a comprehensive baseline and ESIA undertaken for the Project. As a result, the management of CHSS risks and impacts is lacking - specifically preventive and control measures for the risks and impacts of the health & safety of the Affected Community, consistent with GIIP. RLU has thus far addressed CHSS through the development of various procedures and initiatives. The approach taken in relation to CHSS reflects how the focus for RLU has been on those topics presenting perceived greatest risk, such as land return. SEB is currently underway and which may inform the coherency of the approach to CHSS, through associated CHSS baseline data / information and targeted impact assessment.

Interviews with RLU internal stakeholders indicated recognition of the need for more informed planning of CHSS activities and management, as well as the need to collaborate more effectively with other divisions on management of CHSS. RLU has conducted CHSS training, though this has been targeted reactively on topical issues and challenges. CHSS training was planned for 2021, however the COVID-19 pandemic disrupted the CHSS efforts in 2021, to the extent that no community level training was offered.

Terdapat Prosedur Tanggap Darurat untuk kedua konsesi, dan ini membahas satu situasi darurat utama - pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, sebagai keadaan darurat utama. Tidak ada situasi/skenario darurat lain yang teridentifikasi. Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa sebagai bagian dari rekomendasi Pelingkupan ESIA bahwa situasi dan dampak darurat diidentifikasi dan dinilai lebih lanjut, dan dari sini, langkah-langkah mitigasi yang tepat dikembangkan dan diimplementasikan. Hal ini termasuk mengembangkan Rencana Tanggap Darurat khusus, yang juga akan menguraikan bagaimana RLU akan membantu dan berkolaborasi dengan masyarakat yang terkena dampak.

RLU mempertahankan pekerja untuk memberikan keamanan. Pada tahun 2020, dianggap bahwa risiko keamanan dan konflik tetap menjadi masalah utama bagi RLU, mengingat patroli keamanan melibatkan staf Perusahaan serta perwakilan pemerintah dan polisi, di mana RLU memiliki kendali dan kemampuan terbatas untuk memengaruhi tanggapan keamanan. Risiko ini diperkuat mengingat konteks di mana RLU menerapkan pengembalian lahan, dan yang telah memperkuat dan memperburuk potensi dan konflik aktual. RLU menyadari risiko-risiko ini, dan hal ini telah disorot lebih lanjut dalam pekerjaan TA tentang pengembalian lahan dengan MFC (dan ruang lingkup yang diperluas yang mencakup pendampingan yang berkaitan dengan resolusi konflik).

SOP untuk pelatihan keamanan direncanakan akan difinalisasikan pada tahun 2022, konsisten dengan ketentuan yang diuraikan dalam VPSHR dan termasuk ketentuan untuk interaksi pekerja keamanan dengan masyarakat setempat. Wawancara dengan RLU menunjukkan bahwa ini adalah prioritas untuk tahun 2022.

Rekomendasi:

Lihat PS1. Selain itu, khusus untuk CHSS, rekomendasi utamanya antara lain adalah bahwa berdasarkan pelaksanaan latihan Pelingkupan ESIA, yang didefinisikan lebih lanjut di bawah PS1, RLU harus mengembangkan Rencana Manajemen CHSS yang membahas dampak spesifik yang diidentifikasi, dan menyediakan pengelolaan dampak CHSS yang ditargetkan.

There is an Emergency Response Procedure in place for both concessions, and this addresses one key emergency situation - forest and land fire prevention and handling, as the key emergency. There is a need to ensure that as part of recommended ESIA Scoping that emergency situations and impacts are further identified and assessed, and out of this, appropriate mitigation measures are developed and implemented. This includes developing a specific Emergency Response Plan, which would also outline how RLU will assist and collaborate with affected communities.

RLU retains workers to provide security. As of 2020, it is considered that security and conflict risks remain a key issue for RLU, considering that security patrols involve both Company staff as well as government representatives and police, over which RLU has limited control and ability to influence security responses. This risk is amplified given the context within which RLU is implementing land return, and which has amplified and exacerbated potential and actual conflict. RLU is aware of these risks, and this has been highlighted further in the TA work on land return with MFC (and the extended scope which includes mentoring relating to conflict resolution).

A SOP for security training is planned to be finalised in 2022, consistent with provisions outlined in the VPSHR and including provisions for security workers' interactions with local communities. Interviews with RLU indicated that this is a priority for 2022.

Recommendations:

See PS1. In addition, specific to CHSS, the key recommendation (among others) is that based on conducting an ESIA Scoping exercise, further defined under PS1, RLU should develop a CHSS Management Plan that addresses specific impacts identified, and provides for targeted management of CHSS impacts.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan dan Sosial (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	--	---

PS 5: PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI SECARA PAKSA

Melalui TA bersama MFC, telah terlihat adanya kemajuan substansial dalam penilaian perencanaan dan praktik pengembalian lahan RLU melalui perspektif IFC PS 1 dan PS 5. Dimulainya TA adalah item penting yang ditandai dalam laporan audit ESDD 2021. Ramboll menilai bahwa TA telah memberikan penilaian dan panduan penting dalam bentuk Peta Jalan Pengembalian Lahan yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan dan praktik pengembalian lahan dengan IFC PS 5 sambil menavigasi tantangan kontekstual di mana RLU beroperasi, termasuk target produksi, perambahan, keberadaan Masyarakat Adat, konflik dengan dan ketidakpercayaan oleh para pemangku kepentingan, dan tekanan dari LSM, dan masalah warisan dengan pengembalian lahan, dan lain-lain.

Sebagai bagian dari ruang lingkup awal pekerjaan MFC, telah dilakukan penilaian kepatuhan yang terperinci (termasuk kunjungan lapangan). Penilaian yang digunakan dalam audit 2021 ini oleh Ramboll, sebagai cerminan konteks pengembalian lahan saat ini di Proyek. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Ramboll menganggap TA sangat penting untuk memahami dan menangani apa yang telah (dan terus menjadi) masalah utama Proyek dan hasil yang muncul dianggap dan didukung oleh Ramboll untuk memberikan rencana tindakan definitif yang dengannya RLU dapat bergerak maju untuk memenuhi maksud PS IFC.

Roadmap TA dianggap membuat banyak tindakan yang direkomendasikan ESAP dan Laporan Audit sebelumnya menjadi usang (seperti yang diharapkan). Dengan demikian, Laporan Audit 2021 ini menggabungkan tindakan Roadmap yang didefinisikan untuk membawa RLU ke dalam keselarasan dengan PS IFC. Komentar singkat tentang temuan dan kinerja utama dibuat oleh Ramboll di bawah PS ini, dan rekomendasi utama disorot sesuai dengan Roadmap MFC.

PS 5: LAND ACQUISITION AND INVOLUNTARY RESETTLEMENT

Through the TA with MFC, there has been substantial progress in assessing RLU's land return planning and practices through the lens of IFC PS 1 and PS 5. Commencement of the TA was a critical item flagged in the 2021 ESDD audit report. Ramboll considers the TA to have provided pivotal assessment and guidance in the form of a precise Land Return Roadmap to align land return planning and practices with IFC PS 5 while navigating the contextual challenges in which RLU is operating, including production targets, encroachment, the presence of IPs, conflict with and distrust by stakeholders, and pressure from NGOs, and legacy issues with land return, among others.

As part of MFC's initial scope of works, a detailed compliance assessment (including field visits) was conducted. This assessment is drawn upon in this 2021 audit by Ramboll, as reflective of the current context of land return on the Project. As eluded above, Ramboll considered the TA as critical to really understand and address what has been (and continues to be) the major issue for the Project and the emerging outcomes of which are considered and endorsed by Ramboll to provide the definitive plan of action by which RLU can move forward towards meeting the intent of the IFC PS.

The TA Roadmap is considered to make obsolete many of the ESAP and previous Audit Report recommended actions (as expected). As such, this 2021 Audit Report incorporates the Roadmap actions defined in order to bring RLU into alignment with IFC PS. Brief commentary of key findings and performance are made by Ramboll under this PS, and key recommendations are highlighted in accordance with MFC Roadmap.

Pentingnya semua divisi RLU, dan di semua tingkat organisasi, untuk mengikuti Roadmap yang digariskan oleh MFC untuk implementasi dan "memiliki" tindakan dan tanggung jawab yang digariskan di dalamnya (lihat juga PS 1 tentang hal ini) tidak dapat ditekankan secara berlebihan. Dan hal ini, didasarkan pada pemahaman bersama tentang praktik terbaik (IFC PS) prinsip-prinsip dan proses pengembalian lahan. Yang penting, Peta Jalan menggambarkan tanggung jawab spesifik antara divisi RLU (misalnya divisi Keberlanjutan, divisi Operasi / Pertumbuhan, divisi Produksi-Agronomi dan divisi lain yang dianggap penting sebagai bagian dari keberhasilan Peta Jalan) dalam mengimplementasikan tindakan. Hal ini merupakan kunci dalam memastikan bahwa Peta Jalan dan kegiatan pengembalian lahan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan seluruh Perusahaan, termasuk masukan yang diperlukan, dukungan dan kepemilikan tindakan oleh personel dari berbagai divisi.

Kesenjangan utama dalam kaitannya dengan PS 1 IFC, dan kerangka kerja, SOP, dan praktik pengembalian lahan RLU adalah bahwa mereka (lihat rincian lebih lanjut dalam Penilaian Kesenjangan MFC dan di atas di bawah PS 1):

- Tidak didasarkan pada peta penggunaan lahan yang komprehensif yang sepenuhnya menggambarkan apa yang ada di lahan konsesi.
- Tidak didasarkan pada penilaian E&S yang komprehensif yang mengidentifikasi dampak dan risiko perpindahan.
- Belum sepenuhnya menerapkan hierarki mitigasi untuk pengembalian lahan dan belum mengambil semua langkah yang mungkin untuk menghindari atau meminimalkan dampak pemindahan paksa.
- Keterlibatan pemangku kepentingan RLU dan praktik manajemen pengaduan tidak cukup untuk mendukung kegiatan pengembalian lahan secara memadai.

It cannot be overstressed as to the importance of all RLU's divisions, and at all levels of the organisation, taking onboard the Roadmap outlined by MFC for implementation and "owning" the actions and responsibilities outlined therein (see also PS 1 on this). And this, premised on a shared understanding of best practice (IFC PS) land return principles and processes. Importantly, the Roadmap delineates the specific responsibilities between RLU divisions (e.g. Sustainability division, Operations / Growth division, Production-Agronomy division and any other divisions deemed important as part of making the Roadmap successful) in implementing actions. This is key in ensuring that the Roadmap and land return activities are implemented using a whole of Company approach, including the necessary input, support and ownership of actions by personnel from the different divisions.

Key gaps in relation to IFC PS 1, and RLU's land return framework, SOP, and practices are that they (see further detail in MFC Gap Assessment and above under PS 1):

- Are not based on a comprehensive land use map that fully describes what is on concession land.
- Are not based on a comprehensive E&S assessment that identifies displacement impacts and risks.
- Have not fully applied the mitigation hierarchy to land return and have not taken all possible steps to avoid or minimise involuntary displacement impacts.
- RLU stakeholder engagement and grievance management practices are insufficient to adequately support land return activity.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Sehubungan dengan kerangka kerja, SOP, dan praktik pengembalian lahan IFC PS 5 RLU, kesenjangan utama yang disorot oleh MFC termasuk bahwa mereka:

- Tidak secara jelas menentukan kegiatan pengembalian lahan mana yang bersifat sukarela / tidak sukarela.
- Tidak menjelaskan mekanisme untuk menetapkan tanggal batas akhir sesuai dengan persyaratan PS 5.
- Tidak mencakup pengumpulan inventarisasi aset yang memadai dan data sosial-ekonomi untuk mendukung penetapan hak atau untuk mendukung upaya pemantauan dan evaluasi.
- Mekanisme kompensasi RLU saat ini tidak memenuhi biaya penggantian penuh.
- Tidak mengikuti praktik internasional yang baik untuk negosiasi dan mediasi.
- Tidak menyertakan rencana komprehensif untuk mengelola orang-orang yang rentan selama proses pengembalian lahan.
- Tidak mendefinisikan bagaimana kegiatan pemulihan mata pencaharian akan memenuhi tujuan pemulihan atau peningkatan mata pencaharian.
- Tidak menyertakan rencana yang memadai untuk memantau dan mengevaluasi hasil.

Masalah utama yang mendasari kesenjangan yang teridentifikasi adalah kurangnya analisis alternatif (yang biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses ESIA lengkap) dan yang dapat mengarahkan fokus RLU pada alternatif yang layak untuk kegiatan pengembalian lahan, termasuk memperluas zona konsentrasi ke daerah lain yang mungkin lebih tepat sasaran / lebih murah (vis-a-vis masalah biaya penggantian penuh). Diakui bahwa dalam praktiknya, RLU dalam banyak kasus, berhasil menghindari lahan dengan pemukiman masyarakat dan masyarakat adat dan LRF dan SOP memang membuat referensi untuk menghindari dan meminimalkan pemukiman kembali secara paksa, namun ketentuan tentang bagaimana hal ini dicapai dianggap tidak jelas. Opsi, termasuk partisipasi PLTU disediakan, tetapi tidak ada referensi untuk desain proyek. Pada tahun 2021, RLU telah merancang peta zona CPP yang memfokuskan dan mengimplementasikan program CPP yang didukung oleh The Sustainable Trade Initiative (IDH) dan P4F (ongoing) dalam pemilihan area.

In relation to IFC PS 5 RLU's land return framework, SOP, and practices, the key gaps highlighted by MFC include that they:

- Do not clearly specify which land return activities are voluntary / involuntary.
- Do not describe a mechanism to set a cut-off date in line with PS 5 requirements.
- Do not include collection of sufficient asset inventory and socio-economic data to support setting entitlements or to support monitoring and evaluation efforts.
- RLU's current compensation mechanisms do not meet full replacement cost.
- Do not follow good international practice for negotiation and mediation.
- Do not include a comprehensive plan for managing vulnerable people during the land return process.
- Do not define how livelihood restoration activities will deliver on the objective of restoring or improving livelihoods.
- Do not include adequate plans for monitoring and evaluating outcomes.

A key issue underpinning the gaps identified is the lack of an alternatives analysis (which would normally have been conducted as part of a full ESIA process) and which could direct RLU focus accordingly on viable alternatives to land return activities, including expanding the concentration zone to other areas that may be better targeted / less costly (vis-a-vis full replacement cost issues). It is recognised that in practice, RLU has in many cases, managed to avoid lands with community settlements and indigenous people and the LRF and SOP do make reference to avoiding and minimising involuntary resettlement, however provisions for how this is accomplished are considered to be vague. Options, including CPP participation are provided, but there is no reference to project design. In 2021, RLU has designed the CPP zone map focusing and implementing CPP program supported by The Sustainable Trade Initiative (IDH) and P4F (ongoing) in the area selection.

Peta Jalan saat ini sedang dalam tahap awal implementasi. Pembaruan terbaru untuk kemajuan menunjukkan bahwa tindakan utama yang telah diselesaikan termasuk pengembangan Kebijakan Pengembalian Lahan yang saat ini sedang ditinjau (tidak ditinjau oleh Ramboll pada saat penulisan Laporan ini), dan bahwa komponen LRF dan SOP yang telah direvisi sedang dalam pengembangan seperti yang direncanakan dalam Roadmap.

Khususnya terkait dengan CPP (yang melintasi banyak PS), TA tentang Pengembalian Lahan memberikan penilaian dan tindakan untuk memfasilitasi amandemen CPP agar lebih selaras dengan PS 5. Ada juga sejumlah temuan tentang CPP yang dicatat dalam Laporan Audit 2020 secara lebih luas daripada yang terkait dengan PS 5 (dan yang dibahas di bagian ini). CPP adalah sarana pemberdayaan ekonomi utama untuk RLU. Kesenjangan yang ada termasuk kemampuan CPP untuk menunjukkan kesesuaian dalam hal pemulihan mata pencaharian. Konsisten dengan rekomendasi Audit 2020, TA menemukan bahwa CPP dirancang dengan baik dan sejalan dengan misi RLU untuk menjadi pemimpin dunia dalam karet alam berkelanjutan dengan mempromosikan model baru produksi karet berkelanjutan yang memberdayakan secara ekonomi, inklusif secara sosial, dan ramah lingkungan. Hal ini juga selaras dengan fokus KLHK pada model perhutanan sosial sebagai mekanisme yang lebih disukai untuk penyelesaian konflik. TA merekomendasikan agar CPP dinilai lebih lanjut terhadap PS 5 IFC untuk memastikan bahwa CPP juga dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam lingkup langkah-langkah pemulihan mata pencaharian PS 5, antara lain. Tercatat bahwa area CPP telah dirancang untuk Jambi tetapi belum untuk Kalimantan Timur.

Rekomendasi utama dari Laporan Audit 2020 adalah untuk menerapkan kerangka kerja CPP terkonsolidasi yang menghubungkan berbagai inisiatif kemitraan masyarakat. Hal ini belum berkembang secara substansial pada tahun 2021, sebagian besar karena temuan dan hasil TA Pengembalian Lahan perlu dimasukkan ke dalam pengembangan CPP yang sedang berlangsung. Ini direkomendasikan untuk ditindaklanjuti pada tahun 2022. RLU mengindikasikan bahwa seorang ahli program perhutanan sosial telah ditunjuk untuk meningkatkan model bisnis CPP secara keseluruhan. Posisi ini disarankan untuk mengambil pendekatan strategis untuk pengembangan CPP yang sedang berlangsung, termasuk memastikan bahwa evolusi daripadanya didukung oleh kerangka kerja yang kohesif.

The Roadmap is currently in the early phases of implementation. The most recent updates to progress indicate that key actions completed include the development of a Land Return Policy which is currently under review (not reviewed by Ramboll at the time of writing this Report), and that the revised LRF and SOP components are under development as planned in the Roadmap.

Specifically in relation to the CPP (which cross-cuts many of the PS), the TA on Land Return provides assessment and actions to facilitate amendment of the CPP to better align with PS 5. There were also a number of findings on the CPP noted in the 2020 Audit Report more broadly than in relation to PS 5 (and which are discussed in this section). The CPP is the key economic empowerment vehicle for RLU. Gaps include the CPP's ability to demonstrate conformance in terms of livelihoods restoration. Consistent with the 2020 Audit recommendation, the TA found the CPP is well-designed and in line with RLU's mission to be a world leader in sustainable natural rubber by promoting a new model of sustainable rubber production that is economically empowering, socially inclusive, and environmentally friendly. It also aligns with the MoEF's focus on social forestry models as the preferred mechanism for conflict resolution.

The TA recommended that the CPP is further assessed against IFC PS 5 in order to ensure that it may also be fully utilised within the scope of PS 5 livelihood restoration measures, among others. Noted that CPP area has been designed for Jambi but not East Kalimantan yet.

A key recommendation of the 2020 Audit Report was to put in place a consolidated CPP framework linking the various community partnership initiatives. This has not substantially progressed in 2021, due largely to the Land Return TA findings and outcomes needing to feed into CPP ongoing development. This is recommended to be actioned in 2022. RLU indicated that a social forestry program expert has been appointed to improve the overall CPP business model. This position is advised to take a strategic approach to CPP ongoing development, including ensuring that evolution thereof is underpinned by a cohesive framework.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

Rekomendasi:

Rekomendasi berikut ini dibuat lebih lanjut pada rekomendasi PS 1, melintasi PS 5, dan konsisten dengan Roadmap MFC:

41. Finalisasi Kebijakan Pengembalian Lahan.
42. Memperbarui kriteria pemilihan lokasi penanaman sehubungan dengan pengembalian lahan.
43. Menilai dampak dan risiko perpindahan.
44. Memetakan lahan yang belum diklaim.
45. Memutakhirkan Program Tukar Guling Lahan sejalan dengan PS 5.
46. Mengintegrasikan Pendekatan Pengelolaan Lahan.
47. Menyertakan opsi bagi penggugat lahan untuk bekerja dengan SHM dan WALHI saat mereka menavigasi proses RLU.
48. Keterlibatan dan program RLU harus diperluas ke desa-desa di sekitar konsesi RLU.
49. Melakukan desktop-study tentang biaya penggantian.
50. Mengembangkan basis data inventarisasi aset dan sensus sosio-ekonomi bersama (dapat diakses oleh RLU Operations, Growth and RLU Sustainability dan divisi terkait lainnya) yang merujuk silang lahan dan aset dengan pemilik aset, rumah tangga, dan anggota rumah tangga, dan dengan basis data RLU lainnya.
51. Meluncurkan inventarisasi aset dan sensus sosio-ekonomi di area prioritas sebelum hasil SEB/SIA sesuai kebutuhan.
52. Mempertimbangkan untuk melibatkan konsultan untuk melakukan Audit Pengembalian Tanah Warisan dengan rencana tindakan korektif jika kegiatan Pelingkupan SEB/SIA mengidentifikasi hasil mata pencarian negatif yang signifikan bagi penerima Tali Asih yang atau jika proses pelibatan lainnya mengungkapkan bahwa kegiatan pengembalian tanah menjadi salah satu akar penyebab konflik dengan masyarakat.

Recommendations:

Further to PS 1 recommendations which cross-cut PS 5, and consistent with MFC Roadmap, the following recommendations are made:

41. Finalise the Land Return Policy.
42. Update planting location selection criteria vis-a-vis land return activities.
43. Assess displacement impacts and risks.
44. Map unclaimed land.
45. Update the Land Swap Program in line with PS 5.
46. Integrate Land Management Approaches.
47. Include the option for land claimants to work with SHM and Walhi (NGOs) as they navigate RLU processes.
48. RLU engagement and programming should extend to villages surrounding RLU's concessions.
49. Conduct a replacement cost desktop study.
50. Develop a shared (accessible to RLU Operations, Growth and RLU Sustainability and other relevant divisions) asset inventory and socio-economic census database that cross references land and assets with asset owners, households, and household members, and with other RLU databases.
51. Roll out asset inventory and socio-economic census in priority areas in advance of SEB/SIA results as needed.
52. Consider engaging a consultant to conduct a Legacy Land Return Audit with a corrective action plan if the SEB/ESIA Scoping exercise identifies significant negative livelihoods outcomes for historic Tali Asih recipients or if other engagement processes reveal that historic land return activities are among root causes for conflicts with communities.

53. Mengembangkan Kebijakan yang membatasi penggunaan prosedur wajib dan mengembangkan SOP Negosiasi dan Mediasi sebagai komponen Kerangka Kerja Pengembalian Tanah.

54. Memilih target pengembalian tanah prioritas sukarela.

55. Melibatkan seorang ahli eksternal untuk menilai pelaksanaan LRF yang direvisi RLU dan prosedur terkait secara berkala.

56. Merevisi LRF dan SOP untuk menyertakan Rencana Masyarakat Rentan (termasuk sebagai bagian dari dokumen LRF/SOP) yang menganalisis dampak dan risiko yang terkait dengan Masyarakat Rentan yang Terkena Dampak Proyek, menguraikan cara mendukung mereka untuk mengakses proses, serta memantau dan mengevaluasi hasil bagi masyarakat rentan.

57. Menyertakan opsi uang tunai dan barang untuk hak jika memungkinkan dan masukkan langkah-langkah untuk memberi insentif pada alternatif barang.

58. Mengembangkan rencana komunikasi tanggal batas akhir.

59. Memperbarui bagian-bagian LRF dan SOP agar selaras dengan isi Rencana Pemulihan Mata Pencarian (LRP) termasuk menjelaskan bagaimana program-program Perusahaan disesuaikan dengan dampak perpindahan ekonomi, bagaimana program-program tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan memulihkan mata pencarian ke standar yang sama atau lebih baik, dan bagaimana hal ini dapat diukur dan dilaporkan bersama dengan semua persyaratan lain dari LRP.

53. Develop a Policy limiting the use of compulsory procedures and develop a Negotiation and Mediation SOP as a component of the Land Return Framework.

54. Select voluntary priority land return targets.

55. Engage an external expert to assess RLU's implementation of revised LRF and associated procedures periodically.

56. Revise the LRF and SOP to include a Vulnerable People's Plan (included as part of LRF / SOP document) that analyses impacts and risks related to Vulnerable Project Affected People, outlines how to support them to access processes, and that monitoring and evaluates outcomes for vulnerable people.

57. Include cash and in-kind options for entitlements where feasible and incorporate measures to incentivize in-kind alternatives.

58. Develop a cut-off date communications plan.

59. Update sections of the LRF and SOP to align with the content of a Livelihoods Restoration Plan (LRP) including describing how Company programs are scaled to the economic displacement impacts, how they aim to achieve the objective of restoring livelihoods to the same or better standards, and how this can be measured and reported along with all other requirements of an LRP.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan dan Sosial (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	--	---

60.CPP: Kembangkan Kerangka Kerja CPP yang menghubungkan berbagai inisiatif kemitraan masyarakat yang saling melengkapi (pasca-SEB sehingga hasil-hasil SEB dapat dimasukkan). Perbarui rencana CPP untuk menyelaraskan dengan IFC PS5 termasuk pertimbangan kerentanan, pengumpulan data dasar sosial-ekonomi, dan program pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa partisipasi CPP menghasilkan hasil mata pencarian yang sama atau lebih baik. Secara khusus, penilaian kerentanan mata pencarian dari setiap peserta harus dilakukan untuk menyempurnakan intervensi CPP dalam kasus orang-orang yang rentan. Peta lahan CPP yang telah dikonfirmasi untuk dimasukkan ke dalam ICLUP, ABKT SKT dan pelaporan nasional ke KLH. Mengembangkan dan melaksanakan rencana komunikasi pendaftaran PLTU yang membahas hambatan peluncuran PLTU dan mendokumentasikan posisi pemangku kepentingan terkait program. Memasukkan lahan CPP dan area target CPP dalam pelaporan SLUS, peta ICLUP dan rencana kerja tahunan RKT/RKU dan audit PHPL.

60.CPP: Develop a CPP Framework that links the various complementary community partnership initiatives (post-SEB such that SEB outcomes may be incorporated). Update the CPP plan to align with IFC PS5 including consideration of vulnerability, socio-economic baseline data collection, and monitoring and evaluation program to confirm that CPP participation results in the same or better livelihood outcomes. Specifically, a livelihood vulnerability assessment of each participant should be undertaken to fine tune CPP interventions in the case of vulnerable people. The confirmed map of CPP land to be included in the ICLUP, HCV HCS and national reporting to MoE. Develop and implement a CPP signup communications plan that addresses the obstacles to CPP rollout and documents stakeholders' position regarding the program. Include CPP land and CPP target areas in SLUS reporting, ICLUP map and RKT/RKU annual workplan and audit PHPL.

PS 6: PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

Penilaian atas Habitat Kritis untuk Pengembangan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati & Rencana Pengelolaan Offset Keanekaragaman Hayati:

Bagian 8 dari Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMP) menguraikan pengelolaan habitat berdasarkan hutan, semak belukar, lahan terbuka, lahan pertanian, dan daerah Riparian yang belum dikategorikan sesuai dengan PS 6 IFC: untuk tujuan mengevaluasi penilaian habitat kritis untuk pengembangan rencana aksi keanekaragaman hayati dan rencana penggantian kerugian keanekaragaman hayati yang disyaratkan oleh PS 6, habitat terbagi menjadi habitat yang dimodifikasi, alami dan kritis. Hirarki Mitigasi: Hindari, Kurangi, Perbaiki, dan Ganti Rugi yang harus ditunjukkan dalam BMP belum dilakukan. RLU telah menetapkan jadwal pada Q4 2022 untuk memperbarui BMP 2020 untuk memasukkan elemen-elemen penting dari PS 6 untuk secara jelas menguraikan dampak merugikan yang terukur untuk fitur-fitur yang memenuhi syarat Habitat Kritis, atau perubahan signifikan dari integritas atau kelangsungan hidup di Habitat Alami, PS 6 masing-masing membutuhkan keuntungan bersih atau keseimbangan bersih untuk fitur-fitur dan habitat ini.

RLU bekerja sama dengan BTNP untuk memperkuat zona penyangga Taman Nasional melalui beberapa kegiatan (yaitu patroli bersama, pemantauan keanekaragaman hayati, pelatihan dan sosialisasi) untuk melindungi kawasan, melestarikan flora dan fauna, restorasi ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. Patroli di dalam WCA dilakukan secara teratur untuk mencegah kegiatan ilegal seperti perburuan, perambahan, dan kebakaran.

PS 6: BIODIVERSITY CONSERVATION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF LIVING NATURAL RESOURCES

Critical Habitat Assessment for Development of Biodiversity Action Plan & Biodiversity Offset Management Plan:

Section 8 of the Biodiversity Management Plan (BMP) outlines the habitat management based on forest, shrublands, open land, agricultural land, and Riparians area that has not been categorised in accordance with IFC PS 6: habitats are divided into modified, natural and critical habitats, for the purpose of evaluating critical habitat assessment for subsequent development of biodiversity action plan and biodiversity offset plan required by the PS 6. The Mitigation Hierarchy: Avoid, Reduce, Remedy, and Offset which is required to be demonstrated in the BMP has not yet been conducted. RLU has set a timeline by Q4 2022 to update the BMP 2020 to incorporate the critical elements of PS 6 to clearly outline the measurable adverse impacts for Critical Habitat qualifying features, or significant alteration of integrity or viability in Natural Habitat, PS 6 respectively requires either a net gain or net balance for these features and habitats.

RLU is working with BTNP to strengthen the National Park's buffer zone through several activities (i.e. joint patrol, biodiversity monitoring, training and socialisation) to protect the area, preserve flora and fauna, ecosystem restoration and community empowerment. Patrolling within WCA is conducted on regular basis to prevent illegal activities such as hunting, encroachment and fire.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Saat ini BMP 2020 akan menjadi komitmen RLU dalam menerapkan praktik terbaik untuk memastikan perlindungan lanskap dan untuk menentukan di dalam area influence proyek. Perubahan BMP yang dilakukan dengan mempertimbangkan penggabungan ICLUP (area fokus yang cukup besar oleh RLU selama beberapa tahun terakhir) dan kemungkinan reklasifikasi habitat kritis dengan penilaian berjenjang (yaitu, Tier 1 atau Tier 2, kelas utama habitat kritis yang berlaku untuk C1 hingga C3) menurut IFC Guidance Note 6 harus dipertimbangkan dan melakukan evaluasi kesenjangan sebelum melakukan perubahan pada BMP. Penting bagi RLU untuk memahami sepenuhnya persyaratan IFC PS 6 dan ABKT untuk menghindari duplikasi upaya dan mendapatkan manfaat dari jadwal proyek yang lebih lancar. Tercatat bahwa &Green sedang menyelesaikan kerangka kerja keuntungan bersih untuk membantu mengkuantifikasi Kerugian Bersih mereka dan merancang pendekatan Keuntungan Bersih.

Penilaian NKT-SKT:

Laporan ABKT-SKT terbaru untuk LAJ dan MKC yang dilakukan pada tahun 2020, telah melewati proses Peninjauan Panel Kualitas HCVRN dan mendapatkan hasil "Memuaskan" pada 22 Juli 2021. Dalam hal ini RLU adalah kawasan konservasi pertama di Kalimantan Timur yang telah didefinisikan dengan baik melalui identifikasi ABKT/SKT. Tantangan tetap ada dalam kaitannya dengan pemeliharaan / pelestarian kawasan ABKT/SKT yang relatif kecil yang dikelilingi oleh area produksi RLU. Laporan analisis dampak lingkungan (AMDAL) for East Kalimantan has not been updated with the latest assessment based on HCV-HCS assessment conducted in 2020.

Currently the BMP 2020 will serve to be the commitment of RLU to implement best practice to ensure protection of the landscape and specifies within the project area of influence. The amendments of the BMP considering the incorporation of ICLUP (a considerable area of focus by RLU over the past years) and maybe reclassification of critical habitat with tier assessment (i.e., Tier 1 or Tier 2, main grades of critical habitat which are applicable to C1 to C3) according to IFC Guidance Note 6 should be considered and conduct gap evaluation prior to making changes to the BMP. It is important that RLU gains full understanding of the requirements of both IFC PS 6 and HCV to avoid duplication of effort and benefit from smoother project timelines. It is noted that &Green is finalising a net gain framework to help quantify their Net Losses and design a Net Gain approach.

HCV-HCS Assessment:

The latest HCV-HCS Report for LAJ and MKC conducted in 2020, has passed the HCVRN Quality Panel Review process and was declared as "Satisfactory" on 22 July 2021. RLU is the first conservation areas in East Kalimantan have been well defined through the HCV/HCS identification. Challenges remain in relation with the maintenance/preservation of the HCV/HCS areas that are of relatively small areas surrounded by RLU's production areas. The approved environmental impact analysis report (AMDAL) for East Kalimantan has not been updated with the latest assessment based on HCV-HCS assessment conducted in 2020.

Perencanaan Sumber Daya tentang Patroli Bersama dan Keamanan di Kawasan Lindung:

RLU membantu melindungi sekitar 143.000 ha BTPNP yang berdekatan dari deforestasi melalui kolaborasi dengan Pejabat Taman Nasional untuk membangun kegiatan perlindungan kawasan, pelestarian flora dan fauna, restorasi ekosistem dan pemberdayaan masyarakat di zona penyanga BTPNP yang merupakan habitat gajah dan harimau Sumatera yang dilindungi. Kegiatan bersama tersebut meliputi patroli, pemantauan keanekaragaman hayati dan pemberian pelatihan.

Dilaporkan, ada beberapa program pelibatan dan sosialisasi aktif pada tahun 2021 meskipun ada tantangan Covid-19. Pembalakan liar dan perambahan area konsesi tetap menjadi tantangan kritis untuk mencegah deforestasi dan Ramboll mengidentifikasi bahwa ketersediaan sumber daya untuk patroli akan sangat penting untuk melindungi area konsesi. Karena pandemi Covid-19, pelatihan untuk patroli SMART belum dilakukan pada tahun 2021 sesuai rencana. Wawancara yang dilakukan oleh Ramboll dengan para pemangku kepentingan RLU mengidentifikasi bahwa peningkatan sumber daya dalam patroli dan keamanan akan cenderung menekan meningkatnya kasus pembalakan liar dan perambahan. RLU memiliki rencana untuk membeli drone pada tahun 2022 untuk lebih meningkatkan upaya patroli dan pemantauan di area konsesi.

Rekomendasi:

61. Melakukan penilaian kesenjangan antara PS 6 dan kerangka kerja ABKT sebelum melanjutkan pembaruan BMP karena pendekatan ABKT dan PS 6 memiliki banyak elemen konseptual yang sama, namun ada beberapa area penting yang berbeda. BMP harus mempertimbangkan penggunaan cakupan spasial yang diperluas untuk memenuhi ekspektasi PS 6 akan pendekatan lanskap; menggunakan ambang batas habitat kritis, atau kriteria Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama, sebagai ambang batas global untuk NKT; dan menyertakan penentuan Habitat Alami dan Habitat Modifikasi sesuai PS 6, dan secara eksplisit mengadopsi definisi 'mempertahankan dan meningkatkan' yang selaras dengan konsep PS 6 mengenai 'keuntungan bersih'.

62. Resource planning to resume SMART patrolling training and capacity building on drone operations.

Resource Planning on Joint Patrolling and Security at Protected Areas:

RLU helps protect the adjacent approximately 143,000 ha BTPNP from deforestation through collaboration with Park Officials to establish area protection activities, preservation of flora and fauna, ecosystem restoration and community empowerment in the buffer zone of BTPNP which is a habitat for protected Sumatran elephants and tigers. The joint activities include patrol, biodiversity monitoring and provision of training.

Reportedly, there was some active engagement and socialisation programmes in 2021 despite Covid-19 challenge. Illegal logging and encroachment of concession areas remain a critical challenge to prevent deforestation and Ramboll identifies that resource availability for patrolling would be crucial to protect the concession areas. Due to Covid-19 pandemic, training for SMART patrolling has not been conducted in 2021 as per plan. Interviews conducted by Ramboll with RLU stakeholders identified that increased resource in patrolling and security would tend to curb the rising cases of illegal logging and encroachment. RLU has plans to purchase drones in 2022 to further enhance its patrolling and monitoring efforts in the concession areas.

Recommendations:

61. Conduct gap assessment between PS 6 and HCV framework before proceeding to update the BMP as the HCV approach and PS 6 have many conceptual elements in common, there are important areas of divergence. The BMP should consider the use an expanded spatial scope to meet the PS 6 expectation of a landscape approach; use critical habitat thresholds, or Key Biodiversity Area criteria, as a global threshold for HCVs; and include a determination of Natural and Modified Habitats per PS 6, and explicitly adopt definitions of 'maintain and enhance' that are aligned with the PS 6 concept of 'net gain'.

62. Perencanaan sumber daya untuk melanjutkan pelatihan patroli SMART dan peningkatan kapasitas pada operasi drone.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

63. Update AMDAL based on the latest HCV-HCS assessment conducted in 2020, and submit to the Environmental Agency for approval.

PS 7: MASYARAKAT ADAT

Paket TA untuk menyelaraskan kegiatan Masyarakat Adat dengan PS IFC sesuai rencana dimulai pada tahun 2020 oleh MFC (terkait dengan TA untuk Pengembalian Lahan). Hal ini adalah tindakan prioritas yang direkomendasikan pada Laporan Audit 2020. Untuk PS 7, ruang lingkup MFC termasuk menilai keadaan dari kelompok-kelompok masyarakat adat terdampak dan apa dampak operasional perusahaan terhadap mereka, termasuk mengevaluasi potensi dampak positif dan negatif RLU terhadap masyarakat adat yang terkena dampak; dan menggunakan analisis untuk menginformasikan pembaruan kerangka kerja MA dan IPP (sebagai bagian dari Tahap 2 dari ruang lingkup MFC). MFC telah menyampaikan Analisis Kesenjangan pada Keterlibatan Masyarakat Adat RLU terhadap PS IFC, dan menguraikan serangkaian langkah selanjutnya untuk mendorong RLU menuju kepatuhan terhadap PS IFC, sebagai berikut:

- Memperbarui Kerangka Kerja IPP;
- Mengembangkan rancangan IPP (Kalimantan Timur);
- Meninjau IPP yang dikembangkan oleh RLU (Jambi); dan
- Mengembangkan Rencana Keterlibatan dan Komunikasi MA.

Meskipun TA mengenai Masyarakat Adat telah menjadi prioritas sekunder di belakang TA terkait pengembalian lahan (PS 5), Ramboll melihat bahwa MFC telah menguraikan rencana aksi yang jelas mengenai Masyarakat Adat yang akan memfasilitasi RLU untuk bekerja lebih komprehensif dan terarah untuk memenuhi PS 7. Temuan utama dari tinjauan terperinci yang dilakukan oleh MFC adalah menempatkan pendekatan terhadap MA dalam pemahaman yang direvisi tentang MA yang terkena dampak (berdasarkan definisi PS 7 tentang MA). Hal ini termasuk pengakuan (dan seperti yang diidentifikasi dalam Laporan ESDD sebelumnya) Talang Mamak sebagai MA di Jambi, dan melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap MA di Kalimantan Timur yang konsisten dengan definisi IFC tentang MA.

63. Memperbarui AMDAL berdasarkan penilaian NKT-SKT terbaru yang dilakukan pada tahun 2020, dan menyerahkannya kepada Badan Lingkungan Hidup untuk mendapatkan persetujuan.

PS 7: INDIGENOUS PEOPLE

The TA package to align IPs activities with IFC PS was commenced as planned in 2020 by MFC (in association with the TA for Land Return). This was a priority recommended action from the 2020 Audit Report. For PS 7, MFC scope included assessing the particular circumstances of affected indigenous groups and the operations' impacts on them, including evaluating RLU's potential positive and adverse impacts on the affected IPs; and using the analysis to inform the updates to the IP framework and IPP (as part of Phase 2 of the MFC scope). MFC have delivered a Gap Analysis on RLU's Indigenous Peoples' Engagement Against IFC PS, and which outlines a series of next steps to move RLU forward towards compliance with IFC PS, as follows:

- Updating the IPP Framework;
- Developing a draft IPP (East Kalimantan);
- Review IPP developed by RLU (Jambi); and
- Developing an IP Engagement and Communication Plan.

Ramboll identifies that while the TA on IPs has been somewhat of a secondary priority behind the related TA on land return (PS 5), MFC has outlined a clear plan of action on IPs that will facilitate RLU to more comprehensively and purposefully work towards compliance with PS7. A key finding from the detailed review conducted by MFC is situating the approach to IPs within a revised understanding of affected IPs (based on PS 7 definition of IPs). This includes recognition of the Talang Mamak as IPs in Jambi, and conducting further identification of IPs in East Kalimantan consistent with IFC definition of IPs.

Informasi dasar minimum tentang MA yang diperlukan untuk mendukung pengembangan IPP dicatat dengan baik dalam Penilaian Kesenjangan MFC, seperti halnya dampak sosial ekonomi utama yang perlu dinilai; ini harus menjadi fokus dari upaya/penyampaian TA yang tersisa hingga tahun 2022.

Keterlibatan dengan komunitas MA yang terkena dampak telah dilakukan, namun, cara yang lebih terpadu direkomendasikan dengan hanya beberapa MA (misalnya keterlibatan dengan Orang Rimba yang menetap serta kelompok nomaden SEB Progresif dan kegiatan konsultasi dengan MA sedang berlangsung. Kegiatan pemetaan partisipatif MA harus memperhitungkan semua MA.

Kerangka Kerja Keterlibatan Masyarakat Adat dan Mata Pencaharian (IPELF) RLU membuat RLU berkomitmen pada proses dan prinsip-prinsip PADIATAPA, termasuk Diagram Alir Proses Konsultasi Menggunakan Pendekatan PADIATAPA. Audit 2020 menemukan bahwa dokumentasi keterlibatan yang sistematis (termasuk menunjukkan PADIATAPA sebagai proses yang berkelanjutan) masih kurang. Perjanjian tertulis yang ditandatangani dengan tiga kelompok Orang Rimba di Jambi berfokus pada hal-hal berikut: 1) RLU untuk memberikan dukungan dan bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, situasi darurat, dan mata pencaharian; 2) perlindungan WCA sebagai habitat IP dan gajah Sumatera; dan 3) survei sosial dan pemetaan aset Orang Rimba dan mata pencaharian mereka. Seperti yang telah diidentifikasi sebelumnya, dokumentasi proses di mana kesepakatan-kesepakatan ini dibuat tidak memadai dan juga kurang terkait dengan langkah-langkah mitigasi dampak untuk dampak pada MA. Ramboll memuji RLU karena telah meningkatkan dokumentasi proses konsultasi selama dua tahun terakhir, fokus ini harus dilipatgandakan karena keterlibatan dan konsultasi dengan semua MA diprioritaskan. Lebih lanjut, RLU perlu menjalin kesepakatan yang lebih spesifik dengan kelompok-kelompok MA dan yang mencerminkan konteks yang berubah (termasuk proses penilaian dasar/dampak yang sedang berlangsung). Seperti yang dicatat oleh MFC dalam penilaian kesenjangan mereka, untuk memenuhi FPCI, perjanjian dengan MA harus spesifik mengenai kegiatan dan usaha RLU apa yang disetujui oleh MA.

Rekomendasi:

64. Memprioritaskan penyelesaian TA MA (dan hasil tindakan) seperti yang direncanakan / diuraikan dalam ruang lingkup TA yang disepakati.

The minimum baseline information on IPs required to support the development of an IPP is well noted in the MFC Gap Assessment, as are the key socio-economic impacts that need to be assessed; these should be the focus of remaining TA efforts / delivery through 2022.

Engagement with affected communities of IPs has been conducted, however, a more unified manner is recommended with only some IPs (e.g. engagement with both sedentary Orang Rimba as well as nomadic groups Progressive SEB and consultation activities with IPs are underway. Participatory mapping activities of IPs should account for all IPs.

RLU's Indigenous Peoples Engagement and Livelihood Framework (IPELF) commits RLU to FPIC processes and principles, including a Consultation Process Flowchart Using the FPIC Approach. The 2020 Audit found systematic documentation of engagement (including demonstrating FPIC as an ongoing process) is lacking. The written agreements signed with the three Orang Rimba groups in Jambi focus on the following: 1) RLU to provide support and assistance in education, health, emergency situation, and livelihood; 2) protection of WCA as IP and Sumatran elephant habitat; and 3) social survey and asset mapping of Orang Rimba and their livelihoods. As identified previously, documentation of processes whereby these agreements were established is insufficient and also lacking in relation to impact mitigation measures for impacts on IPs. Ramboll commends RLU for improving documentation of consultation processes over the past two years, this focus should be doubled down upon as engagement and consultation with all IPs is prioritised. Further RLU needs to forge more specific agreements with IP groups and which reflect the changing context (including baseline / impact assessment processes underway). As noted by MFC in their gap assessment, to meet FPCI, agreements with IPs should be specific as to what RLU activities and undertakings IPs are providing their consent to.

Recommendations:

64. Prioritise the completion of IP TA (and actions outcomes) as planned / outlined in the agreed TA scope.

BAB CHAPTER 1	BAB CHAPTER 2	BAB CHAPTER 3	BAB CHAPTER 4	BAB CHAPTER 5	BAB CHAPTER 6	BAB CHAPTER 7	BAB CHAPTER 8	BAB CHAPTER 9	BAB CHAPTER 10
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	Capaian Lingkungan Environmental Highlights	Capaian Sosial Social Highlights	Capaian Produksi Production Highlights	Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

65. Menyelaraskan Kerangka Kerja Masyarakat Adat dan IPP-Jambi dengan memasukkan Talang Mamak, yang ditemukan di desa-desa yang berdekatan dengan BU3 dan 4 LAJ.
66. Selain kelompok-kelompok Masyarakat Adat yang teridentifikasi di Kalimantan Timur, selidiki potensi keberadaan Masyarakat Adat lainnya di daerah tersebut. Jika ada kelompok-kelompok seperti itu, ini harus dimasukkan ke dalam Kerangka Kerja dan Rencana Masyarakat Adat RLU.
67. Untuk mendukung kegiatan di atas, kegiatan Pemetaan MA Partisipatif harus dilanjutkan baik di Jambi dan Kalimantan Timur, bersama dengan SEB, dan kegiatan konsultasi berkelanjutan yang ditargetkan dengan MA untuk melengkapi pemahaman dasar dan identifikasi MA, dan setelah itu untuk secara khusus mendukung penilaian dampak yang ditargetkan untuk dimasukkan ke dalam IPP untuk Jambi dan Kalimantan Timur.
68. Konsultasi dengan MA, SEB dan kegiatan pemetaan/inventarisasi aset harus mencakup fokus dan analisis pada kepemilikan tradisional MA dan penggunaan lahan dan sumber daya secara adat. Fokus khusus harus ditempatkan pada MA yang datanya terbatas/tidak ada di RLU, serta menambah pemahaman di mana keterlibatan/konsultasi sudah terjalin dengan MA (misalnya kelompok MA yang menetap).
69. Mempersiapkan dan memulai implementasi Rencana Keterlibatan & Komunikasi MA.
70. Terus melibatkan MA dan menjalin kesepakatan yang lebih spesifik dengan mereka yang selaras dengan persyaratan FPIC secara lebih lengkap. Perjanjian-perjanjian ini harus eksplisit mengenai kegiatan dan usaha RLU spesifik apa yang disetujui oleh MA.
71. Mengejar keterlibatan khusus dengan kelompok-kelompok MA yang belum dilibatkan oleh Proyek, dengan menerapkan prinsip-prinsip dan proses FPIC. Targetkan keterlibatan yang berarti dengan semua kelompok MA (yaitu kelompok nomaden di Jambi dan MA di Kalimantan Timur) pada akhir tahun 2022. Keterlibatan idealnya juga harus mencakup SEB, sehingga penilaian dasar/dampak yang berkaitan dengan semua MA dapat ditetapkan dan dimasukkan dalam IPP.
65. Harmonise the Indigenous People's Framework and IPP-Jambi by including the Talang Mamak, who are found in the villages adjacent to BU3 and 4 of LAJ.
66. Aside from the identified IP groups in East Kalimantan, investigate the potential presence of other IPs in the area. If there are such groups, these should be incorporated into RLU's IP Framework and Plan.
67. To support above activities, Participatory IP Mapping activities should be continued both in Jambi and East Kalimantan, along with SEB, and targeted ongoing consultation activities with IPs in order to supplement baseline understanding and identification of IPs, and thereafter to specifically support targeted impact assessment to be incorporated within the IPPs for Jambi and East Kalimantan.
68. Consultation with IPs, SEB and asset mapping/inventory activities should include focus and analysis on IPs' traditional ownership and customary use of land and resources. Specific focus to be placed on those IPs that RLU has limited/no data on as yet, as well as augmenting understanding where engagement / consultation is already established with IPs (e.g. sedentary IP groups).
69. Prepare and commence implementation of the IP Engagement & Communications Plan.
70. Continue to engage IPs and forge more specific agreements with them that align with FPIC requirements more fully. These agreements should be explicit as to what specific RLU activities and undertakings IPs are giving their consent to.
71. Pursue specific engagement with IP groups that have not yet been engaged by the Project, applying FPIC principles and processes. Target meaningful engagement with all IP groups (i.e. nomadic groups in Jambi and IPs in East Kalimantan) by end of 2022. Engagement should ideally also encompass SEB, such that baseline / impacts assessment relating to all IPs is able to be established and included in IPPs.
72. Dalam Rencana Keterlibatan dan Komunikasi MA yang direvisi, berikan perencanaan dan tindakan khusus untuk mendukung konsultasi dan pengungkapan informasi dengan MA tentang dampak dan langkah-langkah mitigasi.
73. Kerangka Kerja dan Rencana Pengembalian Lahan harus mengatasi potensi dampak pada MA, termasuk hilangnya mata pencaharian mereka secara permanen atau sementara. Pemukiman kembali secara paksa bagi MA harus dihindari.
74. Mitigasi dan manfaat pembangunan (berdasarkan pelengkupan ESIA yang diperbarui termasuk MA yang sebelumnya tidak teridentifikasi/dinilai) harus dikembangkan melalui konsultasi dengan kelompok MA, dan yang mencerminkan kebutuhan dan preferensi mereka.
75. Memastikan sumber daya internal ditugaskan secara memadai untuk kemajuan tugas-tugas / kegiatan pelibatan IP secara berkelanjutan dan konsisten.
76. Mempertimbangkan untuk mempertahankan konsultan (misalnya MFC) yang akrab dengan Proyek dalam kapasitas yang ditargetkan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk memfasilitasi pelaksanaan IPP RLU yang efektif sesuai dengan IFC PS 7 (dan yang dibangun berdasarkan pekerjaan IP yang juga telah diselesaikan RLU dengan Wanaksara, KKI Warsi, RBI, dan Daemeter). Alasan untuk ini adalah untuk menghindari kemajuan yang dibuat pada tahun 2021/2022 pada IP kehilangan momentum setelah TA selesai.
77. Untuk potensi keberadaan kelompok-kelompok MA dan area budidaya mereka di dalam area konsesi RLU, pertama-tama kumpulkan data mengenai kelompok-kelompok MA dan kegiatan mereka termasuk populasi, lokasi, dan area. Setelah mengumpulkan data, RLU harus menyusun rencana untuk keterlibatan pemangku kepentingan dengan kelompok-kelompok MA untuk mencapai kesepakatan yang akan menguntungkan kedua belah pihak (kelompok MA dan RLU).
72. In the revised IP Engagement and Communications Plan, provide specific planning and actions to support consultation and information disclosure with IPs on impacts and mitigation measures.
73. The Land Return Framework and Plan should address potential impacts on IPs, including permanent or temporary loss of their livelihood. Involuntary Resettlement of IPs should be avoided.
74. Mitigation and development benefits (based on updated ESIA scoping including previously unidentified / assessed IPs) should be developed in consultation with IP groups, and which reflect their needs and preferences.
75. Ensure internal resources are adequately assigned to progress on IP tasks / engagement activities in an ongoing and consistent manner.
76. Consider retaining a consultant (e.g. MFC) familiar with the Project in a targeted capacity to provide ongoing coaching and mentoring to facilitate RLU's effective implementation of the IPPs consistent with IFC PS 7 (and which builds on the IP work that RLU has also completed with Wanaksara, KKI Warsi, RBI, and Daemeter). The rationale for this is to avoid the progress made in 2021/2022 on IPs losing momentum once the TA is complete.
77. For the potential existence of IP groups and their cultivation area within RLU's concession area, first gather data regarding to the IP groups and their activities including population, location and area. After gathering the data, RLU should devise a plan for stakeholder engagement with the IP groups to reach an agreement that will benefit to both parties (IP groups and RLU).

PS 8: WARISAN BUDAYA

Melalui studi, konsultasi, pelaporan, dan perencanaan sebelumnya dan yang sedang berlangsung sebagai bagian dari NKT-SKT (dan ICLUP), warisan budaya telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan sebagian warisan budaya. Ada pengakuan eksplisit terhadap konvensi lokal dan internasional tentang perlindungan warisan budaya (Draft ICLUP, dan Laporan NKT-SKT). Laporan NKT-SKT (Jambi dan Kalimantan Timur) mengindikasikan penerapan langkah-langkah mitigasi yang mendukung penghindaran sehubungan dengan hutan adat/sakral, dan kuburan (HCV 6), termasuk misalnya, pemasangan dan pemeliharaan batas-batas untuk melindungi lokasi bersejarah/sakral. Warisan budaya yang mengikuti definisi HCV 6 (Nilai Budaya) telah diidentifikasi dan lokasinya disorot dalam peta. Pendekatan identifikasi NKT 6 dalam Laporan telah sesuai dengan Panduan NKT-SKT. RLU harus memastikan bahwa warisan budaya termasuk bentuk-bentuk budaya yang berwujud dan tidak berwujud seperti yang didefinisikan oleh IFC PS 8, semuanya dimasukkan dalam SEB yang sedang berjalan.

Prosedur Penemuan Peluang belum dikembangkan untuk Proyek tersebut.

Risiko saat ini adalah bahwa sementara kemajuan dalam mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya sedang dibuat, tidak ada pemahaman, penilaian, dan mitigasi/pengelolaan warisan budaya yang terkonsolidasi atau terpadu, dan bahwa warisan budaya berisiko didekati secara terputus-putus dan sedikit demi sedikit sebagai hasilnya. Karena Proyek ini semakin matang dalam hal kemampuannya untuk menangani berbagai aspek yang lebih luas (selain masalah risiko/dampak tinggi), diperlukan konsolidasi fokus pada warisan budaya.

Rekomendasi:

78. Setelah tersedianya Laporan SEB, kumpulkan informasi dasar warisan budaya yang tersedia dari Studi ABKT-SKT, SEB, dan kegiatan konsultasi/TA IP sebagai bagian dari rekomendasi pelingkupan ESIA yang direkomendasikan di atas dan pengembangan CHMP untuk Jambi dan Kalimantan Timur. CHMP harus dikembangkan dengan mempertimbangkan dan dengan mengacu pada aliran kerja dan proses terkait yang sedang berlangsung oleh Proyek (misalnya, CPP, pengembalian lahan dan IPP).

PS 8: CULTURAL HERITAGE

Through previous and ongoing studies, consultation, reporting, and planning as part of HCV-HCS (and ICLUP), cultural heritage has partially identified and documented cultural heritage. There is explicit recognition of both local and international conventions on the protection of cultural heritage (Draft ICLUP, and HCV-HCS Reports). The HCV-HCS Report (Jambi and East Kalimantan) do indicate application of mitigation measures that favour avoidance in relation to indigenous / sacred forests, and graves (HCV6), including for example, erection and maintenance of boundaries to protect historical / sacred locations. The cultural heritages following the definition of HCV 6 (Cultural Values) have been identified and their locations are highlighted in map. The approach of HCV 6 identification in the Report has complied to the HCV-HCS Guidance. RLU should ensure that the cultural heritages including tangible and intangible forms of culture as defined by IFC PS 8 are all included in the on-going SEB.

A Chance Finds Procedure has not yet been developed for the Project.

The risk at present is that while progress in identifying and protecting cultural heritage is being made, there is no consolidated or unified understanding, assessment and mitigation / management of cultural heritage, and that cultural heritage is at risk of being approached in a disjointed and piecemeal fashion as a result. As the Project is maturing in terms of its ability to address a broader range of aspects (other than those high risk / impact issues), consolidated focus on cultural heritage is needed.

79. Mengembangkan Prosedur Temuan Peluang untuk Proyek.

80. Melakukan pelatihan kesadaran dengan semua pekerja dan konsultan yang terlibat dalam Proyek dan yang terlibat dalam pekerjaan berbasis lapangan mengenai ketentuan-ketentuan Prosedur Temuan Peluang.

81. Memastikan ketentuan untuk akses berkelanjutan bagi masyarakat yang terkena dampak ke situs budaya didokumentasikan dan diterapkan dalam CHMP dan IPP (sebagaimana mestinya).

79. Develop a Chance Finds Procedure for the Project.

80. Conduct awareness training with all workers and consultants engaged on the Project and who are involved in field-based work as to the provisions of the Chance Finds Procedure.

81. Ensure provisions for continued access for affected communities to cultural sites is documented and implemented in CHMP and IPP (as appropriate).



Hasil panen biji kopi yang merupakan salah satu tanaman budidaya dalam program agroforestry kerja sama Orang Rimba dan PT Lestari Asri Jaya.

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

Pertimbangan atas Tinjauan ESG Sebagai Akibat COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menantang perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk RLU Group, yang paling terdampak oleh mobilitas. Upaya ESG di masa lalu, yang telah mendorong RLU menuju kepatuhan terhadap IFC PS, telah berperan penting dalam meningkatkan ketahanan dan melindungi RLU terhadap risiko ESG yang tidak terduga, seperti COVID-19, terutama dalam kaitannya dengan ketentuan ketenagakerjaan dan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan dan juga masyarakat di mana RLU beroperasi, Perusahaan menerapkan beberapa langkah, termasuk di antaranya:

- Tidak ada pengurangan gaji atau kompensasi lainnya. Perusahaan juga berkomitmen untuk membayar 100% kompensasi tetap kepada semua karyawan, yang mencakup perawatan medis.
- Untuk mengambil keputusan dengan cepat dan efektif, perusahaan membentuk Tim Manajemen Krisis COVID-19 (tim CMT COVID) yang terdiri dari manajemen senior Grup RLU (Dewan Direksi, Manajer Umum, Kepala Departemen) dan juga Satuan Tugas (TF) COVID 19 di semua lokasi. TF yang terakhir ini terdiri dari anggota tim Keselamatan Kesehatan dan Lingkungan dan perwakilan karyawan dari berbagai departemen. CMT dan Gugus Tugas dibentuk pada Maret 2020.

Perusahaan juga menetapkan Protokol COVID-19, dan meninjau rencana kerja berdasarkan situasi COVID-19 yang berkembang di setiap area. Hal ini termasuk melembagakan langkah-langkah bekerja di rumah bagi karyawan yang pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah, pembatasan pergerakan karyawan dan pengunjung di dalam perkebunan, tes Polymerase Chain Reaction (PCR) COVID-19 untuk semua pengunjung atau karyawan di lokasi yang menunjukkan gejala atau kontak dekat dari kasus yang dikonfirmasi berdasarkan pelacakan kontak.

ESG Review Considerations Due to COVID-19

The COVID-19 pandemic has challenged companies globally including the RLU Group, which has been most impacted by mobility. Past ESG efforts moving RLU towards compliance with IFC PS are noted to have been instrumental in improving resilience and safeguarding RLU against unexpected ESG risks such as COVID-19, especially in relation to labour and community health and safety provisions. As part of the Company's commitment to protect health and safety of employees and also in the communities where RLU operates, the Company implemented several measures, including, key among which include:

- No reduction in salary or other compensation. The Group also committed to paying 100% of fixed compensation to all employees, covering any medical treatment.
- To take decisions quickly and effectively, the company established a COVID-19 Crisis Management Team (COVID CMT team) comprised of RLU Group senior management (Board of Directors, General Managers, Department Heads) and also a COVID 19 Task Force (TF) at all sites. This latter TF is comprised of Safety Health and Environment team members and employee representatives from various departments. The CMT and Task Force were established in March 2020.

The Company also established a COVID-19 Protocol, and reviews work plans based on the evolving COVID-19 situation in each area. This has included instituting work at home measures for employees whose jobs can be performed from home, employee and visitor movement restrictions within the plantations, COVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) tests for all site visitors or employees showing symptoms or the close contacts of confirmed cases based on contact tracing.

Status Progres Key Performance Indicators TLFF (KPI TLFF) TLFF Key Performance Indicators (TLFF KPI) Progress Status

TLFF Objective / Tujuan TLFF	KPI	2018 Data	2019 Data	2020 Data	2021 Data
Retensi Hutan / Forest Retention	Hektar hutan ABKT/SKT yang dikelola secara aktif - di konsesi / Hectares of actively managed HCV/HCS forest – on concession	<ul style="list-style-type: none"> • Jambi: 2,000 ha • Kalimantan Timur/ East Kalimantan: 6,500 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Jambi: 2,879 ha • Kalimantan Timur/ East Kalimantan: 8,858 ha (HCV-HCS Land Cover 2019 Data) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jambi: 2,879 ha • Kalimantan Timur/ East Kalimantan: 8,858 ha (HCV-HCS Land Cover 2019 Data) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jambi: 2,780 ha • Kalimantan Timur/ East Kalimantan: 9,094 Ha (Satelligence 2018- 2021 Data)
Peningkatan Mata Pengaharian Pedesaan / Improved Rural Livelihoods	Jumlah petani karet rakyat yang terlibat sebagai bagian dari CPP (paruh waktu dan penuh waktu). Mereka adalah petani yang tidak dipekerjakan oleh RLU, tetapi memiliki perjanjian yang mencakup beberapa jenis transaksi layanan dan produk (karet). / Number of smallholder rubber farmers engaged as part of the CPP (part time and full time). These are farmers, not employed by RLU, but that have an agreement which defines some type of transaction between services and products (rubber).	Not available / data tidak tersedia	<ul style="list-style-type: none"> • Jambi: 33 • Kalimantan Timur/ East Kalimantan : 300 	<ul style="list-style-type: none"> • Jambi: 213 • Kalimantan Timur/ East Kalimantan : 398 	<ul style="list-style-type: none"> • Jambi: 242 • Kalimantan Timur/ East Kalimantan : 488

Total: 730

Catatan: penghitungan berdasarkan petani kecil yang telah dilegalikan dalam NKK. Kaltim: termasuk 440 petani luar

Note: counting based on smallholders that has been legalized in NKK. EKal: including 440 outgrowers

BAB CHAPTER 1	BAB CHAPTER 2	BAB CHAPTER 3	BAB CHAPTER 4	BAB CHAPTER 5	BAB CHAPTER 6	BAB CHAPTER 7	BAB CHAPTER 8	BAB CHAPTER 9	BAB CHAPTER 10
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	Capaian Lingkungan Environmental Highlights	Capaian Sosial Social Highlights	Capaian Produksi Production Highlights	Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

TLFF Objective / Tujuan TLFF	KPI	2018 Data	2019 Data	2020 Data	2021 Data
Jumlah rumah tangga petani kecil yang terkena dampak CPP RLU (dihitung sebagai jumlah petani x 5 dengan asumsi rata-rata rumah tangga di Jambi) / Number of smallholder households impacted by RLU CPP (to be calculated as no. of farmers x 5 given assumptions re. average household in Jambi)	Not available / data tidak tersedia	1,655 orang / persons	3,175 orang / persons	3,650 orang / persons	
Jumlah petani yang menerima pelatihan dari RLU / Number of farmers receiving training from RLU	266	804	• Jambi: 263 • Kalimantan Timur/ East	• Jambi: 435 • Kalimantan Timur/ East	
			Kalimantan: 198	Kalimantan: 242	
Jumlah petani yang menjual karet ke dalam rantai pasokan RLU / Number of farmers selling rubber into the RLU supply chain	Data tidak tersedia / Not available	333	413	730	
Jumlah pekerjaan yang diciptakan di bawah CPP (termasuk pekerjaan yang terkait dengan pemasok lokal) / Number of jobs created under the CPP (to include those jobs associated with local suppliers)	Data tidak tersedia / Not available	Data tidak tersedia / Not available	• Jambi: 35 • Kalimantan Timur/ East	• Jambi: 16 • Kalimantan Timur/ East	
			Kalimantan: 163	Kalimantan: 33	
Jumlah pekerjaan langsung yang diciptakan / Number of direct job created	• Jambi: 3,579 • Kalimantan Timur/ East	• RLU permanent employees / karyawan tetap: 851	• Head Office / Kantor Pusat: 45 • Jambi: 1,042 • Daily labour / Tenaga kerja harian: 3,278	• Head Office / Kantor Pusat: 49 • Jambi: 3,005 • Kalimantan Timur/ East	
	Total: 4,430	Total: 4,320	Total: 4,259	Total: 3,882	

TLFF Objective / Tujuan TLFF	KPI	2018 Data	2019 Data	2020 Data	2021 Data
Kisaran gaji karyawan RLU / Salary range of direct RLU employees	Di atas standar upah minimum provinsi / Above provincial minimum wage standard	Di atas standar upah minimum provinsi / Above provincial minimum wage standard	Di atas standar upah minimum provinsi / Above provincial minimum wage standard	Di atas standar upah minimum provinsi / Above provincial minimum wage standard	Di atas standar upah minimum provinsi / Above provincial minimum wage standard
Perlindungan Keaneharagaman Hayati dan pemetaan spesies yang terancam/terancam punah Biodiversity Protection and mapping of threatened/endangered species	Jumlah program konservasi yang dilaksanakan / No. of conservation programmes implemented	Empat (4) program: <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan Hutan• Kawasan Konservasi Satwa Liar• Konflik Manusia-Satwa Liar• Pemantauan Satwa Liar	Empat (4) program: <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan Hutan• Kawasan Konservasi Satwa Liar• Konflik Manusia-Satwa Liar• Pemantauan Satwa Liar	Lima (5) program: <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan Hutan• Kawasan Konservasi Satwa Liar• Konflik Manusia-Satwa Liar• Pemantauan satwa liar• Restorasi (hanya di Jambi)	Lima (5) program: <ul style="list-style-type: none">• Perlindungan Hutan• Kawasan Konservasi Satwa Liar• Konflik Manusia-Satwa Liar• Pemantauan satwa liar• Restorasi (hanya di Jambi)
		Four (4) programmes: <ul style="list-style-type: none">• Forest Protection• Wildlife Conservation Area• Human-wildlife Conflict• Wildlife Monitoring	Four (4) programmes: <ul style="list-style-type: none">• Forest Protection• Wildlife Conservation Area• Human-wildlife Conflict• Wildlife Monitoring	Five (5) programmes: <ul style="list-style-type: none">• Forest Protection• Wildlife Conservation Area• Human-wildlife Conflict• Wildlife monitoring• Restoration (only in Jambi)	Five (5) programmes: <ul style="list-style-type: none">• Forest Protection• Wildlife Conservation Area• Human-wildlife Conflict• Wildlife monitoring• Restoration (only in Jambi)

BAB CHAPTER 1 Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	BAB CHAPTER 2 Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	BAB CHAPTER 3 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	BAB CHAPTER 4 Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	BAB CHAPTER 5 Capaian Lingkungan Environmental Highlights	BAB CHAPTER 6 Capaian Sosial Social Highlights	BAB CHAPTER 7 Capaian Produksi Production Highlights	BAB CHAPTER 8 Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	BAB CHAPTER 9 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	BAB CHAPTER 10 Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

TLFF Objective / Tujuan TLFF	KPI	2018 Data	2019 Data	2020 Data	2021 Data
Jumlah spesies yang dilindungi / Number of species protected	5 Spesies yang Terancam Punah / 5 Critically Endangered Species: • Gajah / Elephant (<i>Elephas maximus sumatranus</i>) • Harimau / Tiger (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) • Orangutan (<i>Pongo pygmaeus morio</i>) • Rangkong Gading/ Helmeted hornbill (<i>Rhinoplax vigil</i>), • Meranti Kuning / Yellow Meranti (<i>Shorea peltata</i>) • Gaharu (Aqularia beccarain) • Orangutan (<i>Pongo pygmaeus morio</i>) • Meranti (<i>Dipterocarpus tempehes Slooten</i>) • Meranti (<i>Dipterocarpus tempehes Slooten</i>) (Endemic)	5 Spesies yang Terancam Punah / 5 Critically Endangered Species: • Gajah / Elephant (<i>Elephas maximus sumatranus</i>) • Harimau / Tiger (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) • Orangutan (<i>Pongo pygmaeus morio</i>) • Rangkong Gading/ Helmeted hornbill (<i>Rhinoplax vigil</i>), • Meranti Kuning / Yellow Meranti (<i>Shorea peltata</i>) • Gaharu (Aqularia beccarain) • Orangutan (<i>Pongo pygmaeus morio</i>) • Meranti (<i>Dipterocarpus tempehes Slooten</i>) • Meranti (<i>Dipterocarpus tempehes Slooten</i>) (Endemic)	7 Spesies yang Terancam Punah / 7 Critically Endangered Species: • Gajah / Elephant (<i>Elephas maximus sumatranus</i>) • Harimau / Tiger (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) • Rangkong Gading/ Helmeted hornbill (<i>Rhinoplax vigil</i>), • Meranti Kuning / Yellow Meranti (<i>Shorea peltata</i>) • Gaharu (Aqularia beccarain) • Orangutan (<i>Pongo pygmaeus morio</i>) • Meranti (<i>Dipterocarpus tempehes Slooten</i>) • Meranti (<i>Dipterocarpus tempehes Slooten</i>) (Endemic)	7 Spesies yang Terancam Punah / 7 Critically Endangered Species: • Gajah / Elephant (<i>Elephas maximus sumatranus</i>) • Harimau / Tiger (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) • Rangkong Gading/ Helmeted hornbill (<i>Rhinoplax vigil</i>), • Meranti Kuning / Yellow Meranti (<i>Shorea peltata</i>) • Gaharu (Aqularia beccarain) • Orangutan (<i>Pongo pygmaeus morio</i>) • Meranti (<i>Dipterocarpus tempehes Slooten</i>) • Meranti (<i>Dipterocarpus tempehes Slooten</i>) (Endemic)	7 Spesies yang Terancam Punah / 7 Critically Endangered Species: • Gajah / Elephant (<i>Elephas maximus sumatranus</i>) • Harimau / Tiger (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) • Rangkong Gading/ Helmeted hornbill (<i>Rhinoplax vigil</i>), • Meranti Kuning / Yellow Meranti (<i>Shorea peltata</i>) • Gaharu (Aqularia beccarain) • Orangutan (<i>Pongo pygmaeus morio</i>) • Meranti (<i>Dipterocarpus tempehes Slooten</i>) • Meranti (<i>Dipterocarpus tempehes Slooten</i>) (Endemic)

TLFF Objective / Tujuan TLFF	KPI	2018 Data	2019 Data	2020 Data	2021 Data
2 Endangered species / 2 Spesies yang terancam punah: • Simpai Putih / Mitred monkey (<i>Presbytis melalophos</i>) • Malayan Tapir (<i>Tapirus indicus</i>) • Berang-berang / Otter civet (<i>Cynogale bennettii</i>) • Malayan Tapir (<i>Tapirus indicus</i>) • Owa/ Bornean gibbon (<i>Hylobates muelleri</i>) • Bekantan / Proboscis Monkey (<i>Nasalis larvatus</i>) • Macan tutul/ Clouded leopard (<i>Neofelis diardi</i>) • Kapur (<i>Dryobalanops oblongifolia</i> subsp. <i>occidentalis</i> P.S.Ashton)	4 Spesies yang Terancam Punah / 4 Endangered species: • Simpai Putih/ Mitred monkey (<i>Presbytis melalophos</i>) • Anjing hutan/ Wild dog (<i>Canis alpinus</i>) • Berang-berang / Otter civet (<i>Cynogale bennettii</i>) • Malayan Tapir (<i>Tapirus indicus</i>) • Owa/ Bornean gibbon (<i>Hylobates muelleri</i>) • Bekantan / Proboscis Monkey (<i>Nasalis larvatus</i>) • Macan tutul/ Clouded leopard (<i>Neofelis diardi</i>) • Kapur (<i>Dryobalanops oblongifolia</i> subsp. <i>occidentalis</i> P.S.Ashton)	8 Spesies yang Terancam Punah / 8 Endangered species: • Simpai Putih/ Mitred monkey (<i>Presbytis melalophos</i>) • Anjing hutan/ Wild dog (<i>Canis alpinus</i>) • Berang-berang / Otter civet (<i>Cynogale bennettii</i>) • Malayan Tapir (<i>Tapirus indicus</i>) • Owa/ Bornean gibbon (<i>Hylobates muelleri</i>) • Bekantan / Proboscis Monkey (<i>Nasalis larvatus</i>) • Macan tutul/ Clouded leopard (<i>Neofelis diardi</i>) • Kapur (<i>Dryobalanops oblongifolia</i> subsp. <i>occidentalis</i> P.S.Ashton)	8 Spesies yang Terancam Punah / 8 Endangered species: • Simpai Putih/ Mitred monkey (<i>Presbytis melalophos</i>) • Anjing hutan/ Wild dog (<i>Canis alpinus</i>) • Berang-berang / Otter civet (<i>Cynogale bennettii</i>) • Malayan Tapir (<i>Tapirus indicus</i>) • Owa/ Bornean gibbon (<i>Hylobates muelleri</i>) • Bekantan / Proboscis Monkey (<i>Nasalis larvatus</i>) • Macan tutul/ Clouded leopard (<i>Neofelis diardi</i>) • Kapur (<i>Dryobalanops oblongifolia</i> subsp. <i>occidentalis</i> P.S.Ashton)	8 Spesies yang Terancam Punah / 8 Endangered species: • Simpai Putih/ Mitred monkey (<i>Presbytis melalophos</i>) • Anjing hutan/ Wild dog (<i>Canis alpinus</i>) • Berang-berang / Otter civet (<i>Cynogale bennettii</i>) • Malayan Tapir (<i>Tapirus indicus</i>) • Owa/ Bornean gibbon (<i>Hylobates muelleri</i>) • Bekantan / Proboscis Monkey (<i>Nasalis larvatus</i>) • Macan tutul/ Clouded leopard (<i>Neofelis diardi</i>) • Kapur (<i>Dryobalanops oblongifolia</i> subsp. <i>occidentalis</i> P.S.Ashton)	8 Spesies yang Terancam Punah / 8 Endangered species: • Simpai Putih/ Mitred monkey (<i>Presbytis melalophos</i>) • Anjing hutan/ Wild dog (<i>Canis alpinus</i>) • Berang-berang / Otter civet (<i>Cynogale bennettii</i>) • Malayan Tapir (<i>Tapirus indicus</i>) • Owa/ Bornean gibbon (<i>Hylobates muelleri</i>) • Bekantan / Proboscis Monkey (<i>Nasalis larvatus</i>) • Macan tutul/ Clouded leopard (<i>Neofelis diardi</i>) • Kapur (<i>Dryobalanops oblongifolia</i> subsp. <i>occidentalis</i> P.S.Ashton)

Hektar kawasan konservasi satwa liar yang dilindungi / Hectares of wildlife conservation areas protected	8,198 ha	Sekitar 9.700 ha (dibulatkan ke atas)/ Approx. 9,700 ha (round up)	Jambi: 9,678 ha	Jambi: 9,678 ha
--	-----------------	--	------------------------	------------------------

BAB CHAPTER 1	BAB CHAPTER 2	BAB CHAPTER 3	BAB CHAPTER 4	BAB CHAPTER 5	BAB CHAPTER 6	BAB CHAPTER 7	BAB CHAPTER 8	BAB CHAPTER 9	BAB CHAPTER 10
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	Capaian Lingkungan Environmental Highlights	Capaian Sosial Social Highlights	Capaian Produksi Production Highlights	Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

TLFF Objective / Tujuan TLFF	KPI	2018 Data	2019 Data	2020 Data	2021 Data
------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Hektar habitat konservasi yang dilindungi di dalam konsesi / Hectares of conservation habitats protected within the concessions	<ul style="list-style-type: none"> Jambi: 18,370 ha Kalimantan Timur/ East Kalimantan: 9,983 ha 	<ul style="list-style-type: none"> Jambi: 18,370 ha Kalimantan Timur/ East Kalimantan: 9,983 ha 	<ul style="list-style-type: none"> Jambi: 18,370 ha Kalimantan Timur/ East Kalimantan: 9,983 ha 	<ul style="list-style-type: none"> Jambi: 18,690 ha (238 ha di antaranya akan dikelola bersama masyarakat di bawah CPP) Kalimantan Timur: 9,874 ha (109 ha di antaranya akan dikelola bersama masyarakat di bawah CPP) Jambi: 18,690 ha (238 ha of it to be managed with community under CPP) East Kalimantan: 9,874 ha (109 ha of it to be managed with community under CPP) 	
---	---	---	---	---	--

Cakupan patroli dan pelaporan tentang temuan aktivitas ilegal dari waktu ke waktu / Patrol coverage and reporting on illegal activity findings overtime	<p>Jangkauan patroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jambi: 125.893 km Kalimantan Timur: 84.286 km <p>Pelaporan aktivitas ilegal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jambi: 22 laporan Kalimantan Timur: 53 laporan <p>Patrol coverage:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jambi: 125,893 km East Kalimantan: 84,286 km 	<p>Jangkauan patroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jambi: 107.305 km WCA: 59,261 km Kalimantan Timur: 81.767 km <p>Pelaporan aktivitas ilegal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jambi: 4 laporan Kalimantan Timur: 5 laporan <p>Patrol coverage:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jambi: 107.305 km WCA: 37,726 km East Kalimantan: 42,796 km 	<p>Jangkauan patroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jambi: 83.015 km WCA: 37.726 km East Kalimantan: 42,796 km <p>Pelaporan aktivitas ilegal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jambi: 4 laporan Kalimantan Timur: 81.767 km <p>Patrol coverage:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jambi: 83,015 km WCA: 37,726 km East Kalimantan: 42,796 km
---	--	--	---

TLFF Objective / Tujuan TLFF	KPI	2018 Data	2019 Data	2020 Data	2021 Data
------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Illegal activity reporting:	<ul style="list-style-type: none"> Jambi: 22 reports East Kalimantan: 53 reports 	Illegal activity reporting:	<ul style="list-style-type: none"> Jambi: 4 reports East Kalimantan: 5 reports 	Illegal activity reporting:	<ul style="list-style-type: none"> Jambi: 4 reports
Pengurangan emisi dengan melarang penebangan dan pembakaran di lanskap / Reduced emissions from prohibitions on slash and burn in landscapes	Jumlah pohon yang ditanam / Number of trees planted	Pohon karet yang ditanam: 8,583,277	Pohon karet yang ditanam: 10,209,131	Pohon karet yang ditanam: 11,318,033	Pohon karet yang ditanam: 11,358,157
Restorasi:	<ul style="list-style-type: none"> 1,075 pohon asli ditanam di Kawasan Konservasi BU3-4 dan 1 121 pohon ditanam di Kawasan Konservasi BU1-2 	Restorasi:	<ul style="list-style-type: none"> 1,113 pohon asli ditanam di Kawasan Konservasi (Jambi) 4 dan 1 121 pohon ditanam di Kawasan Konservasi 9 Kalimantan Timur 	Restorasi:	<ul style="list-style-type: none"> 1,827 pohon ditanam di Kawasan Konservasi (Jambi) 222 pohon ditanam di Kawasan Konservasi 9 Kalimantan Timur
Rubber trees planted: 8,583,277	Rubber trees planted: 10,209,131	Rubber trees planted: 11,318,033	Rubber trees planted: 11,358,157	Rubber trees planted: 11,318,033	Rubber trees planted: 11,358,157
Restoration:	<ul style="list-style-type: none"> 1,075 native trees planted in Conservation Area (Jambi) 	Restoration:	<ul style="list-style-type: none"> 1,113 native trees planted in Conservation Area BU3-4 and 1 121 trees planted in Conservation Area BU1-2 	Restoration:	<ul style="list-style-type: none"> 1,827 trees planted in Conservation Area (Jambi) 222 trees planted in Conservation Area 9 East Kalimantan
Pembibitan:	<ul style="list-style-type: none"> 3,132 bibit (Stasiun Ranger BU4) 3,796 bibit (BU1 Arboretum) 180 bibit di BU5 	Pembibitan:	<ul style="list-style-type: none"> 9,051 bibit (Jambi) 228 bibit (Kalimantan Timur) 	Pembibitan:	<ul style="list-style-type: none"> 8,700 bibit (Jambi) 1,636 bibit (Kalimantan Timur)
Rubber trees planted: 10,209,131	Rubber trees planted: 11,318,033	Rubber trees planted: 11,358,157	Rubber trees planted: 11,318,033	Rubber trees planted: 11,358,157	Rubber trees planted: 11,358,157
Restoration:	<ul style="list-style-type: none"> 1,113 native trees planted in Conservation Area BU3-4 and 1 121 trees planted in Conservation Area BU1-2 	Restoration:	<ul style="list-style-type: none"> 1,827 native trees planted in Conservation Area BU3-4 and 1 121 trees planted in Conservation Area BU1-2 	Restoration:	<ul style="list-style-type: none"> 2,222 trees planted in Conservation Area 9 East Kalimantan
Nursery:	<ul style="list-style-type: none"> 3,132 seedlings (BU4 Ranger's Station) 3,796 seedlings (BU1 Arboretum) 180 seedlings in BU5 	Nursery:	<ul style="list-style-type: none"> 9,051 seedlings (Jambi) 228 seedlings (East Kalimantan) 	Nursery:	<ul style="list-style-type: none"> 8,700 seedlings (Jambi) 1,636 seedlings (East Kalimantan)

BAB CHAPTER 1	BAB CHAPTER 2	BAB CHAPTER 3	BAB CHAPTER 4	BAB CHAPTER 5	BAB CHAPTER 6	BAB CHAPTER 7	BAB CHAPTER 8	BAB CHAPTER 9	BAB CHAPTER 10
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	Capaian Lingkungan Environmental Highlights	Capaian Sosial Social Highlights	Capaian Produksi Production Highlights	Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan dan Sosial (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Socail Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

TLFF Objective / Tujuan TLFF	KPI	2018 Data	2019 Data	2020 Data	2021 Data
Jumlah kebakaran yang terdaftar (seperti yang dilaporkan kepada pihak berwenang) / Number of fires registered (as reported to the authorities)	Data tidak tersedia / Not available	Jambi • LAJ: 73 • WMW: 19 • 180 bibit di BU5 / 180 seedlings in BU5	Jambi • Jambi: 101 • Kalimantan Timur / East Kalimantan: 4 Timur MKC / East Kalimantan MKC: 16	Jambi: • LAJ: 16 WMW: 6 • Kalimantan Timur / East Kalimantan: 3	
Jumlah area (hektar) yang terbakar (jika ada) / Number of hectares burnt (if any)	Data tidak tersedia / Not available	• Jambi: 101.04- ha • Kalimantan Timur / East Kalimantan: 42 ha	• Jambi: 37.05 ha • Kalimantan Timur / East Kalimantan: 3.57 ha	• Jambi: 16.81 ha • Kalimantan Timur / East Kalimantan: 1.07 ha	
Jejak karbon (dalam tCO2e) / Carbon footprint (in tCO2e)	• Jambi: (351,265) • Kalimantan Timur / East Kalimantan: 266,366	• Jambi: (860,189) • Kalimantan Timur / East Kalimantan: 231,343	• Jambi: (1,027,091) • Kalimantan Timur / East Kalimantan: 162,221	• Jambi: (1,532,849) • Kalimantan Timur / East Kalimantan: 162,221	
Emisi gas rumah kaca yang diserap oleh hutan lindung, pohon yang ditanam (dalam tCO2e) / Greenhouse gas emissions absorbed by protected forest, planted trees (in tCO2e)	• Jambi dan Kalimantan Timur: 84.899 (Revisi Laporan Penilaian Karbon RLU) / Jambi and: 84,899 (Revised RLU Carbon Assessment Report)	• Jambi dan Kalimantan Timur: 628.846 / Jambi and East Kalimantan: 628,846	Jambi and East Kalimantan: 864,870 / Jambi dan Kalimantan Timur: 864.870	Jambi and East Kalimantan: 1,370,628 / Jambi dan Kalimantan Timur: 1.370.628	

Key Performance Indicators Rencana Perlindungan Lanskap (KPI LPP) &Green &Green Landscape Protection Plan Key Performance Indicators (LPP KPI)

RLU, TLFF dan &Green (bersama-sama disebut "Para Pihak Proyek") bermaksud untuk memantau tutupan hutan dan perubahan penggunaan lahan di konsesi RLU serta lanskap di sekitarnya dalam rangka menetapkan dampak proyek terhadap tutupan hutan di dalam dan sekitar konsesi. Pada bulan Juni 2020, Satelligence BV, sebuah perusahaan yang berbasis di Belanda, dikontrak untuk periode dua tahun untuk memantau dan menganalisis tutupan hutan dan penggunaan lahan di konsesi RLU di Jambi dan Kalimantan. Hasilnya akan dilaporkan dalam Laporan Audit mulai periode 2022.

Sementara untuk TLFF dan &Green, tujuannya adalah untuk menetapkan dampak proyek terhadap tutupan hutan di lanskap di sekitar konsesi di Jambi terhadap Rencana Perlindungan Lanskap yang disepakati di antara Para Pihak Proyek dan sehubungan dengan kerangka kerja KPI yang dilaporkan &Green. Pemantauan lanskap harus disertai dengan keterlibatan pemerintah Indonesia, yang difasilitasi oleh RLU, untuk memastikan pemahaman yang baik oleh pemerintah tentang tujuan pemantauan.

RLU, TLFF and &Green (together "the Project Parties") wish to monitor forest cover and land use- change on the RLU concessions as well as in the surrounding landscape in order to establish the impact of the project on forest cover in and around the concessions. In June 2020, Satelligence BV, a company based in the Netherlands, was contracted for a two year period to monitor and analyse the forest cover and land use of RLU's concessions in Jambi and Kalimantan. The results are to be reported in the Audit Reports starting from the 2022 period.

Whilst for TLFF and &Green, the objective is to establish the impacts of the project on forest cover in the landscape surrounding the concessions in Jambi against a Landscape Protection Plan agreed upon among the Project Parties and in relation to the KPI framework &Green is reporting against. The landscape monitoring shall be accompanied by engagement with the Indonesian government, facilitated by RLU, to ascertain a good understanding by the government of the objectives of the monitoring.

BAB CHAPTER 1	BAB CHAPTER 2	BAB CHAPTER 3	BAB CHAPTER 4	BAB CHAPTER 5	BAB CHAPTER 6	BAB CHAPTER 7	BAB CHAPTER 8	BAB CHAPTER 9	BAB CHAPTER 10
Sekilas Tentang PT Royal Lestari Utama PT Royal Lestari Utama at a Glance	Tata Kelola Perusahaan, Etik dan Kepatuhan Good Corporate Governance, Ethics and Compliance	Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)	Keterlibatan dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Partnerships and Stakeholder Engagement	Capaian Lingkungan Environmental Highlights	Capaian Sosial Social Highlights	Capaian Produksi Production Highlights	Keterlibatan Karyawan Employee Engagement	Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan dan Sosial (K3L) Occupational Health, Safety and the Environment (OHSE)	Ringkasan Laporan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) 2021 Oleh Ramboll Environ Singapore PTE LTD Summary of Environmental and Social Governance ESG Report 2021 By Ramboll Environ Singapore PTE LTD

Jambi

Table ES2: Forests Conserved / Restored in the RLU Concession

Tabel ES2: Hutan yang Dikonservasi/Direstorasi di Konsesi RLU

Unit Lahan / Land Unit	Tutupan Hutan Dasar / Baseline Forest Cover (ha)		Area yang Dilindungi di Bawah Kendali RLU (ha) / Protected Areas under control by RLU (ha)		Restorasi (ha) / Restoration (ha)	
	2021 Target	2021 Status	2021 Target	2021 Status	2021 Target	2021 Status
ABKT / SKT	2,550	2,780*	2,550	2,780*	Regenerasi alami 876 ha	Regenerasi alami 878 ha
HCV/HCS					Penanaman aktif 40 ha	(Karet yang dihapuskan untuk WCA dan riparian/sungai satwa liar)**
Di luar WCA outside WCA	50	505*	50	505*	Natural regeneration 876 ha	Smallholders benefiting from Community Partnerships
Di dalam WCA inside WCA	2,500	2,275*	2,500	2,275*	Active planting 40 ha	
Total WCA	2,500	2,275*	2,500	2,275*		
WCA total						
Area Riparian Non-ABKT di luar WCA (sungai kecil)	0	0*	505	1,378**	Natural regeneration 878 ha (Rubber written off for WCA and wildlife riparian/stream)**	
Non-HCV riparian areas (small streams) outside the WCA					Active planting 41.20 hour	
Lainnya	0	0*	0	not available*		
Other						
Total	2,550	2,780*	3,484	2,780*		

Note / Catatan:

* Satelligence data 2018-2021 / Data Satelligence 2018-2021

** SLUS December 2021

Tabel ES3: Intensifikasi Pertanian

Table ES3: Agricultural Intensification

Unit	Area yang Diintensifkan (ha) / Intensified Area (ha)				
	2018 Status	2019 Status	2020 Status	2021 Status	2033 Target
Karet RLU	14,123	16,188	17,812	18,351	30,000
RLU Rubber					
Perluasan petani kecil CPP	0	0	393	623.15	6,000
CPP smallholders expansion					
Total	14,123	16,188	18,205	18,974.15	36,000

Tabel ES4: Manfaat Sosial

Table ES4: Social Benefits

Social Benefit	2018 Status	2019 Status	2020 Status	2021 Status	2033 Target
Pekerjaan Jobs	3,579	3,256	3,302	3,005	16,200 (Jambi & Kaltim)
Petani Kecil yang Mendapat Manfaat dari Community Partnership Program	0	0	213	243	3,000

Kalimantan Timur / East Kalimantan

Tabel ES5: Hutan yang Dikonservasi/Direstorasi di Konsesi RLU

Table ES5: Forests Conserved / Restored in the RLU Concession

Unit Lahan / Land Unit	Tutupan Hutan Dasar / Baseline Forest Cover (ha)		Area yang Dilindungi di Bawah Kendali RLU (ha) / Protected Areas under control by RLU (ha)		Restorasi (ha) / Restoration (ha)	
	2021 Target	2021 Status	2021 Target	2021 Status	2021 Target	2021 Status
ABKT / SKT	8,331	9,094 (including space forest class)*	6,731	8,083*	50	Natural regeneration: 44 ha** Active planting: 13.88 ha
HCV/HCS						
Area Riparian di Luar ABKT / SKT	0	not available*	1,600	not available	0	0
Riparian areas outside HCV/HCS						
Lainnya / Other	0	not available*	0	not available*	0	0
Total	8,331	9,094*	8,331	8,083*	50	57.88*

Note:

* Satelligence data 2018-2021 / Data Satelligence 2018-2021

** SLUS December 2021

Tabel ES6: Intensifikasi Pertanian

Table ES6: Agricultural Intensification

Unit	Area yang Diintensifkan (ha) / Intensified Area (ha)				
	2018 Status	2019 Status	2020 Status	2021 Status	2033 Target
Karet RLU RLU Rubber	4,523	4,782	4,788	4,788	4,649
Perluasan petani kecil CPP CPP smallholders expansion	0	0	95	115.2	1,000
Total	4,523	4,782	4,883	4,903.2	5,649

Tabel ES7: Manfaat Sosial

Table ES7: Social Benefits

Manfaat Sosial / Social Benefit	2018 Status	2019 Status	2020 Status	2021 Status	2033 Target
Pekerjaan Jobs	851	1,013	912	828	2,800 (Jambi & Kaltim)
Petani Kecil yang Mendapat Manfaat dari Community Partnership Program Smallholders benefiting from Community Partnerships	0	300	398	488	500

Glosarium dan Akronim

Glossary and Acronyms

B	BMP (Biodiversity Management Plan)	HCV (High Conservation Value)
	BTPNP (Bukit Tigapuluh National Park)	HCVRN (High Conservation Value Resource Network)
C	CPP (Community Participation Program)	Ha (Hectare)
	CHSS (Community Health, Safety and Security)	ICP (Informed Consultation and Participation)
	CLO (Community Liaison Officer)	IFC (International Finance Corporation)
	CRT (Conflict Resolution Team)	IFMP (Integrated Forest Management Plan)
D	Daemeter (PT Daemeter Consulting)	ILO (International Labour Organization)
E	Ecositrop (Ecology and Conservation Center for Tropical Studies)	IP (Indigenous Peoples)
	EK (East Kalimantan)	KIIs (Key Informant Interviews)
	E&S (Environmental and Social)	KPI (Key Performance Indicator)
	EHS (Environmental, Health and Safety)	LAJ (PT Lestari Asri Jaya)
	EMS (Environmental Management System)	LPP (Landscape Protection Plan)
	ESAB (Environmental and Social Advisory Board)	MoM (Minutes of Meeting)
	ESAP (Environmental and Social Action Plan)	MOU (Memorandum of Understanding)
	ESG (Environment, Social and Governance)	MKC (PT Multi Kusuma Cemerlang)
	ESMS (Environmental and Social Management System)	P
	ESIA (Environmental and Social Impact Assessment)	PCR (Polymerase Chain Reaction)
	ESMP (Environmental and Social Management Plan)	PPE (Personal Protective Equipment)
F	FPIC (Free, Prior and Informed Consent)	PR (Priority Recommendation)
G	GM (Grievance Mechanism)	PS (Performance Standard)
	GIIP (Good International Industry Practice)	R
H	HTI Industrial Forest Plantation (Hutan Tanaman Industri)	RLU (PT Royal Lestari Utama)
	HSE (Health, Safety and Environment)	S
	HCS (High Carbon Stock)	SHE (Safety, Health and Environment)
		SIA (Social Impact Assessment)
		SEP (Stakeholder Engagement Plan)



■ Area operasional anak usaha RLU di Kalimantan Timur
PT Multi Kusuma Cemerlang.



Royal Lestari Utama
Natural Rubber



Wisma Barito Pacific, Jalan Letjen S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11410.



www.rlu.co.id



contact@rlu.co.id